

# LAPORAN KEUANGAN

BA  
022

2021

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
PER 31 DESEMBER 2021

DIREKTORAT  
JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT



UN-AUDITED

ACCOUNT  
TO  
ACCOUNT

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Eselon I dari Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA  
NIP. 19670320 199203 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

VI. Lampiran

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited* Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA  
NIP. 19670320 199203 1 003

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.172.720.949.441 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.172.720.949.441 atau mencapai 108,57 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp3.843.330.169.001.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.144.787.140.030 atau mencapai 96,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.496.489.224.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp60.035.259.599.871 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp270.434.276.003; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp8.937.546.286; Aset Tetap (neto) sebesar Rp58.414.257.972.991 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.341.629.804.591.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.699.894.372 dan Rp60.031.559.705.499

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.111.240.006.910 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8.136.402.400.893 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-4.025.162.393.983, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-276.429.865.967 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-4.301.592.259.950.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp59.894.096.563.455, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-4.301.592.259.950 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -588.415.965.730 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 5.027.471.367.724 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp60.031.559.705.499

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	3.843.330.169.001	4.172.720.949.441	108,57	3.711.055.508.075
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.843.330.169.001</b>	<b>4.172.720.949.441</b>	<b>108,57</b>	<b>3.711.055.508.075</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.753.170.624.000	1.703.879.027.832	97,19	1.717.590.901.468
Belanja Barang	B.2.2	3.733.583.089.000	3.644.598.122.816	97,62	3.483.287.946.778
Belanja Modal	B.2.3	4.009.735.511.000	3.796.309.989.382	94,68	4.312.543.993.955
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>9.496.489.224.000</b>	<b>9.144.787.140.030</b>	<b>96,30</b>	<b>9.513.422.842.201</b>

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	12.112.827	65.204.207
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	90.453.800	222.794.110
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	20.701.471.289	1.569.164.904
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	3.672.566.846	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.5	-	2.499.192.324
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.6	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	-	-
Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.9	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.10	40.464.859.524	51.609.572.638
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.11	(20.163.949.005)	(19.073.357.257)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.12	63.035.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	(744.575)	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.15	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Persediaan	C.18	225.594.470.297	218.480.101.807
Persediaan yang Belum Diregister	C.19	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>270.434.276.003</b>	<b>255.372.672.733</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.20	9.482.009.139	9.478.598.990
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.21	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.22	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.23	(544.462.853)	(376.290.802)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>8.937.546.286</b>	<b>9.102.308.188</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.24	12.443.538.534.024	11.965.320.248.636
Tanah Belum Diregister	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin	C.26	19.923.727.581.084	17.087.015.203.142
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan	C.28	7.253.695.864.930	6.992.136.398.200
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.30	23.455.009.293.404	23.403.893.990.585
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.31	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.32	41.823.756.584	44.686.110.058
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.33	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.34	12.127.144.408.156	13.359.168.726.331
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.35	(16.830.681.465.191)	(14.284.365.585.551)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>58.414.257.972.991</b>	<b>58.567.855.091.401</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.36	742.138.116.015	401.218.575.000
Aset Tak Berwujud	C.37	623.200.185.238	514.228.379.543
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.38	7.260.888.250	13.413.438.250
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.39	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.40	-	-

Aset Lain-lain	C.41	483.295.024.276	470.084.375.971
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.42	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.43	(514.264.409.188)	(333.380.139.429)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.341.629.804.591</b>	<b>1.065.564.629.335</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>60.035.259.599.871</b>	<b>59.897.894.701.657</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.44	3.238.811.295	3.086.240.444
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.45	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.46	-	646.693.551
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.47	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.48	448.970.250	-
Uang Muka dari KPPN	C.49	12.112.827	65.204.207
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.50	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>3.699.894.372</b>	<b>3.798.138.202</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>3.699.894.372</b>	<b>3.798.138.202</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.51	60.031.559.705.499	59.894.096.563.455
<b>JUMLAH EKUTAS</b>		<b>60.031.559.705.499</b>	<b>59.894.096.563.455</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>60.035.259.599.871</b>	<b>59.897.894.701.657</b>

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	4.111.240.006.910	3.695.233.306.103
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>4.111.240.006.910</b>	<b>3.695.233.306.103</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.3	1.703.783.086.434	1.715.775.702.835
Beban Persediaan	D.4	229.978.107.715	344.156.053.787
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.453.897.567.152	2.338.327.025.660
Beban Pemeliharaan	D.6	652.214.777.017	561.539.042.736
Beban Perjalanan Dinas	D.7	283.008.531.679	258.877.554.781
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	313.082.926.561
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	2.807.358.228.442	2.716.552.743.919
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	6.162.102.454	1.521.429.638
<b>Jumlah Beban</b>		<b>8.136.402.400.893</b>	<b>8.249.832.479.917</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(4.025.162.393.983)</b>	<b>(4.554.599.173.814)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(317.122.032.412)	(92.366.317.184)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	40.692.166.445	34.204.443.796
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(276.429.865.967)</b>	<b>(58.161.873.388)</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(4.301.592.259.950)</b>	<b>(4.612.761.047.202)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.15		
-		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(4.301.592.259.950)</b>	<b>(4.612.761.047.202)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TINGKAT ESELON I  
SELAKU UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG ESELON I (UAPPA/B-E1)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2021	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>59.894.096.563.455</b>	<b>56.952.495.482.080</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(4.301.592.259.950)</b>	<b>(4.612.761.047.202)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	<b>(588.415.965.730)</b>	<b>1.234.101.075.870</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	3.725.177.192	11.864.853.518
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	(2.926.538.499)	25.980.142.852
Selisih Revaluasi Aset	E.44	34.645.546.250	1.256.160.377.250
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(621.597.959.863)	(63.850.336.357)
Koreksi Lain-Lain	E.46	(2.262.190.810)	3.946.038.607
<b>Jumlah</b>		<b>(588.415.965.730)</b>	<b>1.234.101.075.870</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	<b>5.027.471.367.724</b>	<b>6.320.261.052.707</b>
<b>KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>137.463.142.044</b>	<b>2.941.601.081.375</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>60.031.559.705.499</b>	<b>59.894.096.563.455</b>

### A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan merupakan Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat, mempunyai tugas dan fungsi dalam Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) dibawah Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPPA) Kementerian Perhubungan diharapkan dapat menyelenggarakan Proses Tata Kelola Keuangan yang disajikan secara akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk tujuan diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, transparan dan akuntabel melalui Sistem Akuntansi Pemerintah menuju Laporan Keuangan yang berkualitas dengan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan berkelanjutan terhadap terhadap Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah;
- Mengembangkan sistem pendukung yang profesional dan terpercaya;
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Perhubungan.

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 329 Satker. Rincian Satker tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-E1*

No	Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	0100	DKI Jakarta	6		10							16
2	0199	Kantor Pusat			0							0
3	0200	Jawa Barat			5							5
4	0300	Jawa Tengah			10							10
5	0500	Jawa Timur			16							16
6	0600	Aceh			11							11
7	0700	Sumatera Utara			19							19
8	0800	Sumatera Barat			5							5

9	0900	Riau			14								14
10	1000	Jambi			5								5
11	1100	Sumatera Selatan			3								3
12	1200	Lampung			6								6
13	1300	Kalimatan Barat			8								8
14	1400	Kalimatan Tengah			7								7
15	1500	Kalimatan Selatan			5								5
16	1600	Kalimatan Timur			10								10
17	1700	Sulawesi Utara			11								11
18	1800	Sulawesi Tengah			12								12
19	1900	Sulawesi Selatan			16								16
20	2000	Sulawesi Tenggara			9								9
21	2100	Maluku			16								16
22	2200	Bali			6								6
23	2300	NTB			8								8
24	2400	NTT			16								16
25	2500	Papua			13								13
26	2600	Bengkulu			3								3
27	2800	Maluku Utara			10								10
28	2900	Banten			3								3
29	3000	Bangka Belitung			5								5
30	3100	Gorontalo			4								4
31	3200	Kepulauan Riau			10								10
32	3300	Irian Jaya Barat			11								11
33	3400	Sulawesi Barat			4								4
34	3500	Kalimantan Utara			6								6
<b>JUMLAH</b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>302</b>						

#### Basis Akuntansi

### A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Dasar Pengukuran

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa PNPB diakui setelah selesai dilakukannya pelayanan jasa terhadap pengguna jasa.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

##### Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

##### Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### Piutang Jangka Panjang

##### Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### *Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

#### **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan Aset Tetap*

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.800.000.438.000	3.843.330.169.001
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.800.000.438.000</b>	<b>3.843.330.169.001</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	1.920.451.158.000	1.753.170.624.000
Belanja Barang	4.572.610.994.000	3.733.583.089.000
Belanja Modal	4.919.128.585.000	4.009.735.511.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.412.190.737.000</b>	<b>9.496.489.224.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp4.172.720.949.441

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.172.720.949.441 atau mencapai 108,57 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.843.330.169.001. Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.172.720.949.441. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.843.330.169.001	4.172.720.949.441	108,57
<b>Jumlah</b>	<b>3.843.330.169.001</b>	<b>4.172.720.949.441</b>	<b>108,57</b>

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 12,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.172.720.949.441	3.711.055.508.075	12,44
<b>Jumlah</b>	<b>4.172.720.949.441</b>	<b>3.711.055.508.075</b>	<b>12,44</b>

Realisasi  
Penerimaan  
Pajak Rp0

### B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2021 sebesar 0,00 dari TA 2020 .

Realisasi  
Penerimaan  
Negara Bukan  
Pajak  
Rp4.172.720.949.441

### B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing- masing sebesar Rp4.172.720.949.441 dan Rp3.711.055.508.075. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,44 dari TA 2020 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.172.720.949.441	3.711.055.508.075	12,44
<b>Jumlah</b>	<b>4.172.720.949.441</b>	<b>3.711.055.508.075</b>	<b>12,44</b>

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.268.525.000	-	100,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	4.901.347.700	-	100,00
Pendapatan Lain-lain BLU	41.860.765	-	100,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	55.900.000	123.621.697	(54,78)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.431.556.044	1.865.993.022	244,67
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.520.180.650	1.953.579.552	182,57
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.279.628.168	20.034.397.997	(28,72)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	603.980.000	2.520.000	23.867,46
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.525.271.097	4.619.284.403	127,86
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	5.000.000	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	-
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.097.000.000	233.265.360	798,98
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	-	-	-
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.486.901.710.435	2.280.521.130.126	9,05
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	605.873.972.772	573.040.644.803	5,73
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	274.038.369.122	250.917.198.787	9,21
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	540.555.379.773	491.301.397.032	10,03
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	69.220.536.819	61.182.384.656	13,14
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	9.109	3.044	199,24
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	146.929.398	68.356.147	114,95
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	56.010.000	49.500.000	13,15
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	132.948.169	766.925.629	(82,66)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	112.601.690.435	2.485.591.271	4.430,18
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	52.455.557	45.617.828	14,99
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	30.599.180.564	3.643.497.349	739,83
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	6.298.098.465	18.106.002.131	(65,22)

Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	88.335.000	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	554.200	808.650	(31,47)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	43.050.000	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	429.520.199	3.600.873	11.828,22
Pendapatan Denda Lainnya	-	42.137.718	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>4.172.720.949.441</b>	<b>3.711.055.508.075</b>	<b>12,44</b>

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,44% persen dibandingkan 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut dapat disebabkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021 Ditjen Perhubungan Laut mulai untuk melakukan pengelolaan BLU pada Satker BKPP yang bergerak dalam bidang kesehatan, dimana untuk pos pendapatan menambah berupa Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha dan Pendapatan Lain-lain BLU
2. Kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yang sudah dapat dikendalikan sehingga penerapan pembatasan kegiatan di masyarakat yang semula ketat kemudian dilonggarkan. Pelonggaran pembatasan ini akan berdampak pada peningkatan perputaran ekonomi di masyarakat maupun antar daerah. Peningkatan ekonomi di masyarakat tentunya akan mempengaruhi juga tingkat perdagangan yang secara langsung akan berhubungan dengan kenaikan pergerakan logistik terutama di sektor perhubungan laut. Kenaikan pergerakan logistik tersebut akan berdampak secara signifikan pula pada peningkatan frekuensi kunjungan kapal yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di sektor Perhubungan Laut.

Realisasi Belanja  
Rp9.144.787.140.  
030

## B.2 Belanja

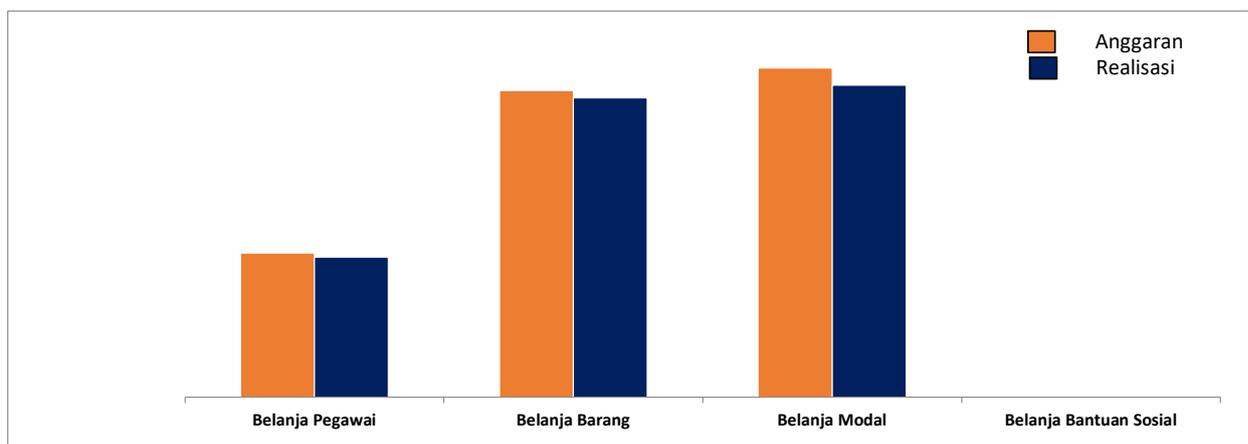
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp9.144.787.140.030 atau 96,30 % dari anggaran belanja sebesar Rp.9.496.489.224.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	1.753.170.624.000	1.703.879.027.832	97,19
Belanja Barang	3.733.583.089.000	3.644.598.122.816	97,62
Belanja Modal	4.009.735.511.000	3.796.309.989.382	94,68
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.496.489.224.000</b>	<b>9.144.787.140.030</b>	<b>96,30</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

### Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 3,87% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	1.703.879.027.832	1.717.590.901.468	(0,80)
Belanja Barang	3.644.598.122.816	3.483.287.946.778	4,63
Belanja Modal	3.796.309.989.382	4.312.543.993.955	(11,97)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.144.787.140.030</b>	<b>9.513.422.842.201</b>	<b>(3,87)</b>

Perbandingan realisasi belanja antara posisi 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 386.635.702.181. Jika dirinci maka dapat disampaikan bahwa untuk realisasi barang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 4.63% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2020, sedangkan untuk realisasi belanja pegawai dan belanja modal 31 Desember 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yaitu belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 13.711.873.636 atau sekitar 0,80% serta belanja modal mengalami penurunan sebesar 516.234.004.573 atau sekitar 11,97%

Realisasi  
Belanja Pegawai  
Rp1.703.879.027.832

**B.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.703.879.027.832 dan Rp1.717.590.901.468. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar 13.711.873.636 atau 0,80 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena Penurunan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS dikarenakan jumlah penerimaan PNS baru jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang pensiun yang tidak seimbang, bahwa jumlah PNS yang pensiun lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pegawai baru.

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	614.124.903.962	623.798.064.163	(1,55)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.711.701	9.899.140	(1,89)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50.167.179.535	51.095.191.703	(1,82)
Belanja Tunj. Anak PNS	16.019.332.111	16.295.466.419	(1,69)
Belanja Tunj. Struktural PNS	8.752.985.000	8.909.278.300	(1,75)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	423.020.000	342.760.000	23,42
Belanja Tunj. PPh PNS	685.367.310	788.301.779	(13,06)
Belanja Tunj. Beras PNS	42.769.133.230	37.642.826.780	13,62
Belanja Uang Makan PNS	117.660.159.579	119.623.107.837	(1,64)
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	13.426.946.146	14.865.869.315	(9,68)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	462.375.000	476.725.000	(3,01)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	3.715.873.148	3.958.290.000	(6,12)
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	32.252.231.550	33.037.132.050	(2,38)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	91.897.800	118.775.300	(22,63)
Belanja Uang Lembur	84.724.056.778	74.117.172.079	14,31
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	718.744.775.254	732.640.038.167	(1,90)
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>1.704.029.948.104</b>	<b>1.717.718.898.032</b>	<b>(0,80)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	150.920.272	127.996.564	17,91
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.703.879.027.832</b>	<b>1.717.590.901.468</b>	<b>(0,80)</b>

Realisasi  
Belanja Barang  
Rp3.644.598.122.816

**B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.644.598.122.816 dan Rp3.483.287.946.778. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,63% dari Realisasi TA 2020. Kenaikan belanja barang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Barang Operasional mengalami kenaikan senilai 53.361.135.150 atau senilai 12.51% jika dibandingkan realisasi belanja barang operasional Tahun 2020
2. Realisasi Belanja Barang Non Operasional mengalami kenaikan tipis senilai 32.938.251.829 atau senilai 1.95% jika dibandingkan realisasi belanja barang non operasional Tahun 2020
3. Realisasi Belanja Barang Perjalanan Dalam Negeri mengalami kenaikan tipis senilai 25.678.830.543 atau senilai 9.99% jika dibandingkan realisasi belanja barang non operasional Tahun 2020.
4. Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan senilai 35.337.094.233 atau senilai 199.84% jika dibandingkan realisasi belanja barang non operasional Tahun 2020. Kegiatan dari Belanja ini berupa pembangunan Kapal *Bottom Glass* yang nanti setelah selesai 100% akan diserahkan ke Pemda

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	480.042.957.383	426.681.822.233	12,51
Belanja Barang Non Operasional	1.719.334.458.680	1.686.396.206.851	1,95
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	145.875.915.376	130.194.010.663	12,05
Belanja Jasa	254.094.649.409	228.028.535.347	11,43
Belanja Pemeliharaan	709.655.162.182	739.586.997.998	(4,05)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	282.646.412.948	256.967.582.405	9,99
Belanja Perjalanan Luar Negeri	118.236.000	2.396.094.460	(95,07)
Belanja Barang BLU	1.228.417.813	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	53.019.517.336	17.682.423.103	199,84
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	61.994.400	233.835.940	(73,49)
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.646.077.721.527</b>	<b>3.488.167.509.000</b>	<b>4,53</b>
Pengembalian Belanja	1.479.598.711	4.879.562.222	(69,68)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.644.598.122.816</b>	<b>3.483.287.946.778</b>	<b>4,63</b>

Realisasi  
Belanja Modal  
Rp3.796.309.98  
9.382

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.796.309.989.382 dan Rp4.312.543.993.955. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 11,97% dibandingkan TA 2020

Jika dilihat dari tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu senilai 1.697.358.622.926 atau sebesar 283,61, kemudian diikuti kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin senilai 480.662.009.069 atau sebesar 125,71% dibandingkan realisasi belanja modal tahun sebelumnya.

Namun sebaliknya untuk realisasi belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal tanah Tahun 2021 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya masing-masing mengalami penurunan sebesar 2.579.031.259.080 (83,65%) dan 126.994.883.807 (65,74%)

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	66.192.125.711	193.187.009.518	(65,74)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	863.031.729.517	382.369.720.448	125,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	504.041.038.154	3.083.072.297.234	(83,65)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.295.839.456.524	598.480.833.598	283,61
Belanja Modal Lainnya	65.949.975.670	55.498.995.549	18,83
Belanja Modal BLU	1.310.748.806	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.796.365.074.382</b>	<b>4.312.608.856.347</b>	<b>(11,97)</b>
Pengembalian Belanja	55.085.000	64.862.392	(15,07)

<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.796.309.989.382</b>	<b>4.312.543.993.955</b>	<b>(11,97)</b>
-----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Realisasi  
Belanja Modal  
Tanah  
Rp66.192.125.711

### B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp66.192.125.711 dan Rp193.187.009.518. Realisasi tersebut pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 65,74% dibandingkan TA 2020.

Salah satu item belanja modal tanah yang mengalami penurunan realisasi yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 adalah belanja modal tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang dilakukan oleh LMAN dengan nilai penurunan sebesar 113.016.404.921 atau (64,63)%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 luasan tanah yang dibebaskan lebih kecil daripada tahun sebelumnya sehingga nilai pembebasan tanah yang dibayarkan melalui KSOP Patimban akan mengikuti nilai dari jumlah tanah yang dibebaskan tersebut.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	3.534.754.848	17.815.415.564	(80,16)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	770.955.510	7.740.000	9.860,67
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	42.470.840	503.504.520	(91,56)
Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang dilakukan oleh LMAN	61.843.944.513	174.860.349.434	(64,63)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>66.192.125.711</b>	<b>193.187.009.518</b>	<b>(65,74)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>66.192.125.711</b>	<b>193.187.009.518</b>	<b>(65,74)</b>

Realisasi  
Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp863.006.229.517

### B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp863.006.229.517 dan Rp382.369.600.448, mengalami kenaikan sebesar 125,70 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

Kenaikan realisasi belanja modal yang paling signifikan ada belanja modal peralatan dan mesin yaitu sebesar 463.266.102.582 atau 125,26 % jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020. Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi KPLP berupa pembangunan kapal patroli senilai 118.045.927.845 dan Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Laut berupa pembayaran tunggakan atas pembangunan kapal rede, kapal kontainer dan kapal perintis

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	833.123.570.106	369.857.467.524	125,26
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	14.500.000	34.735.000	(58,26)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	366.440.000	910.923.200	(59,77)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	404.450.000	4.800.000	8.326,04
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	214.705.746	301.363.346	(28,76)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	1.406.149.650	2.859.200.078	(50,82)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	27.501.914.015	8.401.231.300	227,36
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>863.031.729.517</b>	<b>382.369.720.448</b>	<b>125,71</b>
Pengembalian	25.500.000	120.000	21.150,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>863.006.229.517</b>	<b>382.369.600.448</b>	<b>125,70</b>

Realisasi  
Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp504.011.453.154

### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp504.011.453.154 dan Rp3.083.024.172.842 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar 83,65% dibandingkan Realisasi TA 2020.

Penurunan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 adalah yang paling signifikan yaitu senilai 2.574.710.592.370 atau sebesar 87,85%. Penurunan ini sebagai akibat dari beralihnya pos Pinjaman Luar Negeri Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Patimban dimana pada Tahun 2020 untuk dana Loan di alokasikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sedangkan pada Tahun 2021 dialokasikan pada Belanja Modal Jalan dan Jembatan dengan nilai anggaran yang cukup signifikan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	356.071.500.521	2.930.782.092.891	(87,85)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	32.000.000	3.060.000	945,75
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	738.517.500	1.739.673.960	(57,55)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	408.473.135	320.903.528	27,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Penanganan	145.320.446.698	133.133.288.566	9,15
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.470.100.300	17.093.278.289	(91,40)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>504.041.038.154</b>	<b>3.083.072.297.234</b>	<b>(83,65)</b>
Pengembalian Belanja	29.585.000	48.124.392	(38,52)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>504.011.453.154</b>	<b>3.083.024.172.842</b>	<b>(83,65)</b>

Realisasi  
Belanja Modal,  
Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp2.295.839.45  
6.524

**B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.295.839.456.524 dan Rp598.464.215.598, mengalami kenaikan sebesar 283,62 % dibandingkan Realisasi TA 2020.

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai 1.703.531.704.998 atau sebesar 287,96% jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Salah satu kegiatan yang paling signifikan adalah alokasi belanja modal jalan dan jembatan Pinjaman Luar Negeri (Loan) dari JICA untuk Pekerjaan Proyek Strategis Nasional di Pelabuhan Patimban dengan nilai realisasi mencapai 1.591.269.793.607

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.295.114.330.524	591.582.625.536	287,96
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	-	10.000.000	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	28.400.000	10.110.000	180,91
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	-	595.958.862	(100,00)
Belanja Modal Irigasi	184.522.000	5.803.867.500	(96,82)
Belanja Modal Perjalanan Irigasi	-	8.861.000	(100,00)
Belanja Modal Jaringan	215.000.000	469.410.700	(54,20)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	297.204.000	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.295.839.456.524</b>	<b>598.480.833.598</b>	<b>283,61</b>
Pengembalian Belanja	-	16.618.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.295.839.456.524</b>	<b>598.464.215.598</b>	<b>283,62</b>

Realisasi  
Belanja Modal  
Lainnya  
Rp65.949.975.6  
70

**B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp65.949.975.670 dan Rp55.498.995.549, mengalami kenaikan sebesar 18,83 % dibandingkan Realisasi TA 2020.

Kenaikan realisasi belanja modal lainnya tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 10.450.980.121, kenaikan ini tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah total nilai belanja modal di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut. Belanja Modal Lainnya ini direalisasikan untuk kegiatan studi/kajian, pembangunan sistem (*Software*) atau pengembangan sistem (*software*)

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Lainnya	65.949.975.670	55.498.995.549	18,83
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>65.949.975.670</b>	<b>55.498.995.549</b>	<b>18,83</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>65.949.975.670</b>	<b>55.498.995.549</b>	<b>18,83</b>

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp12.112.827

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.12.112.827 dan Rp.65.204.207. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
BA(022) ES1(04) DKI JAKARTA	-	-
BA(022) ES1(04) JAWA BARAT	-	-
BA(022) ES1(04) JAWA TENGAH	-	-
BA(022) ES1(04) JAWA TIMUR	-	-
BA(022) ES1(04) ACEH	-	27.870.607
BA(022) ES1(04) SUMATERA UTARA	-	-
BA(022) ES1(04) SUMATERA BARAT	-	-
BA(022) ES1(04) RIAU	-	19.333.600
BA(022) ES1(04) JAMBI	-	-
BA(022) ES1(04) SUMATERA SELATAN	-	-
BA(022) ES1(04) LAMPUNG	-	-
BA(022) ES1(04) KALIMATAN BARAT	-	-
BA(022) ES1(04) KALIMATAN TENGAH	-	-
BA(022) ES1(04) KALIMATAN SELATAN	-	-
BA(022) ES1(04) KALIMATAN TIMUR	-	-
BA(022) ES1(04) SULAWESI UTARA	-	-
BA(022) ES1(04) SULAWESI TENGAH	-	-
BA(022) ES1(04) SULAWESI SELATAN	-	-
BA(022) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	-	-
BA(022) ES1(04) MALUKU	199.000	-
BA(022) ES1(04) BALI	-	-
BA(022) ES1(04) NTB	-	-
BA(022) ES1(04) NTT	-	-
BA(022) ES1(04) PAPUA	11.913.827	-
BA(022) ES1(04) BENGKULU	-	-
BA(022) ES1(04) MALUKU UTARA	-	-
BA(022) ES1(04) BANTEN	-	-
BA(022) ES1(04) BANGKA BELITUNG	-	-
BA(022) ES1(04) GORONTALO	-	-
BA(022) ES1(04) KEPULAUAN RIAU	-	-
BA(022) ES1(04) IRIAN JAYA BARAT	-	18.000.000
BA(022) ES1(04) SULAWESI BARAT	-	-
BA(022) ES1(04) KALIMANTAN UTARA	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.112.827</b>	<b>65.204.207</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

- UPP Bula merupakan saldo Kas di UP senilai 199.000 sudah disetor pada tanggal 3 Januari 2022 sesuai NTPN Nomor 8DDDA55DEMBSEH49
- KSOP Jayapura merupakan saldo kas UP senilai 915.500 sudah disetor pada tanggal 6 Januari 2022 sesuai NTPN Nomor 7C78461QUGUC3JFI dan saldo Kas TUP senilai 10.998.327 yang sudah disetor pada tanggal 6 Januari 2022 sesuai NTPN Nomor AF1A51JNFC2E256R

Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp90.453.800

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.90.453.800 dan Rp.222.794.110. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
BA(022) ES1(04) MALUKU	28.745.300	162.469.014
BA(022) ES1(04) MALUKU UTARA	61.708.500	60.325.096
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>90.453.800</b>	<b>222.794.110</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

1. UPP Babang memiliki saldo Kas di Bendahara Penerima senilai 11.472.000, sudah disetor tanggal 7 Januari 2022 sesuai NTPN Nomor 3D39761QUGU9SSO2
2. UPP Soa Sio memiliki saldo Kas di Bendahara Penerima senilai 34.900.250, sudah disetor tanggal 4 Januari 2022 sesuai NTPN Nomor A98D70N9VHFVE4K0
3. UPP Geser memiliki saldo Kas di Bendahara Penerima senilai 28.745.300, sudah disetor tanggal 5 Januari 2022 sesuai NTPN Nomor 97D5A2G4V6KO8MVA, B2BE42G4V6KO8QL7, 159100N9VHFVERV1
4. UPP Buli memiliki saldo Kas di Bendahara Penerima senilai 15.336.250, sudah disetor tanggal 4 Januari 2022 sesuai NTPN Nomor 7DD522G4V6KO8KB6 dan F7E5948VURPH2IVQ

Kas Lainnya dan Setara Kas  
Rp20.701.471.289

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.701.471.289 dan Rp1.569.164.904. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	27.763.346,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	20.701.471.289,00	894.708.007,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	-	646.693.551,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.701.471.289</b>	<b>1.569.164.904</b>

Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah terdapat pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kenavigasian berupa nilai saldo pada rekening Hibah senilai USD. 1.450.799,41 dengan nilai kurs tengah BI saat pelaporan senilai Rp 14.269,01 sehingga diperoleh nilai saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar 20.701.471.289,00

Kas pada Badan Layanan Umum  
Rp3.672.566.846

### C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.672.566.846 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut

*Rincian Kas pada Badan Layanan Umum Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
BA(022) ES1(04) DKI JAKARTA	3.672.566.846,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.672.566.846</b>	<b>-</b>

Kas pada Badan Layanan Umum terdapat pada Balai Kesehatan dan Keselamatan Pelayaran (BKPP) berupa saldo pada rekening Operasional BLU pada tiga bank diantaranya:

1. Bank BNI dengan Nomor Rekening 1178763188 saldo sebesar Rp 1.664.602.836
2. Bank BRI dengan Nomor Rekening 0186-01-001697-30-7 saldo sebesar Rp 1.679.308.046
3. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1210000780779 saldo sebesar Rp 328.655.964

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

### C.5 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.499.192.324. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah sebagai berikut :

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	32.084.250
Beban Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	-	2.467.108.074
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.499.192.324</b>

Uang Muka  
Belanja  
(prepayment)  
Rp0

#### C.6 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya.

Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp0

#### C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang  
Perpajakan Rp0

#### C.8 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak .

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih -  
Piutang  
Perpajakan Rp0

#### C.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan  
Pajak Rp-  
40.464.859.524

#### C.10 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp-40.464.859.524 dan Rp-51.609.572.638. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021

Jenis	REALISASI T.A.2021	KLASIFIKASI
KSOP SAMPIT	68.372.151	Lancar
KANTOR UPP MOLAWA	151.061.166	Lancar
KSOP BANJARMASIN	247.774.442	Lancar
KSOP SAMARINDA	985.547.917	Lancar
KSOP BALIKPAPAN	3.535.732.725	Lancar
KSOP TARAKAN	247.171.349	Lancar
KSOP NUNUKAN	45.047.061	Lancar
UPP TANJUNG SANTAN	49.072.212	Lancar
KSOP MANADO	15.450.000	Diragukan
KSOP GORONTALO	18.249.752	Lancar
KSOP TELUK PALU	15.911.680	Lancar
OP MAKASSAR	300.984.050	Kurang Lancar
KSOP AMBON	148.660.643	Lancar
KSOP TERNATE	3.888.079	Lancar
KSOP B E N O A	41.971.153	Lancar
KSOP JAYAPURA	27.314.022	Lancar
KSOP B I A K	18.626.712	Lancar
KSOP MANOKWARI	31.303.951	Lancar
KSOP SORONG	48.217.808	Lancar
KSOP FAK-FAK	4.542.455	Lancar
KSOP MERAUKE	3.917.909	Lancar
KSOP PULAU BAAI	98.361.220	Lancar
KSOP PANGKALAN SUSU	259.503.172	Lancar
KSOP TANJUNG BUTON	399.586.684	Lancar
UPP SANGKULIRANG	300.073.807	Lancar
UPP TANJUNG REDEP	68.507.828	Lancar
KANTOR UPP TANA PASER	239.619.000	Lancar
KSOP PARE-PARE	28.912.588	Lancar
UPP SAUMLAKI	1.509.036	Kurang Lancar
KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	5.449.936.392	Macet
KSOP CIREBON	45.231.297	Lancar
KSOP TANJUNG EMAS	241.142.887	Lancar
UPP JEPARA	327.753.500	Lancar
KSOP CILACAP	344.942.535	Lancar
OP UTAMA PERAK	2.759.987.872	Macet

KSOP GRESIK	493.750.000	Lancar
KSOP KUALA LANGSA	533.247.720	Macet
KSOP LHOKSEUMAWE	171.626.999	Lancar
OP UTAMA BELAWAN	599.915.440	Lancar
KSOP SIBOLGA	7.959.849	Lancar
KSOP TELUK BAYUR	225.797.789	Lancar
KSOP KUALA TANJUNG	226.790.952	Lancar
KSOP DUMAI	1.953.639.254	Lancar
KSOP PEKANBARU	145.074.763	Lancar
KSOP TEMBILAHAN	11.543.559	Lancar
KSOP TANJUNG PINANG	55.843.506	Lancar
KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	390.127.495	Lancar
UPP TANJUNG UBAN	101.503.602	Lancar
UPP TAREMPA	10.820.931.830	Macet
KSOP PALEMBANG	1.387.753.608	Lancar
KSOP PANJANG	190.101.214	Macet
KANTOR UPP KINTAP	104.208.900	Lancar
KSOP TOLI-TOLI	2.096.753	Lancar
UPP BAU - BAU	6.726.627	Lancar
UPP KOLONEDALE	107.708.650	Lancar
UPP D O B O	9.050.040	Lancar
UPP SANGKAPURA/BAWEAN	1.940.785.000	Kurang Lancar
KSOP TANJUNG WANGI	129.542.276	Lancar
KSOP MALAHAYATI	32.709.743	Lancar
KSOP BITUNG	254.261.029	Lancar
KSOP LEMBAR	99.611.003	Lancar
UPP TANJUNG SELOR	33.372.825	Lancar
UPP PULAU BUNYU	19.889.116	Lancar
KSOP BONTANG	575.386.000	Lancar
KSOP KHUSUS BATAM	506.073.889	Lancar
KSOP KUALA ENOK	1.342.043	Lancar
KSOP KIJANG	13.805.693	Lancar
UPP LABUHAN MARINGGAI	38.400.000	Kurang Lancar
UPP GARONGKONG	32.777.629	Lancar
UPP POMALA'A	559.594	Lancar
UPP POMALA'A	16.236.883	Kurang Lancar
UPP POMAKO I/POMAKO II	136.204.919	Lancar
UPP SUNGAI GUNTUNG	991.111	Lancar
UPP SATUI	201.108.360	Lancar
UPP BELANG-BELANG	25.218.058	Lancar
UPP BULI	78.042.000	Macet
KSOP BAKAUHEUNI	4.000.000	Diragukan
UPP ANGGREK	12.566.578	Lancar
UPP ANGGREK	6.413.050	Kurang Lancar
UPP MACINI BAJI	43.018.900	Lancar
	-	
<b>PIUTANG LAINNYA</b>		
KSOP PATIMBAN	2.055.900.220	Lancar
UPP KUALA MENDAHARA	87.360.000	Lancar
<b>Jumlah</b>	<b>40.464.859.524</b>	

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih -  
Piutang Bukan  
Pajak Rp-  
20.163.949.002

#### C.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp-20.163.949.002 dan Rp-19.073.357.257. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	18.308.834.477	0,5%	91.544.172
Kurang Lancar	2.304.328.019	10%	230.432.802
Diragukan	19.450.000	50%	9.725.000
Macet	19.832.247.028	100%	19.832.247.028
<b>Jumlah</b>	<b>40.464.859.524</b>		<b>20.163.949.002</b>

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Rp-63.035.000

### C.12 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp63.035.000 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Tahunan (Unaudited) TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	58.515.000	0,5%	292.575
Kurang Lancar	4.520.000	10%	452.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>63.035.000</b>		<b>744.575</b>

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

### C.14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

### C.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &.

Persediaan Rp225.594.470.297

### C.18 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp225.594.470.297 dan Rp218.480.101.807. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	64.458.069.166	69.631.125.971
Amunisi	70.102.262	70.101.810
Bahan untuk Pemeliharaan	2.935.022.786	3.556.860.991
Suku Cadang	24.368.336.288	30.003.347.712
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	11.680.955.168	11.680.955.168
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	67.079.580.439	17.682.423.103
Bahan Baku	27.243.317.669	35.209.863.721
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	-	-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.030.392.052	1.183.123.352
Persediaan Lainnya	26.728.694.467	49.462.299.979
<b>Jumlah</b>	<b>225.594.470.297</b>	<b>218.480.101.807</b>

Persediaan yang memiliki nilai terbesar adalah Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses, berupa pembangunan 4 Unit Kapal *Bottom Glass* senilai Rp. 67.079.580.439 pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang rencananya ketika sudah selesai 100% akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Likupang dan Pemerintah Daerah Labuhan Bajo yang merupakan daerah kawasan destinasi pariwisata super prioritas Indonesia

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

#### C.19 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi Rp9.482.009.139

#### C.20 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp9.482.009.139 dan Rp9.478.598.990. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
KSOP CIREBON	169.000.000	-
KSOP PALEMBANG	7.371.407.551	7.411.407.551
KSOP PANJANG	2.500.000	-
KANTOR UPP AMAHAI	112.500.000	112.500.000
UPP POMAKO I/POMAKO II	180.754.100	180.754.100
KANTOR UPP LAPUKO	1.255.216.137	1.381.216.137
KANTOR UPP RAJA AMPAT	41.305.209	41.305.209
KSOP KEPULAUAN SERIBU	349.326.142	349.326.142
UPP CALANG	-	1.089.851
<b>Jumlah</b>	<b>9.482.009.139</b>	<b>9.477.598.990</b>

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

#### C.21 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

#### C.22 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.

Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi Rp544.462.853

#### C.23 Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp544.462.853 dan Rp376.290.802. Perhitungan Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	8.629.123.688	0,5%	43.145.618
Kurang Lancar	390.631.351	10%	39.063.135
Diragukan	-	50%	-
Macet	462.254.100	100%	462.254.100
<b>Jumlah Penyisihan</b>	<b>9.482.009.139</b>		<b>544.462.854</b>

Tanah  
Rp12.443.538.534.024

#### C.24 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp12.443.538.534.024 dan Rp11.965.320.248.636. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	11.965.320.248.636
<b>Mutasi tambah :</b>	
Saldo Awal	325.085.068.235
Pembelian	6.784.688.150
Transfer Masuk	9.491.118.299
Hibah (Masuk)	20.619.450.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.317.151.000
Reklasifikasi Masuk	165.104.799.376
Perolehan Lainnya	-
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	57.316.348.628
Pengembangan Nilai Aset	61.850.940.353
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	559.254.900.442
Pengembangan Melalui KDP	17.560.402.126
<b>Mutasi kurang :</b>	
Transaksi Normalisasi BMN	(56.895.530.628)
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Penghapusan	(75.486.600)
Transfer Keluar	(929.375.000)
Reklasifikasi Keluar	(24.729.273.726)
Koreksi Pencatatan	(618.309.955.963)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14.800.000)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	(49.212.159.304)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>12.443.538.534.024</b>

Tanah Belum  
Diregister Rp0

#### C.25 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp19.923.727.581.084

#### C.26 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp19.923.727.581.084 dan Rp17.087.015.203.142. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	17.087.015.203.142
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal	13.078.491.445
Pembelian	94.770.122.791
Transfer Masuk	566.472.278.264
Hibah (Masuk)	1.464.718.039
Rampasan	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.851.780.908.164
Pembatalan Penghapusan	-
Reklasifikasi Masuk	252.709.874.321
Penyelesaian Pembangunan Langsung	315.986.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	12.468.120.822
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	266.189.187.285
Pengembangan Nilai Aset	37.582.091.085
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	34.301.531.703
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	6.439.779.700
Pengembangan Melalui KDP	70.039.414.294
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transaksi Normalisasi BMN	(259.453.427.028)
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Penghapusan	(18.228.978.479)
Transfer Keluar	(568.723.714.264)
Reklasifikasi Keluar	(220.358.014.616)

Koreksi Pencatatan	(33.572.212.426)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(3.520.045.415)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(40.750.000)
Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(733.719.800)
Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	(250.886.200)
Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	(840.958.496)
Hibah Keluar (semester II dokumen TAYL)	(29.624.279.336)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (semester II dokumen semester I)	(14.470.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(235.538.669.911)
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>19.923.727.581.084</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(11.501.450.489.875)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>8.422.277.091.209</b>

Peralatan dan  
Mesin Belum  
Diregister Rp0

### C.27 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.253.695.86  
4.930

### C.28 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.253.695.864.930 dan Rp6.992.136.398.200. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>6.992.136.398.200</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal	10.418.007.782
Pembelian	4.125.404.000
Transfer Masuk	4.597.045.000
Hibah (Masuk)	1.252.216.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	300.983.886.487
Reklasifikasi Masuk	304.898.295.016
Perolehan Lainnya	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.058.664.762
Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	2.732.357.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	52.934.828
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	210.361.013.881
Pengembangan Nilai Aset	3.999.721.647
Pengembangan Melalui KDP	78.838.669.105
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(8.699.458.722)
Transaksi Normalisasi BMN	(193.843.936.954)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(51.000.200)
Koreksi BMN ditemukan Kembali	(89.504.800)
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Penghapusan	(24.772.363.726)
Transfer Keluar	(4.607.145.204)
Reklasifikasi Keluar	(181.458.094.591)
Koreksi Pencatatan	(166.790.996.075)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(860.975.000)
Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(32.968.000)
Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	(863.400.000)
Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	(83.616.000)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (semester II dokumen semester I)	(951.212.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(40.031.912.045)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	(39.622.165.461)
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>7.253.695.864.930</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.162.905.264.989)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>6.090.790.599.941</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Belum Diregister  
Rp0

### C.29 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp23.455.009.2  
93.404

### C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.23.455.009.293.404 dan Rp.23.403.893.990.585. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>23.403.893.990.585</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal	113.135.687.493
Pembelian	574.004.000
Transfer Masuk	111.668.294.131
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.166.411.982.429
Reklasifikasi Masuk	1.321.657.916.749
Penyelesaian Pembangunan Langsung	828.874.000
Perolehan Lainnya	-
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	635.876.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	5.062.890.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	309.860.603.239
Pengembangan Nilai Aset	657.141.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	236.402.147.397
Pengembangan Melalui KDP	256.124.500.070
Koreksi BMN ditemukan Kembali	34.735.051.050
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transaksi Normalisasi BMN	(573.019.575.657)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(2.569.538.050)
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Penghapusan	(177.919.224.598)
Transfer Keluar	(111.668.294.131)
Reklasifikasi Keluar	(1.623.213.399.059)
Koreksi Pencatatan	(723.015.759.807)
Penghapusan (semester II dokumen semester I)	(5.964.816.000)
Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	(213.247.000)
Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	(5.042.046.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(29.196.191.187)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	(254.817.573.250)
	-
<b>Saldo per</b>	<b>23.455.009.293.404</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.	(4.166.269.996.406)
<b>Nilai Buku per</b>	<b>19.288.739.296.998</b>

Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Belum Diregister  
Rp0

### C.31 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### C.32 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.41.823.756.584 dan Rp.44.686.110.058. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>44.686.110.058</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	887.395.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.137.066.900
Reklasifikasi Masuk	1.617.469.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	6.763.289.000
Pengembangan Melalui KDP	655.900.000
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transaksi Normalisasi BMN	(6.763.289.000)
Transfer Keluar	(6.612.678.623)
Reklasifikasi Keluar	(1.200.270.000)
Koreksi Pencatatan	(777.069.001)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(450.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(569.716.750)
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>41.823.756.584</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(55.713.921)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>41.768.042.663</b>

### C.33 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0.

### C.34 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.12.127.144.408.156 dan Rp.13.359.168.726.331. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021</b>	<b>13.359.168.726.331</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal KDP	2.129.689.263
Perolehan/Penambahan KDP	243.736.054.268
Pengembangan KDP	3.275.658.895.414
Koreksi Nilai KDP	22.413.962.001
Transfer Masuk KDP	2.314.806.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghapusan/ Penghentian KDP	(23.631.276.146)
Transfer Keluar KDP	(2.314.806.000)
Penghapusan/Penghentian KDP (semester II dokumen TAYL)	(1.481.762.400)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(4.750.849.880.575)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>12.127.144.408.156</b>

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang cukup signifikan berada di KSOP Patimban senilai Rp.8.662.587.646.995,- (71,43%) yang merupakan pekerjaan pembangunan pelabuhan Patimban Fase 1-1. Proses reklasifikasi KDP menjadi aset definitif pada KSOP Patimban direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2022 setelah seluruh pekerjaan fisik dan pembayaran atas pekerjaan Fase 1-1 selesai dilaksanakan.

### C.35 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp16.830.681.465.191 dan Rp14.284.365.585.551. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	19.923.727.581.084	(11.501.450.489.875)	8.422.277.091.209
2	Gedung dan Bangunan	7.253.695.864.930	(1.162.905.264.989)	6.090.790.599.941
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.455.009.293.404	(4.166.269.996.406)	19.288.739.296.998
4	Aset Tetap Lainnya	41.823.756.584	(55.713.921)	41.768.042.663
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>50.674.256.496.002</b>	<b>(16.830.681.465.191)</b>	<b>33.843.575.030.811</b>

Kemitraan  
Dengan Pihak  
Ketiga  
Rp742.138.116.  
015

**C.36 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp742.138.116.015 dan Rp401.218.575.000. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
0500	BA(022) ES1(04) JAWA TIMUR	392.060.676.000
1300	BA(022) ES1(04) KALIMANTAN BARAT	6.425.542.000
2400	BA(022) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	167.796.277.690
3100	BA(022) ES1(04) GORONTALO	175.855.620.325
<b>Jumlah</b>		<b>742.138.116.015</b>

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Perhubungan Laut berupa Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atas aset senilai 742.138.116.015 yang sudah dilaksanakan pada KSOP Probolinggo, KSOP Sintete, KSOP Labuan Bajo, dan KSOP Anggrek

Aset Tak  
Berwujud  
Rp623.200.185.  
238

**C.37 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp623.200.185.238 dan Rp514.228.379.543. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2021</b>	<b>514.228.379.543</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal	37.149.581.502
Pembelian	1.367.590.000
Transfer Masuk	5.353.459.650
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	66.249.006.970
Reklasifikasi Masuk	2.631.831.464
Penyelesaian Pembangunan Langsung	198.825.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	32.848.007.028
Pengembangan Nilai Aset	198.550.000
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Pengembangan Melalui KDP	60.950.000
Transaksi Normalisasi BMN	(32.909.492.219)
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Transfer Keluar	(1.037.272.500)
Reklasifikasi Keluar	(2.256.368.200)
Koreksi Pencatatan	(873.403.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(9.460.000)
	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2021</b>	<b>623.200.185.238</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(137.070.858.087)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>486.129.327.151</b>

Aset Tak  
Berwujud Dalam  
Pengerjaan  
Rp7.260.888.250

### C.38 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.7.260.888.250 dan Rp.13.413.438.250. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per</b>	<b>13.413.438.250</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Saldo Awal KDP	51.850.000
Perolehan/Penambahan KDP	13.367.802.357
Pengembangan KDP	46.789.604.613
Koreksi Nilai KDP	(51.850.000)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(66.309.956.970)
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per</b>	<b>7.260.888.250</b>

Dana Yang  
Dibatasi  
Pergunaannya  
Rp0

### C.39 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana Cadangan  
Perwakilan RI di  
Luar Negeri Rp0

### C.40 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia.

Aset Lain-lain  
Rp483.295.024.  
276

### C.41 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp483.295.024.276 dan Rp470.084.375.971. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	<b>470.084.375.971</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	305.360.749.893
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(67.019.869.705)
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	(2.545.658.111)
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	(450.856.000)
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	(2.099.938.486)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	(10.141.347.978)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	(314.304.364)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	(1.045.500.000)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(143.279.198.682)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(3.465.000)
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(71.039.700)
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(10.904.571.486)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(36.690.406.426)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(17.583.945.650)
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>483.295.024.276</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(377.193.551.101)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>106.101.473.175</b>

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

#### C.42 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 514.264.409.188

#### C.43 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp514.264.409.188 dan Rp333.380.139.429. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	623.200.185.238	(137.070.858.087)	486.129.327.151
Aset Lain-lain	483.295.024.276	(377.193.551.101)	106.101.473.175
-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.106.495.209.514</b>	<b>(514.264.409.188)</b>	<b>592.230.800.326</b>

Utang kepada Pihak Ketiga Rp3.238.811.295

#### C.44 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.238.811.295 dan Rp3.086.240.444. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.795.232.345	2.891.173.743
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	443.578.950	167.303.355
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	27.763.346
-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.238.811.295</b>	<b>3.086.240.444</b>

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

#### C.45 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

#### C.46 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp646.693.551. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

#### C.47 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp448.970.250

#### C.48 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp448.970.250 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2020
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	433.970.250	-
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka BLU	15.000.000	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>448.970.250</b>	<b>-</b>

Pendapatan Diterima dimuka terdapat pada:

1. KSOP Cirebon, merupakan pendapatan sewa tanah reklamasi selama senilai Rp 433.970.250,- sesuai surat perjanjian Nomor HK.201/1/5/KSOP.Cbn-21 dan Nomor 003/PKS/GTOS/VIII/21.
2. BKPP, merupakan pendapatan atas transaksi sewa lahan ATM selama senilai Rp 15.000.000

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp12.112.827

#### C.49 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp12.112.827 dan Rp65.204.207. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :*

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	1.114.500
Tambahan Uang Persediaan	10.998.327
<b>Total</b>	<b>12.112.827</b>

Utang Jangka  
Pendek Lainnya  
Rp0

#### C.50 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Ekuitas  
Rp60.031.559.7  
05.499

#### C.51 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.031.559.705.499. dan Rp59.894.096.563.455. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan  
Perpajakan Rp0

### D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00.

Pendapatan  
Negara Bukan  
Pajak  
Rp4.111.240.006.910  
6.910

### D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.111.240.006.910 dan Rp3.695.233.306.103. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 11,26. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.331.560.000	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan	4.901.347.700	-	-
Pendapatan Lain-lain BLU	26.860.765	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.845.657.918	20.034.397.997,00	(30,89)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	603.980.000	2.520.000,00	23.867,46
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.718.985.597	9.425.569.903,00	(39,32)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	5.000.000,00	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	-	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi	-	-	-
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.481.949.187.378	2.286.703.775.000,00	8,54
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	605.883.158.875	572.852.721.813,00	5,77
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	273.926.303.973	250.919.427.527,00	9,17
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	540.800.633.942	491.444.289.880,00	10,04
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	69.220.556.819	61.270.412.427,00	12,98
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	9.109	3.044,00	199,24
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	112.601.690.435	2.485.591.271,00	4.430,18
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji I	554.200	808.650,00	(31,47)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih	-	43.050.000,00	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	429.520.199	3.600.873,00	11.828,22
Pendapatan Denda Lainnya	-	42.137.718,00	(100,00)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.111.240.006.910,00</b>	<b>3.695.233.306.103,00</b>	<b>11,26</b>

Beban Pegawai  
Rp1.703.783.086.434  
6.434

### D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.703.783.086.434 dan Rp1.715.775.702.835.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 0,70 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	614.110.839.496	623.778.441.381	(1,55)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.625.309	9.354.490	2,90
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50.165.350.735	51.090.340.783	(1,81)
Beban Tunj. Anak PNS	16.018.170.379	16.294.842.655	(1,70)
Beban Tunj. Struktural PNS	8.752.495.000	8.902.703.300	(1,69)
Beban Tunj. Fungsional PNS	418.220.000	342.760.000	22,02
Beban Tunj. PPh PNS	685.367.310	788.301.779	(13,06)
Beban Tunj. Beras PNS	42.767.925.058	37.640.364.500	13,62

Beban Uang Makan PNS	117.515.508.737	119.632.119.925	(1,77)
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	13.403.866.863	14.902.164.250	(10,05)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	462.375.000	476.725.000	(3,01)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.715.873.148	3.958.290.000	(6,12)
Beban Tunjangan Umum PNS	32.221.362.772	33.022.521.075	(2,43)
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	91.897.800	118.775.300	(22,63)
Beban Uang Lembur	84.746.604.778	74.041.705.079	14,46
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	718.697.604.049	730.776.293.318	(1,65)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.703.783.086.434</b>	<b>1.715.775.702.835</b>	<b>(0,70)</b>

Beban  
Persediaan  
Rp229.978.107.  
715

#### D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp229.978.107.715 dan Rp344.156.053.787

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 33,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	149.137.873.178	178.499.161.963	(16,45)
Beban Persediaan amunisi	30.029	517.500	(94,20)
Beban Persediaan bahan baku	50.341.046.241	143.226.600.396	(64,85)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	1.079.533.404	919.824.656	17,36
Beban Persediaan Lainnya	29.419.624.863	21.509.949.272	36,77
	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>229.978.107.715,00</b>	<b>344.156.053.787</b>	<b>(33,18)</b>

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp2.453.897.56  
7.152

#### D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.453.897.567.152 dan Rp2.338.327.025.660.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,94 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	354.751.844.012	297.858.073.042	19,10
Beban Pengadaan Bahan Makanan	11.880.823.960	13.731.478.645	(13,48)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.749.093.499	8.519.105.349	(20,78)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.265.994.178	4.262.593.828	0,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48.953.333.800	65.681.028.874	(25,47)
Beban Barang Operasional Lainnya	34.015.068.437	7.948.853.883	327,92
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19.265.051.967	29.509.206.996	(34,72)
Beban Bahan	42.003.783.501	28.654.799.798	46,59
Beban Honor Output Kegiatan	16.772.949.000	2.035.203.200	724,14
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.653.821.795.213	1.487.976.567.785	11,15
Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga	2.743.980.000	2.221.680.000	23,51
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.001.524.294	160.596.131.450	(98,13)

Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	21.750.000	-	-
Beban Langganan Listrik	48.428.034.174	45.086.435.474	7,41
Beban Langganan Telepon	4.963.217.961	6.678.560.460	(25,68)
Beban Langganan Air	5.161.861.019	4.753.715.470	8,59
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19.526.767.362	11.560.682.024	68,91
Beban Jasa Pos dan Giro	2.085.111.070	1.642.118.601	26,98
Beban Jasa Konsultan	86.253.378.387	66.488.612.162	29,73
Beban Sewa	14.571.534.687	34.054.586.413	(57,21)
Beban Jasa Profesi	3.894.639.368	6.967.965.000	(44,11)
Beban Jasa Lainnya	66.338.615.913	46.000.155.400	44,21
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.112.224.482	4.327.271.228	(28,08)
Beban Barang	498.681.500	-	-
Beban Jasa	312.580.000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	503.929.368	1.772.200.578	(71,56)
<b>Jumlah</b>	<b>2.453.897.567.152</b>	<b>2.338.327.025.660,00</b>	<b>4,94</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp652.214.777.  
017

#### D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp652.214.777.017 dan Rp561.539.042.736.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,15 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.459.888.446	93.070.010.778	16,54
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	30.800.000	573.405.394	(94,63)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	197.991.334	249.947.213	(20,79)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	471.315.400.886	360.197.693.108	30,85
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	13.544.871.190	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	449.948.000	79.530.579	(34,16)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16.433.010.976	23.615.282.766	(0,12)
Beban Pemeliharaan Irigasi	49.988.000	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	958.543.719	639.271.168	(4,25)
Beban Pemeliharaan Lainnya	254.008.902	242.935.000	(11,18)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11.042.610.560	11.167.324.450	(0,24)
Beban Persediaan suku cadang	42.980.825.194	58.141.563.710	(26,08)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	41.761.000	17.207.380	142,69
<b>Jumlah</b>	<b>652.214.777.017</b>	<b>561.539.042.736</b>	<b>16,15</b>

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp283.008.531.  
679

#### D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp283.008.531.679 dan Rp258.877.554.781

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,32 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

#### Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	195.932.593.925	183.747.936.653	6,63
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.834.046.910	28.491.780.431	85,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.133.988.957	12.240.688.050	23,64
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.572.509.574	28.537.155.187	(34,92)

Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID	-	3.463.900.000	(100,00)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	118.236.000	2.396.094.460	(95,07)
Beban Perjalanan	417.156.313	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>283.008.531.679,00</b>	<b>258.877.554.781</b>	<b>9,32</b>

Beban Barang  
Untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat Rp0

#### D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp313.082.926.561

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 100,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	26.450.400,00	(100,00)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	312.810.201.161,00	(100,00)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	154.340.000,00	(100,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	91.935.000,00	(100,00)
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>313.082.926.561</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Bantuan  
Sosial Rp0

#### D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp2.807.358.228.442  
8.442

#### D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.807.358.228.442 dan Rp2.716.552.743.919.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.617.774.245.853	1.493.194.531.378	8,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	274.290.608.264	289.390.239.510	(5,22)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	508.697.483.933	507.597.207.153	0,22
Beban Penyusutan Irigasi	377.282.436.869	396.168.786.607	(4,77)
Beban Penyusutan Jaringan	3.551.807.507	4.099.094.925	(13,35)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	19.219.031	14.593.890	31,69
Beban Amortisasi Software	4.506.305.600	3.786.547.700	19,01
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	192.610.000	(100,00)
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.703.310.561	7.016.401.694	52,55
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	10.532.810.824	15.092.731.062	(30,21)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>2.807.358.228.442</b>	<b>2.716.552.743.919</b>	<b>3,34</b>
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.807.358.228.442</b>	<b>2.716.552.743.919</b>	<b>3,34</b>

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp6.162.102.454  
4

#### D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.162.102.454 dan Rp1.521.429.638

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	5.981.629.078	1.525.314.744	292
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.716.301	(3.685.555)	(390,76)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	169.000.000	(199.551)	(84.790,13)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12.500	-	-
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	744.575	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.162.102.454,00</b>	<b>1.521.429.638</b>	<b>305</b>

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp-317.122.032.412

**D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-317.122.032.412 dan Rp-92.366.317.184

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	55.900.000	123.621.697,00	(55)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.431.556.044	1.865.993.022,00	245
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.520.180.650	1.953.579.552,00	183
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(329.129.669.106)	(96.309.511.455,00)	242
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(317.122.032.412)</b>	<b>(92.366.317.184)</b>	<b>243</b>

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0

**D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp40.692.166.445

**D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.692.166.445 dan Rp34.204.443.796.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.097.000.000	233.265.360,00	798,98
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	265.729.398	38.677.528,00	587,04
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	8.300.000	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	149.268.318	806.194.099,00	(81)
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	52.455.557	45.617.828,00	15

Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	30.598.893.564	3.643.497.349,00	740
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	6.298.098.465	15.757.114.109,00	(60)
Penerimaan Kembali Beban Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	175.695.000	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	1.842.057.013	12.940.431,00	14.135
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.084.110	31.287.942.301,00	(100)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(17.617.839.209,00)	(100)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(797.414.980)	(2.966.000,00)	26.785
<b>Jumlah</b>	<b>40.692.166.445</b>	<b>34.204.443.796</b>	<b>18,97</b>

Pos Luar Biasa  
Rp0

#### D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp59.894.096.563.455,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.59.894.096.563.455,00 dan Rp.56.952.495.482.080,00

*Defisit LO Rp.-4.301.592.259.950,00*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-4.301.592.259.950,00 dan Rp.-4.612.761.047.202,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00*

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-588.415.750.976 dan Rp.1.234.101.075.870 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00*

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan Rp3.725.177.192,00*

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.3.725.177.192,00 dan Rp.11.864.853.518,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	3.725.177.192
<b>Jumlah</b>	<b>3.725.177.192,0</b>

*Koreksi Atas Reklasifikasi Rp-2.926.538.499,00*

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-2.926.538.499 dan Rp.25.980.142.852. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(2.926.538.499)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.926.538.499,0)</b>

*Selisih Revaluasi Aset Rp.34.645.546.250,00*

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.34.645.546.250,00 dan Rp.1.256.160.377.250,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021*

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	34.645.546.250
	-
<b>Jumlah</b>	<b>34.645.546.250,0</b>

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp-621.597.959,86*

**E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-621.597.959.863 dan Rp.-63.850.336.357. Koreksi ini .

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021*

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(538.124.390.489)
	(83.473.569.374)
<b>Jumlah</b>	<b>(621.597.959.863,0)</b>

*Koreksi Lain-Lain Rp-2.262.190.810*

**E.4.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2.262.190.810 dan Rp.3.946.038.607. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

*Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021*

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(2.262.190.810)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.262.190.810,0)</b>

*Transaksi Antar Entitas Rp5.027.471.367,724*

**E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.5.027.471.367.724 dan Rp.6.320.261.052.707. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

*Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.135.253.015.411
Diterima dari Entitas Lain	(4.166.509.215.976)
Transfer Keluar	(360.982.337.482)
Transfer Masuk	371.143.396.665
Pengesahan Hibah Langsung	40.844.509.106
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	7.722.000.000
	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.027.471.367.724</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 9.135.253.015.411, sedangkan DDEL sebesar Rp 4.166.509.215.976

### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp-360.982.337.482

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp371.143.396.665

BEDA TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK		
	TRANSFER KELUAR	360.982.337.482
	TRANSFER MASUK	371.143.396.665
	<b>BEDA TRANSFER</b>	<b>(10.161.059.183)</b>
	<b>TRANSFER KELUAR DARI BA NON 022</b>	
1	KSOP SAMARINDA KE KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA	1.024.451.741
2	KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA KE SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	3.373.076.006
3	KSOP SUNDA KELAPA KE PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	172.898.923
	<b>TRANSFER MASUK DARI BA NON 022</b>	
1	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA KE KSOP SAMARINDA berupa Gedung dan Bangunan	1.117.596.910
2	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUDUS KE UPP JEPARA berupa Gedung dan Bangunan	292.563.921
3	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUDUS KE UPP REMBANG berupa Gedung dan Bangunan	237.564.015
4	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke KSOP Batam berupa Tanah	3.925.410.299
5	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SIBOLGA KE KSOP GUNUNG SITOLI berupa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.842.163.558
6	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU KE KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA Berupa Hasil Kajian/Penelitian	4.316.187.150
	<b>SISA BEDA</b>	<b>-</b>
	Selisih Monitoring TK-TM Hubla TA. 2021 Terlampir	

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. -40.844.509.106

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
UPP L U W U K	Tanah	(2.473.740.000)
OP UTAMA TANJUNG PERAK	Gedung dan Bangunan	(1.252.216.000)
SATKER KPLP	Peralatan dan Mesin	(1.735.178.837)
SATKER KENAVIGASIAN PUSAT	Kas	(24.959.664.269)
KSOP BONTANG	Tanah	(9.963.000.000)
KANTOR UPP AMURANG	Tanah	(458.310.000)
KANTOR UPP SATUI	Tanah	(2.400.000)
-	-	-
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		<b>(40.844.509.106,00)</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>(40.844.509.106,00)</b>

#### E.5.4 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN Tahun Anggaran yang Lalu. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.-7.722.000.000

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

*Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :*

Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
UPP PELABUHAN RATU	Tanah	(7.722.000.000)
	-	-
	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		<b>(7.722.000.000,00)</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>(7.722.000.000)</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir  
Rp60.031.559.7  
05.499*

#### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.60.031.559.705.499,00 dan Rp.59.894.096.563.455,00.

**INFORMASI LAINNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUNAN TA. 2021**

**A. Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP)**

**1. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

- a. Target PNBP TA. 2021 sebesar **Rp3.843.330.169.001,-**  
 b. Pencapaian target PNBP TA 2021 **Rp4.172.720.949.441,- (108,57%)**

**2. Jumlah realisasi penyetoran PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Triwulan III Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.172.720.949.441,- dengan rincian sebagai berikut :**

- a. PNBP Non Fungsional : Rp. 189.919.247.055,-  
 b. Fungsional : Rp. 3.976.589.968.921,-  
     1) Jasa Kenavigasian : Rp. 605.873.972.772,-  
     2) Perkapalan : Rp. 274.038.369.122,-  
     3) Jasa Transportasi Lainnya : Rp. 69.220.536.819,-  
     4) Kepelabuhanan : Rp. 2.486.901.710.435,-  
     5) Konsesi : Rp. 540.555.379.773,-  
 c. BLU : Rp. 6.211.733.465,-

**3. Saldo Kas Bendahara Penerimaan**

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL	TANGGAL SETOR	NTPN
1	022.04.413658	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BABANG	11.472.000	07/01/2022	3D39761QUGU9SSO2
2	022.04.559400	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SOA-SIU	34.900.250	04/01/2022	A98D70N9VHFVE4K0
3	022.04.559417	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN GESER	28.745.300	05/01/2022	97D5A2G4V6KO8MVA B2BE42G4V6KO8QL7 159100N9VHFVERV1
4	022.04.559470	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULI	15.336.250	04/01/2022	7DD522G4V6KO8KB6 F7E5948VURPH2IVQ
<b>TOTAL</b>			<b>90.453.800</b>		

**4. Penggunaan Perairan**

- a. Dasar Hukum:
- 1) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
  - 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- 3) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Mekanisme pemungutan PNBP Penggunaan Perairan:
- 1) Penggunaan perairan termasuk dalam PNBP Jasa Kepelabuhanan Lainnya;
  - 2) Untuk pelayanan penggunaan perairan dilaksanakan dengan perjanjian penggunaan perairan dalam batas waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  - 3) Tarif untuk penggunaan perairan Rp2.500,- per m<sup>2</sup>;
  - 4) Termin untuk pembayaran penggunaan perairan dilaksanakan setiap tahun sesuai periode tahun takwin dan pembayarannya dilakukan setiap awal termin sesuai periode perjanjian;
  - 5) Dalam hal perjanjian penggunaan perairan tidak dilakukan dalam 1 (satu) takwim maka perhitungan termin pertama dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut dan untuk termin berikutnya perhitungan pungutan sesuai dengan tahun takwim.
  - 6) Pengguna jasa yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo nota tagihan dikeluarkan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang tertuang dalam nota tagihan;
  - 7) Penerbitan nota tagihan penggunaan perairan dilakukan sebagai berikut:
    - a. Untuk termin pertama yang dimulai sejak ditanda tangani perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun berjalan, nota tagihan diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian ditandatangani;
    - b. Untuk termin berikutnya nota tagihan diterbitkan selambat-lambatnya akhir April tahun berjalan;
  - 8) Jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak nota tagihan dikeluarkan.  
Untuk pelayanan jasa yang menggunakan perjanjian seperti penggunaan perairan, penentuan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;

## **5. Jasa Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel)**

- a. Jasa telekomunikasi pelayaran merupakan bagian dari PNBP Jasa kenavigasian.
- b. Jasa Telkompel terdiri dari:
  1. *Vessel Traffic Services (VTS)*;
  2. *Jasa Telegram/telepon radio/radio telex/radio maritime latter*.
- c. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/34/18/DJPL-16 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Penerapan

PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan *Vessel Traffic Services (VTS)*, Pelayanan Jasa Telegram/Telepon Radio/*Radio Telex/Radio Maritime Letter* dan Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut disebutkan bahwa apabila telah dilakukan penarikan PNBP Jasa Kenavigasian VTS pada pelabuhan dan/atau di dalam DLKr/DLKp pelabuhan, maka penarikan PNBP Jasa Telegram/Telepon Radio berupa *Mastercable* tidak perlu dilakukan lagi mengingat berita yang disampaikan ke VTS sudah mencakup berita dalam *Mastercable*.

d. Daftar stasiun SROP / VTS:

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
1	Disnav Belawan – VTS Belawan			
	1. Syahbandar Belawan	√	-	
	2. KSOP Kuala Tanjung	-	√	
2	Disnav Dumai – VTS Dumai	√	-	
	1. KSOP Dumai	√	-	
3	Disnav Tg. Pinang	-	√	
	1. Kanpel Batam VTS Center Batam	√	-	
	2. KSOP Tg. Balai Karimun	√	-	
	3. UPP Tanjung Uban	√	-	
	4. KSOP Kijang	-	√	
	5. KSOP Tanjung Pinang	-	√	
	6. UPP Dabo Singkep	-	√	
	7. UPP Senayang	-	√	
	8. UPP Tarempa	-	√	
4	Disnav Teluk Bayur – VTS Teluk Bayur	√	-	
	1. KSOP Teluk Bayur	√	-	
5	Disnav Palembang – VTS Palembang	√	-	
	1. KSOP Palembang	√	-	
	2. KSOP Muntok	√	-	
	3. KSOP Pangkal Balam	-	√	
	4. KSOP Tanjung Pandan	-	√	
	5. KSOP Muara Sabak	-	√	
	6. KSOP Jambi	-	√	
	7. KSOP Kuala Tungkal	-	√	
6	Disnav Tanjung Priok – VTS Jakarta	√	-	
	1. Syahbandar Tanjung Priok	√	-	
	2. KSOP Sunda Kelapa	√	-	
	3. KSOP Marunda	√	-	
	4. KSOP Muara Baru	√	-	
	5. KSOP Kalibaru	√	-	
7	VTS Merak – Master Cable	√	-	
	1. UPP Bojonegara	√	-	
	2. UPP Karangantu	√	-	
	3. UPP Labuhan	√	-	

No.	Stasiun SROP / VTS	Jasa Telkompel		Keterangan
		VTS	Master Cable	
8	4. UPP Anyer	√	-	
	5. KSOP Pulau Baai Bengkulu	-	√	
9	VTS – Panjang	√	-	
10	Disnav Semarang – VTS Semarang	√	-	
	1. KSOP Semarang	√	-	
11	Disnav Surabaya – VTS Surabaya	√	-	
	1. Syahbandar Surabaya	√	-	
	2. KSOP Gresik	√	-	
12	Disnav Benoa – VTS Benoa	√	-	
13	VTS Lembar	√	-	
14	Disnav Pontianak – VTS Pontianak	√	-	
	1. KSOP Pontianak	√	-	
15	Disnav Banjarmasin – VTS Banjarmasin	√	-	
	1. KSOP Banjarmasin	√	-	
16	VTS Batulicin	√	-	
17	Disnav Samarinda – VTS Samarinda	√	-	
	1. KSOP Samarinda	√	-	
18	VTS Balikpapan	√	-	
19	Disnav Makassar – VTS Makassar	√	-	
	Disnav Bitung – VTS Bitung	√	-	
20	1) KSOP Gorontalo	-	√	
	2) UPP Pantoloan	-	√	
	Disnav Sorong – VTS Sorong	√	-	
	1. UPP Bintuni	√	-	

## 6. Piutang PNBP

Total piutang PNBP s.d. Periode Bulan Desember TA. 2021 sebesar Rp38.321.599.304,- dengan kategori sebagai berikut :

- a) Lancar Rp. 16.165.574.257,-
- b) Kurang lancar Rp. 2.304.328.019,-
- c) Diragukan Rp. 19.450.000,-
- d) Macet Rp. 19.832.247.028,-

a. Sebagian besar piutang PNBP termasuk kategori lancar yang merupakan piutang kontribusi jasa pandu/tunda kepada PT. Pelindo Regional I, II, III dan IV (Persero) periode 31 Desember 2021, yang akan dibayarkan di periode bulan Januari 2022 sebagai berikut:

1) Piutang Pandu Tunda:

- a) KSOP Tanjung Emas (Regional III) : Rp. 241.142.887,-
- b) UPP Jepara (PT. KBS) : Rp. 327.753.500,-

c)	KSOP Cilacap (Regional III)	: Rp. 344.942.535,-
d)	KSOP Gresik (PT. Maspion)	: Rp. 493.750.000,-
e)	UPP Bawean (BOP Camar Resort)	: Rp. 1.940.785.000,-
f)	KSOP Lhouksemawe (Regional I)	: Rp. 171.626.999,-
g)	KSOP Malahayati (Regional I)	: Rp. 32.709.743,-
h)	KSOP Pangkalan Susu (Regional I)	: Rp. 259.503.172,-
i)	OP. Utama Belawan (Regional I)	: Rp. 599.915.440,-
j)	KSOP Sibolga (Regional I)	: Rp. 7.959.849,-
k)	KSOP Kuala Tanjung (Regional I)	: Rp. 226.790.952,-
l)	KSOP Teluk Bayur (Regional II)	: Rp. 225.797.789,-
m)	KSOP Tanjung Buton (Regional I)	: Rp. 399.586.684,-
n)	KSOP Dumai (Regional I)	: Rp. 1.953.639.254,-
o)	KSOP Pekanbaru (Regional I)	: Rp. 145.074.763,-
p)	KSOP Tembilahan (Regional I)	: Rp. 11.543.559,-
q)	KSOP Kuala Enok (Regional I)	: Rp. 1.342.043,-
r)	UPP Sungai Guntung (Regional I)	: Rp. 991.111,-
s)	KSOP Palembang (PT. JAI)	: Rp. 1.387.753.608,-
t)	Ksop Sampit (Regional I)	: Rp. 68.372.151,-
u)	UPP Satui (PT. Mitra Rama)	: Rp. 201.108.360,-
v)	KSOP Samarinda (Regional IV)	: Rp. 985.547.917,-
w)	KSOP Balikpapan (Regional IV)	: Rp. 3.535.732.725,-
x)	UPP Tanjung Santan (Regional IV)	: Rp. 49.072.212,-
y)	UPP Sangkulirang (Regional IV)	: Rp. 300.073.807,-
z)	UPP Tanjung Redep (Regional IV)	: Rp. 68.507.828,-
aa)	UPP Tanah Paser (Regional IV)	: Rp. 239.619.000,-
bb)	KSOP Bontang (Regional IV)	: Rp. 575.386.000,-
cc)	KSOP Bitung (Regional IV)	: Rp. 254.261.029,-
dd)	KSOP Teluk Palu (Regional IV)	: Rp. 15.911.680,-
ee)	KSOP Toli-Toli (Regional IV)	: Rp. 2.096.753,-
ff)	UPP Kolonedale (Regional IV)	: Rp. 107.708.650,-
gg)	KSOP Pare-Pare (Regional IV)	: Rp. 28.912.588,-
hh)	UPP Maccini Baji (PT. Semen Tonasa)	: Rp. 43.018.900,-
ii)	UPP Garongkong (Regional IV)	: Rp. 33.777.629,-
jj)	KSOP Bau Bau (PT. Pelindo)	: Rp. 6.726.627,-
kk)	Upp Pomala (PT. Mitra)	: Rp. 16.796.477,-
ll)	UPP Molawe (Regional IV)	: Rp. 151.061.166,-
mm)	KSOP Ambon (Regional IV)	: Rp. 148.660.643,-
nn)	UPP Dobo (Regional IV)	: Rp. 9.050.040,-
oo)	KSOP Bena (Regional II)	: Rp. 41.971.153,-
pp)	KSOP Lembar (Regional III)	: Rp. 99.611.003,-
qq)	KSOP Jayapura (Regional IV)	: Rp. 27.314.022,-
rr)	KSOP Biak (Regional IV)	: Rp. 18.626.712,-
ss)	KSOP Merauke (Regional IV)	: Rp. 3.917.909,-
tt)	UPP Pomako (Regional IV)	: Rp. 136.204.919,-
uu)	KSOP Pulau Baai (Regional II)	: Rp. 98.361.220,-
vv)	KSOP Ternate (Regional IV)	: Rp. 3.888.079,-
ww)	KSOP Gorontalo (Regional IV)	: Rp. 18.249.752,-
xx)	KSOP Anggrek (Regional II)	: Rp. 12.566.578,-
yy)	KSOP Tanjung Balai Karimun (Regional I)	: Rp. 390.127.495,-
zz)	UPP Tanjung Uban (Pelindo)	: Rp. 101.503.602,-
aaa)	KSOP Khusus Batam (Regional I)	: Rp. 506.073.889,-

- |  |       |               |
|--|-------|---------------|
| bbb) KSOP Kijang (Regional I)          | : Rp. | 13.805.693,-  |
| ccc) KSOP Manokwari (Regional IV)      | : Rp. | 31.303.951,-  |
| ddd) KSOP Sorong (Regional IV)         | : Rp. | 48.217.808,-  |
| eee) KSOP Fak-Fak (Regional IV)        | : Rp. | 4.542.455,-   |
| fff) UPP Belang-Belang (Regional IV)   | : Rp. | 25.218.058,-  |
| ggg) KSOP Tarakan (Regional IV)        | : Rp. | 247.171.349,- |
| hhh) KSOP Nunukan (Regional IV)        | : Rp. | 45.047.061,-  |
| iii) UPP Tanjung Selor (Regional IV)   | : Rp. | 33.372.825,-  |
| jjj) UPP Pulau Bunyu (Regional IV)     | : Rp. | 19.889.116,-  |
| kkk) Pulau Bunyu (Pelindo IV)          | : Rp. | 17.950.234,-  |
| lll) KSOP Banjarmasin (Regional III)   | : Rp. | 247.774.442,- |
| mmm) KSOP Tanjung Wangi (Regional III) | : Rp. | 129.542.276,- |
| nnn) UPP Satui (Regional III)          | : Rp. | 201.108.360,- |
- b. Piutang kurang lancar sebesar Rp2.304.328.019,- terdiri dari :
- |  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| 1) UPP Labuhan Maringgai sebesar   | Rp. | 38.400.000,-    |
| 2) UPP Sangkapura Bawean sebesar<br>(BPO Camar Resort piutang penggunaan perairan) | Rp. | 1.940.785.000,- |
| 3) KSOP Anggrek sebesar  | Rp. | 6.413.050,-     |
| 4) OP. Utama Makassar sebesar  | Rp. | 300.984.050,-   |
| 5) UPP Pomala'a sebesar  | Rp. | 16.236.883,-    |
| 6) UPP. Saumlaki sebesar   | Rp. | 1.509.036,-     |
- c. Piutang diragukan sebesar Rp19.450.000,- terdiri dari :
- |                                      |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| 1) KSOP Bakauheni (PT. BDAP) sebesar | Rp. | 4.000.000,-  |
| 2) KSOP Manado sebesar               | Rp. | 15.450.000,- |
- d. Piutang Kategori macet sebesar Rp19.832.247.028,- terdiri dari :
- 1) Piutang pada Kantor KSOP Kuala Langsa dikategorikan macet sebesar Rp533.247.720,- (Jasa Kepelabuhanan) merupakan piutang dari debitur PT. Blue Sky Langsa LTD. Dikarenakan Perusahaannya yang menyewa penggunaan perairan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2017;
  - 2) UPP Tarempa:
    - a) Piutang macet pada Kantor UPP Tarempa sebesar Rp. 10.820.931.830,- untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Peralahan Arnebatara Natuna.
    - b) Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tersus Migas Udang Marine Terminal Nomor KU.404/I/06/UPP-TPA-2016 Tanggal 17 Februari 2016.
    - c) Pada tanggal 25 Oktober 2016 Kantor UPP Tarempa menyurati PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai Pembayaran Tagihan PNBPN Penggunaan Perairan Tersus Udang dengan rincian sebagai berikut :
 

- periode tahun 2011 s.d 2014	Rp	109.968.338,42
- periode tahun 2015	Rp	1.761.052.794,33
- periode tahun 2016	Rp	3.923.812.500,00
    - d) Pada tanggal 9 Desember 2016 PT. Peralahan Arnebatara Natuna hanya melakukan pembayaran berdasarkan tarif sewa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 dengan tagihan PNBPN periode tahun 2011 s.d 2014 sebesar Rp109.968.338,42
    - e) Pada tanggal 14 Februari 2017 Kantor UPP Tarempa menerima surat tembusan dari Dirjen Hubla mengenai Pengenaan Tarif Atas Penggunaan Perairan TAC PEP – PT. Peralahan Arnebatara Natuna yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dengan nomor surat UM.002/5/18/DJPL-17 Tanggal 13 Januari 2017. Yang dimana pada lampiran-lampiran surat tersebut dapat diketahui ketidakmampuan PT. Peralahan Arnebatara Natuna untuk pembayaran PNBPN penggunaan perairan tersebut dikarenakan perubahan tarif sewa pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2015.

- f) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menindaklanjuti surat dari PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai peninjauan kembali tarif penggunaan perairan dengan nomor surat Pp.002/6/12/DJPL-17 tanggal 5 Juli 2017.
- g) Pada tanggal 14 Juli 2017 Presdir PT. Peralahan Arnebatara Natuna menerbitkan Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kantor UPP Tarempa untuk melaksanakan lifting dan berkomitmen menjalankan operasi sesuai aturan yang berlaku, serta siap untuk tidak diberikan pelayanan apabila tidak memenuhi kewajiban yang tercantum pada surat pernyataan tersebut.
- Pada tanggal 5 Nopember 2017 Kepala Kantor UPP Tarempa menyampaikan surat kepada PT. Peralahan Arnebatara Natuna mengenai tindak lanjut dalam rangka penertiban administrasi terminal khusus udang marine terminal. Dikarenakan PT. Peralahan Arnebatara Natuna tidak memenuhi kewajibannya. Sampai dengan saat ini PT. Peralahan Arnebatara Natuna belum melakukan pembayaran tagihan PNBPN yang dinyatakan sebagai piutang macet dengan rincian sebagai berikut:
 

- periode tahun 2015	Rp 1.761.052.794,33
- periode tahun 2016	Rp 3.923.812.500,00
- periode tahun 2017	Rp 3.923.812.500,00
- <u>periode semester I 2018</u>	
-	<u>Rp 1.212.254.036,00</u>
Total	Rp10.820.931.830,00
- h) Pada tanggal 13 Juni 2019 sudah diadakan rapat kembali terkait pembahasan penggunaan perairan dengan PT. PAN yang dipimpin oleh Sesditjen Hubla
- i) Pada Tanggal 18 Juni 2019 rapat ulang pembahasan luasan penggunaan perairan PT. PAN yang dipimpin oleh UPP. Tarempa di Kantor Pusat dari hasil keputusan rapat tersebut belum ada hasil dan sudah bersurat ke Direktorat Kepalabuhanan Tanggal 19 Juni 2019 perhitungan ulang 18 Juli 2019 peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu DitjenHubla untuk perhitungan luasan penggunaan perairan
- j) Hasil peninjauan lapangan dengan luas perairan 1.536.992 m2 dengan jumlah penggunaan perairan tahun 2015/2019 Rp.6.045.741.679,-
- k) Kantor UPP. Tarempa pada tanggal 27 September 2019 telah berkirin surat kepada PT. PAN perihal Tindak lanjut hasil peninjauan lapangan dalam rangka perhitungan luas penggunaan perairan di Tersus Udang Natuna;
- l) Pada tanggal 20 April 2021 UPP Tarempa telah mengirim surat kepada KPKNL Batam terkait penyerahan pengurusan piutang negara atas PT. PAN;
- m) Pada tanggal 23 Juni 2021 Kantor KPKNL Batam mengirimkan tanggapan kepada UPP Tarempa perihal Permintaan Kelengkapan Dokumen Penyerahan, sesuai Surat Kepala Kantor KPKNL Batam nomor S-861/Wkn.03/KNL.04/2021;
- n). Pada tanggal 9 Agustus 2021, UPP Tarempa telah mengirim resume penyerahan pengurusan piutang negara atas PT. PAN (Surat No UM.001/2/19/UPP.TPA 2022).
- 3) KSOP Panjang:
- a) Piutang macet pada Kantor KSOP Panjang sebesar Rp192.601.214,- untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Sumatera Bahtera Raya;
  - b) Piutang macet atas penggunaan perairan termin terakhir tahun 2019 sesuai perjanjian penggunaan perairan nomor HK.107/1/3/KSOP.Pjg-16.
  - c) Pihak KSOP Panjang telah melakukan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 kepada PT. Sumatera Bahtera Raya yaitu melalui surat sebagai berikut:
    - Surat Kepala Kantor KSOP Panjang Nomor KU.102/1/10/KSOP.Pjg-20 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pembayaran PNBPN Penggunaan Perairan Tahun 2019;

- Surat Kepala Kantor KSOP Panjang Nomor KU.102/3/7/KSOP.Pjg-20 tanggal 13 Mei 2020 perihal Pembayaran PNBP Penggunaan Perairan Tahun 2019;
  - Surat Kepala Kantor KSOP Panjang Nomor KU.102/3/17/KSOP.Pjg-20 tanggal 6 Juli 2020 perihal Pembayaran PNBP Penggunaan Perairan Tahun 2019
- d) Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh petugas dari KSOP Panjang, PT. Sumatera Raya sudah tidak beroperasi lagi semenjak tahun 2019.
  - e) Pihak KSOP Panjang telah mengirimkan surat kepada Direktur Kepelabuhanan Nomor AL.308/81/16/KSOP.Pjg-20 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Pembekuan Sementara Izin Operasional TUKS PT. Sumatera Bahtera Raya namun hingga 31 Desember 2020 belum ada arahan dan balasan lebih lanjut atas surat tersebut;
  - f) KSOP Panjang telah melakukan penyerahan pengurusan piutang ke kantor KPKNL Bandar Lampung sesuai surat Kepala Kantor KSOP Panjang Nomor UM.006/13/1/KSOP.Pjg-2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara atas PT. Sumatera Bahtera Raya(PT. SBR) dikarenakan Kantor KSOP Panjang sudah melakukan upaya penagihan dengan menyurati PT. SBR selama 3 kali namun tidak juga mendapatkan jawaban dari pihak PT. SBR;
  - g) KSOP Panjang telah melakukan peninjauan ke lokasi Kantor PT. SBR namun sudah tidak ada kegiatan dan kantor PT. SBR dalam keadaan kosong;
  - h) Posisi sampai dengan Semester II 2021 masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPKNL Bandar Lampung.
- 4) Piutang Kantor Pusat termasuk katagori piutang macet, piutang kantor pusat adalah piutang PNBP dari Debitur PT. Pelni (Persero) sebesar Rp5.449.936.392,- dengan US\$3.741,15 dengan Rate Bank Indonesia per 31 Desember 2021 US\$ = Rp. 14.105,- = Rp52.768.920,75,-
  - 5) Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak  
Piutang macet pada OP Tanjung Perak sebesar Rp2.784.987.872,- Untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), dengan kronologis sebagai berikut:
    - a) Tanggal 23 Desember 2015  
penandatanganan perjanjian kerjasama kantor otoritas pelabuhan utama Tg. Perak dengan PT. DPS
    - b) 19 januari 2016  
OP Tg. Perak menerbitkan surat kepada PT. DPS untuk segera melaksanakan pembayaran penggunaan perairan periode I TA. 2015
    - c) Tanggal 18 Pebruari 2016  
OP Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode I ( 26 Maret s/d 31 Desember 2015)
    - d) Tanggal 29 Pebruari 2016  
Surat peringatan untuk PT. DPS segera melaksanakan pelunasan pembayaran penggunaan perairan periode I TA. 2015 Tanggal 29 Maret 2016  
OP Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairan kepada PT. DPS periode II ( 01 Januari s/d 31 Desember 2016)
    - e) Tanggal 30 maret 2016  
Surat pemberitahuan pengenaan denda kepada PT. DPS atas penangguhan pembayaran penggunaan perairan tahun 2015 dengan denda sebesar 2% sesuai pp nomor 29 tahun 2009
    - f) Tanggal 3 Mei 2016  
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp. 246.697.538,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2016
    - g) Tanggal 10 juni 2016  
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015 ) kepada PT. DPS sebesar Rp. 251.631.489,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 Juni 2016

- h) Tanggal 10 juni 2016  
Surat tagihan penggunaan perairan periode II (TA. 2016) sebesar Rp. 314.160.224,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Juni 2016
- i) Tanggal 30 Juni 2016  
Surat tagihan penggunaan perairan periode I ( TA. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp. 256.664.119,- dan jatuh tempo pemabayaran tanggal 28 Juli 2016;
- j) Tanggal 30 Juni 2016  
Surat tagihan penggunaan perairan periode II ( TA. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp. 320.443.429,- dan jatuh tempo pemabayarn tanggal 27 juli 2016'
- k) Tanggal 21 Juli 2016  
PT. DPS baru mengirimkan surat balasan/tanggapan terhadap surat-surat yang telah kantor OP kirimkan dengan mengajukan permohonan skema pembayaran pelunasan penggunaan perairan dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran penggunaan perairan periode I ( TA. 2015) dan periode II ( TA. 2016) dengan alasan mengalami kesulitan likuiditas;
- l) Tanggal 2 Agustus 2016\  
Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepada PT. DPS sebesar Rp. 261.797.401,- dan tanggal jatuh tempo 27 agustus 2016;
- m) Tanggal 2 Agustus 2016  
Surat tagihan penggunaan perairan periode II (TA. 2016) kepada PT. DPS sebesar Rp. 326.852.298,- dan tanggal jatuh tempo 26 Agustus 2016
- n) Tanggal 25 Agustus 2016  
Kantor OP Tg. Perak membuat surat balasan atas surat dari PT. DPS tanggal 21 Juli 2016 yang pada dasarnya kantor OP Tg. Perak tetap mengharuskan PT. DPS melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian penggunaan perairan dan untuk penghapusan denda keterlambatan menunggu arahan dari kantor pusat DJPL;
- o) Tanggal 29 Nopember 2016  
Kantor OP Tg. Perak kembali mengirinkan surat kepada PT. DPS bahwa denda keterlambatan tidak bisa dihapuskan dan segera melaksanakan pembayaran tagihan periode 2015 dan 2016;
- p) Tanggal 6 Januari 2017  
Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp. 649.916.832,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 24 Januari 2017 dan periode II tanggal 23 Januari 2017;
- q) Tanggal 20 Januari 2017  
Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode Ili (01 Januari s/d 31 Desember 2017);
- r) Tanggal 30 Januari 2017  
Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan II sebesar Rp. 662.915.169,- jatuh tempo pembayaran periode I tanggal 23 Pebruari 2017 dan periode II tanggal 22 Pebruari 2017;
- s) Tanggal 7 Pebruari 2017  
Manajemen PT. DPS di undang ke kantor OP Tg. Perak untuk membahas pembayaran penggunaan perairan periode I dan II;
- t) Tanggal 16 Pebruari 2017  
Surat dari PT. DPS mengenai permohonan skema pelunasan pembayaran penggunaan perairan TA. 2015 s/d 2017 dan dilampirkan laporan keuangan PT. DPS tahun 2013-2015;
- u) Tanggal 14 Maret 2017  
OP Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal arahan pembayaran penggunaan perairan PT. DPS tahun 2015, 2016 dan 2017;
- v) Tanggal 6 April 2017

OP Tg. Perak mengirimkan surat kepada PT. DPS perihal penyerahan audit Laporan Keuangan oleh auditor independen untuk rencana pembayaran penggunaan perairan PT. DPS;

- w) Tanggal 19 April 2017  
PT. DPS menyampaikan surat laporan hasil audit dan permohonan jangka waktu pembayaran kepada kantor OP Tg. Perak;
- x) Tanggal 2 Mei 2017  
OP Tg. Perak menghadiri undangan dari kantor pusat Kemenhub tentang pembahasan permasalahan pembayaran PNBP penggunaan perairan PT. DPS dan PT. dumas dengan hasil risalah rapat bahwa kantor OP Tg. Perak harus melakukan koordinasi dengan KPPN setempat;
- y) Tanggal 15 Mei 2017  
Kantor OP Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihal hasil koordinasi mengenai pembayaran penggunaan perairan PT. DPS antara kantor OP Tg. Perak dengan Kanwil Perbendaharaan Jawa Timur;
- z) Tanggal 31 Oktober 2017  
Berita Acara rekonsiliasi piutang PNBP penggunaan perairan PT. DPS per 31 Oktober 2017;
- aa) Tanggal 27 Nopember 2017  
Surat tagihan pembayaran penggunaan perairan :
  - periode tahun 2015 sebesar Rp.359.391.730 jatuh tempo tanggal 22 Desember 2017
  - periode tahun 2016 sebesar Rp. 448.698.162 jatuh tempo tanggal 21 Desember 2017
  - periode tahun 2017 sebesar Rp.368.088.774 jatuh tempo tanggal 19 Desember 2017;
- bb) Tanggal 27 Desember 2017  
Surat tagihan pembayaran penggunaan perairan :
  - periode tahun 2015 sebesar Rp.366.579.564 jatuh tempo tanggal 21 Januari 2018
  - periode tahun 2016 sebesar Rp. 457.672.125 jatuh tempo tanggal 20 Januari 2018
  - periode tahun 2017 sebesar Rp.375.450.550 jatuh tempo tanggal 19 Januari 2018'
- cc) Sesuai hasil rapat di Biro Keuangan dan Perlengkapan pada tanggal 4 September 2017 bahwa tindak lanjut ke Kementerian Keuangan tentang permohonan keringanan pembayaran penggunaan perairan akan dilakukan setelah ada ijin operasional PT. DOK dan Perkapalan Surabaya dan untuk tagihan tahun 2017 harus tetap dibayar sambil mengurus surat ijin tersebut; Sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran untuk tagihan TA. 2017 oleh PT. DOK dan Perkapalan Surabaya;
- dd) Pada tanggal 6 Nopember 2018 telah dilaksanakan rapat lanjutan dengan hasil piutang akan tetap dihitung ditambah dengan denda sambil menunggu audit dari BPKP;
- ee) Piutang Macet PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)/PT. DPS. DPS Posisi sd. 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.120.832.253 (periode 2015-2019)
- ff) Tindak Lanjut terhadap piutang PT. DPS tersebut yaitu:
  - (1) Rapat koordinasi antara Kantor OP. Utama Tanjung Perak dengan PT. DPS menghadirkan BPKP Provinsi Jawa Timur, KPKNL dan Biro Keuangan Kemenhub pada tanggal 28 Oktober 2019;
  - (2) Kantor OP Utama Tanjung Perak terkait penghapusan piutang PT. DPS harus ada audit BPKP dan dari Inspektorat Jenderal Kemenhub;
  - (3) PT. DPS menyampaikan bahwa telah mengalami kerugian selama 9 tahun terakhir dan sedang dalam proses restrukturisasi;

- (4) Atas permohonan penghapusan piutang PT. DPS dari BPKP menyampaikan bahwa PT. DPS harus mengajukan ke instansi terkait yang kemudian akan dimintakan audit ke BPKP;
- (5) Biro Keuangan menyampaikan bahwa terkait piutang PT. DPS sesuai PP Nomor 14 tahun 1985 harus melalui BPKP, Inspektorat, KPKNL dan Kemenhub;
- (6) KPKNL menyatakan terkait piutang PT. DPS dapat diselesaikan antara Kantor OP. Utama Tanjung Perak dengan PT. DPS;
- (7) Kantor OP. Utama Tanjung Perak telah melaporkan hasil rapat terakhir pembahasan piutang penggunaan peraira PT. DOK dan Perkapalan Surabaya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Surat Kepala Kantor OP. Utama Tanjung Perak Nomor KU.102/08/12/OP.TPr-19 tanggal 7 November 2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Piutang PNBPT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Perserp) periode 2015-2019, dari surat tersebut belum ada arahan lebih lanjut;
- (8) Kantor OP. Utama Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kepada BPKP Provinsi Jawa Timur agar dapat dilakukan audit secara menyeluruh terkait Laporan Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Dan atas segala biaya yang timbul dari audit tersebut dibebankan kepada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) melalui Surat Kepala Kantor OP. Utama Tanjung Perak Nomor KU. 501/01/09/OP.TPr-2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Audit, dari surat tersebut belum ada balasan.

6) UPP Buli

Piutang macet pada Kantor UPP Buli sebesar Rp.78.042.000,- merupakan piutang dari PT. Pelni (Persero) periode tahun 2005 s.d. 2009 . Piutang ini sesuai dengan PP NO. 14 Tahun 2000. Seharusnya untuk piutang PNBPT sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2000 di catat dan di tagihkan oleh kantor pusat Ditjen Hubla setelah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) antara kantor pusat, UPT dan kantor pusat PT. Pelni (Persero). Untuk piutang PT. Pelni (Persero) pada UPP Buli tidak termasuk dalam coklit tersebut sehingga piutang nya tetap tercatat di UPT yang bersangkutan. Ditjen Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat kepada Kepala Kantor UPP Buli Nomor KU. 201/1/4/DJPL-17 tanggal 2 Pebruari 2017 perihal Piutang PNBPT. PELNI (Persero) yang meminta kepada UPP Buli untuk segera menyampaikan aksi lanjut atau langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

**7. Piutang Lainnya**

Terdapat Piutang Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp2.143.260.222 dengan rincian sebagai berikut:

- a. KSOP Patimban Rp. 2.055.900.220,- (Lancar)  
Piutang Lainnya KSOP Patimban berupa Bank Garansi yang telah dicairkan pada Januari TA. 2022 dengan NTPN F4FDC7QLU6380QP1 senilai Rp1.986.277.040,- dan NTPN 4731B2G4V6KTIT3Q senilai Rp69.623.180,-
- b. KSOP Kuala Mendahara Rp. 87.360.000,- (Lancar)  
Piutang Lainnya KSOP Kuala Mendahara berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kuala Mendahara senilai Rp174.720.000,-. Pada Tanggal 31 Desember 2021, nilai tersebut telah berkurang menjadi Rp87.360.000 dikarenakan telah terdapat pembayaran oleh Pihak Ketiga pada tanggal 23-09-2021 dengan NTPN 22F7F61QU8CF5EPM senilai Rp43.680.000,- dan pada tanggal 01-11-2021 dengan NTPN A4AF52G4UU65K8A4 senilai Rp43.680.000,-

**8. Piutang BLU**

Total Piutang BLU Ditjen Hubla berada pada satker BKKP dengan periode bulan Desember TA. 2021 sebesar Rp63.035.000,- adalah sebagai berikut:

- a. Lancar Rp. 58.515.000,-
- b. Kurang lancar Rp. 4.520.000,-

## 9. Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian

Terdapat temuan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp9.397.009.139 dengan rincian sebagai berikut:

a. KSOP Palembang	Rp. 7.371.407.551,- (Lancar)
b. KSOP Panjang	Rp. 2.500.000,- (Lancar)
c. UPP Lapuko	Rp. 1.255.216.137,- (Lancar)
d. UPP Raja Ampat	Rp. 41.305.209,- (Kurang Lancar)
e. KSOP Kepulauan Seribu	Rp. 349.326.142,- (Kurang Lancar)
f. UPP Amahai	Rp. 112.500.000,- (Macet)
g. UPP Pomako	Rp. 180.754.100,- (Macet)
h. KSOP Cirebon	Rp. 169.000.000,- (Macet)

## 10. Konsesi

### a. Dasar Hukum Konsesi:

- 1) PP Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 2) PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 tentang tata cara penerimaan, penyeteroran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### b. Pengertian Konsesi

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, disebutkan bahwa:

- 1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
- 2) Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

### c. Mekanisme Konsesi

- 1) Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dengan Pendapatan Konsesi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi;
- 2) Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015.
- 3) Kegiatan Pengusahaan adalah Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- 4) Area Konsesi adalah wilayah di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) daratan yang eksisting dikuasai oleh BUP yang dibuktikan dengan sertifikat, atau telah tercatat sebagai aset BUP, dan bagian perairan yang digunakan untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air sebagai fasilitas Kegiatan Pengusahaan pada masing-masing pelabuhan;

- 5) Pendapatan Konsesi adalah Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian konsesi kepada BUP;
- 6) Ruang Lingkup perjanjian konsesi adalah Pemberian Hak kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Area Konsesi pada pelabuhan yang diusahakan BUP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015;
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, bahwa *consession fee* sekurang-kurangnya sebesar 2,5% dari pendapatan bruto (Pasal 39).
- 8) Jenis-jenis jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021 sebagai berikut:
  - a) Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Dermaga untuk bertambat
  - b) Penyediaan dan/atau Pelayanan Pengisian Bahan Bakar dan Pelayanan Air Bersih
  - c) Penyediaan dan/atau Pelayanan Fasilitas Naik Turun Penumpang dan/ atau Kendaraan
  - d) Penyediaan dan / atau Pelayanan Jasa Dermaga untuk Pelayanan Bongkar Muat Barang dan Petikemas
  - e) Penyediaan dan / atau Pelayanan Jasa Gudang dan Tempat Penimbunan Barang, Alat Bongkar Muat dan Peralatan Pelabuhan
  - f) Penyediaan dan / atau Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas, Curah Air, Curah Kering, dan Roro
  - g) Penyediaan dan / atau Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang
  - h) Penyediaan dan / atau Pelayanan Pusat Distribusi dan Konsolidasi Barang
  - i) Penyediaan dan / atau Pelayanan Jasa Penundaan Kapal
- 9) Kepala Otoritas Pelabuhan Utama melakukan koordinasi terhadap—pelaksanaan konsesi antara Kepala KSOP dengan General Manager Cabang PT. Pelindo masing-masing serta berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan konsesi tersebut;
- 10) Rekonsiliasi PNBPNP hasil konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) dilakukan tiap bulan di tempat masing-masing kantor penyelenggara pelabuhan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Bagian Hukum dan KSLN; Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya;
- 11) Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran termin konsesi untuk periode triwulan di tempat masing-masing Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya pada tiap periode triwulannya (bulan pertama pada triwulan selanjutnya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dengan melibatkan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut yang dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Bagian Keuangan dan Bagian Hukum dan KSLN;
- 12) Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam perjanjian, maka wajib dilaksanakan perubahan perjanjian (*addendum*) yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
- 13) Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBPNP hasil konsesi adalah 1 (satu) tahun takwim anggaran;
- 14) Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun takwim, maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya dimulai dari awal

- perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut. Periode triwulan selanjutnya sesuai bulan takwim anggaran yaitu Triwulan I yaitu 1 Januari s.d. 31 Maret, Triwulan II yaitu 1 April s.d. 30 Juni, Triwulan III yaitu 1 Juli s.d. 30 September dan Triwulan IV yaitu 1 Oktober s.d. 31 Desember. Perubahan periode ini akan dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) Perjanjian Konsesi yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
- 15) Pembayaran PNPB hasil Konsesi dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya;
  - 16) Perhitungan PNPB hasil konsesi selama 1 (satu) tahun berdasarkan pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya;
  - 17) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil audit oleh Akuntan Publik maka akan diperhitungkan kembali pada triwulan berikutnya;
  - 18) Konsesi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas konsesi Existing dan Konsesi Non-Existing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama UPT / Satker	Nama BUP	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
<b>KONSESI EXISTING</b>					
1	OP UTAMA BELAWAN	Pelindo I	HK.107/1/2/OP.BLW-20	9 Nopember 2015	30
2	OP UTAMA TANJUNG PRIOK	Pelindo II	HK.107/1/7/OP.TPK-15	11 Nopember 2015	50
3	OP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo III	HK.107/01/12/OP.TP-15	9 Nopember 2015	30
4	OP UTAMA MAKASSAR	Pelindo IV	HK. 107/07/01/OP.MKS-15	9 Nopember 2015	30
<b>KONSESI NON EXISTING</b>					
1	KSOP KUALA TANJUNG	Pelindo I - Terminal Curah Cair Kuala Tanjung	HK.107/1/1/KSOP.KTG-15	23 Januari 2015	69
2	OP UTAMA TANJUNG PRIOK	Pelindo II - Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok	PP.001/1/1/OP.TPK-12	31 Agustus 2012	70
3	OP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo III - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong - TTL	HK.107/01/06/OP.TPR-15	19 Mei 2015	72
4	OP UTAMA TANJUNG PERAK	Pelindo III - Alur Pelayaran Barat Surabaya - APBS	HK.107/01/05/OP.TPR-14	8 Mei 2014	25
5	OP UTAMA MAKASSAR	Pelindo IV - Terminal Makassar NewPort	HK.107/02/01/OP.MKS-15	19 Mei 2015	70
6	KSOP MARUNDA	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16	29 Nopember 2016	70
7	KSOP MARUNDA	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)	HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17	24 Mei 2017	65
8	KSOP TALANG DUKUH	PT. Wahyu Samudera Indah (WSI)	PP.001/1/16/KSOP.TLD.2016	27 Oktober 2016	66
9	KSOP PONTIANAK	PT. Indo Container Sarana (ICS)	PP.008/1/6/KSOP.PTK/18	14 Maret 2018	61
10	KSOP BANTEN	PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)	HK.107/2/6/KSOP.Btn-2020	23 Juli 2020	73
11	KSOP BANTEN	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	HK.107/2/2/KSOP.Bln-16	14 Nopember 2016	75
12	UPP BRONDONG	PT. Lamongan Intergrated Shorbase (LIS)	HK.201/1/14/UPP.BRG-2020	25 Juli 2020	72
13	KSOP BANJARMASIN	PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)	PP.008/01/01/KSOP.BJM.18	15 September 2015	49
14	KSOP SAMARINDA	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	AL.302/3/5/KSOP.SMD-2020	17 Juni 2020	37
15	KSOP PROBOLINGGO	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	PP.002/1/17/KSOP-Pbl-17	21 Desember 2017	37
16	KSOP GRESIK	PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	HK.107/01/10/Ksop.Gsk-2017	15 Desember 2017	76
17	KSOP GRESIK	PT. Siam Maspion (SM)	AL.301/02/19/Ksop.Gsk-2020	8 Agustus 2020	43
18	KSOP KOTABARU-BATU LICIN	PT. Swangi Indah (SI)	KL.003/01/14KSOP.KBBL-19	4 Oktober 2019	21

Jumlah Pendapatan Konsesi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp540.555.373.773,00 dan Rp491.302.716.832,00. Untuk Pendapatan Konsesi BUP Existing Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp445.441.939.495,00 dan Pendapatan Konsesi BUP Non-Existing sebesar Rp95.113.113.278,00. Berikut adalah Rincian Penerimaan Konsesi TA. 2021 per UPT berdasarkan Penyetoran Simponi per 31 Desember 2021:

<b>NAMA UPT - BUP</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>KONSESI WILAYAH KOORDINATOR OP UTAMA BELAWAN</b>		
<b>KSOP DUMAI</b>	<b>7.808.578.829</b>	
<b>Pelindo I cabang Dumai</b>	<b>7.808.578.829</b>	
2020 - Tw IV	1.537.754.604	
2021 - Tw I	1.396.465.359	
2021 - Tw II	1.782.175.287	
2021 - Tw III	2.058.396.695	
Periode lainnya	1.033.786.884	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP GUNUNG SITOLI</b>	<b>193.880.309</b>	
<b>Pelindo I cabang Gunung Sitoli</b>	<b>193.880.309</b>	
2020 - Tw IV	47.491.682	
2021 - Tw I	46.556.420	
2021 - Tw II	44.459.510	
2021 - Tw III	55.372.697	
<b>KSOP KIJANG</b>	<b>446.744.398</b>	
<b>Pelindo I cabang Tanjung Pinang</b>	<b>446.744.398</b>	
2020 - Tw IV	112.339.312	
2021 - Tw I	101.087.949	
2021 - Tw II	122.226.079	
2021 - Tw III	107.427.337	
Periode lainnya	3.663.721	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP KUALA CINAKU</b>	<b>14.956.832</b>	
<b>Pelindo I cabang Rengat</b>	<b>14.956.832</b>	
2020 - Tw IV	5.530.155	
2021 - Tw I	4.199.182	
2021 - Tw II	2.123.019	
2021 - Tw III	3.104.476	
<b>KSOP KUALA LANGSA</b>	<b>1.711.883</b>	
<b>Pelindo I cabang Lhokseumawe</b>	<b>1.711.883</b>	
2020 - Tw IV	575.483	
2021 - Tw I	8.776	
2021 - Tw II	717.356	
2021 - Tw III	410.268	
<b>KSOP KUALA TANJUNG</b>	<b>1.835.523.151</b>	
<b>Pelindo I - Terminal Curah Cair Kuala Tanjung - Non Existing</b>	<b>1.830.393.442</b>	
2020 - Tw IV	410.290.964	
2021 - Tw I	450.041.756	
2021 - Tw II	423.272.559	

2021 - Tw III	546.788.163	
<b>Pelindo I cabang Kuala Tanjung</b>	<b>5.129.709</b>	
2021 - Tw II	194.471	
2021 - Tw III	2.235.048	
Periode lainnya	2.700.190	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP LHOKSEUMAWE</b>	<b>199.687.422</b>	
<b>Pelindo I cabang Lhokseumawe</b>	<b>199.687.422</b>	
2020 - Tw IV	30.047.950	
2021 - Tw I	57.456.651	
2021 - Tw II	36.092.772	
2021 - Tw III	56.485.058	
Periode lainnya	19.604.991	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP MALAHAYATI</b>	<b>300.106.238</b>	
<b>Pelindo I cabang Malahayati</b>	<b>300.106.238</b>	
2020 - Tw IV	85.910.624	
2021 - Tw I	101.040.232	
2021 - Tw II	46.853.075	
2021 - Tw III	66.302.307	
<b>KSOP MEULABOH</b>	<b>2.659.686</b>	
<b>Pelindo I cabang Malahayati</b>	<b>2.659.686</b>	
2020 - Tw IV	560.268	
2021 - Tw I	1.020.754	
2021 - Tw II	476.050	
2021 - Tw III	602.614	
<b>KSOP PEKANBARU</b>	<b>1.960.477.598</b>	
<b>Pelindo I cabang Pekan Baru</b>	<b>1.960.477.598</b>	
2020 - Tw IV	508.021.075	
2021 - Tw I	491.499.888	
2021 - Tw II	488.345.772	
2021 - Tw III	464.729.140	
Periode lainnya	7.881.723	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP SELAT PANJANG</b>	<b>26.786.118</b>	
<b>Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun</b>	<b>26.786.118</b>	
2020 - Tw IV	6.719.020	
2021 - Tw I	7.377.157	
2021 - Tw II	6.875.223	
2021 - Tw III	5.293.843	
Periode lainnya	520.875	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP SIBOLGA</b>	<b>543.143.270</b>	
<b>Pelindo I cabang Sibolga</b>	<b>543.143.270</b>	
2020 - Tw IV	175.433.044	
2021 - Tw I	140.549.013	
2021 - Tw II	97.710.287	
2021 - Tw III	126.102.248	
Periode lainnya	3.348.678	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP TANJUNG BALAI ASAHAN</b>	<b>50.208.096</b>	

<b>Pelindo I cabang Tanjung Balai Asahan</b>	<b>50.208.096</b>	
2020 - Tw IV	10.030.799	
2021 - Tw I	9.559.413	
2021 - Tw II	13.627.813	
2021 - Tw III	16.990.071	
<b>KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN</b>	<b>52.624.589</b>	
<b>Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun</b>	<b>52.624.589</b>	
2020 - Tw IV	13.300.216	
2021 - Tw I	14.035.927	
2021 - Tw II	11.524.948	
2021 - Tw III	11.102.551	
Periode lainnya	2.660.947	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP TANJUNG PINANG</b>	<b>227.701.534</b>	
<b>Pelindo I cabang Tanjung Pinang</b>	<b>227.701.534</b>	
2020 - Tw IV	72.734.853	
2021 - Tw I	52.330.591	
2021 - Tw II	63.622.294	
2021 - Tw III	38.112.668	
Periode lainnya	901.128	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP TEMBILAHAN</b>	<b>17.526.484</b>	
<b>Pelindo I cabang Tembilahan</b>	<b>17.526.484</b>	
2020 - Tw IV	4.135.968	
2021 - Tw I	3.764.586	
2021 - Tw II	4.554.475	
2021 - Tw III	5.068.131	
Periode lainnya	3.324	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>OP UTAMA BELAWAN</b>	<b>38.130.329.716</b>	
<b>Pelindo I - Cabang Belawan</b>	<b>7.404.237.175</b>	
2020 - Tw IV	1.520.843.692	
2021 - Tw I	1.658.292.556	
2021 - Tw II	1.853.709.590	
2021 - Tw III	2.292.773.833	
Periode lainnya	78.617.504	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>Pelindo I - PT. Prima Terminal Petikemas - Non Existing</b>	<b>831.816.619</b>	
2021 - Tw III	831.816.619	Pembayaran periode April - September 2021
<b>Pelindo I - TPK Domestik</b>	<b>11.684.301.832</b>	
2020 - Tw IV	2.924.647.208	
2021 - Tw I	2.902.175.393	
2021 - Tw II	2.787.830.242	
2021 - Tw III	3.057.297.458	
Periode lainnya	12.351.531	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>Pelindo I - TPK Internasional</b>	<b>18.209.974.090</b>	
2020 - Tw IV	4.575.343.669	
2021 - Tw I	4.616.901.977	

2021 - Tw II	4.543.993.541	
2021 - Tw III	4.464.718.647	
Periode lainnya	9.016.256	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>JUMLAH</b>	<b>51.812.646.153</b>	
<b>KONSESI WILAYAH KOORDINATOR OP UTAMA TANJUNG PRIOK</b>		
<b>KSOP BANTEN</b>	<b>20.923.359.829</b>	
<b>Pelindo II cabang Banten</b>	<b>3.641.664.009</b>	
2020 - Tw IV	655.127.331	
2021 - Tw I	1.247.711.130	
2021 - Tw II	1.021.679.639	
2021 - Tw III	717.145.909	
<b>PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)</b>	<b>707.708.935</b>	
2020 - Tw IV	172.651.663	
2021 - Tw I	183.278.547	
2021 - Tw II	174.562.000	
2021 - Tw III	177.216.725	
<b>PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)</b>	<b>16.573.986.885</b>	
2021 - Tw I	11.166.928.383	
2021 - Tw II	2.226.329.500	
2021 - Tw III	3.180.729.002	
<b>KSOP CIREBON</b>	<b>1.994.849.438</b>	
<b>Pelindo II cabang Cirebon</b>	<b>1.994.849.438</b>	
2020 - Tw IV	578.992.162	
2021 - Tw I	380.720.147	
2021 - Tw II	553.702.027	
2021 - Tw III	480.415.309	
Periode lainnya	1.019.793	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP KETAPANG</b>	<b>33.343.897</b>	
<b>Pelindo II cabang Pontianak</b>	<b>33.343.897</b>	
2020 - Tw IV	10.563.381	
2021 - Tw I	8.941.807	
2021 - Tw II	7.282.752	
2021 - Tw III	6.555.957	
<b>KSOP KUALA TUNGKAL</b>	<b>681.790</b>	
<b>Pelindo II cabang Jambi</b>	<b>681.790</b>	
2020 - Tw IV	104.572	
2021 - Tw I	331.927	
2021 - Tw II	166.301	
2021 - Tw III	78.990	
<b>KSOP MARUNDA</b>	<b>9.986.888.930</b>	
<b>PT. Karya Citra Nusantara (KCN)</b>	<b>5.215.752.950</b>	
2020 - Tw IV	358.397.850	
2021 - Tw I	1.220.477.550	
2021 - Tw II	1.373.289.650	

2021 - Tw III	905.317.550	
2021 - Tw IV	1.358.270.350	
<b>PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)</b>	<b>4.771.135.980</b>	
2020 - Tw IV	1.162.270.641	
2021 - Tw I	1.176.749.170	
2021 - Tw II	1.181.361.838	
2021 - Tw III	1.250.754.331	
<b>KSOP MUARA SABAK</b>	<b>6.305.762</b>	
<b>Pelindo II cabang Jambi</b>	<b>6.305.762</b>	
2020 - Tw IV	873.552	
2021 - Tw I	1.366.308	
2021 - Tw II	2.239.429	
2021 - Tw III	1.826.473	
<b>KSOP MUNTOK</b>	<b>886.685</b>	
<b>Pelindo II cabang Pangkal Balam</b>	<b>886.685</b>	
2020 - Tw IV	636.485	
2021 - Tw II	174.825	
2021 - Tw III	75.375	
<b>KSOP PALEMBANG</b>	<b>5.808.687.826</b>	
<b>Pelindo II cabang Jambi</b>	<b>5.808.687.826</b>	
2020 - Tw IV	1.543.095.611	
2021 - Tw I	1.308.547.695	
2021 - Tw II	1.245.870.301	
2021 - Tw III	1.297.516.367	
Periode lainnya	413.657.852	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2018 & 2019 (Rp. 403.577.774) ; dan Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020 (Rp.10.080.078)
<b>KSOP PANGKAL BALAM</b>	<b>824.485.842</b>	
<b>Pelindo II cabang Pangkal Balam</b>	<b>824.485.842</b>	
2020 - Tw IV	211.000.427	
2021 - Tw I	181.971.410	
2021 - Tw II	204.555.890	
2021 - Tw III	226.958.115	
<b>KSOP PANJANG</b>	<b>9.212.994.697</b>	
<b>Pelindo II cabang Panjang</b>	<b>9.212.994.697</b>	
2020 - Tw IV	2.041.263.865	
2021 - Tw I	1.960.816.978	
2021 - Tw II	1.865.216.139	
2021 - Tw III	2.054.118.572	
Periode lainnya	1.291.579.143	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2018 - 2019 - 2020
<b>KSOP PONTIANAK</b>	<b>8.220.813.437</b>	
<b>Pelindo II cabang Pontianak</b>	<b>6.548.237.030</b>	
2020 - Tw IV	1.753.540.354	
2021 - Tw I	1.605.435.870	
2021 - Tw II	1.672.274.316	
2021 - Tw III	1.516.986.490	

<b>PT. Indo Container Sarana (ICS)</b>	<b>1.672.576.407</b>	
2020 - Tw IV	465.470.324	
2021 - Tw I	429.738.642	
2021 - Tw II	479.017.440	
2021 - Tw III	298.350.001	
<b>KSOP PULAU BAAI</b>	<b>3.922.441.690</b>	
<b>Pelindo II cabang Bengkulu</b>	<b>3.922.441.690</b>	
2020 - Tw IV	1.014.986.038	
2021 - Tw I	958.569.163	
2021 - Tw II	964.534.744	
2021 - Tw III	947.693.679	
Periode lainnya	36.658.066	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2018 (Rp.16.575.970) ; Tahun 2019 (Rp.17.380.191) ; Tahun 2020 (2.701.905)
<b>KSOP SINTETE</b>	<b>15.713.634</b>	
<b>Pelindo II cabang Pontianak</b>	<b>15.713.634</b>	
2020 - Tw IV	4.803.250	
2021 - Tw I	3.499.701	
2021 - Tw II	4.036.794	
2021 - Tw III	3.373.889	
<b>KSOP SUNDA KELAPA</b>	<b>1.144.219.123</b>	
<b>Pelindo II cabang Sunda Kelapa</b>	<b>1.144.219.123</b>	
2020 - Tw IV	304.456.302	
2021 - Tw I	254.448.499	
2021 - Tw II	234.786.490	
2021 - Tw III	348.706.128	
Periode lainnya	1.821.704	Kurang dan Lebih Bayar Tahun 2016, 2017, 2018
<b>KSOP TALANG DUKUH</b>	<b>2.288.063.485</b>	
<b>Pelindo II cabang Jambi</b>	<b>2.288.063.485</b>	
2020 - Tw IV	492.109.559	
2021 - Tw I	504.639.247	
2021 - Tw II	489.242.758	
2021 - Tw III	480.341.715	
Periode lainnya	321.730.206	
<b>KSOP TANJUNG PANDAN</b>	<b>207.941.231</b>	
<b>Pelindo II cabang Tanjung Pandan</b>	<b>207.941.231</b>	
2020 - Tw IV	51.765.770	
2021 - Tw I	47.176.619	
2021 - Tw II	47.915.351	
2021 - Tw III	61.083.491	
<b>KSOP TELUK BAYUR</b>	<b>5.947.573.172</b>	
<b>Pelindo II cabang Teluk Bayur</b>	<b>5.947.573.172</b>	
2020 - Tw IV	1.578.820.380	
2021 - Tw I	1.398.738.556	
2021 - Tw II	1.387.375.281	
2021 - Tw III	1.582.638.955	

<b>OP UTAMA TANJUNG PRIOK</b>	<b>169.527.414.754</b>	
<b>Pelindo II - Terminal Kalibaru - Non Existing</b>	<b>8.779.075.365</b>	
2020 - Tw IV	709.052.422	
2021 - Tw I	2.158.359.414	
2021 - Tw II	2.252.091.554	
2021 - Tw III	1.618.113.674	
2021 - Tw IV	2.041.458.301	
<b>Pelindo II cabang Pelabuhan Tanjung Priok</b>	<b>160.748.339.389</b>	
2020 - Tw IV	38.582.445.134	
2021 - Tw I	37.379.765.005	
2021 - Tw II	41.392.863.387	
2021 - Tw III	42.252.712.149	
Periode lainnya	1.140.553.714	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>JUMLAH</b>	<b>240.066.665.222</b>	
<b>KONSESI WILAYAH KOORDINATOR OP UTAMA TANJUNG PERAK</b>		
<b>KSOP BADAS</b>	<b>202.170.106</b>	
<b>Pelindo III cabang Badas</b>	<b>202.170.106</b>	
2020 - Tw IV	46.952.418	
2021 - Tw I	29.447.710	
2021 - Tw II	56.564.655	
2021 - Tw III	69.205.323	
<b>KSOP BANJARMASIN</b>	<b>14.293.021.052</b>	
<b>Pelindo III cabang Banjarmasin</b>	<b>11.756.609.335</b>	
2020 - Tw IV	2.334.905.251	
2021 - Tw I	2.188.384.527	
2021 - Tw II	2.273.738.088	
2021 - Tw III	2.698.230.777	
2021 - Tw IV	1.591.302.369	
Periode lainnya	670.048.323	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)</b>	<b>2.536.411.717</b>	
2020 - Tw IV	222.428.280	
2021 - Tw I	573.550.666	
2021 - Tw II	666.274.944	
2021 - Tw III	440.635.305	
2021 - Tw IV	633.522.522	
<b>KSOP BENOA</b>	<b>1.091.876.349</b>	
<b>Pelindo III cabang Benoa</b>	<b>1.091.876.349</b>	
2020 - Tw IV	337.991.838	
2021 - Tw I	405.729.454	
2021 - Tw II	198.778.511	
2021 - Tw III	149.376.546	
<b>KSOP BIMA</b>	<b>184.253.770</b>	
<b>Pelindo III cabang Bima</b>	<b>184.253.770</b>	

2020 - Tw IV	43.238.489	
2021 - Tw I	41.873.402	
2021 - Tw II	52.513.609	
2021 - Tw III	46.628.270	
<b>KSOP CELUKAN BAWANG</b>	<b>223.323.125</b>	
<b>Pelindo III cabang Celukan Bawang</b>	<b>223.323.125</b>	
2020 - Tw IV	56.634.623	
2021 - Tw I	54.044.113	
2021 - Tw II	48.815.339	
2021 - Tw III	56.922.675	
Periode lainnya	6.906.375	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP CILACAP</b>	<b>2.838.048.414</b>	
<b>Pelindo III cabang Tanjung Intan</b>	<b>2.838.048.414</b>	
2020 - Tw IV	1.031.140.807	
2021 - Tw I	678.609.238	
2021 - Tw II	604.469.244	
2021 - Tw III	523.829.125	
<b>KSOP ENDE</b>	<b>115.029.542</b>	
<b>Pelindo III cabang Ende</b>	<b>115.029.542</b>	
2020 - Tw IV	26.448.143	
2021 - Tw I	35.882.537	
2021 - Tw II	28.292.049	
2021 - Tw III	24.406.813	
<b>KSOP GRESIK</b>	<b>9.685.214.859</b>	
<b>Pelindo III Cabang Gresik</b>	<b>1.375.672.050</b>	
2020 - Tw IV	120.696.427	
2021 - Tw I	375.626.173	
2021 - Tw II	431.525.958	
2021 - Tw III	442.720.163	
Periode lainnya	5.103.329	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS)</b>	<b>2.202.324.293</b>	
2020 - Tw IV	316.510.531	
2021 - Tw I	618.292.387	
2021 - Tw II	590.508.310	
2021 - Tw III	677.013.065	
<b>PT. Siam Maspion Terminal (SMT)</b>	<b>6.107.218.516</b>	
2020 - Tw IV	1.888.057.994	
2021 - Tw I	1.152.824.539	
2021 - Tw II	1.152.970.252	
2021 - Tw III	720.767.569	
2021 - Tw IV	1.192.598.162	
<b>KSOP KALABAHI</b>	<b>55.640.573</b>	
<b>Pelindo III cabang Kalabahi</b>	<b>55.640.573</b>	
2020 - Tw IV	15.354.472	
2021 - Tw I	12.348.798	
2021 - Tw II	11.622.702	
2021 - Tw III	16.314.601	

<b>KSOP KALIANGET</b>	<b>22.055.923</b>	
<b>Pelindo III cabang Kalianget</b>	<b>22.055.923</b>	
2020 - Tw IV	6.700.980	
2021 - Tw I	4.881.737	
2021 - Tw II	6.062.590	
2021 - Tw III	4.410.616	
<b>KSOP KOTABARU - BATULICIN</b>	<b>2.475.395.192</b>	
<b>Pelindo III cabang Kotabaru</b>	<b>1.670.912.847</b>	
2020 - Tw IV	445.719.383	
2021 - Tw I	393.881.829	
2021 - Tw II	507.999.740	
2021 - Tw III	323.311.895	
<b>PT. Swangi Indah (SI)</b>	<b>643.892.092</b>	
2021 - Tw I	236.435.433	
2021 - Tw II	177.611.733	
2021 - Tw III	225.116.217	
Periode lainnya	4.728.709	Pembayaran Denda Keterlambatan pembayaran Konsesi
<b>Pelindo III cabang Batulicin</b>	<b>160.590.253</b>	
2021 - Tw III	160.590.253	
<b>KSOP KUMAI</b>	<b>1.819.279.943</b>	
<b>Pelindo III cabang Kumai - Pelabuhan Kumai</b>	<b>24.030.695</b>	
2020 - Tw IV	24.030.695	
<b>Pelindo III cabang Kumai - Terminal Bumihardjo</b>	<b>1.795.249.248</b>	
2020 - Tw IV	367.820.288	
2021 - Tw I	483.368.745	
2021 - Tw II	477.412.779	
2021 - Tw III	466.647.436	
<b>KSOP KUPANG</b>	<b>2.104.800.041</b>	
<b>Pelindo III cabang Tenau Kupang</b>	<b>2.104.800.041</b>	
2020 - Tw IV	556.986.268	
2021 - Tw I	466.159.025	
2021 - Tw II	458.563.850	
2021 - Tw III	583.438.272	
Periode lainnya	39.652.626	KSP Fasilitas Pelabuhan yang dibayarkan menggunakan akun konsesi
<b>KSOP LAURENTIUS SAY</b>	<b>256.954.347</b>	
<b>Pelindo III cabang Maumere</b>	<b>256.954.347</b>	
2020 - Tw IV	72.023.155	
2021 - Tw I	64.080.627	
2021 - Tw II	56.666.642	
2021 - Tw III	64.183.923	
<b>KSOP LEMBAR</b>	<b>1.331.021.557</b>	
<b>Pelindo III cabang Lembar</b>	<b>1.331.021.557</b>	
2020 - Tw IV	334.967.089	
2021 - Tw I	335.470.414	

2021 - Tw II	319.439.150	
2021 - Tw III	340.837.711	
Periode lainnya	307.193	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>KSOP PANARUKAN</b>	<b>166.011</b>	
<b>Pelindo III cabang Panarukan</b>	<b>166.011</b>	
2020 - Tw IV	50.420	
2021 - Tw I	29.091	
2021 - Tw II	42.625	
2021 - Tw III	43.875	
<b>KSOP PROBOLINGGO</b>	<b>814.892.211</b>	
<b>Pelindo III Cabang Pasuruan</b>	<b>292.761</b>	
2020 - Tw IV	79.341	
2021 - Tw I	69.704	
2021 - Tw II	74.864	
2021 - Tw III	68.852	
<b>Pelindo III Cabang Tanjung Tembaga</b>	<b>77.264.583</b>	
2020 - Tw IV	13.131.310	
2021 - Tw I	42.244.955	
2021 - Tw II	10.094.110	
2021 - Tw III	11.794.208	
<b>PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)</b>	<b>737.334.867</b>	
2020 - Tw IV	181.169.303	
2021 - Tw I	156.743.599	
2021 - Tw II	248.373.499	
2021 - Tw III	151.048.466	
<b>KSOP PULANG PISAU</b>	<b>40.528.168</b>	
<b>Pelindo III cabang Pulang Pisau</b>	<b>40.528.168</b>	
2020 - Tw IV	12.183.324	
2021 - Tw I	7.066.854	
2021 - Tw II	11.556.197	
2021 - Tw III	9.721.793	
<b>KSOP SAMPIT</b>	<b>1.709.108.733</b>	
<b>Pelindo III cabang Sampit</b>	<b>1.709.108.733</b>	
2020 - Tw IV	377.470.897	
2021 - Tw I	432.265.506	
2021 - Tw II	436.152.107	
2021 - Tw III	463.220.223	
<b>KSOP SUKAMARA</b>	<b>236.463</b>	
<b>Pelindo III cabang Sukamara</b>	<b>236.463</b>	
2020 - Tw IV	51.945	
2021 - Tw I	120.499	
2021 - Tw II	64.019	
<b>KSOP TANJUNG EMAS</b>	<b>25.957.326.733</b>	
<b>Pelindo III cabang Tanjung Emas</b>	<b>2.007.604.395</b>	
2020 - Tw IV	509.712.307	
2021 - Tw I	500.707.704	

2021 - Tw II	512.964.761	
2021 - Tw III	479.207.573	
Periode lainnya	5.012.050	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>Pelindo III TPKS</b>	<b>23.949.722.338</b>	
2020 - Tw IV	5.973.820.806	
2021 - Tw I	6.338.628.204	
2021 - Tw II	5.923.931.314	
2021 - Tw III	5.713.342.014	
<b>KSOP TANJUNG WANGI</b>	<b>650.492.831</b>	
<b>Pelindo III cabang Tanjung Wangi</b>	<b>650.492.831</b>	
2020 - Tw IV	182.530.505	
2021 - Tw I	121.048.196	
2021 - Tw II	162.982.915	
2021 - Tw III	183.931.215	
<b>KSOP TEGAL</b>	<b>36.091.229</b>	
<b>Pelindo III cabang Tegal</b>	<b>36.091.229</b>	
2020 - Tw IV	12.817.782	
2021 - Tw I	9.573.273	
2021 - Tw II	6.746.422	
2021 - Tw III	6.953.752	
<b>KSOP WAINGAPU</b>	<b>214.327.792</b>	
<b>Pelindo III cabang Waingapu</b>	<b>214.327.792</b>	
2020 - Tw IV	38.335.186	
2021 - Tw I	31.663.619	
2021 - Tw II	23.831.065	
2021 - Tw III	99.305.278	
Periode lainnya	21.192.644	Pembayara kurang bayar tahun 2016 dan 2017
<b>OP UTAMA TANJUNG PERAK</b>	<b>128.868.318.808</b>	
<b>Pelindo III - ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA - APBS - Non Existing</b>	<b>8.182.700.762</b>	
2020 - Tw IV	806.032.419	
2021 - Tw I	2.392.620.634	
2021 - Tw II	2.485.384.934	
2021 - Tw III	2.497.487.745	
Periode lainnya	1.175.030	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>Pelindo III - BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA - BJTI</b>	<b>20.154.927.292</b>	
2020 - Tw IV	5.565.037.217	
2021 - Tw I	4.925.287.809	
2021 - Tw II	4.821.409.254	
2021 - Tw III	4.843.193.012	
<b>Pelindo III - TERMINAL MULTI PURPOSE TELUK LAMONG - TTL - Non-Existing</b>	<b>27.084.482.397</b>	
2021 - Tw I	6.319.850.997	
2021 - Tw II	6.393.210.592	
2021 - Tw III	6.547.968.536	

2021 - Tw IV	7.416.010.724	
Periode lainnya	407.441.548	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>Pelindo III - TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA - TPS</b>	<b>56.783.856.823</b>	
2020 - Tw IV	14.263.169.231	
2021 - Tw I	13.804.797.932	
2021 - Tw II	14.314.785.743	
2021 - Tw III	14.401.103.917	
<b>Pelindo III Cabang Tanjung Perak</b>	<b>16.662.351.534</b>	
2020 - Tw IV	3.916.335.467	
2021 - Tw I	3.835.337.000	
2021 - Tw II	4.026.486.444	
2021 - Tw III	4.669.762.996	
Periode lainnya	214.429.627	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2020
<b>UPP BRONDONG</b>	<b>1.564.088.029</b>	
<b>PT. Lamongan Intergrated Shorbase (LIS)</b>	<b>1.564.088.029</b>	
2020 - Tw IV	209.493.071	
2021 - Tw I	397.040.271	
2021 - Tw II	457.856.973	
2021 - Tw III	499.697.714	
<b>JUMLAH</b>	<b>196.553.661.801</b>	
<b>KONSESI WILAYAH KOORDINATOR OP UTAMA MAKASSAR</b>		
<b>KSOP AMBON</b>	<b>2.117.029.884</b>	
<b>Pelindo IV cabang Ambon</b>	<b>2.117.029.884</b>	
2020 - Tw IV	538.546.856	
2021 - Tw I	495.630.148	
2021 - Tw II	482.042.535	
2021 - Tw III	600.810.345	
<b>KSOP BALIKPAPAN</b>	<b>7.559.158.843</b>	
<b>Pelindo IV - PT. Kaltim Karingau Terminal</b>	<b>6.162.999.456</b>	
2020 - Tw IV	1.321.423.802	
2021 - Tw I	1.181.403.642	
2021 - Tw II	3.660.172.012	
<b>Pelindo IV cabang Balikpapan</b>	<b>1.396.159.387</b>	
2020 - Tw IV	801.806.533	
2021 - Tw I	594.352.854	
<b>KSOP BANDANAIRE</b>	<b>14.402.163</b>	
<b>Pelindo IV cabang kawasan Bandanaire</b>	<b>14.402.163</b>	
2020 - Tw IV	3.306.828	
2021 - Tw I	3.706.669	
2021 - Tw II	4.286.225	
2021 - Tw III	3.102.441	
<b>KSOP BIAK</b>	<b>578.374.247</b>	
<b>Pelindo IV cabang Biak</b>	<b>578.374.247</b>	
2020 - Tw IV	165.134.723	

2021 - Tw I	138.323.657	
2021 - Tw II	137.701.460	
2021 - Tw III	137.214.407	
<b>KSOP BITUNG</b>	<b>5.296.511.737</b>	
<b>Pelindo IV - TPK Bitung</b>	<b>4.842.708.163</b>	
2020 - Tw IV	1.206.057.636	
2021 - Tw I	1.143.237.101	
2021 - Tw II	1.084.887.167	
2021 - Tw III	1.408.526.259	
<b>Pelindo IV Cabang Bitung</b>	<b>453.803.574</b>	
2020 - Tw IV	61.079.911	
2021 - Tw I	188.800.071	
2021 - Tw II	203.923.592	
<b>KSOP FAK-FAK</b>	<b>297.742.823</b>	
<b>Pelindo IV cabang Fak-fak</b>	<b>297.742.823</b>	
2020 - Tw IV	88.244.020	
2021 - Tw I	78.938.856	
2021 - Tw II	67.886.734	
2021 - Tw III	62.673.213	
<b>KSOP GORONTALO</b>	<b>675.978.222</b>	
<b>Pelindo IV cabang Gorontalo</b>	<b>675.978.222</b>	
2020 - Tw IV	178.504.287	
2021 - Tw I	167.797.063	
2021 - Tw II	166.243.425	
2021 - Tw III	163.433.447	
<b>KSOP JAYAPURA</b>	<b>1.798.757.257</b>	
<b>Pelindo IV cabang Jayapura</b>	<b>1.798.757.257</b>	
2020 - Tw IV	485.132.056	
2021 - Tw I	446.218.867	
2021 - Tw II	380.269.320	
2021 - Tw III	487.137.014	
<b>KSOP KENDARI</b>	<b>809.607.134</b>	
<b>Pelindo IV cabang Kendari</b>	<b>809.607.134</b>	
2020 - Tw IV	46.371.527	
2021 - Tw I	229.128.218	
2021 - Tw II	191.813.797	
2021 - Tw III	342.293.592	
<b>KSOP MANADO</b>	<b>107.421.233</b>	
<b>Pelindo IV cabang Manado</b>	<b>107.421.233</b>	
2020 - Tw IV	27.414.993	
2021 - Tw I	17.899.203	
2021 - Tw II	26.185.933	
2021 - Tw III	35.921.104	
<b>KSOP MANOKWARI</b>	<b>870.794.193</b>	
<b>Pelindo IV cabang Manokwari</b>	<b>870.794.193</b>	
2020 - Tw IV	188.795.209	

2021 - Tw I	293.084.414	
2021 - Tw II	201.120.243	
2021 - Tw III	187.794.327	
<b>KSOP MERAUKE</b>	<b>892.471.640</b>	
<b>Pelindo IV cabang Merauke</b>	<b>892.471.640</b>	
2020 - Tw IV	222.736.378	
2021 - Tw I	200.380.138	
2021 - Tw II	246.276.824	
2021 - Tw III	223.078.300	
<b>KSOP NUNUKAN</b>	<b>327.564.920</b>	
<b>Pelindo IV cabang Nunukan</b>	<b>327.564.920</b>	
2020 - Tw IV	58.285.894	
2021 - Tw I	80.823.059	
2021 - Tw II	68.771.914	
2021 - Tw III	49.598.741	
2021 - Tw IV	70.085.312	
<b>KSOP PARE-PARE</b>	<b>341.797.051</b>	
<b>Pelindo IV cabang Pare-pare</b>	<b>341.797.051</b>	
2020 - Tw IV	63.987.476	
2021 - Tw I	91.566.619	
2021 - Tw II	89.197.669	
2021 - Tw III	97.045.287	
<b>KSOP SAMARINDA</b>	<b>11.240.088.195</b>	
<b>Pelindo IV cabang Palaran</b>	<b>8.332.105.637</b>	
2020 - Tw IV	1.420.515.935	
2021 - Tw I	1.459.394.721	
2021 - Tw II	1.388.493.340	
2021 - Tw III	1.498.512.972	
Periode lainnya	2.565.188.669	Pembayaran Kurang Bayar Tahun 2019
<b>Pelindo IV Cabang Samarinda</b>	<b>335.212.424</b>	
2020 - Tw IV	83.639.600	
2021 - Tw I	79.583.412	
2021 - Tw II	79.345.012	
2021 - Tw III	92.644.400	
<b>PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)</b>	<b>2.572.770.134</b>	
2020 - Tw IV	265.129.038	
2021 - Tw I	735.404.715	
2021 - Tw II	857.469.169	
2021 - Tw III	714.767.212	
<b>KSOP SORONG</b>	<b>1.358.478.162</b>	
<b>Pelindo IV cabang Sorong</b>	<b>1.358.478.162</b>	
2020 - Tw IV	322.619.262	
2021 - Tw I	335.281.158	
2021 - Tw II	318.008.510	
2021 - Tw III	382.569.232	
<b>KSOP TARAkan</b>	<b>1.214.457.711</b>	
<b>Pelindo IV cabang Tarakan</b>	<b>1.214.457.711</b>	

2020 - Tw IV	296.040.899	
2021 - Tw I	232.057.761	
2021 - Tw II	230.990.901	
2021 - Tw III	253.685.399	
2021 - Tw IV	201.682.751	
<b>KSOP TELUK PALU</b>	<b>1.689.491.075</b>	
<b>Pelindo IV cabang Pantoloan</b>	<b>1.689.491.075</b>	
2020 - Tw IV	492.457.395	
2021 - Tw I	394.828.174	
2021 - Tw II	385.189.523	
2021 - Tw III	417.015.983	
<b>KSOP TERNATE</b>	<b>894.999.267</b>	
<b>Pelindo IV cabang Ternate</b>	<b>894.999.267</b>	
2020 - Tw IV	181.942.791	
2021 - Tw I	215.729.808	
2021 - Tw II	244.938.025	
2021 - Tw III	252.388.643	
<b>KSOP TOLI-TOLI</b>	<b>272.108.546</b>	
<b>Pelindo IV cabang Toli-toli</b>	<b>271.787.546</b>	
2020 - Tw IV	4.239.073	
2021 - Tw I	71.595.135	
2021 - Tw II	72.357.261	
2021 - Tw III	79.480.967	
2021 - Tw IV	44.115.110	
<b>OP UTAMA MAKASSAR</b>	<b>13.765.166.294</b>	
<b>Pelindo IV cabang Makassar</b>	<b>2.523.335.983</b>	
2020 - Tw IV	630.619.305	
2021 - Tw I	908.407.973	
2021 - Tw II	412.421.003	
2021 - Tw III	571.887.702	
<b>Pelindo IV Terminal Makasar New Port - Non Existing</b>	<b>3.099.443.888</b>	
2020 - Tw IV	617.940.967	
2021 - Tw I	827.354.263	
2021 - Tw II	766.429.572	
2021 - Tw III	887.719.086	
<b>Pelindo IV TPK Makasar</b>	<b>8.142.386.423</b>	
2020 - Tw IV	2.412.656.626	
2021 - Tw I	1.940.635.060	
2021 - Tw II	1.841.550.363	
2021 - Tw III	1.947.544.374	
<b>JUMLAH</b>	<b>52.122.400.597</b>	
<b>JUMLAH KONSESI TOTAL TAHUN 2021</b>	<b>540.555.373.773</b>	<b>Sesuai Penyetoran Simponi Tahun 2021</b>

**RINCIAN PENYETORAN KONSESI per BUP TAHUN 2021**

No.	Nama BUP	Jumlah
1	Pelindo I - Cabang Belawan	7.404.237.175
2	Pelindo I - TPK Domestik	11.684.301.832
3	Pelindo I - TPK Internasional	18.209.974.090
4	Pelindo I cabang Dumai	7.808.578.829
5	Pelindo I cabang Gunung Sitoli	193.880.309
6	Pelindo I cabang Kuala Tanjung	5.129.709
7	Pelindo I cabang Lhokseumawe	201.399.305
8	Pelindo I cabang Malahayati	302.765.924
9	Pelindo I cabang Pekan Baru	1.960.477.598
10	Pelindo I cabang Rengat	14.956.832
11	Pelindo I cabang Sibolga	543.143.270
12	Pelindo I cabang Tanjung Balai Asahan	50.208.096
13	Pelindo I cabang Tanjung Balai Karimun	79.410.707
14	Pelindo I cabang Tanjung Pinang	674.445.932
15	Pelindo I cabang Tembilahan	17.526.484
16	Pelindo II cabang Banten	3.641.664.009
17	Pelindo II cabang Bengkulu	3.922.441.690
18	Pelindo II cabang Cirebon	1.994.849.438
19	Pelindo II cabang Jambi	8.103.738.863
20	Pelindo II cabang Pangkal Balam	825.372.527
21	Pelindo II cabang Panjang	9.212.994.697
22	Pelindo II cabang Pelabuhan Tanjung Priok	160.748.339.389
23	Pelindo II cabang Pontianak	6.597.294.561
24	Pelindo II cabang Sunda Kelapa	1.144.219.123
25	Pelindo II cabang Tanjung Pandan	207.941.231
26	Pelindo II cabang Teluk Bayur	5.947.573.172
27	Pelindo III - BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA - BJTI	20.154.927.292
28	Pelindo III Cabang Gresik	1.375.672.050
29	Pelindo III - TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA - TPS	56.783.856.823
30	Pelindo III cabang Badas	202.170.106
31	Pelindo III cabang Banjarmasin	11.756.609.335
32	Pelindo III cabang Bena	1.091.876.349
33	Pelindo III cabang Bima	184.253.770
34	Pelindo III cabang Celukan Bawang	223.323.125
35	Pelindo III cabang Ende	115.029.542
36	Pelindo III cabang Kalabahi	55.640.573

37	Pelindo III cabang Kalianget	22.055.923
38	Pelindo III cabang Kotabaru	1.670.912.847
39	Pelindo III cabang Kumai - Pelabuhan Kumai	24.030.695
40	Pelindo III cabang Kumai - Terminal Bumihardjo	1.795.249.248
41	Pelindo III cabang Lembar	1.331.021.557
42	Pelindo III cabang Maumere	256.954.347
43	Pelindo III cabang Panarukan	166.011
44	Pelindo III Cabang Pasuruan	292.761
45	Pelindo III cabang Pulang Pisau	40.528.168
46	Pelindo III cabang Sampit	1.709.108.733
47	Pelindo III cabang Sukamara	236.463
48	Pelindo III Cabang Tanjung Perak	16.662.351.534
49	Pelindo III cabang Tanjung Emas	2.007.604.395
50	Pelindo III cabang Tanjung Intan	2.838.048.414
51	Pelindo III Cabang Tanjung Tembaga	77.264.583
52	Pelindo III cabang Tanjung Wangi	650.492.831
53	Pelindo III cabang Tegal	36.091.229
54	Pelindo III cabang Tenau Kupang	2.104.800.041
55	Pelindo III cabang Waingapu	214.327.792
56	Pelindo III TPKS	23.949.722.338
82	Pelindo III cabang Batulicin	160.590.253
57	Pelindo IV - PT. Kaltim Karingau Terminal	6.162.999.456
58	Pelindo IV - TPK Bitung	4.842.708.163
59	Pelindo IV cabang Ambon	2.117.029.884
60	Pelindo IV cabang Balikpapan	1.396.159.387
61	Pelindo IV cabang Biak	578.374.247
62	Pelindo IV Cabang Bitung	453.803.574
63	Pelindo IV cabang Fak-fak	297.742.823
64	Pelindo IV cabang Gorontalo	675.978.222
65	Pelindo IV cabang Jayapura	1.798.757.257
66	Pelindo IV cabang kawasan Bandanaire	14.402.163
67	Pelindo IV cabang Kendari	809.607.134
68	Pelindo IV cabang Makassar	2.523.335.983
69	Pelindo IV cabang Manado	107.421.233
70	Pelindo IV cabang Manokwari	870.794.193
71	Pelindo IV cabang Merauke	892.471.640
72	Pelindo IV cabang Nunukan	327.564.920
73	Pelindo IV cabang Palaran	8.332.105.637

74	Pelindo IV cabang Pantoloan	1.689.491.075
75	Pelindo IV cabang Pare-pare	341.797.051
76	Pelindo IV Cabang Samarinda	335.212.424
77	Pelindo IV cabang Sorong	1.358.478.162
78	Pelindo IV cabang Tarakan	1.214.457.711
79	Pelindo IV cabang Ternate	894.999.267
80	Pelindo IV cabang Toli-toli	271.787.546
81	Pelindo IV TPK Makasar	8.142.386.423
	<b>JUMLAH KONSESI EXISTING</b>	<b>445.441.939.495</b>
No.	<b>Nama BUP</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pelindo I - PT. Prima Terminal Petikemas - Non Existing	831.816.619
2	Pelindo I - Terminal Curah Cair Kuala Tanjung - Non Existing	1.830.393.442
3	Pelindo II - Terminal Kalibaru - Non Existing	8.779.075.365
4	Pelindo III - ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA - APBS - Non Existing	8.182.700.762
5	Pelindo III - TERMINAL MULTI PURPOSE TELUK LAMONG - TTL - Non Existing	27.084.482.397
6	Pelindo IV Terminal Makasar New Port - Non Existing	3.099.443.888
7	PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ)	707.708.935
8	PT. Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	2.202.324.293
9	PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN)	737.334.867
10	PT. Indo Container Sarana (ICS)	1.672.576.407
11	PT. Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT)	2.536.411.717
12	PT. Karya Citra Nusantara (KCN)	5.215.752.950
13	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	16.573.986.885
14	PT. Lamongan Intergrated Shorbase (LIS)	1.564.088.029
15	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)	4.771.135.980
16	PT. Sarana Abadi Lestari (SAL)	2.572.776.134
17	PT. Siam Maspion Terminal (SMT)	6.107.218.516
18	PT. Swangi Indah (SI)	643.892.092
	<b>JUMLAH KONSESI NON EXISTING</b>	<b>95.113.119.278</b>
	Salah akun (KSOP Toli Toli) seharusnya bukan Penerimaan Konsesi - belum di revisi	<b>321.000</b>
	JUMLAH KONSESI EXISTING	445.441.939.495
	JUMLAH KONSESI NON-EXISTING	95.113.119.278
	SALAH AKUN	321.000
	<b>JUMLAH KONSESI SESUAI PENYETORAN SIMPONI</b>	<b>540.555.379.773</b>

## **B. Kerjasama Pemanfaatan BMN**

### **1. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan;
- e. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kementerian Perhubungan RI cq. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete

### **2. MEKANISME PELAKSANAAN KSP**

- a. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Kerjasama Pemanfaatan BMN dibedakan dalam 4 (empat) Klasifikasi yaitu:
  - 1) Klasifikasi 1 Berupa:
    - a) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ; dan/ atau
    - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 2) Klasifikasi 2 berupa:
    - a) tanah dan/ atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;dan/atau
    - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) Klasifikasi 3 berupa:
    - a) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 4) Klasifikasi 4 berupa:
  - a) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan/atau
  - b) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Persetujuan/penolakan usulan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Klasifikasi I); Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi (Klasifikasi II) ; Kakanwil DJKN (Klasifikasi III) dan Kepala KPKNL (Klasifikasi IV).
  - 2) Kepala Kantor/UPT/ Satker/ KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen (Klasifikasi I) ; tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan (Klasifikasi II-IV);
  - 3) Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/ Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  - 4) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen (Klasifikasi I&II); Kakanwil DJKN (Klasifikasi III); KPKNL terkait (Klasifikasi IV)
  - 5) Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama (Klasifikasi III);
  - 6) Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan (Klasifikasi IV);
  - 7) Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait; (Klasifikasi I & 2)
  - 8) Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Klasifikasi I); Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Klasifikasi II)
  - 9) Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Klasifikasi I);
  - 10) Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan

- secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Klasifikasi II);
- d. Kerjasama pemanfaatan BMN ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan BMN yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
    - 2) Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan merupakan BMN sejak awal pengadaannya;
    - 3) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun untuk KSP dan 50 (lima puluh) tahun untuk KSPI sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang;
    - 4) Penerimaan negara yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara oleh mitra kerjasama pemanfaatan BMN selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari:
      - a) kontribusi tetap; dan
      - b) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan BMN.
    - 5) Kewenangan Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara) dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan, yaitu:
      - a) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;
      - b) Penetapan besaran kontribusi tetap atas BMN selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.
  - e. Kerjasama pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah dilaksanakan pada KSOP Probolinggo, KSOP Sintete, KSOP Labuan Bajo, dan KSOP Anggrek.
  - f. Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Probolinggo dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan
    - 1) Obyek KSP BMN berupa tanah hasil reklamasi seluas 89.000 m<sup>2</sup> dan dermaga seluas 24.161,5 m<sup>2</sup> yang terletak di Pelabuhan Tembaga Baru, Jalan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Mayangan, Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp446.583.876.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
    - 2) Mitra KSP adalah PT Delta Artha Bahari Nusantara sebagaimana ditetapkan Pengguna Barang yang merupakan operator Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
    - 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
    - 4) Kontribusi kepada negara berupa:
      - a) kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55% pertahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya; dan Kontribusi Tetap untuk tahun kedua adalah sebesar Rp4.553.879.380,- (Empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sebagai berikut:

- i. Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. DABN Tahun ke 5 sebesar Rp2.551.791.312,- NTPN : 4CA398N3DNHUAC1D Tanggal 24-03-2021 dan Kontribusi Tetap dari KSP Tahun ke 5 sebesar Rp2.667.897.817,- NTPN 124703C IEO9DUA4H Tanggal 9 Mei 2021  
Denda KSP Tetap Tahun ke 5 Tahun 2021 sebesar Rp160.073.869,- NTPN C2FE61JNF34SFJ57 Tanggal 25 Mei 2021.
    - ii. Sharing Profit dari Pendapatan Bruto KSP PT. DABN sebesar Rp2.254.494.188,- NTPN D3FD77QLTSVO5O1E5 Tanggal 29-03-2021.
  - b) pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16% dari penjualan (revenue) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp42.300.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah). Penjualan (revenue) tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit.
- 5) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 6) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 8) Nilai Tanah Hasil Reklamasi NUP 1 pada Neraca berbeda dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari hasil revaluasi atau penilaian kembali yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai BA Reval No. BAR-030/REV/WKN.10/KNL.04/2019. Nilai Aset Tanah Hasil Reklamasi setelah Reval merupakan nilai wajar akhir dengan nilai sebesar Rp101.104.000.000,-. Nilai pada Neraca SIMAK BMN sebesar Rp101.127.714.000,- merupakan nilai wajar akhir ditambah dengan pengembangan melalui KDP berupa pensertifikatan tanah senilai Rp23.714.000,-.
- 9) Nilai Dermaga NUP 2 pada Neraca berbeda dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP. Perbedaan tersebut merupakan akibat dari hasil revaluasi atau penilaian kembali yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai BA Reval No. BAR-030/REV/WKN.10/KNL.04/2019. Nilai Aset Dermaga setelah Reval merupakan nilai wajar akhir dengan nilai sebesar Rp290.932.962.000,-.
- g. Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Sintete dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga

Pada Kementerian Perhubungan RI cq. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete;

- 1) Obyek KSP BMN berupa bangunan dermaga seluas 280 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Pelabuhan No.1 Ds. Sintete, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai wajar sebesar Rp.8.115.306.000,00 (Delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- 2) Mitra KSP adalah PT. Pelindo II Cabang Pontianak.
- 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- 4) Kontribusi kepada negara berupa:
  - a) Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,7% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,81% per tahun dari kontribusi tetap tahun pertama dan Kontribusi Tetap untuk tahun pertama adalah sebesar Rp88,681.112,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) Kontribusi Tetap dari KSP dengan PT. IPC Pelindo II Cabang Pontianak sebesar Rp. 68.551.005,- NTPN. 0D4E42G4UTH8I0MM Tanggal 24 Maret 2021; Pembayaran keterlambatan KSP Tetap tahun 2018 sebesar Rp. 8.930.935,- NTPN 25C8348VUIRKF8GG Tanggal 11 Mei 2021
    - (2) Pembayaran keterlambatan Sharing Profit Tahun 2018 sebesar Rp. 1.051.108,- NTPN882B13CIEO09K6HT Tanggal 24 Mei 2021;
    - (3) Pembayaran KSP Tetap tahun 2019 sebesar Rp. 3.744.206,- NTPN 96D9855DEDE0S90F Tanggal 11 Mei 2021.
- 5) Pembagian keuntungan KSP sebesar 43,94% untuk pemerintah dan 56,06% untuk mitra KSP dari net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp1.120.020.000 (Satu milyar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah). Net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah di audit.
- 6) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 7) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- 8) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 9) Pada Tahun 2018 Nilai Dermaga NUP 1 di Neraca sudah sesuai dengan Nilai Aset pada Surat Perjanjian KSP yang merupakan hasil koreksi nilai tim penertiban aset sebesar Rp175.374.000,- dan koreksi semu hasil penilaian kembali sebesar (Rp785.268.000,-) sehingga nilai aset pada tahun tersebut

sebesar Rp8.115.306.000,-. Namun, pada tahun 2019 terdapat koreksi hasil reval yang mengurangi Nilai Aset pada Neraca sebesar Rp1.689.764.000,- sehingga nilai wajar akhir berkurang menjadi Rp6.425.542.000,- (Sesuai dengan Neraca SIMAK BMN). Dengan demikian, nilai wajar akhir tersebut berbeda dengan Nilai Aset pada Perjanjian KSP.

- h. Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada UPP Labuan Bajo dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-427/MK.6/2021 Tanggal 30 September 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo.
- 1) Objek KSP BMN berupa Aset Pelabuhan Labuan Bajo yang dibiayai APBN dengan nilai wajar sebesar Rp190.624.744.000,- yang terdiri dari :
    - a) Dermaga berukuran (120x20) m<sup>2</sup>;
    - b) *Trestle* berukuran (60x12) m<sup>2</sup>;
    - c) *Causeway* berukuran (690x20) m<sup>2</sup>;
    - d) Tanah Hasil Reklamasi atau Tanah Lapangan Penimbunan (*Container Yard*) seluas (100x300) m<sup>2</sup>.
  - 2) Mitra KSP Adalah PT. Pelabuhan Indonesia
  - 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan secara tertulis oleh PT. Pelabuhan Indonesia Kepada UPP Labuan Bajo paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSP.
  - 4) Kontribusi Kepada Negara berupa :
    - a) Kontribusi tetap per tahun yang dibayarkan dari nilai kewajaran aset Barang Milik Negara (BMN) Sejumlah Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2.95% (dua koma sembilan puluh lima persen). Adapun kontribusi tetap tahun pertama sudah dibayarkan PT. Pelindo sebesar Rp.171.000.000,- NTPN BE3A061QU8I63BK2 Tanggal 10/11/2021.
    - b) Memperoleh Keuntungan Bagi Hasil atas Perjanjian ini sebesar 16,81% (enam belas koma delapan puluh satu persen) dari Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi (AKB KOKI) dengan asumsi nilai investasi sebesar Rp.318.640.679.333 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi (AKB KOKI) tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independent. Posisi Pada 31 Desember 2021 belum ada pembayaran Keuntungan Bagi Hasil karena belum ada nilai dasar perhitungan yang telah diaudit oleh auditor independen.
  - 5) Pembayaran Kontribusi Tetap Khusus Tahun Pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah perjanjian ditandatangani. Pembayaran Kontribusi Tetap tahun berikutnya, dilakukan paling lambat Tanggal 8 November Pada Tahun Berikutnya sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
  - 6) Pembayaran Pembagian Keuntungan Bagi Hasil dilakukan paling lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.
  - 7) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan hasil perjanjian pada waktu yang telah ditentukan dalam Waktu Perjanjian maka Mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayar oleh Mitra KSP.

- i. Dasar persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Pada UPP Kelas II Anggrek dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-107/MK.6/2021 Tanggal 04 Maret 2021 Hal Persetujuan Kerja Sama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan c.q. KUPP Kelas II Anggrek.
- 1) Objek KSP BMN berupa aset BMN KUPP Kelas II Anggrek dengan nilai wajar sebesar Rp179.233.974.000,- yang terdiri dari:
    - a) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 184.932 m<sup>2</sup>;
    - b) 11 (sebelas) unit bangunan;
    - c) 1 (satu) unit dermaga;
    - d) 4 (empat) unit irigasi.
  - 2) Mitra KSP adalah PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal.
  - 3) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara ini diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) Tahun terhitung sejak Tanggal Efektif (“Periode Kerja Sama”) di mana BUP diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
  - 4) Kontribusi Kepada Negara berupa:
    - a) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50% disetorkan oleh Mitra KSPI ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap Tanggal 30 April tahun berikutnya.
    - b) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSPI.
  - 5) Mitra KSPI yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSPI yang bersangkutan.

### C. PENETAPAN BLU DI LINGKUNGAN DITJEN HUBLA

Penetapan Satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat, pada tahun anggaran 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mendapat persetujuan untuk mengelola 1 (satu) satker biasa menjadi satker BLU, Balai Besar Kesehatan Kerja Pelayaran berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 57/KMK.05/2021 tanggal 15 Februari 2021.

No	Satker BLU	Keputusan Menteri Keuangan
1	Balai Kerja Kesehatan Pelayaran	Nomor 57/KMK.05/2021 Tanggal 15 Februari 2021

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2021 satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU menggunakan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

## D. KEGIATAN MYC (MultiYears Contract)

N O	Satker	Pagu Tahun 2021 (Rp)	Sumber Dana	Kategori	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tgl Mulai Kontrak	Tgl Selesai Kontrak	Jenis Belanja (Belanja Barang / Modal)	Nilai Keseluruhan Kontrak (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	KSOP Benoa	4.705.395.000	RM	Persetujuan Awal	Paket Pekerjaan Manajemen Kontruksi (MK) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sanur TA. 2020-2021	PT. RAYAKONSULT	PL.107/1/19 /KSOP.BNA-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	3.998.011.600	3.998.011.600
2	UPP labuhan Bajo	3.615.929.966	RM	Persetujuan Awal	Jasa Konsultasi Manajemen Kontruksi Pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Laut Labuhan Bajo	PT. VIRAMA KARYA (PERSERO)	PR.801/1/11 /UPP.LBJ-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	1.552.089.000	1.552.089.000
3	UPP labuhan Bajo	65.649.706.000	RM	Revisi Persetujuan Awal	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Laut Labuhan Bajo TA. 2020-2021	PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	PR.801.a/3/4/UPP.LBJ-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	63.963.631.653	63.963.631.653
4	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	50.572.592.760	RM	Rekomposisi	Pekerjaan Pembangunan 4 Unit Kapal Bottom Glass Termasuk Supervisi TA.2020-2021	PT. DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD	20004676/3 A/133.20004 676/3/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	11.806.273.893	11.806.273.893
						PT. PROSKUNEO KADARUSMAN	20004721/3 A/133.20004 721/3/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	12.057.681.106	12.057.681.106
						PT. BAYUBAHARI SANTOSA	20004722/3 A/133.20004 722/3/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	12.151.347.033	12.151.347.033
						PT. BEN SANTOSA	20004832/2 A/133.20004 832/2/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	12.023.001.992	12.023.001.992
						PT MEGA OCEAN JAYA	20004907/2 A/133.20004 907/2/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	348.972.855	348.972.855
						PT. ZATRIA AWAN CONSULTANT	20004908/2 A/133.20004 908/2/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	344.531.605	344.531.605
						PT. ZATRIA AWAN CONSULTANT	20004909/2 A/133.20004 909/2/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	344.531.605	344.531.605
						PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	20004910/2 A/133.20004 910/2/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	320.817.247	320.817.247
5	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	7.046.953.180	RM	Rekomposisi	Permohonan Rekomposisi dan Perpanjangan Anggaran Tahun Jamak (Multiyears) Kegiatan Docking dan Supervisi KM Sabuk Nusantara 45 Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	PT. CITRA BAHARI SHIPYARD	19015954/3 A/133.19015 954/3/2	01-JAN-21	31-DEC-21	barang	6.248.980.000	6.248.980.000
6	KSOP Benoa	235.000.000.000	RM	Persetujuan Awal	- Pembangunan Pelabuhan Sanur	HUTAMA - BANGUN - VIRAMA KSO	PL.107/2/17 /KSOP.BNA-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	100.401.988.400	100.401.988.400
7	Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	19.125.000.000	RM	Persetujuan Awal	Pembangunan 5 Unit Kapal Patroli Kelas V	PT. CAHAYA ANGGUN SEGARA	HH.01/KPL-V- A/PFKPLP/XI /2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	14.516.511.154	14.516.511.154
8	KSOP PATIMBAN	38.565.988.000	RM	Persetujuan Awal	Pembangunan Jalan Lingkungan Pelabuhan Patimban	PT CIPTA MARGA PERSADA	PL.107/01/IX /FPAPBN-PTB/2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	34.159.269.768	34.159.269.768
9	UPP JAMPEA	12.035.901.000	RM	Persetujuan Awal	- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jampea	PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI	PL.107/1/5/ PPK/UPP.Ja-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	12.035.901.000	12.035.901.000
10	UPP JAMPEA	633.053.000	RM	Persetujuan Awal	- Supervisi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jampea	CV. ALIAH CONSULINDO	PL.107/2/4/ PPK/UPP.Ja-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	401.100.000	401.100.000
11	UPP BANGGAI	7.014.876.000	RM	Persetujuan Awal	- Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Mansalean	PT. ABDI PRATAMA PERKASA	PL.106/01/0 2/UPP.Bgi 2021	05-JAN-21	31-MAY-21	Modal	4.675.989.514	4.675.989.514

N O	Satker	Pagu Tahun 2021 (Rp)	Sumber Dana	Kategori	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tgl Mulai Kontrak	Tgl Selesai Kontrak	Jenis Belanja (Belanja Barang / Modal)	Nilai Keseluruhan Kontrak (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
12	KSOP KOTABARU-BATU LICIN	7.930.000.000	RM	Persetujuan Awal	- Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sebuku	PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI	PL.106/01/01/KSOP.KBB L-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	7.297.565.950	7.297.565.950
13	KSOP KOTABARU-BATU LICIN	5.093.784.000	RM	Persetujuan Awal	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Matasiri TA.2021-2022	PT. TATAANALISA MULTI MULYA	PL.107/03/09/KSOP.KBB L-2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	4.856.139.976	4.856.139.976
14	KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR	756.001.000	RM	Persetujuan Awal	- Pembangunan Gedung Operasional Paotere	CV. KARYA DWI PUTRA	06/PAOTERE/IV/OP.MKS-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	756.000.000	756.000.000
15	UPP SOA SIO	7.139.429.000	RM	Persetujuan Awal	- Pekerjaan Perbaikan Pelabuhan Laut Soa Sio	CV. BANGUN UTAMA	HK.107/1/6/V/UPP.SS-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	7.139.421.000	7.139.421.000
16	UPP TAHUNA	19.904.095.000	RM	Persetujuan Awal	- Rehabilitas fasilitas sisi laut Pelabuhan Marore	MALUKU JAYA BANGUNSAKTI, PT	PR.805/1/9/UPP.THN-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	15.738.547.437	15.738.547.437
17	UPP SAPUDI	2.619.957.000	RM	Persetujuan Awal	- Pembangunan dan Rehabilitas Fasilitas Darat Pelabuhan Sapudi	CV. SEMPUL PRIMA GEMILANG	PL.106.a/4/4/UPP.Spd-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	2.066.958.270	2.066.958.270
18	DISTRICK NAVIGASI TELUK BAYUR	1.568.392.000	RM	Persetujuan Awal	- Replace 3 unit Rambu Suar T.10 m Laut Kontruksi GPR lokasi Gs Moller, Pokai dan Gs. Inggaris	PT. RANSOE PILAR UTAMA	03/PPK-53/FSK.RPC.RS/DNG.TBS-2020 Lanjutan	01-JAN-21	28-FEB-21	Modal	1.309.740.000	1.309.740.000
19	DISTRICK NAVIGASI MERAUKE	6.244.870.000	RM	Persetujuan Awal	- Pekerjaan /Pengadaan Top Overhaul Main Engine dan Replacement alat Bantu Angkut KN. Merpati	PT. TEKNO MARINDO UTAMA	HK.107/1/1/DNG.MRK-21	01-JAN-21	31-MAR-21	Modal	5.940.252.610	5.940.252.610
20	DISTRICK NAVIGASI MAKASSAR (UJUNG PANDANG)	2.721.557.000	RM	Persetujuan Awal	- Replacement Menara Suar Bonerate dan Fasilitas Penjangan	PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA	PL.305/08/04/DNG.MKS-2020-LANJUTAN	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	2.621.557.000	2.621.557.000
21	DISTRICK NAVIGASI BANJARMASIN	3.728.785.000	RM	Persetujuan Awal	- Pembangunan Gedung Penunjang Fasilitas Pangkalan Kenavigasian	PT. LUTHFIATAMA JAYA MANDIRI KONSTRUKSI	PL.106/2/4/DNG.BJM-20-Lanjutan	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	3.591.425.000	3.591.425.000
22	DISTRICK NAVIGASI PONTIANAK	732.003.000	RM	Persetujuan Awal	- Replacement Rambu Suar Laut T.10 M. DSI.2143 Kontruksi Baja Galvanis di Karang Pulau Buan	CV. CAHAYA	PL.1.07/1/19/DNG.PTK-2021	17-FEB-21	15-AUG-21	Modal	677.002.000	677.002.000
23	UPP MELONGUANE	13.350.556.754	RM	Revisi Persetujuan Awal	Replacement Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas (Rekomposisi Multiyears Contract)	PT. LEILEM JAYA KSO PT. INDONESIA	PL.107/02/20/UPP.MLG-2019	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	12.697.547.960	12.697.547.960
24	UPP SANGKULIRANG	24.280.411.000	RM	Revisi Persetujuan Awal	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Sangkulirang	PT. DAMBHA PRIMA UTAMA	035/PPK/PL.SKL/IV/UPP.Skg-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	23.460.816.000	23.460.816.000
25	KSOP PATIMBAN	22.567.500.000	RM	Revisi Persetujuan Awal	Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional Pelabuhan Patimban termasuk supervisi	PT LINGGARJATI PERKASA	PL.107/2/XII/FPAPBN-PTB/2019	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	21.584.573.756	21.584.573.756
26	PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT	18.378.700.250	RM	Revisi Persetujuan Awal	LANJUTAN PEMBANGUNAN KM. SABUK NUSANTARA 54 DAN SUPERVISI (myc 2019-2021)	PT DOK BAHARI NUSANTARA	KTRK.01/PPK.PERINTIS/NS4/XII/2019	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	16.876.937.279	16.876.937.279
27	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENIAGAAN LAUT DAN PANTAI	42.240.336.000	RM	Revisi Persetujuan Awal	Pembangunan Kapal Patroli Kelas III (MYC Lanjutan) (2 unit) (prioritas nasional)	PT. ORELA SHIPYARD	HH.01/KPL-III-C/PFKPLP/XI/2019	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	19.243.437.006	19.243.437.006
						PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA	HH.01/KPL-III-B/PFKPLP/XI/2019	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	19.022.728.057	19.022.728.057
						PT. MULIA ARTHALOKA	HH.01/SPV-III-B/PFKPLP/XI/2019	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	232.414.685	232.414.685
						PT. MULIA ARTHALOKA	HH.01/SPV-III-C/PFKPLP/XI/2019	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	232.414.680	232.414.680

N O	Satker	Pagu Tahun 2021 (Rp)	Sumber Dana	Kategori	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tgl Mulai Kontrak	Tgl Selesai Kontrak	Jenis Belanja (Belanja Barang / Modal)	Nilai Keseluruhan Kontrak (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
28	UPP TUAL	19.579.316.000	RM	Persetujuan Awal	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Tual TA. 2021-2022	PT. SULAWESI MAKMUR PRATAMA	HK.107/3/9/K.UPP.TL-21	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	18.553.931.600	18.553.931.600
29	UPP LIKUPANG	15.000.000.000	RM	Persetujuan Awal	Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang TA. 2021-2022 termasuk Supervisi	PT. LALANTA WAYA	Nomor: PL.106/01/06/UPP.LKG-21	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	10.287.153.579	10.287.153.579
30	DIREKTORAT KEPSELABUHAN ANAN	2.030.644.000	RM	Persetujuan Awal	Kegiatan Konsultan Project Management Unit (PMU) Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Teluk Palu TA. 2021-2023	PT. MARGA NUSANTARA PERSADA	1/KONTRAK/PMU/VII/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Barang	2.002.032.854	2.002.032.854
31	UPP OGOAMAS	9.988.079.000	RM	Persetujuan Awal	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ogoamas TA. 2021-2022 termasuk Supervisi	PT. TIRAI MEGAH UTAMA	PL.107/1/6/UPP.OGS-2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	9.487.444.792	9.487.444.792
	<b>RUPIAH MURNI</b>	<b>669.819.810.910</b>										
32	UPP Seba	24.601.656.000	SBS N	Realokasi SBSN	Pembangunan Faspel Seba (lanjutan MYC)	PT SUMBER BANGUN SENTOSA	PR.802/1/2/UPP.Seba-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	23.533.695.000	23.533.695.000
33	UPP Wonreli	35.765.088.000	SBS N	Realokasi SBSN	Pembangunan Faspel Arwala	PT. PILAR DASAR MEMBANGUN	PL.106/1/05/UPP.WRL-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	30.920.178.834	30.920.178.834
34	KSOP Fak-Fak	33.450.469.000	SBS N	Realokasi SBSN	Pembangunan Faspel Karas	PT KARYA PEMBANGUNAN REZKI	PL.107/5/17/KSOP.FF-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	31.435.403.475	31.435.403.475
35	UPP Sinjai	30.642.851.000	SBS N	Realokasi SBSN	Pembangunan Faspel Kambuno	PT. SULAWESI MAKMUR PRATAMA	HK.107/01/04/UPP.SI-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	29.284.553.600	29.284.553.600
36	UPP Jenepoto	19.580.142.000	SBS N	Realokasi SBSN	Pembangunan Faspel laut Tanakeke	PT. ABADI PRIMA KONINDO	PL.107/1/1/UPP.JPT.TNK-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	18.787.104.900	18.787.104.900
37	UPP Mamuju	35.809.404.000	SBS N	Realokasi SBSN	Pembangunan Faspel Laut Salingsingan	PT SUMBER BANGUN SENTOSA	PL.107/01/22/UPP MU 2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	44.600.099.000	44.600.099.000
38	KSOP Muntok	63.502.566.000	SBS N	Realokasi SBSN	Pembangunan Fasilitas Dermaga Pelabuhan Tanjung Ular	PT. SENA SANJAYA - DAMBHA UTAMA (KSO)	KU.104/II/01/KSOP.MTK-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	62.480.867.290	62.480.867.290
	<b>SBSN</b>	<b>243.352.176.000</b>										
39	PENINGKATAN FUNGSI KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	37.000.000.000	PNB P	Persetujuan Awal	- Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Aluminium (4 unit)	PT. BINTANG TIMUR SAMUDERA	HH.01/KPL-IV-A/PFKPLP/XI/2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	15.848.013.700	15.848.013.700
						PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA	HH.01/KPL-IV-B/PFKPLP/XI/2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	16.154.242.775	16.154.242.775
40	UPP RAJA AMPAT	5.902.950.000	PNB P	Persetujuan Awal	- Pembangunan Fasilitas Pendukung Manajemen Pelabuhan Raja Ampat	CV. HENGGY PERMAI	PL.106/1/18-MYC/KUPP.RJA-2020	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	5.902.950.000	5.902.950.000
41	UPP WONRELI	15.860.841.000	PNB P	Persetujuan Awal	- Pekerjaan Perkuatan Fasilitas Pelabuhan Moa	PT. SUATRI	PL.106/1/01/UPP.WRL-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	14.624.000.000	14.624.000.000
42	Satker Peningkatan Keselamatan Kepelautan Pusat	2.969.560.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepelautan	PT. SHERASA INTEGRITAS	02/P.XIX/DK P/PFKP/IX-20	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	2.846.432.655	2.846.432.655
43	UPP SERUI	4.416.268.000	PNB P	Persetujuan Awal	Fasilitas Darat Pelabuhan Serui TA. 2021-2022	PT. ADIVA BERLIAN ABADI	PL.107/12/9/UPP.SRI-2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	3.976.625.000	3.976.625.000
44	UPP TUAL	6.504.764.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pelebaran Dermaga dan Trestle Pelabuhan Tual TA. 2021-2022	PT. IBNU MUNSIR DWI GUNA	HK.107/3/7/K.UPP.TL-21	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	6.001.236.800	6.001.236.800
45	UPP Saumlaki	6.000.000.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Saumlaki termasuk Supervisi	PT. MULTI KARYA PRATAMA	PL.107/3/BM/UPP.SXK-21	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	5.644.500.000	5.644.500.000
46	KSOP Khusus Batam	6.000.000.000	PNB P	Persetujuan Awal	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KSOP Khusus Batam termasuk Supervisi	PT. BINTANIKA JAYA	HK.201/2/12/KSOP.BTM/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	5.491.389.975	5.491.389.975

N O	Satker	Pagu Tahun 2021 (Rp)	Sumber Dana	Kategori	Nama Kontrak	Penyedia	Nomor Kontrak	Tgl Mulai Kontrak	Tgl Selesai Kontrak	Jenis Belanja (Belanja Barang / Modal)	Nilai Keseluruhan Kontrak (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
47	KSOP Tanjung Pandan	11.319.439.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan dan Perkuatan Dermaga Pelabuhan Laut Tanjung Batu Tahun 2021-2022	PT. DWIWIRA KUSUMA	PL.106/1/1/KSOP.Tpdn-21	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	10.884.082.000	10.884.082.000
48	KSOP Kelas IV Probolinggo	6.468.000.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pembangunan Kapal Negara Patroli Kelas IV Aluminium termasuk Supervisi	PT. BEN SANTOSA	PL.107/4/1/KSOP.Pbl/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	5.433.453.300	5.433.453.300
49	UPP SEBA	8.000.000.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Rajua TA. 2021-2022 termasuk Supervisi	PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA	PL.106/1/7/MYC/UPP.Seba-2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	7.764.590.000	7.764.590.000
50	UPP KUALA SEMBOJA	8.034.620.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pekerjaan Rehabilitasi Talud dan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Ambarawang Laut Kuala Semoja TA. 2021-2022 termasuk Supervisi	PT. IBNU MUNSIR DWIGUNA / PT. KHARISMA PERSADA (KSO)	PL.107/1/1/UPP-KSB/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	7.919.057.300	7.919.057.300
51	KSOP KOTABARU-BATULICIN	5.086.113.000	PNB P	Persetujuan Awal	Kegiatan Pekerjaan Pemabngunan Fasilitas Pelabuhan Marabatun TA. 2021-2022 termasuk Supervisi	PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI	PL.107/04/12/KSOP.KBB L-2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	4.813.199.000	4.813.199.000
52	UPP PALOPO	2.205.000.000 (DIBATALKAN)	PNB P	Persetujuan Awal	Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Kelas V Aluminium TA. 2021-2022 termasuk Supervisi							
53	Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai	14.400.000.000	PNB P	Revisi Persetujuan Awal	Pembangunan 10 (Sepuluh) Unit Kapal Patroli Kelas V Aluminium TA. 2021-2022 Termasuk Supervisi	PT. BAYUBAHARI SANTOSA	HH.01/KPL-V-C/PFKPLP/X/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	6.793.426.295	6.793.426.295
						PT. BEN SANTOSA	HH.01/KPL-V-B/PFKPLP/X/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	6.330.351.225	6.330.351.225
						PT. SUWONDO SANDIKA	HH.01/KONS-V-B/PFKPLP/X/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	169.443.868	169.443.868
						PT. SUWONDO SANDIKA	HH.01/KONS-V-C/PFKPLP/X/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	169.443.868	169.443.868
54	Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai	16.896.000.000	PNB P	Persetujuan Awal	Pembangunan 4 (Empat) Unit Kapal Patroli Kelas IV Aluminium TA. 2021-2022 Termasuk Supervisi	PT. PROSKUNEO KADARUSMAN	HH.01/KPL-IV-B/PFKPLP/XI/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	7.935.561.561	7.935.561.561
						PT. BEN SANTOSA	HH.01/KPL-IV-A/PFKPLP/XI/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	7.749.025.205	7.749.025.205
						PT. LAJU NUSANTARA INDONESIA	HH.01/SPV-IV-B/PFKPLP/XI/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	200.718.655	200.718.655
						PT. LAJU NUSANTARA INDONESIA	HH.01/SPV-IV-A/PFKPLP/XI/2021	01-JAN-21	31-DEC-21	Modal	201.012.441	201.012.441
	<b>PNBP</b>	<b>154.858.555.000</b>										

## E. REALISASI PC-PEN DITJEN HUBLA TA. 2021

### 1. Total Belanja Penanganan Pandemi Covid 19

No	Pagu DIPA	Kode Akun	Realisasi Neto	%Realisasi Terhadap DIPA
1	20.362.392.000	521131	19.265.051.967	94,61
2	3.669.187.000	521241	2.994.024.294	81,60
3	29.068.832.000	521841	27.917.499.533	96,04
4	4.017.327.000	522192	3.112.224.482	77,47
5	30.800.000	523114	30.800.000	100,00
6	14.400.000	526321	-	0,00
7	62.000.000	526322	61.994.400	99,99
8	1.510.860.000	532119	1.406.149.650	93,07
9	145.701.900.000	533119	145.173.973.712	99,64
10	526.700.000	537122	524.770.574	99,63
	<b>204.964.398.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>200.486.488.612</b>	<b>97,82</b>

### 2.a Total Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (Reguler)

1	65.895.142.000	523111	62.903.612.000	95,46
2	32.504.000	523112	32.459.000	99,86
3	2.548.186.000	523121	2.459.295.000	96,51
4	50.000.000	523123	50.000.000	100,00
5	13.417.037.000	523131	12.838.648.000	95,69
6	110.000.000	523199	109.483.000	99,53
7	184.935.000	533111	184.935.000	100,00
	<b>82.237.804.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>78.578.432.000</b>	<b>95,55</b>

### 2.b Total Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (BA BUN)

1	20.000.000.000	534111	-	0,00
2	4.880.543.000	534111	-	0,00
3	136.904.022.000	521219	136.904.022.000	100,00
	<b>161.784.565.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>136.904.022.000</b>	<b>84,62</b>

### 2.c Kawasan Industri

1	4.445.000.000	534111	4.442.308.000	99,94
	<b>4.445.000.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>4.442.308.000</b>	<b>99,94</b>

### 3. Total Belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN (A+B) Tahun 2021

	<b>453.431.767.000</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>420.411.250.612</b>	<b>92,72</b>
--	------------------------	---------------------	------------------------	--------------

## F. PELAKSANAAN ANGGARAN

### 1. KRONOLOGIS PAGU ANGGARAN

a.	<b>DIPA Ditjen Perhubungan Laut TA.2021</b> Nomor: DIPA-022.04-0/2021 tanggal 23 November 2020	Rp. 11.428.194.813.000
b.	<b>Revisi Antar Program</b> Alokasi digunakan sebagai tambahan anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 11.357.206.710.000
c.	<b>Refocussing dan Realokasi Anggaran Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021 (Tahap I)</b> (Sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal <i>Refocusing</i> dan Realokasi Belanja K/L dan Surat Menteri Perhubungan No. KU.001/1/10 Phb 2021 tanggal 19 Januari 2021 (Penghematan sebesar Rp3.210.017.879.000)	Rp. 8.147.188.831.000

d.	<b>Revisi Alokasi Anggaran Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021</b> Terdapat penambahan anggaran PHLN sebesar Rp1.142.813.739.000,- dan pergeseran anggaran dari BA BUN sebesar Rp161.784.565.000,-	Rp. 9.483.770.838.000
e.	<b>Revisi Penghematan Belanja Pegawai (Tahap II)</b> Terdapat penghematan alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji 13 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 sebesar Rp108.504.558.000,-	Rp. 9.375.266.280.000
f.	<b>Revisi Anggaran Antar Unit Eselon I</b> Revisi pergeseran anggaran pagu tetap yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp2.055.012.000,- dari Ditjen Perhubungan Laut Ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	Rp. 9.373.211.268.000
g.	<b>Refocussing dan Realokasi Anggaran Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021 (Tahap III)</b> (Sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal <i>Refocusing</i> dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021 dan Surat Menteri Perhubungan No. KU.001/6/14 Phb 2021 tanggal 9 Juli 2021 (Penghematan sebesar <b>Rp80.261.495.000</b> )	Rp. 9.292.949.773.000
h.	<b>Refocussing dan Realokasi Anggaran Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021 (Tahap IV)</b> (Surat Menteri Keuangan nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal <i>Refocusing</i> dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan Surat Menteri Perhubungan KU 001/7/1 PHB 2021 tanggal 23 Juli 2021 hal <i>Refocusing</i> dan Realokasi Belanja TA 2021 Tahap IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan <b>Rp56.222.221.000,-</b>	Rp. 9.236.727.552.000
i.	<b>Penambahan anggaran dalam rangka pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN pada Proyek strategis nasional Pembangunan Pelabuhan Patimban semester I sebesar Rp42.717.527.000,-</b>	Rp. 9.279.445.079.000
j.	<b>Penambahan anggaran dari kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp166.479.742.000,-</b>	Rp. 9.445.924.821.000
k.	Penambahan anggaran PNBPD Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp24.397.820.000,-	Rp. 9.470.322.641.000
l.	Penambahan hibah luar negeri Project-5 Maintenance and Replacement of Aids to Navigation in the Straits of Malacca and Singapore Rp7.038.207.000,-	Rp. 9.477.360.848.000
m.	<b>Penambahan anggaran dalam rangka pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN pada Proyek strategis nasional Pembangunan Pelabuhan Patimban TW III sebesar Rp1.148.682.000,-</b>	Rp. 9.478.509.530.000
n.	<b>Penambahan anggaran dalam rangka pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN pada Proyek strategis nasional Pembangunan Pelabuhan Patimban TW IV sebesar Rp17.977.737.000,-</b>	Rp. 9.496.487.267.000

## 2. KRONOLOGIS REVISI ANGGARAN

- a. Revisi 1 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-7/AG/AG.3/2021 tanggal 11 Januari 2021, Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar program sebesar Rp70.988.103.000,- dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. Revisi 2 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-49/AG/AG.3/2021 tanggal 09 Februari 2021, Revisi anggaran berupa penambahan pagu lanjutan kegiatan (luncuran) penggunaan sisa anggaran SBSN yang tidak terserap tahun 2020 pada Satker Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kaimana sebesar Rp.7.314.699.000,-;
- c. Revisi 3 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-133/AG/AG.1/2021 tanggal 17 Februari 2021, Revisi

- anggaran dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran belanja TA. 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp. 2.243.364.712.000,- dari target refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp.3.210.017.879.000,-;
- d. Revisi 4 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-161/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Februari 2021, Revisi anggaran berupa pemenuhan kekurangan penghematan dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran belanja TA. 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp.966.953.167.000,- sehingga telah memenuhi target penghematan sebesar Rp.3.210.017.879.000,- dan Pergeseran anggaran antar satker sebesar Rp.118.001.366.000,- terdiri dari revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp.1.620.304.000,- dan PNBP sebesar Rp.116.381.062.000,-;
- e. Revisi 5 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-226/AG/AG.3/2021 tanggal 08 April 2021, revisi anggaran berupa:
- 1) Pencantuman/Perubahan catatan halaman IV.B DIPA TA. 2021 sebesar Rp80.945.283.000,- dengan rincian:
    - a) Tunggakan atas pekerjaan TA. 2018 sebesar Rp74.428.108.000,-;
    - b) Tunggakan atas pekerjaan TA. 2019 sebesar Rp6.333.950.000,-;
    - c) Tunggakan atas pekerjaan TA. 2020 sebesar Rp183.225.000,-.
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp125.365.097.000,- yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis akibat dampak dari *refocussing* dan kekurangan dari Pagu kebutuhan sebesar Rp917.439.867.000,- guna mendukung program Prioritas Nasional dan pelayanan kepada masyarakat, yang bersumber dari:
    - a) Dana RM sebesar Rp77.069.517.000,- (Blokir anggaran RM Rp56.736.780.000,-);
    - b) Dana PNBP sebesar Rp48.295.580.000,- (Blokir anggaran PNBP Rp.9.250.000.000);
  - 3) Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA TA. 2021 (buka blokir) yang bersumber dari dana RM pada kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Likupang sebesar Rp15.000.000.000,-
  - 4) Luncuran sisa anggaran TA. 2020 yang dilanjutkan ke TA. 2021 yang bersumber dari dana SBSN sebesar Rp24.669.003.000,-;
- f. Revisi 6 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-310/AG/AG.3/2021 tanggal 18 Mei 2021, revisi berupa penambahan anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk Program Infrastruktur Konektivitas (Program Penciptaan Lapangan Kerja Padat Karya), yang bersumber dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp161.784.565.000,- pada:
- 1) Ksop Palembang - Pembangunan Pelabuhan New Palembang (Tanjung Carat) Rp.80.000.000.000,- ;
  - 2) Ksop Ambon - Pembangunan Pelabuhan New Ambon Rp.81.784.565.000,-.
- g. Revisi 7 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-322/AG/AG.3/2021 tanggal 25 Mei 2021, revisi anggaran berupa:
- 1) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp 218.831.379.000,- yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran

subsidi perintis akibat dampak dari *refocussing* dan kekurangan dari Pagu kebutuhan sebesar Rp 758.343.784.550,- dan kegiatan prioritas ditjen hubla lainnya, yang bersumber dari:

- a) Kegiatan tidak dilaksanakan (ditunda TA. 2022) sebesar Rp103.056.858.000,-;
  - b) Efisiensi kegiatan belum lelang sebesar Rp42.685.407.000,-;
  - c) Sisa anggaran sebesar Rp70.528.409.000,-, dengan rincian:
  - d) Kegiatan SYC menjadi MYC sebesar Rp30.951.478.000,-;
  - e) Sisa pagu sebesar Rp28.737.814.000,-;
  - f) Sisa Kontrak Biro LPPBMN sebesar Rp10.839.117.000,-.
  - g) Blokir anggaran sebesar Rp2.332.061.000,-;
  - h) Sisa Kontrak belanja bahan dan perjalanan dinas sebesar Rp228.644.000,-.
- 2) Penambahan anggaran PHLN kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban TA. 2021 Pada KSOP Patimban melalui DIPA Luncuran sebesar Rp1.142.813.739.000,-.
- h. Revisi 9 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-366/AG/AG.3/2021 tanggal 3 Juni 2021, revisi anggaran berupa Penghematan anggaran belanja pegawai dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-13, yang bersumber dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp108.504.558.000,-;
- i. Revisi 10 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-417/AG/AG.3/2021 tanggal 28 Juni 2021, revisi anggaran berupa:
- 1) Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA TA. 2021 (buka blokir) yang bersumber dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp12.647.813.000,- pada:
    - a) Ksop Palembang - Jasa konsultasi manajemen konstruksi Pembangunan Pelabuhan New Palembang (Tanjung Carat) Rp7.096.979.000,-;
    - b) Ksop Ambon - Jasa konsultasi manajemen konstruksi Pembangunan Pelabuhan New Ambon Rp5.550.834.000,-.
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp23.605.894.000,- yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis akibat dampak dari *refocussing* dan kekurangan dari Pagu kebutuhan sebesar Rp758.343.784.550,- guna mendukung program Prioritas Nasional dan pelayanan kepada masyarakat, yang bersumber dari:
    - a) Dana RM sebesar Rp10.450.809.000,-;
    - b) Dana PNPB sebesar Rp13.155.085.000,-.
- j. Revisi 11 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-417/AG/AG.3/2021 tanggal 28 Juni 2021, revisi anggaran berupa Rincian Output dalam Rangka Penandaan Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Padat Karya dan Kawasan Industri), yang semula Padat Karya Rp80.619.469.000,- berubah menjadi Rp 84.045.538.000,-
- k. Revisi 12 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-439/AG/AG.3/2021 tanggal 7 Juli 2021, revisi anggaran berupa Realokasi/pergeseran anggaran antar unit kerja Eselon I dalam Satu Program TA. 2021 sebesar Rp2.055.012.000,- yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Sekretariat Jenderal TA 2021 pada kegiatan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.055.012.000;

- l. Revisi 13 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-615/AG/AG.3/2021 tanggal 6 Agustus 2021, revisi anggaran berupa Perubahan Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP-SBSN) TA. 2021 Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp225.114.995.000,-;
- m. Revisi 14 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-526/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Juli 2021, revisi anggaran berupa:
  - 1) *Refocussing* dan Realokasi Belanja Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021 Tahap III menurut Program sebesar Rp80.261.495.000,-;
  - 2) Penghematan Tahap III TA. 2021 Ditjen Perhubungan Laut yang bersumber dari dana RM sebesar Rp80.261.495.000,-;
  - 3) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp56.328.500.000,- dengan rincian:
    - a) Sumber dana RM sebesar Rp2.832.500.000,-;
    - b) Sumber dana PNBP sebesar Rp53.496.000.000,-.
- n. Revisi 15 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-615/AG/AG.3/2021 tanggal 6 Agustus 2021, revisi anggaran berupa *Refocussing* dan Realokasi Belanja Ditjen Perhubungan Laut TA. 2021 Tahap IV menurut Program sebesar Rp56.222.221.000,-;
- o. Revisi 16 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-732/AG/AG.3/2021 tanggal 23 September 2021, revisi anggaran berupa:
  - 1) Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA TA. 2021 (buka blokir) sebesar Rp8.000.000.000,- yang bersumber dari:
    - a) Dana RM sebesar Rp3.000.000.000,- kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Telekomunikasi Pelayaran Terintegrasi;
    - b) Dana PHLN sebesar Rp5.000.000.000,- Development And Improvement Of Indonesian Aids To Navigation (ATON) On Economic Development Cooperation Fund(EDCF Loan Program) .
  - 2) Perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA TA. 2021 yang bersumber dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp26.881.928.000,-;
  - 3) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp7.260.112.000,- yang bersumber dari:
    - a) Dana RM sebesar Rp6.215.112.000,-;
    - b) Dana PNBP sebesar Rp1.045.000.000,-.
- q. Revisi 17 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-732/AG/AG.3/2021 tanggal 23 September 2021, revisi anggaran berupa :
  - 1) Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester I Tahun 2021 (bulan Januari s.d. Juni 2021) sebesar Rp42.717.527.000,-.
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp235.729.772.000,- yang bersumber dari:
    - a) Dana RM sebesar Rp205.694.520.000,-;
    - b) Dana PNBP sebesar Rp30.035.252.000,-.
- r. Revisi 18 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-745/AG/AG.3/2021 tanggal 1 Oktober 2021, revisi anggaran berupa:

- 1) Realokasi/pergeseran anggaran antar Program TA. 2021 yang bersumber dari dana RM sebesar Rp166.479.742.000,-, yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis akibat dampak dari *refocussing* guna mendukung program Prioritas Nasional dan pelayanan kepada masyarakat,-.
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang bersumber dari dana RM sebesar Rp3.650.035.000,-, yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran subsidi perintis akibat dampak dari *refocussing* guna mendukung program Prioritas Nasional dan pelayanan kepada masyarakat.
- s. Revisi 19 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-798/AG/AG.3/2021 tanggal 25 Oktober, revisi anggaran berupa:
- 1) Penambahan Pagu penggunaan PNBPNP sebesar Rp24.397.820.000,- dalam rangka pembayaran tunggakan;
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 (sumber dana SBSN) sebesar Rp1.429.180.000,- ;
  - 3) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai Rp14.278.982.000,-;
  - 4) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp95.051.608.000,- yang bersumber dari:
    - a) Dana RM sebesar Rp32.538.546.000,-;
    - b) Dana PNBPNP sebesar Rp62.513.062.000,-.
  - 5) Perubahan target pendapatan/penerimaan PNBPNP TA. 2021 Ditjen Perhubungan Laut yang semula Rp 3.800.000.438.000,- menjadi Rp 3.901.119.323.303,-.
- t. Revisi 20 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-864/AG/AG.3/2021 tanggal 4 November 2021, revisi anggaran berupa:
- 1) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai Rp8.975.632.000,-;
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 Rp112.991.953.000,-:
    - a) Dana RM sebesar Rp44.815.386.000,-;
    - b) Dana PNBPNP sebesar Rp68.176.567.000,-;
- u. Revisi 21 Usulan Pengurangan Pagu Anggaran Sumber Dana PHLN Pada Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban TA. 2021 Rp. 383.519.472.957,- tidak disetujui.
- v. Revisi 22 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-900/AG/AG.3/2021 tanggal 2 Desember 2021, revisi anggaran berupa Realokasi/pergeseran anggaran Satker Ksop Sorong pada kegiatan subsidi Perintis R-117 TA. 2021 sebesar Rp3.498.753.000,- dan Ksop Manokwari subsidi perintis R-109 sebesar Rp.398.062.000,- (sumber dana PNBPNP).
- w. Revisi 23 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-900/AG/AG.3/2021 tanggal 2 Desember 2021, revisi anggaran berupa Realokasi/pergeseran penambahan anggaran Satker UPP Tual pada kegiatan subsidi Perintis R-80,81 dan 83 TA. 2021 sebesar Rp2.901.018.000,- (sumber dana PNBPNP).
- x. Revisi 24 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor Nomor S-945/AG/AG.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, revisi anggaran berupa:

- 1) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai sebesar Rp1.025.979.000,- (sumber dana RM);
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 sebesar Rp3.110.622.000,- (sumber dana PNBPN);
  - 3) Perubahan/pencantuman catatan halaman IV.B DIPA TA. 2021 dalam rangka pembayaran tunggakan kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Ternak tahun 2017 (sumber dana RM) pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebesar Rp1.654.838.000,-;
  - 4) Pencantuman catatan pada Halaman IV. B KSOP Banten untuk pembayaran kekurangan belanja pegawai tahun 2017-2019 sebesar Rp.171.826.360,-
- y. Revisi 25 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor Nomor S-1010/AG/AG.3/2021 tanggal 28 Desember 2021, revisi anggaran berupa:
- 1) Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp1.148.681.257,-;
  - 2) Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2021 dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai sebesar Rp538.708.000,- (sumber dana RM).
- z. Revisi 26 sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor Nomor S-17/AG/AG.3/2022 tanggal 19 Januari 2022, revisi anggaran berupa Pencantuman Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Triwulan VI Tahun 2021 sebesar Rp17.977.736.710,-.

### 3. BLOKIR ANGGARAN

a. Posisi blokir s.d Semester 1

Pagu Blokir	: Rp. 475.151.544.000,-
Telah dibuka/realokasi	: <u>Rp. 474.151.544.000,-</u>
Sisa Blokir Anggaran	: Rp. 1.000.000.000,-

b. Rincian blokir TA. 2021:

NO	UNIT / SATUAN KERJA	SUMBER DANA	BLOKIR TA. 2021	BLOKIR TELAH DIBUKA/REALOKASI	SISA BLOKIR
	<b>DITJEN PERHUBUNGAN LAUT</b>		<b>475.151.544.000</b>	<b>474.151.544.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
1	KSOP PULANGPISAU				
	Pembangunan Pelabuhan Bahaur	RM	20.000.000.000	20.000.000.000	-
2	UPP LUWUK				
	Pembangunan Faspel Salakan	PNBP	5.000.000.000	5.000.000.000	-
3	KSOP SELAT PANJANG				-
	Pembangunan Fasilitas Jalan Pelabuhan Dorak	PNBP	3.109.500.000	3.109.500.000	-
	Rehabilitasi Dermaga Penumpang Pelabuhan Dorak	PNBP	25.683.400.000	25.683.400.000	-
4	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN				-
	Rehabilitasi Bangunan Operasional	RM	2.378.679.000	2.378.679.000	-
5	KSOP PANGKAL BALAM				-
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Prioritas Nasional	RM	150.000.000.000	150.000.000.000	-
6	UPP TANJUNG SILOPO				-
	Pengembangan Faspel Laut	RM	5.000.000.000	5.000.000.000	-
7	KANTOR UPP MACCINI BAJI (SULAWESI SELATAN)				-

	Rehabilitasi Fasilitas Pokok Pelabuhan	RM	5.000.000.000	5.000.000.000	-
8	UPP BRONDONG				-
	Pembangunan Fasilitas Pokok Pelabuhan	PNBP	10.000.000.000	10.000.000.000	-
9	UPP LIKUPANG				-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Likupang	RM	30.000.000.000	30.000.000.000	-
10	UPP LAPUKO				-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse	PNBP	20.000.000.000	20.000.000.000	-
11	UPP MALAKONI-ENGGANO				-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malakoni Enggano	RM	15.000.000.000	15.000.000.000	-
12	KSOP PATIMBAN				-
	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban Phase 1-2	PHLN	1.000.000.000	-	1.000.000.000
13	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT				-
	Development And Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) On Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Loan Programm	PHLN	5.000.000.000	5.000.000.000	-
	Pengadaan Sistem Informasi Telekomunikasi Pelayaran Terintegrasi	RM	3.000.000.000	3.000.000.000	-
14	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT				-
	Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Eselon I dan II	RM	13.195.400.000	13.195.400.000	-
15	KSOP PALEMBANG				-
	Pembangunan Pelabuhan New Palembang (Tanjung Carat)	RM	80.000.000.000	80.000.000.000	-
16	KSOP AMBON				-
	Pembangunan Pelabuhan New Ambon	RM	81.784.565.000	81.784.565.000	-

#### 4. Sisa Anggaran

URAIAN	PAGU AKHIR	REALISASI S.D DESEMBER	(%)	SISA
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.753.168.167.000</b>	<b>1.703.879.027.915</b>	<b>97,19%</b>	<b>49.289.139.085</b>
RM	1.753.168.167.000	1.703.879.027.915	97,19%	49.289.139.085
<b>BELANJA BARANG</b>	<b>3.733.583.589.000</b>	<b>3.644.598.122.816</b>	<b>97,62%</b>	<b>88.985.466.184</b>
RM	2.422.473.482.000	2.352.528.400.366	97,11%	69.945.081.634
PNBP	1.302.587.103.000	1.283.846.346.637	98,56%	18.740.756.363
BLU	1.484.796.000	1.228.417.813	82,73%	256.378.187
HIBAH LN	7.038.208.000	6.994.958.000	99,39%	43.250.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.009.735.511.000</b>	<b>3.796.309.989.382</b>	<b>94,68%</b>	<b>213.425.521.618</b>
RM	949.709.954.000	939.346.497.808	98,91%	10.363.456.192
<b>PHLN</b>	<b>1.811.425.083.000</b>	<b>1.615.516.065.969</b>	<b>89,18%</b>	<b>195.909.017.031</b>
PNBP	990.150.535.000	985.508.205.315	99,53%	4.642.329.685
BLU	1.351.242.000	1.310.748.806	97,00%	40.493.194
SBSN	257.098.697.000	254.628.471.484	99,04%	2.470.225.516
<b>TOTAL</b>	<b>9.496.487.267.000</b>	<b>9.144.787.140.113</b>	<b>96,30%</b>	<b>351.700.126.887</b>

- a. Belanja Pegawai Rupiah Murni sebesar Rp49.289.139.085,- tersebar di 297 satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Belanja Barang terdapat sisa anggaran belanja barang sebesar Rp88.985.466.184,-
  - 1) Rupiah Murni
    - a) Kegiatan tidak dilaksanakan Kegiatan Pendukung Pembangunan Pelabuhan New Palembang/Tanjung Carat (Padat Karya) Rp20.000.000.000,- akibat masih dalam proses penyelesaian status lahan;
    - b) Kegiatan tidak dilaksanakan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Land Clearing Pembangunan Pelabuhan New Ambon TA. 2021 Rp.4.880.543.000,- akibat masih dalam proses penyelesaian status lahan;
    - c) Sisa Belanja Barang Operasional sebesar Rp.45.064.538.634,- (Perjadin, Pemeliharaan, ATK, DII) tersebar di 302 satker;
  - 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sisa Belanja Barang Operasional sebesar Rp.18.740.756.363,- (Perjadin, Pemeliharaan, ATK, DII) tersebar di 302 satker;
  - 3) Badan Layanan Umum  
Sisa Kegiatan Badan Layanan Umum sebesar Rp.256.378.187,-;
  - 4) Hibah Luar Negeri  
Sisa Kegiatan Hibah Luar Negeri sebesar Rp.43.250.000,-;
- c. Belanja Modal terdapat sisa anggaran belanja modal sebesar Rp.213.425.521.618,-
  - 1) Rupiah Murni
    - a) Sisa Kegiatan Belanja modal Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Likupang sebesar Rp.4.782.379.422,- akibat perubahan design rencana pekerjaan;
    - b) Sisa Kegiatan Belanja modal Pembangunan/Rehabilitasi pelabuhan, kapal, menara suar dan lainnya sebesar Rp.5.581.076.770,-;
  - 2) Pinjaman Luar Negeri
    - a) Sisa Kegiatan PHLN Pembangunan Pelabuhan Patimban Rp.137.543.945.393,- hasil review BPKP terdapat penghematan penggunaan pinjaman loan IP577;
    - b) Sisa Kegiatan PHLN *REHABILITATION DONGGALA AND WANI PORT* sebesar Rp52.365.071.638,- karena perlunya studi tambahan untuk memastikan dan mengkonfirmasi safety factor pada hasil analisa teknis kegunaan dan lifuifaksi pada Terminal Wani dan Donggala yang membutuhkan waktu tambahan 2-3 bulan pelaksanaan (semula rencana pelaksanaan bulan desember 2021 menjadi februari 2022);
    - c) Kegiatan tidak dilaksanakan *DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF INDONESIAN AIDS TO NAVIGATION (ATON) ON ECONOMIC DEVELOPMENT COOPERATION FUND (EDCF) LOAN PROGRAMME* sebesar Rp.5.000.000.000,- karena belum dilaksanakan proses kontrak;
  - 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Sisa Kegiatan Belanja modal Pembangunan/Rehabilitasi pelabuhan, kapal, menara suar dan lainnya sebesar Rp.4.642.329.685,-
  - 4) Badan Layanan Umum  
Sisa Kegiatan Badan Layanan Umum sebesar Rp.40.493.194,-;
  - 5) Surat Berharga Syariah Negara  
Sisa Kegiatan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp.2.470.225.516,-

## 5. Data Rincian Realisasi Belanja Barang Subsidi Perintis Swasta, Penugasan dan Tol Laut Tahun 2021

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
								<b>680.437.200.181</b>	<b>671.085.649.093</b>	
1	KSOP Kotabaru - Batulicin	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kotabaru Kode Trayek R-12	PL.107/15/15/KSOP.KBB L-2020	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	9.717.439.093	9.694.467.253	
2	KSOP Tarakan	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tarakan Kode Trayek R-13 Tahun Anggaran 2021	PL.107/1/3/KSOP.Trk-2020	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	01-JAN-21	31-DEC-21	364	6.801.852.030	6.801.852.030	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-13 Pangkalan Tarakan Tahun Anggaran 2021	PL.107/1/7/KSOP.Trk-21	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	13-JUL-21	28-SEP-21	77	529.042.649	529.042.649	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-13 Pangkalan Tarakan Tahun Anggaran 2021	PL.107/1/8/KSOP.Trk-21	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	05-OCT-21	31-DEC-21	87	2.215.819.750	2.215.819.750	
3	KSOP Gorontalo	Pekerjaan Penyelenggaraan Pelayaran Perintis Trayek R-41	PL.107/1/4/KONTRAK.R41/KSOP.GTO-2021	PT. LUAS LINE	04-JAN-21	31-DEC-21	361	12.098.172.000	12.098.172.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Perintis Trayek R-40	PL.107/1/3/KONTRAK.R40/KSOP.GTO-2021	PT SINAR SARITAMA MANDIRI	02-JAN-21	31-DEC-21	363	9.949.703.000	9.949.703.000	
4	UPP Tahuna	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tahuna Kode Trayek R-39 Tahun Anggaran 2021	HK.107/2/2/UPP.THN-20	PT.PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	01-JAN-21	31-DEC-21	364	7.752.452.000	7.752.452.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tahuna Kode Trayek R-39 Tahun Anggaran 2021	ADD.07/HK.107/2/2/UPP.THN-21	PT.PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	23-NOV-21	31-DEC-21	38	754.270.000	754.270.000	
5	KSOP Teluk Palu	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Wani Kode Trayek R-48 Tahun Anggaran 2021	PL.107/1/2/R-48/KSOP.Tik. Palu-20	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	01-JAN-21	31-DEC-21	364	10.584.337.000	10.584.337.000	
		Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Wani Kode Trayek R-47	PL.107/1/1/R-47/KSOP.Tik. Palu-20	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	03-JAN-21	31-DEC-21	362	8.758.016.000	8.758.016.000	
6	UPP P O S O	Penyelenggaraan Pelayaran Perintis R-46 Swasta Tahun Anggaran 2021	PL.107/1/6/UPP.PSO-2020	PT. PELAYARAN ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	10.813.954.484	9.846.607.590	
		Penyelenggaraan Pelayaran Perintis R-45 Swasta Tahun Anggaran 2021	PL.107/25/5/UPP.PSO-2020	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	02-JAN-21	31-DEC-21	363	12.136.991.770	10.943.688.199	
7	UPP PARIGI	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Parigi Kode Trayek R-52 Tahun Anggaran 2021	PL.107/57/05/UPP.PRG-2020	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	01-JAN-21	31-DEC-21	364	8.566.134.140	8.566.134.140	
8	KSOP Kendari	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kendari Kode Trayek R-54 Tahun Anggaran 2021	PL.107/20/245/KSOP.KDI-2021	PT. SELVI TRANS INDO	02-JAN-21	31-DEC-21	363	8.411.956.000	8.234.167.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kendari Kode Trayek R-55 Tahun Anggaran 2021	PL.107/20/246/KSOP.KDI-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	14.215.391.000	14.215.391.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kendari Kode Trayek R-56 Tahun Anggaran 2021	PL.107/21/247/KSOP.KDI-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	14.434.659.000	14.434.023.301	

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
9	KSOP Ambon	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon Kode Trayek R-76 Tahun Anggaran 2021.	PL.106/1/3/ KSOP.ABN-2021	PT. INTI SAMUDERA TIMUR	02-JAN-21	31-DEC-21	363	4.531.420.222	4.441.211.933	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon Kode Trayek R-71 Tahun Anggaran 2021.	PL.106/1/2/ KSOP.ABN-2021	PT. INTI SAMUDERA TIMUR	02-JAN-21	31-DEC-21	363	5.218.507.728	5.147.012.471	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon Kode Trayek R-70 Tahun Anggaran 2021	PL.106/1/1/ KSOP.ABN-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	9.191.713.000	8.257.881.889	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon Kode Trayek R-77 Tahun Anggaran 2021.	PL.106/1/4/ KSOP.ABN-2021	PT.PERUSAHAN PELAYARAN INTI IRAMA LINES	02-JAN-21	31-DEC-21	363	3.661.169.350	3.532.689.732	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon Kode Trayek R-70 Tahun Anggaran 2021.	PL.106/1/1C /KSOP.ABN-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	27-AUG-21	31-DEC-21	126	3.150.000.000	3.150.000.000	
10	KSOP Ternate	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate Trayek R-61 Ta.2021	PL.107/1/1/ KSOP.TTE-2021	PT. AKSAR SAPUTRA LINES	02-JAN-21	31-DEC-21	363	6.608.736.105	6.529.440.873	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate Trayek R-62 Ta.2021	PL.107/1/2/ KSOP.TTE-2021	PT. SELVI TRANS INDO	02-JAN-21	31-DEC-21	363	7.257.874.932	7.257.874.932	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate Trayek R-61	PL.107/6/19 /KSOP.TTE-2021	PT. AKSAR SAPUTRA LINES	23-APR-21	31-DEC-21	252	179.908.800	179.908.800	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate Trayek R-62	PL.107/6/20 /KSOP.TTE-2021	PT. SELVI TRANS INDO	23-APR-21	31-DEC-21	252	363.665.758	363.665.758	
11	KSOP Bima	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pelayaran Angkutan Laut Perintis Pangkalan Bima Trayek R-19 Tahun Anggaran 2021	PL.1.07/714/ KSOP.BMA-2020	PT. KARUNIA UTAMA ASIA TIMUR	01-JAN-21	31-DEC-21	364	15.611.962.000	15.611.962.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pelayaran Angkutan Laut Perintis Pangkalan Bima Trayek R-20 Tahun Anggaran 2021	PL.1.07/715/ KSOP.BMA-2020	PT. KARUNIA UTAMA ASIA TIMUR	01-JAN-21	31-DEC-21	364	11.497.068.000	11.497.068.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pelayaran Angkutan Laut Perintis Pangkalan Bima Trayek R-21 Tahun Anggaran 2021	PL.1.07/716/ KSOP.BMA-2020	PT. KARUNIA UTAMA ASIA TIMUR	01-JAN-21	31-DEC-21	364	9.746.716.000	9.746.716.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pelayaran Angkutan Laut Perintis Pangkalan Bima Trayek R-22 Tahun Anggaran 2021	PL.1.07/83/ KSOP.BMA-2021	PT. SINAR SARITAMA MANDIRI	09-JAN-21	31-DEC-21	356	9.040.815.000	9.040.815.000	
12	KSOP Laurentius Say	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Pangkalan Maumere Kode Trayek 30 Tahun 2021	PL.107/2/10/ KSOP.MRE-2021	PT SINAR SARITAMA MANDIRI	02-JAN-21	31-DEC-21	363	9.556.274.000	9.556.274.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Maumere Kode Trayek R-29 Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/09 /KSOP.MRE-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	8.247.524.000	8.247.524.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Maumere Kode Trayek R-31 Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/11 /KSOP.MRE-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	12.418.174.000	12.418.174.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Maumere Kode Trayek R-28 Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/08 /KSOP.MRE-2021	PT. LUAS LINE	02-JAN-21	31-DEC-21	363	12.550.566.000	12.550.516.000	

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Maumere Kode Trayek R-32 Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/12 /KSOP.MRE-2021	PT. LUAS LINE	02-JAN-21	31-DEC-21	363	12.662.334.000	12.662.334.000	
13	KSOP Waingapu	Penyelenggaraan Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Waingapu R-34 Tahun Anggaran 2021	PL. 107/06/08/K SOP.WPU-2020	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	02-JAN-21	31-DEC-21	363	16.289.034.000	16.289.034.000	
		Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-33 Pangkalan Waingapu Tahun Anggaran 2021	PL. 107/06/07/K SOP.WPU-2020	PT. PELAYARAN WIRAYUDA MARITIM	04-JAN-21	31-DEC-21	361	14.670.108.000	14.670.108.000	
14	KSOP Jayapura	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Jayapura Kode Trayek R-95	PL.107/1/4/ KSOP.JRA-2021	PT. BAYU BAHARI NUSANTARA LINES	11-JAN-21	31-DEC-21	354	5.299.102.000	5.299.053.419	
		Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Jayapura Kode Trayek R-93	PL.107/1/3/ KSOP.JRA-2021	PT. BAYU BAHARI NUSANTARA LINES	11-JAN-21	31-DEC-21	354	3.196.443.372	3.196.443.372	
		Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-95 Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/7/ KSOP.JRA/2021	PT. BAYU BAHARI NUSANTARA LINES	12-NOV-21	31-DEC-21	49	2.788.800.000	2.696.824.500	
15	KSOP B I A K	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Pangkalan Biak R-99	PL. 106 / 1 / 1 / KSOP.BIK-21	PT. PELAYARAN KARYA BERKAT MAKMUR	02-JAN-21	31-DEC-21	363	3.088.468.668	3.088.468.668	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Biak Kode Trayek R-99 Tahun 2021	HK. 107 / 1 / 18 / KSOP.BIK-21	PT. PELAYARAN KARYA BERKAT MAKMUR	02-JUL-21	31-DEC-21	182	5.466.681.332	5.466.681.332	
16	KSOP Manokwari	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Laut Perintis Trayek R-109	PL.108/1/1/ KSOP.MKW-2021	PT.LUAS LINE	02-JAN-21	31-DEC-21	363	6.653.112.000	6.653.112.000	
17	KSOP Sorong	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sorong Trayek R-114 Ta 2021	AL.016/2/1/ KSOP.SRG-2020	PT. SELVI TRANS INDO	02-JAN-21	31-DEC-21	363	6.134.385.000	6.134.385.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sorong Trayek R-115 Ta 2021	AL.016/2/2/ KSOP.SRG-2020	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	9.214.787.000	9.199.163.904	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sorong Trayek R-113 Ta 2021	AL.016/1/20 /KSOP.SRG-2020	PT. PELAYARAN KARYA BERKAT MAKMUR	02-JAN-21	31-DEC-21	363	9.343.956.000	9.343.956.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sorong Trayek R-118 Ta 2021	AL.016/2/4/ KSOP.SRG-2020	PT. PELAYARAN WIRAYUDA MARITIM	02-JAN-21	31-DEC-21	363	16.580.000.000	16.278.213.373	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sorong Trayek R-117 Ta 2021	AL.016/2/3/ KSOP.SRG-2020	PT. PELAYARAN WIRAYUDA MARITIM	02-JAN-21	31-DEC-21	363	9.757.000.000	9.757.000.000	
18	KSOP Merauke	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Merauke Kode Trayek R-100 Tahun Anggaran 2021	HK.107/2/13 /KSOP.MRK-2020	PT. LUAS LINE	01-JAN-21	31-DEC-21	364	6.732.863.516	6.723.758.789	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Merauke Kode Trayek R-103 Tahun Anggaran 2021	HK.107/2/14 /KSOP.MRK-2020	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	01-JAN-21	31-DEC-21	364	5.194.155.726	5.109.230.518	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Merauke Kode Trayek R-105 Tahun Anggaran 2021	HK.107/2/15 /KSOP.MRK-2020	PT. LUAS LINE	01-JAN-21	31-DEC-21	364	11.182.854.681	10.563.142.760	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Merauke Kode Trayek R-107 Tahun Anggaran 2021	HK.107/2/17 /KSOP.MRK-2020	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	01-JAN-21	31-DEC-21	364	4.204.983.159	4.198.037.313	

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Merauke Kode Trayek R-106 Tahun Anggaran 2021	HK.107/2/16 /KSOP.MRK-2020	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	01-JAN-21	31-DEC-21	364	5.269.342.672	5.021.023.679	
19	UPP Saumlaki	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki Kode Trayek R-84	PL.107/1/1/ UPP.SKI-2021	PT.PERUSAHAAN PELAYARAN INTI IRAMA LINES	02-JAN-21	31-DEC-21	363	6.960.503.198	6.960.503.198	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki Kode Trayek R-87	PL.107/1/2/ UPP.SKI-21	PT.PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	02-JAN-21	31-DEC-21	363	10.944.644.729	10.944.644.729	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki Kode Trayek R-89	PL.107/1/3/ UPP.SKI-21	PT.PERUSAHAAN PELAYARAN INTI IRAMA LINES	02-JAN-21	31-DEC-21	363	7.206.688.000	7.206.688.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki Kode Trayek R-90	PL.107/1/4/ UPP.SKI-21	PT.PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	02-JAN-21	31-DEC-21	363	7.568.746.000	7.568.746.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki Kode Trayek R-91	PL.107/1/5/ UPP.SKI-21	PT.PERUSAHAAN PELAYARAN INTI IRAMA LINES	02-JAN-21	31-DEC-21	363	5.721.773.073	5.721.773.073	
20	KSOP Tanjung Emas	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Trayek R-14	PL.107/01/0 1/KSOP.TG.E MAS-2021	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	01-JAN-21	31-DEC-21	364	5.226.094.000	5.226.094.000	
		Konsultan Pengawas Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Trayek R-14 Terhadap Dokumen Teknis Dan Administrasi Pembayaran	PL.108/01/0 8/KSOP.Tg.e MAS-21	PT MEGA OCEAN JAYA	05-MAR-21	31-DEC-21	301	98.521.500	98.521.500	
		Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Trayek R-14 Tahun Anggaran 2021	PL.107/03/0 6/KSOP.TG.E MAS-2021	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	22-JUL-21	04-AUG-21	13	800.000.000	800.000.000	
		Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Trayek R-14 Tahun Anggaran 2021	PL.107/04/1 9/KSOP.Tg.E mas-2021	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	01-NOV-21	31-DEC-21	60	3.810.030.000	3.810.030.000	
21	KSOP Kalianget	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kalianget Kode Trayek R 18 Tahun Anggaran 2021	HK. 107/01/12/K SOP.KLG-2020	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	04-JAN-21	31-DEC-21	361	5.425.840.130	5.425.840.130	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kalianget Kode Trayek R 18 Tahun Anggaran 2021	HK.201A/5/8 /KSOP.Klg-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	23-AUG-21	31-DEC-21	130	1.700.000.000	1.700.000.000	
22	KSOP Teluk Bayur	Pekerjaan Penyelenggaraan Pelayaran Perintis R-3 Pangkalan Teluk Bayur Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/20 /KSOP.TBS-2020	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	01-JAN-21	31-DEC-21	364	9.740.386.299	9.740.386.299	
23	KSOP Pontianak	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-10 Pangkalan Pontianak Ta.2021	PL.107/2/10 /KSOP.PTK-2020	PT.PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	01-JAN-21	31-DEC-21	364	11.447.695.708	11.447.695.708	
24	KSOP Sintete	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sintete R-9 Tahun Anggaran 2021	PL.107/1/1/ KSOP.STT-2020	PT CITRABARU ADINUSANTARA	01-JAN-21	31-DEC-21	364	6.347.790.000	6.347.790.000	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sintete R-9 Tahun Anggaran 2021.	PL.107/1/1/ PNB/KSOP. STT-2020.-	PT CITRABARU ADINUSANTARA	12-MAR-21	31-DEC-21	294	1.275.680.000	1.275.680.000	
25	UPP MAMUJU	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Mamuju Kode Trayek R-44 Tahun Anggaran 2021	PL.107/01/2 4/UPP MU 2020	PT. PELAYARAN ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	7.067.433.000	6.448.867.830	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Mamuju Kode Trayek R-44 Tahun Anggaran 2021	PL.107/01/2 4/UPP MU 2020	PT. PELAYARAN ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	-	-	

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Mamuju Kode Trayek R-44 Tahun Anggaran 2021	PL.107/01/24/UPP.MU-2020	PT. PELAYARAN ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	800.000.000	-	
26	UPP T U A L	Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual Trayek R-82 Ta.2021	HK.107/1/5/K.UPP.TL-2021	PT. SAMUDRA NIAGA SEJAHTERA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	12.671.080.510	12.671.080.510	
		Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual Trayek R-81 Ta.2021	HK.107/1/4/K.UPP.TL-2021	PT.PERUSAHAAN PELAYARAN INTI IRAMA LINES	02-JAN-21	31-DEC-21	363	5.485.789.244	5.485.789.244	
		Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual Trayek R-78 Ta.2021	HK.107/1/1/K.UPP.TL-2021	PT.PERUSAHAAN PELAYARAN INTI IRAMA LINES	02-JAN-21	31-DEC-21	363	7.076.035.414	6.992.178.014	
		Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual Trayek R-79 Ta.2021	HK.107/1/2/K.UPP.TL-2021	PT.INTI SAMUDERA TIMUR	02-JAN-21	31-DEC-21	363	10.399.698.000	9.048.611.154	
		Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual Trayek R-80 Ta.2021	HK.107/1/3/K.UPP.TL-2021	PT.INTI SAMUDERA TIMUR	02-JAN-21	31-DEC-21	363	6.332.879.859	6.332.879.859	
		Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual Trayek R-83 TA.2021	HK.107/1/15/K.UPP.TL-2021	PT.PERUSAHAAN PELAYARAN INTI IRAMA LINES	28-JAN-21	31-DEC-21	337	8.306.305.233	8.306.305.233	
27	UPP Kolonedale	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kolonedale Kode Trayek R-51	PL.106/8/01/UPP.KDL-2021	PT. PELAYARAN PELANGI TUNGGAL IKA	12-FEB-21	31-DEC-21	322	12.698.934.000	12.698.934.000	
28	UPP AMPANA	Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengeoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ampana Kode Trayek R-53	PL.107/131/17/UPP.Amp-2020	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	01-JAN-21	31-DEC-21	364	7.038.068.000	7.038.068.000	
		Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengeoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ampana Kode Trayek R-53 Tahun Anggaran 2021	PL.107/131/17/UPP.-.Amp-2020	PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	01-JAN-21	31-DEC-21	364	713.000.000	713.000.000	
29	UPP Babang	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Babang Kode Trayek R-65 Tahun Anggaran 2021	HK.107/1/22/UPP.BBG-2020	PT. KARUNIA UTAMA ASIA TIMUR	01-JAN-21	31-DEC-21	364	11.023.472.000	11.023.472.000	
		Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Pangkalan Babang Kode Trayek R-66 Tahun Anggaran 2021	HK.107/1/23/UPP.BBG-2020	PT. KARUNIA UTAMA ASIA TIMUR	01-JAN-21	31-DEC-21	364	7.148.700.000	7.148.700.000	
30	UPP Sanana	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sanana Kode Trayek R-68 Tahun Anggaran 2021	HK.107/1/10/UPP.SNA-2020	PT.PELAYARAN BERKAT ABADI JAYA MAKMUR	01-JAN-21	31-DEC-21	364	8.914.221.000	8.689.748.100	
		Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Sanana Kode Trayek R-67 Tahun Anggaran 2021	HK.107/1/9/UPP.SNA-2020	PT.PELAYARAN BERKAT ABADI JAYA MAKMUR	01-JAN-21	31-DEC-21	364	14.041.845.000	13.571.233.594	
31	UPP CALANG	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Calang R-2 Tahun 2021	PL.106/01/25/UPP.CLG-2021	PT SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	01-JAN-21	31-DEC-21	364	10.244.086.847	10.244.086.847	
32	UPP Tilamuta	Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tilamuta Kode Trayek R-42 Tahun Anggaran 2021	HK.107/1/7/UPP.TLM-2020	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	01-JAN-21	24-JUL-21	204	6.316.915.000	6.316.915.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tilamuta Kode Trayek R-42 Tahun Anggaran 2021	HK.107/1/10/UPP.TLM-2021	PT. PELAYARAN MANDALA SEJAHTERA ABADI	05-JUL-21	31-DEC-21	179	4.117.622.000	4.117.622.000	

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
33	UPP Pagimana	Pekerjaan Penyelenggaraan Pelayaran Perintis Pangkalan Pagimana Kode Trayek R-49 Swasta	PL.107/5/07/UPP.PGN-2020	PT. PELAYARAN ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA	05-JAN-21	31-DEC-21	360	10.091.338.500	10.091.338.500	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Pelayaran Perintis Pangkalan Pagimana Kode Trayek R-50 Swasta	PL.107/5/08/UPP.PGN-2020	PT. PELAYARAN ANUGERAH MAKMUR SEJAHTERA	05-JAN-21	31-DEC-21	360	6.788.628.000	6.788.628.000	
34	KSOP Kupang	Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-26 Tahun Anggaran 2021	PL.107/1/3/KSOP.Kpg-2021	PT. SINAR SARITAMA MANDIRI	15-JAN-21	31-DEC-21	350	8.673.509.000	7.998.683.405	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-27 Tahun Anggaran 2021	PL.107/3/11/KSOP.Kpg-2020	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	02-JAN-21	31-DEC-21	363	8.962.551.000	8.962.551.000	
		Lanjutan Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-26 Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/16/KSOP.Kpg-2021	PT. SINAR SARITAMA MANDIRI	11-NOV-21	05-DEC-21	24	225.000.000	216.902.174	
		Lanjutan Pekerjaan Penyelenggaraan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Kode Trayek R-27 Tahun Anggaran 2021	PL.107/2/17/KSOP.Kpg-2021	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	11-NOV-21	31-DEC-21	50	725.000.000	648.813.065	
	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2021	01.KTRK/PRTS/PELNI/I/2021 dan TH.01.08-01/SS/2021	PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA	08-JAN-21	31-DEC-21	357	455.263.975.232	455.263.975.232	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021	01/KONTRAK-TL/PPK/PELNI/XII/DITLALA-2020	PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA	01-JAN-21	31-DEC-21	364	179.750.920.723	179.750.920.723	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021	05/KONTRAK-TL/PPK/DL/XII/DITLALA-2020	PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)	01-JAN-21	31-DEC-21	364	70.383.298.541	70.383.298.541	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021	03/KONTRAK-TL/PPK/ASDP/XII/DITLALA-2020	PT. ASDP INDONESIA FERRY	01-JAN-21	31-DEC-21	364	31.993.282.840	31.993.282.840	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-9 Tahun Anggaran 2021	01/KONTRAK-TL/PPK/T-9/XII/DITLALA-2020	PT. LUAS LINE	05-JAN-21	31-DEC-21	360	19.557.915.193	19.557.915.193	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-12 Tahun Anggaran 2021	02/KONTRAK-TL/PPK/T-12/XII/DITLALA-2020	PT PELAYARAN PELANGI TUNGGAL IKA	05-JAN-21	31-DEC-21	360	19.297.333.940	19.297.333.940	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-1 Tahun Anggaran 2021	11/KONTRAK-TL/PPK/T-1/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03-FEB-21	31-DEC-21	331	16.992.909.324	16.992.909.324	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-18	07/KONTRAK-TL/PPK/PELNI/I/DITLALA-2021	PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA	19-JAN-21	31-DEC-21	346	13.375.411.806	13.375.411.806	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-17 Tahun Anggaran 2021	12/KONTRAK-TL/PPK/T-17/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03-FEB-21	31-DEC-21	331	7.700.730.769	7.700.730.769	

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-11 Tahun Anggaran 2021	04/KONTRA K-TL/PPK/T-11/I/DITLAL A-2021	PT. TEMAS, TBK	03-FEB-21	31-DEC-21	331	6.505.670.000	6.505.670.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-21 Tahun Anggaran 2021	14/KONTRA K-TL/PPK/T-21/I/DITLAL A-2021	PT. TEMAS, TBK	03-FEB-21	31-DEC-21	331	3.847.850.000	3.847.850.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-5 Tahun Anggaran 2021	15/KONTRA K-TL/PPK/H-5/I/DITLAL A-2021	PT. TEMAS, TBK	03-FEB-21	31-DEC-21	331	2.274.104.000	2.274.104.000	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-20 Tahun Anggaran 2021	13/KONTRA K-TL/PPK/T-20/I/DITLAL A-2021	PT. TEMAS, TBK	03-FEB-21	31-DEC-21	331	1.787.523.200	1.787.523.200	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-27 Tahun Anggaran 2021	20/KONTRA K-TL/PPK/ T-27/X/DITLAL A-2021	PT. TEMAS, TBK	22-OCT-21	31-DEC-21	70	1.639.096.759	1.639.096.759	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021 (Trayek T-22 Sd T-26)	06/KONTRA K-TL/PPK/ASD P/XII/DITLAL A-2020	PT. ASDP INDONESIA FERRY	01-JAN-21	31-DEC-21	364	626.065.228	626.065.228	
		Pekerjaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-3 Tahun Anggaran 2021	08/KONTRA K-TL/PPK/H-3/II/DITLAL A-2021	PT. MERATUS LINE	17-FEB-21	31-DEC-21	317	449.242.250	320.615.431	

## 6. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN S.D SEMESTER 2 TA. 2021

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat Nomor KU.002/11/1/DJPL/2021 tanggal 4 Oktober 2021 telah menginstruksikan kepada KPA untuk menyampaikan SPTJM Prognosa Penyerapan Anggaran pada setiap Satker/UPT
- b. Sesuai surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.201/4/15/DJPL/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal langkah-langkah akhir tahun Ditjen hubla telah memberikan arahan kepada UPT/Satker untuk melaksanakan hal sebagai berikut:
  - 1) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan kontrak yang belum dilakukan proses lelang dan kontrak;
  - 2) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan non kontrak yang belum dilaksanakan;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang masih rendah realisasi pembayarannya;
  - 4) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan/telah berjalan (kontraktual/non kontraktual), namun belum dicairkan ke KPPN (outstanding);
  - 5) Memonitor Rencana Penarikan Dana dan proses pencairan anggaran guna menghindari deviasi antara target dan realisasi anggaran;
  - 6) Memproses pencairan dana (SPM/SP2D) terhadap kegiatan yang telah selesai/telah jatuh tempo tanpa menunggu batas akhir;
  - 7) Berkoordinasi dengan KPPN setempat terhadap data dukung pencairan dana guna menghindari kesalahan dan tidak dapat ditagih.
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat keputusan nomor KP.986/DJPL/2021 telah membentuk Tim Monitoring Penyerapan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap 20 UPT/Satker yang realisasinya masih rendah

- untuk memonitor realisasi anggaran secara intens kepada UPT/Satker yang masih terkendala dalam penyerapannya
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat tugas ke UPT/Satker yang realisasinya masih rendah untuk memonitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran Satker UPT/Satker yang realisasinya masih rendah dan mendorong percepatan realisasi anggaran 2021
  - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama DJA dan DJPB Kemenkeu pada tanggal 25 Nopember 2021 melakukan pendampingan melalui daring dengan seluruh KPA / PPK dengan realisasi rendah dan luring dengan Satker Pusat guna mendorong percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran Rekomendasi hasil monitoring dan pendampingan realisasi anggaran antara lain:
    - 1) Penambahan tenaga dan alat serta waktu kerja kegiatan konstruksi yang terlambat;
    - 2) Memberikan teguran tertulis kepada pelaksana yang tidak mematuhi rekomendasi percepatan realisasi anggaran sebagai catatan pemilihan pelaksana berikutnya;
    - 3) Pencairan dengan garansi bank jika administrasi pencairan belum selesai pada 15 Desember 2021;
    - 4) Adendum kontrak pekerjaan tambahan yang bisa selesai 2021;
    - 5) Khusus PHLN Patimban, menyampaikan permohonan perpanjangan batas akhir pencairan KPPN dan JICA sampai akhir Desember 2021. Porsi Rupiah (IDR) disampaikan sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 dan Porsi Japanese Yen disampaikan sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
    - 6) Revisi anggaran kelebihan gaji pegawai untuk kegiatan operasional (Covid-19) dalam satu Satker dengan persetujuan Eselon 1 sampai 30 Nopember 2021;
    - 7) Revisi anggaran bersumber PNPB untuk kegiatan lain sesuai tusi sampai 17 Desember 2021;

#### G. PENJELASAN SINGKAT AIDS TO NAVIGATION FUND (ANF)

1. Dalam rangka kerjasama 3 Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization (IMO)* dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*, telah dibentuk forum kerjasama **Cooperative Mechanism** yang didasarkan pada kesepakatan **Ministerial Meeting di Batam tahun 2005, Jakarta Statement '2005 (Senior Officer Meeting), Kuala Lumpur Statement '2006** , serta **Singapore Statement '2007**, untuk mengaplikasikan **article 43 UNCLOS 1982** yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan & perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
2. *Cooperative Mechanism* memiliki 3 komponen, yaitu:
  - a. **Cooperation Forum (CF)**:  
Komponen CM yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai issue-issue yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka & Singapura.
  - b. **Project Coordination Committee (PCC)**:  
Komponen CM yang bertujuan untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka CM
  - c. **Aids to Navigation Fund (ANF)**:  
Komponen CM yang bertujuan untuk menghimpun kontribusi dari *user states* dan *stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi di selat Malaka & Singapura.

3. *Aids to Navigation Fund* (ANF) merupakan salah satu Komponen *Cooperative Mechanism* yang didirikan oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan tujuan untuk menghimpun kontribusi dari *User States* dan *Stakeholders* dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di selat Malaka & Singapura. ANF sendiri dioperasikan dengan *Rules of Procedure* serta *Rules and Regulation* yang diatur dan disetujui oleh Komite ANF sebagai badan tertinggi yang terdiri dari wakil-wakil tiga negara pantai, *User States* and *Stakeholder* yang berkontribusi serta IMO sebagai pengamat. ANF bersidang setiap 6 bulan di negara sekretariat untuk menerima laporan, membahas serta memutuskan kebijakan mengenai issue-issue yang berkembang dalam pengelolaan ANF.
4. Mengingat pendanaan ANF yang bersifat sukarela, sehingga dana ANF menjadi sangat terbatas dan bersifat suplemen bagi 3 Negara Pantai. Adapun berdasarkan *User States and Stakeholder*, dana ANF hanya dapat digunakan untuk:
  - a. Biaya yang terkait dengan pembangunan SBNP di Selat Malaka dan Singapura yang sebelumnya telah disetujui oleh 3 Negara Pantai pada pertemuan *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*;
  - b. Biaya yang terkait dengan perbaikan, perawatan terhadap SBNP di Selat Malaka dan Singapura seperti biaya pelatihan personil yang terlibat langsung dalam kegiatan perawatan SBNP, biaya pembelian suku cadang SBNP dan biaya operasional kegiatan perawatan SBNP.
  - c. Dana ANF tidak dapat digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, akomodasi, ataupun biaya untuk menghadiri pertemuan baik yang terkait dengan ANF maupun yang tidak terkait dengan ANF.
5. Dalam pengoperasiannya, ketiga negara pantai mempunyai beberapa kewajiban yang harus disampaikan kepada komite ANF, antara lain:
  - a. Menyusun *Plan Maintenance Programme (PMP)* yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan SBNP maupun replacement SBNP dalam kurun waktu 10 tahun kedepan secara mandiri oleh masing-masing negara pantai. Forum TTEG akan membahas kajian PMP tersebut yang selanjutnya akan diajukan kepada komite ANF untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. Melaksanakan kegiatan *Joint Inspection Round Work* setiap 6 bulan sekali bersama dengan *Performance Auditor* yang ditunjuk oleh komite ANF. Hasil dari *Joint Inspection Round Work* harus disampaikan pada kepada komite ANF untuk dievaluasi;
  - c. Menyusun laporan kegiatan perawatan dan pemeliharaan SBNP di Selat Malaka dan Singapura serta menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*;
  - d. Menyampaikan laporan keuangan beserta bukti pembayaran kepada Sekretariat ANF. Selanjutnya Sekretariat ANF dan Independent Auditor yang ditunjuk oleh komite ANF akan mengevaluasi laporan keuangan beserta bukti pembayaran yang disampaikan oleh 3 negara pantai dan melaporkannya kepada komite ANF;
  - e. Menyusun program kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan PMP yang telah disetujui oleh komite ANF dan menyampaikannya pada pertemuan ANF *Committee Meeting*.

6. Terdapat Pengesahan Hibah Langsung berupa Kas Satker Kenavigasian Pusat TA. 2021 sebesar Rp24.959.664.269,- dengan Nomor Register 70878801 dan tanggal 28 Desember 2021.
7. Terdapat Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Satker Kenavigasian Pusat sebesar Rp20.701.471.289,-. Nilai tersebut disajikan sesuai pada rekening per 31 Desember 2021 sebesar USD1.450.799,41 dengan Kurs Tengah BI 31 Desember 2021 sebesar Rp14.269.

#### H. PENGADAAN KAPAL DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

1. Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut membangun kapal Pelayaran Rakyat yang telah diserahkan Ke Pemda di seluruh Indonesia. Dari 138 Kapal yang tercatat di Aplikasi Persediaan dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. 133 Kapal sudah diserahkan ke Pemda terkait
  - b. 4 Kapal Terbakar dan akan dievaluasi lebih lanjut  
Kapal tersebut yaitu Kapal Banawa Nusantara 38, Kapal Banawa Nusantara 40, Kapal Banawa Nusantara 43, dan Kapal Banawa Nusantara 44.
  - c. 1 Kapal Tenggelam dan akan dievaluasi lebih lanjut  
Kapal tersebut yaitu Kapal Banawa Nusantara 49.
2. Rincian Kapal Pelra yang terbakar dan tenggelam adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(6)	(9)
1	000014	Kapal Banawa Nusantara 38	Rp 2.331.787.944	Terbakar dan Dalam Proses Penyidikan
2	000016	Kapal Banawa Nusantara 40	Rp 2.331.787.943	Terbakar dan Dalam Proses Penyidikan
3	000019	Kapal Banawa Nusantara 43	Rp 2.331.787.944	Terbakar dan Dalam Proses Penyidikan
4	000020	Kapal Banawa Nusantara 44	Rp 2.331.787.943	Terbakar dan Dalam Proses Penyidikan
5	000025	Kapal Banawa Nusantara 49	Rp 2.353.803.394	Tenggelam dan Sudah Klaim Asuransi
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 11.680.955.168</b>	

- a. Progress Tindak Lanjut Kapal Terbakar  
Berdasarkan Berita Acara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 001/BA/IT.II/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 bahwa belum dapat diketahui penyebab terjadinya kebakaran kapal PELRA dan memerlukan pembuktian secara forensic oleh tim forensic Mabes POLRI. Selain itu, terdapat Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/44/1/ITJEN-2019 perihal Kasus Terbakarnya 4 (empat) unit Kapal PELRA di Pelabuhan Kendari tanggal 21 Oktober 2019. Hasil Laporan Penyelidikan Kebakaran Kapal Bantuan Kementerian Perhubungan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kendari Sektor Kawasan Pelabuhan Kendari, yaitu:
  - 1) Berdasarkan hasil olah TKP bersama identifikasi di atas kapal bantuan Kementerian Perhubungan KM. Banawa Nusantara 43, KM. Banawa Nusantara 44, KM. Banawa Nusantara 38, dan KM. Banawa Nusantara 40 yang terbakar tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana.
  - 2) Berdasarkan hasil interogasi penyelidik terhadap para saksi-saksi serta informan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat ada pelaku yang membakar dan tidak

ada saksi yang mengetahui penyebab kebakaran kapal dan tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana.

b. Progress Tindak Lanjut Kapal Tenggelam

Terdapat Pendapatan Pembayaran Klaim Asuransi atas kapal KM Banawa Nusantara 49 yang mengalami kecelakaan (Tenggelam) dengan nilai klaim sebesar Rp2.330.265.360,- pada periode pelaporan TA. 2020 dan TA. 2021 yang kemudian telah dilakukan 10 kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Tahap Angsuran	Nilai Angsuran	Tanggal Pembayaran Angsuran	NTB (Nomor Transaksi Bank)	NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
1	233.265.360	23 Desember 2020	964649048243	054867QLTKGBR6TE
2	233.000.000	22 Januari 2021	591217212361	844FFON9V86D858U
3	233.000.000	24 Februari 2021	168546933644	973218N3DNEVPENV
4	233.000.000	24 Maret 2021	791366236672	A7D3B7QLTSVHT5IQ
5	233.000.000	28 April 2021	798304021296	165898N3DNL2NB39
6	233.000.000	25 Mei 2021	814087919909	579A155DEDED1VJH
7	233.000.000	24 Juni 2021	187824434367	D02330N9V8LOQNRM
8	233.000.000	26 Juli 2021	073911590843	EB6C58N3DNTR5VK3
9	233.000.000	26 Agustus 2021	579804955290	399CA0N9V8RDG7GK
10	233.000.000	22 September 2021	760470022433	6E66C48VUJ7RIBEI
<b>Total</b>	<b>2.330.265.360</b>			

3. Pengadaan Kapal Bottom Glass

Berdasarkan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Perhubungan (Bunaken, 5 Juli 2019) Pembangunan sarana pariwisata maritim berupa kapal wisata bottom glass dan Rakor Presiden bersama 5 Menteri dalam menentukan pengembangan lima destinasi wisata super prioritas, diantaranya: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang (Sulawesi Utara). Pembangunan kapal bottom glass ini digunakan untuk melihat keindahan bawah laut Indonesia. Kapal bottom glass dibuat untuk memenuhi dan melengkapi ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pariwisata Indonesia.

Satker Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut Pusat membangun 4 (empat) unit Kapal Wisata Bottom Glass dengan tipe Catamaran (2 unit) dan tipe Trimaran (2 unit) melalui kontrak MYC (2020-2022). Berkontrak dengan 4 Galangan, yakni PT. Bayu Bahari Sentosa (Paket 1), PT. Proskuneeo Kadarusman (Paket 2), PT. Dumas Tanjung Perak Shipyards (Paket 3), dan PT. Ben Santosa (Paket 4). Konsultan Pengawas yakni PT. Zatria Awan Consultant (Paket 1 dan Paket 2), PT. Mega Ocean Jaya (Paket 3), dan PT. Dharma Kreasi Nusantara (Paket 4) dengan kronologis sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	27 Januari 2020	Rapat Rencana Calon Penerima Hibah Kapal Wisata Glass Bottom
2	01 April 2021	Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut hal Tindak Lanjut Rencana Calon Penerima Hibah Kapal Wisata Bottom Glass kepada Calon Penerima Hibah.
3	20 April 2021	Surat Bupati Minahasa Utara hal Permohonan Bantuan/Hibah Kapal Wisata Bottom Glass
4	26 April 2021	Surat Bupati Manggarai Barat hal Permohonan Bantuan Hibah Kapal Wisata Glass Bottom- Catamaran
5	31 Mei 2021	Surat Kadishub Provinsi Sulawesi Utara hal Mohon Bantuan / Hibah Kapal Bottom Glass

6	3 Juni 2021	FGD Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapal Wisata Bottom Glass di Jakarta
7	23 Juni 2021	FGD Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapal Wisata Bottom Glass di Labuan Bajo
8	10 September 2021	Surat Direktur Lala hal Penyampaian Data Dukung Hibah Kapal Wisata Bottom Glass
9	15 September 2021	FGD Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapal Wisata Bottom Glass di Labuan Manado
10	15 September 2021	Surat Kepala biro LPPBMN perihal Klarifikasi dan Informasi Persiapan Hibah Kapal Wisata Bottom Glass
11	1 Oktober 2021	Surat Plt. Dirjen Hubla hal Permintaan Perbaikan Permohonan Persetujuan Hibah Kapal Wisata Bottom Glass
12	2 Nopember 2021	Koordinasi Hibah Kapal Wisata Bottom Glass

Pembangunan 4 Kapal Bottom Glass dicatat sebagai Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses dengan total nilai Rp67.079.580.439,-. Pembangunan kapal tersebut masih akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022. Pemberian Hibah Kapal tersebut juga direncanakan akan diberikan pada Tahun Anggaran 2022 kepada Pemda Likupang dan Pemda Labuan Bajo dengan masing-masing Pemda sebanyak 2 unit kapal.

#### I. DAFTAR KAPAL DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Terdapat jumlah kapal sebanyak 155 unit pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan rincian sebagai berikut:

1. Kapal Tercatat Definitif : 147 Unit
2. Kapal Tercatat di KDP : 8 Unit

Rincian Kapal yang tercatat di KDP adalah sebagai berikut:

No.	NAMA KAPAL	PAKET	UKURAN DWT/GT	Panjang	Lebar	Tinggi Sarat	Kapasitas Angkut Penumpang	TAHUN PEMBANGUNAN	GALANGAN KAPAL	STATUS SIMAK
<b>I. TIPE 2000 GT</b>										
1	KM. Sabuk Nusantara 71	E	2000 GT					2018	PT. Janata Marina Indah (Semarang)	Masih tercatat di KDP
2	KM. Sabuk Nusantara 73	G	2000 GT					2018	PT. DKB & PT. Krakatau Shipyard (Jakarta)	Masih tercatat di KDP
3	KM. Sabuk Nusantara 74	H	2000 GT					2018	PT. Steadfast Marine (Pontianak)	Masih tercatat di KDP
4	KM. Sabuk Nusantara 76	J	2000 GT					2018	PT. Steadfast Marine (Pontianak)	Masih tercatat di KDP
5	KM. Sabuk Nusantara 89	W	2000 GT					2018	PT. Steadfast Marine (Pontianak)	Masih tercatat di KDP
<b>II. TIPE 1200 GT</b>										
6	KM. Sabuk Nusantara 111	T	1200 GT					2018	PT. Prakitri Hasta Dharma + PT. Daya Radar Utama	Masih tercatat di KDP
<b>III. TIPE 500 DWT</b>										
7	KM. Sabuk Nusantara 54		500 DWT	51 M	9.0 M	3.2 M	250	2014	<b>PROSES PENYELESAIAN</b>	Masih tercatat di KDP
<b>IV. KAPAL KONTAINER 100 TEUS</b>										
8	KM. Kendhaga Nusantara 14	N	1800 GT					2018	PT. DKB & PT. Krakatau Shipyard (Cilegon)	Masih Tercatat di KDP

Telah dilakukan pengalihan pencatatan kapal yang dicatat di Satker lain menjadi dicatat di Satker Peningkatan Lalu Lintas Angkutan Pusat sebanyak 9 Kapal yang sebelumnya tercatat pada Satker KSOP Ambon (2 Kapal) , KSOP Jayapura (1 Kapal), UPP Kwandang (1 Kapal), KSOP Merauke (1 Kapal), KSOP Sorong (1 Kapal), KSOP Tanjung Pinang (1 Kapal), KSOP Tanjung Wangi (1 Kapal), dan UPP Saumlaki (1 Kapal) pada kegiatan tanggal 30 Agustus s.d. 04 September 2021 sesuai surat undangan rapat No. UM.207/36/14/DJPL/2021. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1418 Tahun 2020, kapal dengan jenis KM. Gandha Nusantara 1 dan KM Gandha Nusantara 2 telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur sesuai dengan Perjanjian Hibah No. PL.301/15/18Phb2020 dan No.552/4668/113/2020 dan BAST No. 576 Tahun 2020 dan No.552/4669/113/2020.

#### J. Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis

NO	NAMA KEGIATAN	UNIT KERJA	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TGL MULAI KONTRAK	TGL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	%	SUMBER DANA	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
1	Subsidi Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara TA. 2021	Satker 439454	01.KTRK/PRTS/PELNI/I/2021 dan TH.01.08-01/SS/2021 Tanggal 08 Januari 2021	PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	08-Jan-21	31-Dec-21	186.776.558.000	455.263.975.232	100%	PNBP	455.263.975.232
	Subsidi Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara TA. 2021	Satker 439454	01.KTRK/PRTS/PELNI/I/2021 dan TH.01.08-01/SS/2021 Tanggal 08 Januari 2021	PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	08-Jan-21	31-Dec-21	268.487.418.000				
<b>TOTAL</b>							<b>455.263.976.000</b>	<b>455.263.975.232</b>		<b>RM &amp; PNBP</b>	<b>455.263.975.232</b>

#### K. Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut)

NO	JENIS KEGIATAN YANG DIKONTRAKAN/SPK	NILAI KONTRAK PER TRAYEK	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL KONTRAK		KONTRAK/SPK		KETERANGAN
					MULAI	SELESAI	CAPAIAN	%	
1	PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TA 2021	Rp 179.750.920.723	01/KONTRAK-TL/PPK/PELNI/XII/DITLALA-2020	PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)	01 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 179.750.920.723	100%	PNBP
2	PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TRAYEK T-18 TA 2021	Rp 13.375.411.806	07/KONTRAK-TL/PPK/PELNI/I/DIT LALA-2021	PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)	19 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 13.375.411.806	100%	PNBP
3	PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TA 2021	Rp 70.383.298.541	05/KONTRAK-TL/PPK/DL/XII/DITLALA-2020	PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)	01 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 70.383.298.541	100%	PNBP
4	PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TA 2021	Rp 31.993.282.840	03/KONTRAK-TL/PPK/ASDP/XII/DITLALA-2020	PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	01 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 31.993.282.840	100%	PNBP
5	PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TA 2021 (T-22 S.D T-26)	Rp 626.065.228	06/KONTRAK-TL/PPK/ASDP/XII/DITLALA-2020	PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	01 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 626.065.228	100%	PNBP

NO	JENIS KEGIATAN YANG DIKONTRAKAN/SPK	NILAI KONTRAK PER TRAYEK	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL KONTRAK		KONTRAK/SPK		KETERANGAN
					MULAI	SELESAI	CAPAIAN	%	
6	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-12 TA 2021	Rp 19.297.333.940	02/KONTRAK-TL/PPK/T-12/XII/DITLAL A-2020	PT PELAYARAN PELANGI TUNGGAL IKA	05 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 19.297.333.940	100%	RM
7	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-9 TA 2021	Rp 19.557.915.193	01/KONTRAK-TL/PPK/T-9/XII/DITLAL A-2020	PT. LUAS LINE	05 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 19.557.915.193	100%	RM
8	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-3 TA 2021	Rp 449.242.250	08/KONTRAK-TL/PPK/H-3/II/DITLALA-2021	PT. MERATUS LINE	17 Januari 2021	31 Desember 2021	Rp 320.615.431	71%	RM
9	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-1 Tahun Anggaran 2021	Rp 16.992.909.324	11/KONTRAK-TL/PPK/T-1/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03 Februari 2021	31 Desember 2021	Rp 16.992.909.324	100%	PNBP dan RM
10	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-11 Tahun Anggaran 2021	Rp 6.505.670.000	04/KONTRAK-TL/PPK/T-11/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03 Februari 2021	31 Desember 2021	Rp 6.505.670.000	100%	RM
11	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-17 Tahun Anggaran 2021	Rp 7.700.730.769	12/KONTRAK-TL/PPK/T-17/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03 Februari 2021	31 Desember 2021	Rp 7.700.730.769	100%	RM
12	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-20 Tahun Anggaran 2021	Rp 1.787.523.200	13/KONTRAK-TL/PPK/T-20/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03 Februari 2021	31 Desember 2021	Rp 1.787.523.200	100%	RM
13	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-21 Tahun Anggaran 2021	Rp 3.847.850.001	14/KONTRAK-TL/PPK/T-21/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03 Februari 2021	31 Desember 2021	Rp 3.847.850.001	100%	RM
14	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek T-27 Tahun Anggaran 2021	Rp 1.639.096.759	20/KONTRAK-TL/PPK/ T-27/X/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	22 Oktober 2021	31 Desember 2021	Rp 1.639.096.759	100%	PNBP
15	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Trayek H-5 Tahun Anggaran 2021	Rp 2.274.104.000	15/KONTRAK-TL/PPK/H-5/I/DITLALA-2021	PT. TEMAS, TBK	03 Februari 2021	31 Desember 2021	Rp 2.274.104.000	100%	RM

## L. Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

1. Kebijakan Pemanfaatan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Untuk Pembiayaan Pembangunan
  - a. Pemanfaatan SBSN untuk pembiayaan proyek sesuai dengan kerangka makro RPJMN 2019-2024, antara lain :
    - Untuk menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%; dan
    - Mempertahankan keberlanjutan fiskal.
  - b. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN 2019-2024, yaitu:
    - Pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri);
    - Dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perumahan); dan
    - Mengurangi kesenjangan antar wilayah (barat dan timur).
  - c. Fokus pemanfaatan SBSN adalah untuk membiayai proyek Infrastruktur dan proyek Pelayanan Umum.
  - d. Pelaksanaan proyek SBSN, diutamakan instansi yang sudah pernah melaksanakan proyek SBSN.
    - Kementerian Perhubungan, misalnya proyek pembangunan jalur kereta api dan
    - fasilitas perkeretaapian (seperti sinyal dan elektrifikasi)

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, fly over dan underpass, dan pembangunan jalan bebas hambatan.
- Kementerian Agama, misalnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Islam, revitalisasi asrama haji, dan pembangunan balain nikah/KUA.

2. Koridor Pembiayaan Proyek SBSN

- a. Memastikan alokasi untuk proyek SBSN yang telah ditetapkan *multiyears*-nya.
- b. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang tinggi dan dapat dijalankan pada awal tahun anggaran, meliputi antara lain:
  - Ketersediaan lahan/tanah tidak bermasalah (termasuk penghapusan gedung/bangunan yang ada pada lokasi proyek)
  - Ketersediaan dokumen perencanaan proyek, misalnya *detail engineering design/DED*
- c. Dapat dikerjakan dengan teknologi dalam negeri.
- d. Kementerian/Lembaga memiliki kemampuan untuk melaksanakan (terutama untuk proyek yang memiliki ketersebaran luas dan nilai yang besar).

3. Realisasi anggaran kegiatan SBSN posisi semester 2 TA. 2021:

NO	Kode   Nama Satker	Pagu Awal	Pagu Sakti Setelah Luncuran TA. 2021	Realisasi Semester 2 TA.2021	%	Sisa
1	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KAIMANA PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN KAIMANA	-	7.314.699.000	7.314.698.074	100,00%	926
2	DISTRIK NAVIGASI TARAKAN PEMBANGUNAN MENARA SUAR DAN FASILITAS PENDUKUNG TANJUNG BATU TARAKAN	-	1.429.180.000	1.429.179.237	100,00%	-
3	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SEBA PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN SEBA	37.848.701.000	24.602.350.000	24.528.645.000	99,70%	73.705.000
4	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN FAK-FAK PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN KARAS	25.000.000.000	33.450.469.000	31.435.403.475	93,98%	2.015.065.525
5	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WONRELI PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN ARWALA	35.000.000.000	35.765.088.000	31.735.391.764	99,28%	229.680.236
6	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN JENEPONTO PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN TANAKEKE	25.000.000.000	26.011.269.000	19.514.024.016	99,60%	77.386.984
7	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MAMUJU PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN SALISINGAN	58.000.000.000	35.809.405.000	44.600.099.000	100,00%	-
8	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MUNTOK PEMBANGUNAN FASILITAS DERMAGA PELABUHAN TANJUNG ULAR	-	63.502.566.000	63.502.565.998	100,00%	2
9	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SINJAI PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN KAMBUNO	44.266.294.000	30.642.851.000	30.568.464.920	99,76%	74.385.720
<b>TOTAL</b>		<b>225.114.995.000</b>	<b>257.098.697.000</b>	<b>254.628.471.484</b>	<b>99,04%</b>	<b>2.470.225.516</b>

## M. Realisasi Pinjaman Luar Negeri TA. 2021

No.	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Kegiatan Subsidi	Nomor Kontrak (Jika Pekerjaan Dikontrakkan)	Penyedia (Nama Perusahaan/ Pihak Penerima Pembayaran Subsidi)	Tgl Mulai Pekerjaan	Tgl Berakhir Pekerjaan	Jangka Waktu Penyelesaian(hari)	Nilai Pagu (Rp)	Nilai Realisasi (Rp) 31 DESEMBER 2021	SISA	Keterangan
								1.806.425.083.000	1.608.526.512.163		
1	KSOP PATIMBAN	Terminal Construction for Patimban Port Development Project (I) (JPY)	PL.102/01/VII/KTRPLN-PTB/2018	PENTA OCEAN-TOA-RINKAI-PP-WIKA-CONSORTIUM	01-JAN-21	31-DEC-21	364	1.729.813.739.000	139.182.686.321	145.533.499.199	
		Terminal Construction for Patimban Port Development Project (I) IDR	PL.102/01/VII/KTRPLN-PTB/2018	PENTA OCEAN-TOA-RINKAI-PP-WIKA-CONSORTIUM	01-JAN-21	31-DEC-21	364		732.315.166.529		
		Paket 8 (Jasa Konsultansi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan) Untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban PorsiRupiah (IDR)	PL.102/02/XI/KSLPLN-PTB/2018	ORIENTAL CONSULTANT GLOBAL., LTD. (PATIMONE CONSULT)	01-JAN-21	31-DEC-21	364		51.784.115.830		
		Paket 8 (Jasa Konsultansi Desain dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan) Untuk Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban PorsiYen (JPY)	PL.102/02/XI/KSLPLN-PTB/2018	ORIENTAL CONSULTANT GLOBAL., LTD. (PATIMONE CONSULT)	01-JAN-21	31-DEC-21	364		32.074.111.782		
		Package 2 ; Breakwater, Seawall And Channel Dredging Work (JPY)	PL.102/03/XI/KTRPLN-PTB/2018	TOYO - ADHI - WAKACHIKU JOINT VENTURE	01-JAN-21	31-DEC-21	364		184.624.501.459		
		Package 2 : Breakwater, Seawall, And Channel Dredging Works (IDR)	PL.102/03/XI/KTRPLN-PTB/2018	TOYO - ADHI - WAKACHIKU JOINT VENTURE	01-JAN-21	31-DEC-21	364		290.210.804.190		
		Patimban Port Development Project (I) Package 3 : Connecting Brige	PL.107/2/II/KSOPP-PMB/2020	WIKA - PP JOINT OPERATION	01-JAN-21	31-DEC-21	364		154.088.853.689		
2	PENINGKATAN FUNGSI KEPELABUHAN ANAN	Loan 3792-INO: Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) - Package CS 2 Port: Design and Construction Supervision Consultant (DSC)	3/CONTRACT/CS2DSC-EARR/2020	PT. AECOM INDONESIA	01-JAN-21	31-DEC-21	364	76.611.344.000	16.434.330.000	52.365.071.638	
		Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Project Package Civil Works (CW) Sea Port 3: Works for Reconstruction of Pantoloan Port	1/CONTRACT/CW-3EARR/IX/2021	PT AMKA-SETIA KSO	01-JAN-21	31-DEC-21	364		7.811.942.362		

## 1. PHLN KSOP Patimban

Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luat Negeri pada KSOP Patimban dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pinjaman Luar Negeri	Loan IP-577 : Japan International Cooperation Agency (JICA)
Pemberi Pinjaman	ODA Loan JICA NO. IP-577
Nama Proyek	Patimban Port Development Project (I)
Loan ID	IP-577
No. Register	1AVH2LAA
Date Sign	15 November 2017
Date Effective	13 Maret 2018
Closing Date	13 Maret 2026
Loan Amount	JPY 118.906.000.000
Disbursement s.d 2020	IDR 6.935.025.145.290
Disbursement pada tahun 2021 :	IDR 1.591.269.793.607
- Package 1 : Konstruksi Terminal	IDR 876.103.986.674
- Package 2 : Breakwater, Seawall dan Pengerukan Alur Pelayaran	IDR 477.624.003.047
- Package 3 : Jembatan Penghubung	IDR 154.088.853.689
- Package 8 : Jasa Konsultansi Untuk Desain dan Supervisi	IDR 83.452.950.197
Belanja Tahun 2021 (Rupiah)	
a. Belanja Pegawai	-
b. Belanja Barang	-
c. Belanja Modal	-
d. Belanja Bansos	-
Neraca (Rupiah)	
a. Aset Lancar	-
b. Aset Tetap (KDP)	IDR 8.526.294.938.897
c. Aset Lainnya	-
d. Kewajiban :	-
Executing Agency	Directorate General of Sea Transportation (DGST)
Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	BPK dan BPKP

## 2. PHLN EARR-Direktorat Kepelabuhanan

Terdapat Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada Direktorat Kepelabuhanan dengan rincian sebagai berikut:

	<b>LK PHLN 1</b>
Nama Pinjaman Luar Negeri	Loan 3792 - INO: Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR)
Pemberi Pinjaman	Asian Development Bank (ADB)
Nama Proyek	Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Teluk Palu
Loan ID	L3792-INO
No. Register	52316-001 Loan Number 3792
Date Sign	30 September 2019
Date Effective	04 November 2019
Closing Date	23 September 2023
Loan Amount	109,75 Juta USD
Disbursement s.d 2020	IDR 14,290,751,296
<b>Disbursement pada tahun 2021 :</b>	<b>IDR 72,862,472,362</b>
- Package CS 2 Port : DSC	IDR 16,434,330,000
- Package Civil Works 3 : Pantoloan Port	IDR 7,811,942,362
<b>Total Port Package</b>	<b>IDR 24,246,272,362</b>
- Package CS 1 Airport : DSC	IDR 3,617,821,310
- Package CW Airport 1: Reconstruction of Runway	IDR 28,933,157,484
- Package CW 2 Airport 2: Reconstruction of Terminal and Other Buildings	IDR 16,065,041,206
<b>Total Airport Package</b>	<b>IDR 48,616,020,000</b>
Belanja Tahun 2021 (Rupiah)	
a. Belanja Pegawai	
b. Belanja Barang	
c. Belanja Modal	<b>IDR 72,862,472,362</b>
d. Belanja Bansos	
Neraca (Rupiah)	
a. Aset Lancar	.....
b. Aset Tetap	<b>IDR 72,862,472,362</b>
c. Aset Lainnya	.....
d. Kewajiban dan Ekuitas	<b>IDR 72,862,472,362</b>
- Package CS 2 Port : DSC	IDR 16,434,330,000
- Package Civil Works 3 : Pantoloan Port	IDR 7,811,942,362
<b>Total Port Package</b>	<b>IDR 24,246,272,362</b>
- Package CS 1 Airport : DSC	IDR 3,617,821,310
- Package CW Airport 1: Reconstruction of Runway	IDR 28,933,157,484
- Package CW 2 Airport 2: Reconstruction of Terminal and Other Buildings	IDR 16,065,041,206
<b>Total Airport Package</b>	<b>IDR 48,616,020,000</b>

- a. Direktorat Kepelabuhanan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditunjuk sebagai Central Project Management Unit (CPMU) atau sebagai Koordinator di Kementerian Perhubungan dalam menyajikan Laporan Keuangan EARR Tahun Anggaran 2021. Selain itu, LK EARR disajikan dalam 2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- b. Realisasi TA. 2021 sebesar Rp72.862.292.362,- atau sebesar 58,18% dari total anggaran Rp125.227.364.000,-.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.065.041.206,- atau sebesar 99,99% dari anggaran Rp16.065.042.000,- berupa Advance Payment (Uang Muka) Tahap I Works-Reconstruction of Terminal And Other Buildings Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri. Nilai tersebut telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Direktorat Bandar Udara sebagai Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan NUP 5.
- d. Belanja Modal JIJ sebesar Rp56.797.251.156,- atau sebesar 52,03% dari anggaran Rp109.162.322.000,- berupa :
  - 1) Jasa Konsultansi Supervisi: Rehabilitation and Reconstruction Pelabuhan Pantoloan, Wani, dan Donggala sebesar Rp16.434.330.000,-. Nilai tersebut telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Satker Kepelabuhanan sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 7.
  - 2) Civil Works (CW) Seaport 3: Works for Reconstruction of Pantoloan Port sebesar Rp7.811.942.362,-. Nilai tersebut telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Satker Kepelabuhanan sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 8.
  - 3) Jasa Konsultansi Supervisi Termin 2-5: Rehabilitation and reconstruction Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri sebesar Rp3.617.821.310,-. Nilai tersebut telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Direktorat Bandar Udara sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 17.
  - 4) Civil Works (CW) Airport 1: Works-Reconstruction Of Runway Emergency Assistance For Rehabilitation And Reconstruction Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri sebesar Rp28.933.157.484,-. Nilai tersebut telah tercatat sebagai Pengembangan KDP di Kartu KDP Direktorat Bandar Udara sebagai Jalan dan Jembatan dalam Pengerjaan NUP 18.
- e. Pada Neraca per 31 Desember 2021, Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) TA. 2021 senilai Rp87.253.043.658 dan TA. 2020 senilai Rp14.390.751.296 atau terdapat kenaikan jumlah KDP sebesar 606,31%.
- f. KDP yang akan dilanjutkan Pada TA. 2022 dan TA. 2023, yaitu sebesar Rp72.862.292.362,-.

## N. Daftar Perkara Ditjen Hubla Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

NO.	NOMOR PERKARA	PENGADILAN	PIHAK	KETERANGAN
<b>PERKARA PERDATA</b>				
1.	50/Pdt.G/2018/PN.Cjr	Pengadilan Negeri Cianjur	PT. Varia Indopermai lawan PT. Megatop Inti Selaras selaku Tergugat I, Menteri ESDM selaku Tergugat II, Menteri Perhubungan selaku Tergugat III, Bupati Cianjur selaku Tergugat IV, Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat V, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI selaku Tergugat VI, Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur selaku Tergugat VII	Putusan pada tingkat Pengadilan Negeri : - Tergugat III tidak terbukti melakukan PMH
2.	70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) selaku Penggugat melawan PT. Karya Citra Nusantara selaku Tergugat I, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda selaku Tergugat II dan PT. Karya Teknik Utama selaku Turut Tergugat.	- Perkara ini telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Perkara 735/PK/PDT/2020 pada tanggal 25 November 2020 dan dimenangkan oleh Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Hubla cq. KSOP Kelas IV Marunda. Dengan amar putusan Menolak Permohonan Peninjauan kembali oleh Pemohon PK semula Terbanding, semula Penggugat (Kawasan Berikat Nusantara); - Perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3.	5/Pdt.Sus-Lain-Lain/2019/PN Niaga Medan jo. Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn	Pengadilan Niaga Medan	PT. Batam Koastal Marine selaku Penggugat lawan Seventh Roni Sianturi selaku Tergugat I, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun selaku Tergugat II	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun selaku Tergugat II telah memenangkan perkara ini pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

NO.	NOMOR PERKARA	PENGADILAN	PIHAK	KETERANGAN
<b>PERKARA TATA USAHA NEGARA</b>				
1.	115/G/2019/PTUN.JKT	Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta	PT. Duta Tambang Gunung Perkara selaku Penggugat lawan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Tergugat	Sudah ada Putusan pada tingkat PTUN
2.	69 PK/TUN/2020	Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta	Ganjar Suharto DKK selaku Pemohon lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Pusat selaku Termohon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Termohon II	Menang pada Putusan Kasasi : - Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan kembali Para Pemohon tidak diterima.
3.	5/P/FP/2021/PTUN.JKT	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	PT. Multi Karya Pratama selaku Pemohon lawan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor UPP Kelas III Wanci	Putusan pada tingkat pengadilan : - Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.

#### O. Gambaran Umum Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

Pipa dan Kabel Bawah Laut merupakan infrastruktur penting sebagai penunjang perekonomian nasional yang harus dijaga keberadaannya. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk membentuk tim nasional penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, dengan telah tergambaranya pipa/kabel bawah laut di peta laut indonesia akan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam menunjang kebutuhan listrik dan gas bumi serta kecukupan provider akan menjangkau seluruh wilayah nusantara. Upaya - upaya yang dilakukan direktorat jenderal perhubungan laut dalam melaksanakan pengamanan terhadap bangunan dan/atau instalasi di perairan antara lain dengan memberikan ketentuan teknis penempatan, pemendaman dan penandaan terhadap bangunan dan instalasi di perairan yang akan dibangun dan telah dicantumkan pada surat izin membangun bangunan dan/atau instalasi di perairan yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau instalasi di perairan meliputi teknis penempatan pipa/kabel bawah laut, pemendaman dan perlindungan pipa/kabel bawah laut, penandaan dengan pemasangan sarana bantu navigasi (sbnp), penetapan batas-batas zona keamanan dan keselamatan berlayar, pemberitaan melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut indonesia dan disiarkan melalui stasiun radio pantai serta kajian analisa resiko (risk assesment) serta mitigasi teknis pengamanan dan proteksi bawah air dan hal yang sangat penting adalah pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar.

Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air.

Tata cara pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Bawah Air diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.71 Tahun 2013, PM.33 tahun 2016 dan PM.38 Tahun 2018 tentang salvage dan/atau pekerjaan bawah air dan peraturan Menteri Perhubungan PM.129 Tahun 2016 tentang alur pelayaran di laut dan bangunan dan/atau instalasi diperairan dengan tujuan memberikan legalitas kepada badan usaha ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usaha dalam menjalankan usaha dan kegiatannya dibidang salvage dan pekerjaan bawah air, menciptakan dan meningkatkan pengamanan terhadap pelaku usaha bidang salvage dan pekerjaan bawah air, meningkatkan peranan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan mengenai tarif untuk Perizinan Salvage dan Perkerjaan Bawah Air yang sebagai jasa Kenavigasian dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai kegiatan terkait pelayanan perizinan bulan Januari hingga Desember 2021 meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang modal seluruhnya dalam negeri sebanyak 0 (nol) surat izin;
- b. Surat Izin kegiatan membangun, memindahkan dan membongkar bangunan dan atau instalasi sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) surat izin;
- c. Surat Persetujuan Kegiatan Salvage dan PBA sebanyak 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) surat persetujuan.

NO.	JENIS PERIZINAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		M E I		JUNI	
		JML	RUPIAH										
1.	IZIN USAHA	0	-	0	-	0	0	0	-				
2.	IZIN BANGUN	3	4,500,000	0	-	1	1,500,000	1	1,500,000	5	7,500,000	2	3,000,000
3.	SPK. SALVAGE DAN PBA	22	22,000,000	18	18,000,001	20	20,000,000	30	30,040,000	26	26,000,000	17	17,000,000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>26,500,000</b>	<b>18</b>	<b>18,000,001</b>	<b>21</b>	<b>21,500,000</b>	<b>31</b>	<b>31,540,000</b>	<b>31</b>	<b>33,500,000</b>	<b>19</b>	<b>20,000,000</b>

NO.	JENIS PERIZINAN	JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
		JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH	JML	RUPIAH
1.	IZIN USAHA												
2.	IZIN BANGUN	1	1,500,000	3	4,500,000	2	3,000,000	1	1,500,000	2	3,000,000	3	4,500,000
3.	SPK. SALVAGE DAN PBA	19	19,000,000	29	29,000,000	15	15,000,000	37	37,020,000	32	32,020,000	12	12,000,000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>20,500,000</b>	<b>32</b>	<b>33,500,000</b>	<b>17</b>	<b>18,000,000</b>	<b>38</b>	<b>38,520,000</b>		<b>35,020,000</b>		<b>16,500,000</b>



Penyelam adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan kegiatan di dalam air dengan tekanan lingkungan lebih besar dari 1 atmosfer absolut (ata) yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Penyelenggaraan legitimasi kegiatan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/14/DJPL-14 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang mengatur tentang persyaratan Sarana prasarana penyelenggara diklat, kualifikasi instruktur persyaratan peserta, kurikulum silabi, dan klasifikasi penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air yang harus dipenuhi oleh lembaga diklat penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air, calon peserta diklat dan instruktur Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar menginisiasi proses legitimasi penyelaman Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang efektif dan efisien melalui Keputusan Bersama antar Kementerian/Lembaga yang membidangi bidang penyelaman untuk mewujudkan proses legitimasi penyelaman Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang efektif dan efisien. Perlu ketentuan baku sebagai payung hukum sebagai dasar legitimasi penerbitan sertifikasi penyelam bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air untuk menghindari tumpang tindih pengaturan penyelam kerja bawah air.

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai akan menindaklanjuti hasil pelaksanaan FGD dengan BP2TL dan Penyelenggara Diklat Lainnya untuk membahas tata cara pelaksanaan pendidikan penyelam bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dan pembahasan buku Silabus untuk dapat meningkatkan penyelenggara diklat penyelaman

dalam mencetak dan menghasilkan personil penyelam salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang memenuhi kriteria standard keselamatan dan keamanan sehingga seluruh penyelam yang bekerja di bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air setelah tersertifikasi akan mendapatkan pengakuan ataupun Endorsement dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Rekapitulasi perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air tahun 1990 s.d 2019 jumlah perusahaan salvage dan/atau perusahaan pekerjaan bawah air kurang lebih 250 perusahaan dan pertumbuhan siup pba setelah km. 23 tahun 1990 dan sesudah pm 71 tahun 2013 serta siup salvage dan pekerjaan bawah air sesuai dengan pm 71 tahun 2013 melalui proses di bkpm dan oss sesuai dengan pm 33 tahun 2016 dan pm 89 tahun 2018 tidak terlalu signifikan, dan dari hasil penilaian perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air yang dilakukan oleh direktorat kesatuan penjagaan laut dan pantai dengan aspek penilaian terhadap perusahaan antara lain meliputi aspek administrasi, teknis, sarana dan prasarana, operasional maupun pelaporan hasil pekerjaan, perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air hanya 58 perusahaan yang aktif dari kurang lebih 250 perusahaan yang memiliki SIUP Salvage dan Pekerjaan Bawah Air.

Tercapainya Suatu Bentuk Sinergitas Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dan Perusahaan Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Ke Arah Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dengan Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif, Perkembangan Lingkungan Strategis Melalui Permodalan Investasi Dengan Peningkatan Sdm, Manajemen Dan Pemanfaatan Teknologi Di Bidang Usaha Salvage Dan Pekerjaan Bawah Air Sehingga Menciptakan Iklim Usaha Salvage Dan Pekerjaan Bawah Air Yang Berdaya Saing Dalam Mendukung Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran.

Pendataan perizinan perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air yang belum pernah dilaksanakan sejak tahun 1990 s.d 2019, dan sesuai dengan data yang ada bahwa Izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut maupun BKPM bahwa jumlah perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air kurang lebih 250 perusahaan dan pertumbuhan SIUP PBA setelah KM. 23 tahun 1990 dan sesudah PM 71 tahun 2013 serta SIUP Salvage dan Pekerjaan Bawah Air sesuai dengan PM 71 tahun 2013 melalui proses di BKPM dan OSS sesuai dengan PM 33 tahun 2016 dan PM 89 tahun 2018 tidak terlalu signifikan, sehingga Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai membuat satu penilaian terhadap perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan aspek penilaian antara lain meliputi aspek administrasi, teknis, sarana dan prasarana, operasional maupun pelaporan hasil pekerjaan.

Sesuai dengan sifat pekerjaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang cukup cepat dibutuhkan Percepatan Penerbitan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terutama pada kegiatan-kegiatan yang masa kontraknya pendek khususnya dibidang penyelaman, inspection ataupun perbaikan Pipa atau Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) sangat dibutuhkan penerbitan Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang lebih cepat sesuai dengan peruntukannya.

Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, Penerbitan Surat Izin Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air dan Penerbitan Surat Izin membangun /memindahkan, membongkar dan jangka waktu pemanfaatan bangunan atau instalasi bawah air maka dianggap perlu memberikan pelayanan optimal kepada para pengguna jasa yang sehingga menghasilkan perizinan berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan salah satunya adalah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen KPLP (SIMKPLP).

## **P. Kas di Bendahara Ditjen Hubla TA. 2021**

1. Prosedur Penggunaan VA/CMS di Lingkungan Ditjen Hubla:
  - a. Sesuai PMK.183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Negara/Lembaga maka Ditjen Perhubungan Laut pada tahap awal melakukan pembukaan rekening induk Giro yang terdiri dari 4 Bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Syariah Indonesia (dengan pengajuan persetujuan pembukaan melalui KPPN yang dirinci sebagai berikut:
    - 1) BNI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1813/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 29 April 2020;
    - 2) BRI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020;
    - 3) MANDIRI: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020;
    - 4) BSI: Persetujuan pembukaan rekening pada Bank BSI mengacu pada Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bank Mandiri Syariah dan Bank BRI Syariah yang di kemudian hari berubah menjadi BSI, dengan rincian berikut:
      - a) BRI Syariah: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-6774/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 22 Desember 2020;
      - b) BSM: Surat Kepala KPPN Tipe A1 Jakarta IV Nomor S-9/WPB.12/KP.04/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
  - b. Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Laut mengajukan pembukaan Rekening VA per masing-masing satker kepada KPPN Jakarta IV
  - c. Setelah Rekening VA Satker dibuka, dilakukan perpindahan saldo dari rekening giro ke rekening virtual dengan rincian cut off sebagai berikut:
    - 1) BNI: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-909/PB.3/2020 Tanggal 22 Desember 2020 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-435/PB.3/2021 Tanggal 17 Maret 2021;
    - 2) BRI: Surat Direktur Surat Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 910/PB.3/2020 Tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-323/PB.3/2021 Tanggal 26 Februari 2021;
    - 3) MANDIRI: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 304/PB.3/2021 Tanggal 24 Februari 2021 dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-558/PB.3/2021 Tanggal 26 Maret 2021;
    - 4) BSM: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-558/PB.3/2021 Tanggal 26 Maret 2021;
    - 5) BRI Syariah: Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S- 304/PB.3/2021 Tanggal 24 Februari 2021.
  - d. Pihak Bank melalui Kantor Cabang Rekening Induk Giro memberikan kepada masing-masing satker berupa CMS dan Kartu ATM yang selanjutnya digunakan sebagai alat transaksi transfer ataupun penarikan tunai atas dana yang tersedia pada rekening VA.
2. Saldo Kas di Bendahara pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL	TANGGAL SETOR	NTPN	KETERANGAN
1	022.04.287778	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN JAYAPURA	915.500	06/01/2022	AF1A51JNFC2E256R	Sudah disetor
2	022.04.559484	KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BULA	199.000	03/01/2022	8DDDA55DEMBSEH49	Sudah disetor
<b>TOTAL</b>			<b>1.114.500</b>			

b. Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL	TANGGAL SETOR	NTPN	KETERANGAN
1	022.04.287778	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN JAYAPURA	10.998.327	06/01/2022	7C78461QUGUC3JFI	Sudah disetor
<b>TOTAL</b>			<b>10.998.327</b>			

c. Kas dan Bank-BLU

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL	BANK	NOMOR REKENING	SALDO	KETERANGAN
1	022.04.606301	BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	3.672.566.846	BNI	1178763188	1.664.602.836	Rekening Operasional BLU
				BRI	0186-01-001697-30-7	1.679.308.046	
				MANDIRI	1210000780779	328.655.964	
<b>TOTAL</b>			<b>3.672.566.846</b>			<b>3.672.566.846</b>	

d. Kas Lainnya di K/L dari Hibah

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL	NOMOR REKENING	BANK	KETERANGAN
1	022.04.439460	PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	20.701.471.289	0165113802	BANK BNI CAB HARMONI	USD1.450.799,41
<b>TOTAL</b>			<b>20.701.471.289</b>			

**Q. Pengadaan Tanah pada Pelabuhan Patimban (LMAN)**

Tanah pada Pelabuhan Patimban hasil dari proses pembebasan tanah sebagai backup area Pelabuhan Patimban yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN KSOP Kelas II Patimban sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Tanah Bangunan Terminal Laut (20101022008) NUP 1 dengan nilai sebesar Rp. 723.150.513.289. Adapun tahap-tahapan dari tahap awal proses pembebasan tanah sampai dengan pencatatan pada SIMAK BMN sebagai berikut:

1. Proses tahap awal pengadaan tanah

a. Studi Perencanaan

Institusi yang Membutuhkan Tanah menyiapkan Dokumen Perencanaan Tanah dan mengirimkan ke Pemerintah Provinsi;

b. Penetapan Lokasi

Setelah dokumen perencanaan diterima oleh Gubernur. Selanjutnya Gubernur membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat. Kegiatan tahapan persiapan:

- 1) Pemberitahuan rencana pembangunan kepada pihak yang berhak dan pihak terdampak (Sosialisasi)
  - 2) Pendataan awal
  - 3) Konsultasi Publik
  - 4) Konsultasi Publik ulang
  - 5) Tim Kajian Keberatan
  - 6) Penyiapan SK Penetapan Lokasi
  - 7) Pengumuman SK Penetapan Lokasi
- c. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah  
Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan (BPN). Kemudian BPN akan membentuk Panitia Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah.
- d. Inventarisasi dan Identifikasi  
Diumumkan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.
- e. Penetapan Nilai  
Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Tim Penilai Publik (*Appraisal*).
- f. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- 1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai public;
  - 2) Ketua Pelaksana membentuk Tim Musyawarah Ganti Rugi yang terdiri dari unsur BPN, Appraisal, Satgas A dan B, Pemerintah Daerah setempat;
  - 3) Pelaksana Pengadaan tanah akan menyampaikan besarnya ganti kerugian kepada Pihak yang berhak;
  - 4) Hasil Musyawarah bentuk dan besarnya ganti kerugian, sepakat atau tidak sepakat akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
  - 5) Pihak yang berhak yang belum sepakat dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.
- g. Permohonan Pembayaran Ganti Kerugian oleh LMAN  
Permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- 1) Fotokopi dokumen identitas Pihak yang Berhak;
  - 2) Fotokopi bukti kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;
  - 3) Fotokopi laporan Hasil penilaian;
  - 4) Fotokopi surat validasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;
  - 5) Surat Permohonan dari PPK Pengadaan Tanah.
2. Proses pengajuan revisi DIPA antara lain:
- a. Setelah ada Berita Acara Rekonsiliasi antara LMAN dengan Kantor KSOP Kelas II Patimban, selanjutnya mengajukan permohonan revisi anggaran ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapatkan pagu anggaran kegiatan pencatatan atas pengadaan lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh LMAN;
  - b. Setelah pagu anggaran terdaftar didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor KSOP Kelas II Patimban, proses pengajuan pencairan pencatatan atas pengadaan lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh LMAN diajukan Surat Perintah

- Membayar (SPM) ke KPPN Purwakarta beserta data dukung Berita Acara Rekonsiliasi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
3. Proses pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN antara lain:
    - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp661.306.568.776 melalui transaksi sebagai berikut:
      - 1) Menu Transaksi Saldo awal sebesar Rp486.446.219.342, yaitu:

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Untuk dipergunakan dalam Tugas-tugas operasional tanggal 30 Juni 2020 perolehan tahun 2018-2019 Proses pencatatan pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN melalui transaksi saldo awal kode dan nama barang (2010102008 Tanah Bangunan Terminal Laut) NUP 1 dengan nilai sebesar Rp. 120.450.425.905 dan nama barang (2010102008 Tanah Bangunan Terminal Laut) NUP 2 dengan nilai sebesar Rp365.995.793.437
      - 2) Menu transaksi pembelian sebesar Rp174.860.349.434  
Proses pencatatan pada tahun anggaran 2020 setelah terbit SP2D dari KPPN dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN melalui transaksi pembelian untuk:
        - a) Berdasarkan nomor SP2D 200210302000023 tanggal 29 Desember 2020 Kode dan nama barang (2010102008 Tanah Bangunan Terminal Laut) NUP 3 dengan nilai sebesar 52.710.866.621(Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester I Tahun 2020 Nomor BA REKON-8/I/LMAN/2020 tanggal 19 Oktober 2020); dan
        - b) Berdasarkan nomor SP2D 200210302000024 tanggal 31 Desember 2020 Kode dan nama barang (2010102008 Tanah Bangunan Terminal Laut) NUP 4 dengan nilai sebesar Rp. 122.149.482.813 (Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester II Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020)
    - b. Tahun anggaran 2021
      - 1) Transaksi koreksi sebesar Rp540.856.142.871 sebagai berikut:
        - a) Dilakukan koreksi pencatatan melalui menu transaksi penghapusan terhadap BMN Tanah Bangunan Terminal Laut (20101022008) untuk NUP 2,3, dan 4 sebesar Rp. -540.856.142.871; berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Kelas II Patimban Nomor: PL.202/2/XI/KSOP-PMB/2021 tanggal 02 November 2021;
        - b) Dilakukan pencatatan melalui transaksi perolehan BMN dan koreksi perubahan nilai/kuantitas Tanah Bangunan Terminal Laut (20101022008) NUP 1 sebesar Rp. 540.856.142.871 berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Kelas II Patimban Nomor: PL.202/2/XI/KSOP-PMB/2021 tanggal 02 November 2021.
      - 2) Transaksi Pengembangan Langsung terhadap Tanah Bangunan Terminal Laut (20101022008) NUP 1 sebesar Rp. 61.843.944.513 sebagai berikut:
        - a) Berdasarkan nomor SP2D 210210301000070 tanggal 03 November 2021 sebesar Rp. 42.717.527.000 (Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Triwulan I Tahun

2021 nomor BA REKON-23/TW.1/LMAN/2021 tanggal 15 April 2021 dan Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Triwulan II Tahun 2021 nomor BA REKON-5/TW.2/LMAN/2021 tanggal 23 Juli 2021);

- b) Berdasarkan nomor SP2D 210210301000111 tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 1.148.681.257 (Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Triwulan III Tahun 2021 nomor BA REKON-6/TW.3/LMAN/2021 tanggal 27 Oktober 2021);
- c) Berdasarkan nomor SP2D 21021030100012 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.977.736.256 (Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Pengadaan Lahan PSN Pelabuhan Patimban oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Triwulan IV Tahun 2021 nomor BA REKON-8/TW.4/LMAN/2021 tanggal 3 Januari 2022);

## R. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka

1. Terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada beberapa jenis utang dan satker, diantaranya:
  - a. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar  
Terdapat Belanja Pegawai YMHD sebesar Rp2.795.232.345,- pada 21 Satker atas Utang terkait perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai TA. 2021
  - b. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar  
Terdapat Belanja Barang YMHD sebesar Rp443.578.950,- pada 24 Satker atas Utang terkait perhitungan Beban Wifi, Listrik, Air, dan Telepon TA. 2021
2. Terdapat Pendapatan Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada beberapa jenis utang dan satker, diantaranya:
  - a. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka  
Terdapat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada KSOP Cirebon senilai Rp433.970.250,- berupa sewa tanah reklamasi selama 2 tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor HK.201/1/5/KSOP.Cbn-21 dan Nomor 003/PKS/GTOS/VIII/21. Rincian nilai tersebut, yaitu:

No.	Jenis Barang	Lokasi	Luas	Penyewa	Jangka Waktu	No. Dokumen Perjanjian	Periode Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan		
									Sewa thn lalu	Sewa periode berjalan	Sewa Diterima Dimuka
1	Tanah Reklamasi	Jl. Tanjung Tengah No. 1B, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat	21.585	PT. Gamtara Trans Ocean Shipyard	3 (tiga) Tahun	HK.201/1/3/KSOP.Cbn-2020	Oktober 2020 s.d September 2023	Rp 382.269.000	Rp 31.855.750	Rp 127.423.000	Rp 222.990.250
2	Tanah Reklamasi	Jl. Madura Gang Lembu, Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat	48.900	PT. Gamtara Trans Ocean Shipyard	3 (tiga) Tahun	HK.201/1/5/KSOP.Cbn-2021	Agustus 2021 s.d 31 Desember 2023	Rp 316.470.000	Rp -	Rp 105.490.000	Rp 210.980.000

### b. Pendapatan Diterima di Muka BLU

Terdapat Pendapatan Diterima Dimuka pada Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP) senilai Rp15.000.000,- berupa transaksi atas sewa lahan ATM. Pendapatan tersebut sudah direalisasikan sebesar Rp5.000.000 dari total pembayaran Rp20.000.000 yang di bayarkan pada bulan Oktober 2021 atau 3/12.

## S. Aset Tetap Renovasi

Terdapat Aset Tetap Renovasi (ATR) sebesar Rp11.544.921.291,- pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di beberapa satker, diantaranya:

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Keterangan
1	287537	KSOP AMBON	125.400.000	Pemeliharaan Gedung Kantor milik Distrik Navigasi Ambon.
2	412772	KANPUS HUBLA	908.425.521	Lift Gedung dan Bangunan Kantor di Jalan Medan Merdeka Timur. Transfer Masuk Tahun 2014. Sudah ada BAST.
3	413417	KSU BELAWAN	223.693.996	Aset induk (Kantor/Terminal Penumpang) yang direnovasi sudah di robohkan, serta SK Penghapusan ATR dari KPKNL sudah terbit (menunggu eksekusi penghapusan di SIMAK)
4	413670	KSOP BANTEN	2.404.044.000	Rehabilitasi Gedung Kantor di KSOP Banten milik PT. Pelindo II cabang Banten. Belum dilakukan serah terima karena PT. Pelindo belum membentuk Tim.
5	522582	KSOP KUPANG	1.937.761.100	Pekerjaan Docking Kapal Perintis milik Satker Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut KN. Nemberala dan Nangalala
6	559154	UPP BATANG	431.004.000	Lapangan penumpukan yang dibangun diatas Tanah milik Dinas Perikanan, rencana akan diserahkan ke Dinas perikanan setempat.
7	559470	UPP BULI	5.027.100.000	Renovasi Pelabuhan Rakyat (Pelra) di atas Tanah milik Pemerintah Daerah
8	652584	PLP DANAR / TUAL	487.492.674	Pembangunan Paving Block Mess/Asrama di atas Tanah milik Distrik Navigasi Tual
TOTAL			11.544.921.291	

## T. Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

### 1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp12.127.144.408.156,- pada 76 satker dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dilanjutkan sebesar Rp1.675.095.280.463,-
- b. Dihentikan Sementara Rp631.556.853.489,-
- c. Dihentikan Permanen Rp122.056.047.209,-
- d. Direncanakan untuk Didefinisikan Rp9.698.436.226.995,-

Nilai KDP terbesar yaitu pada KSOP Patimban senilai Rp8.662.587.646.995,- atas pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Rincian KDP KSOP Patimban adalah sebagai berikut:

- a. Nilai KDP sebesar Rp6.101.082.236.570,- (enam triliun seratus satu milyar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Konstruksi Paket 1 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Konstruksi Terminal sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor : PL.102/01/VII/KTRPLN-PTB/2018 tanggal : 8 Desember 2021 dengan target penyelesaian 760 hari (25 Bulan) serta terdapat Extension of Time (EoT) 210 hari (7 bulan). Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Terminal sudah selesai pada tanggal 24 Juni 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan konstruksi yang

- akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA-022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;
- b. Nilai KDP sebesar Rp1.689.063.003.452,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 2 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Breakwater, Seawall, and Channel Dredging Works sesuai dengan kontrak addendum ke-5 nomor : PL.102/03/XI/KTRPLN-PTB/2018 tanggal : 26 November 2021 dan sudah selesai pada tanggal 27 November 2021 akan tetapi masih ada proses administrasi kontraktual untuk penyesuaian harga, klaim dan retensi pekerjaan kontruksi yang akan dibayarkan pada TA. 2022 sesuai dengan DIPA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban TA. 2022 Nomor: SP DIPA- 022.04.2.021140/2022 tanggal 17 November 2021;
  - c. Nilai KDP sebesar Rp415.474.823.695,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Kontruksi Paket 3 Phase I-1 bagian dari pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung sesuai dengan kontrak addendum ke-2 nomor:PL.107/2/II/KSOP-PMB/2020 tanggal; 09 Desember 2021 dengan target penyelesaian pada tanggal 23 Mei 2022.
  - d. Nilai KDP sebesar Rp320.674.875.180,- bersumber dari dana PHLN merupakan Pekerjaan Supervisi dari Paket Pekerjaan Kontruksi Paket 1, 2 dan 3 Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-1, serta dilanjutkan dengan Supervisi Kontruksi Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase I-2 pada Pekerjaan Paket 5 dan 6.
  - e. Nilai KDP sebesar Rp43.896.272.780,- (empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor : PL.107/03/IX/FPAPBN-PTB/2021 tanggal : 29 September 2021 dan Supervisi Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor : PL.107/03/IX/FPAPBN-PTB/2021 tanggal : 29 September 2021, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021.
  - f. Nilai KDP sebesar Rp15.354.181.298 ,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontuksi Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai dengan kontrak addendum ke-4 nomor: PL. 107/4/II/KSOP-PMB/2020 tanggal : 18 Februari 2020 dan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai dengan kontrak addendum ke-3 nomor: PL. 107/5/II/KSOP-PMB/2020 tanggal : 18 Februari 2020, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020.
  - g. Nilai KDP sebesar Rp48.486.385.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontuksi Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai kontrak addendum ke-5 nomor : PL.107/05/X/FPAPBN-PTB/2021 tanggal : 20 Oktober 2021 dan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai dengan kontrak addendum ke-2 nomor : PL. 107/06/X/FPAPBN-PTB/2021 tanggal: 20 Oktober 2021, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021.
  - h. Nilai KDP sebesar Rp22.279.008.700,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ribu tujuh ratus rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Saluran Drainase dan Outer Road Backup Area Pelabuhan Patimban Segmen I TA. 2021 sesuai dengan kontrak

addendum ke-1 nomor: PL.107/01/XI/FPAPBN-PTB/2021 tanggal: 26 November 2021 dan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dan Outer Road Backup Area Pelabuhan Patimban Segmen I TA. 2021 sesuai dengan kontrak nomor: PL.107/02/X/FPAPBN-PTB/2021 tanggal: 15 Oktober 2021, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021.

- i. Nilai KDP sebesar Rp6.276.860.321,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) bersumber dari dana Rupiah Murni merupakan Biaya Operasional Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Patimban dari TA. 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.

2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (ATB DP)

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp7.260.888.250,- tercatat pada Kantor Pusat Ditjen Hubla. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan dengan Nomor 14/BK/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Tindak Lanjut ATB DP pada Satker Kantor Pusat Ditjen Hubla, bahwa aset tersebut berupa SID dengan rincian sebagai berikut:

No	Asal Perolehan	Nilai (Rp)
1	SID Cikoneng	731.401.000
2	SID Tanjung	759.038.500
3	SID Sampit Kota Waringin, Kalteng	762.572.250
4	SID Bau Bau, Sulawesi Tenggara	740.404.500
5	SID Bansering, Banyuwangi, Jatim	415.211.500
6	SID Waisai	773.245.000
7	SID Merauke	779.509.500
8	SID Teluk Bayur	754.996.000
9	SID Wonreli	777.711.000
10	SID Balikpapan	766.799.000
<b>Jumlah</b>		<b>7.260.888.250</b>

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dengan Nomor 39/BP/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Permohonan Usulan Penghapusan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Bagian Perencanaan, bahwa ATB berupa dokumen SID pada Bagian Perencanaan dengan kondisi hancur dikarenakan imbas dari kebakaran. Dengan demikian, ATB Dalam Pengerjaan tersebut akan dilakukan proses penghapusan pada Tahun Anggaran 2022.

**U. Rincian Nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

Terdapat Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah (YTDDOP) dan ATB YTDDOP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam OP	Nilai (Rp)	Keterangan
Tanah	587.517.713	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Peralatan dan Mesin	270.877.457.867	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Gedung dan Bangunan	86.803.472.728	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
Jalan dan Jembatan, Irigias, dan Jaringan	107.346.484.123	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan

Aset Lainnya	665.363.000	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
ATB YTDOP	17.014.592.095	Rusak Berat dan dalam proses penghapusan
<b>TOTAL</b>	<b>483.295.024.276</b>	

## V. Nilai Buku Minus

1. Terdapat nilai buku minus Intrakomptable sebesar Rp246.696.630,- pada 36 NUP di beberapa satker, diantaranya:
  - a. KSOP Sampit  
Terdapat 1 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp33.960.080,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun memunculkan nilai perolehan minus.
  - b. Disnav Kupang  
Terdapat 2 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp204.771.576,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun memunculkan nilai perolehan minus.
  - c. UPP Bajoe  
Terdapat 1 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp3.000.000,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun tidak merubah hasil dari E-Rekon.
  - d. UPP Tanjung Uban  
Terdapat 32 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp4.964.974,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun tidak merubah hasil dari E-Rekon.
2. Terdapat Nilai Buku Minus Ekstrakomptable sebesar Rp196.076,- pada 7 NUP di 2 satker, diantaranya:
  - a. UPP Tanjung Uban  
Terdapat 3 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp7.500,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun tidak merubah hasil dari E-Rekon.
  - b. KSU Tanjung Priok  
Terdapat 4 NUP dengan nilai buku minus sebesar Rp188.576,-. Histori BMN tidak Minus, sudah dilakukan Normalisasi namun memunculkan nilai perolehan minus.

## W. Reklasifikasi Keluar-Reklasifikasi Masuk

Terdapat selisih Reklasifikasi Keluar-Reklasifikasi Masuk Aset pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp4.637.636.541,-. Selisih tersebut diakibatkan oleh perbedaan transaksi Reklasifikasi pada aplikasi persediaan maupun SIMAK BMN. Selisih Reklasifikasi Aset terdapat pada 4 Satker dengan rincian sebagai berikut:

1. Distrik Navigasi Banjarmasin  
Transaksi Reklas Keluar Rp0 dan Reklas Masuk sebesar Rp969.403.000,- berupa Belanja Barang menjadi Aset yang diinput dengan Reklasifikasi Masuk pada Aplikasi SIMAK BMN.
2. UPP Larantuka  
Transaksi Reklas Keluar Rp32.984.687.525,- dan Reklas Masuk sebesar Rp29.897.522.484,- berupa Sisa Tiang Pancang Pelabuhan Tobilota TA. 2020 yang diinput dengan Reklasifikasi Masuk pada Aplikasi Persediaan.

3. Distrik Navigasi Surabaya  
Transaksi Reklas Keluar Rp5.010.199.500,- dan Reklas Masuk sebesar Rp5.162.203.000,- berupa Belanja Barang menjadi Aset yang diinput dengan Reklasifikasi Masuk pada Aplikasi SIMAK BMN.
4. Peningkatan Fungsi Perkapalan dan Kepelautan  
Transaksi Reklas Keluar Rp16.058.666.214,- dan Reklas Masuk sebesar Rp13.386.788.214,- berupa Belanja Modal menjadi Persediaan yang akan ditransfer ke beberapa satker yang diinput dengan Reklasifikasi Masuk pada Aplikasi Persediaan.

## X. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2021 sebesar Rp48.566.509.106,- yang dicatat pada beberapa satker dengan rincian sebagai berikut:

NO	No Register	Nama Project	Kode Satker	TGL Pengesahan	Jenis Aset	Nilai	NO SPHL / MPHBJJS	No. BAST
1	2TCFMYFA	UPP SATUI Hibah Tanah dari Bulkani (Wiraswata)	559292	20/09/2021	Tanah	Rp2.400.000	1065476929	PL.301/1/1/UPP.Satui-21 Tanggal 5 Maret 2021
2	2724D73A	UPP LUWUK Hibah Langsung berupa barang dari Pemda Banggai Kepulauan	287391	09/08/2021	Tanah	Rp2.473.740.000	1057330241	900/85/BPKAD/2021 PL.301/1/9/DJPL/2021 12 Februari 2021
3	2AMYBVYA	UPP AMURANG HIBAH LANGSUNG BERUPA TANAH PEMDA MINAHASA SELATAN SELUAS 7.031M2	521730	05/11/2021	Tanah	Rp458.310.000	1077983933	445/900/SEKAR- BPKAD/VI-2020 26 Juni 2020 07/NPHD/BMS/VI-2020 05 JUNI 2020
4	2B5NVGJA	HIBAH LANGSUNG DARI PEMERINTAH KOTA BONTANG UNTUK KSOP BONTANG (aset tanah seluas 12.150 m2)	517882	10/12/2021	Tanah	Rp9.963.000.000	1085885229	03/ 909-/BPAD.04 14 Oktober 2021
5	70878801	SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN ANF PROJECT 5: REPLACEMENT AND MAINTENANCE OFF AIDS TO NAVIGATION IN THE SRAITS OFF MALACA AND SINGAPORE	439460	28/12/2020	Kas	Rp24.959.664.269	21140000000 0043	S-300/PR.8/2019 29 Mei 2019
6	24MMYTFA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS YANG TERLETAK DI JALAN PERAK TIMUR NO. 398 SURABAYA DARI PT. PELINDO III (PERSERO) REGIONAL JAWA TIMUR KEPADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	412891	27/12/2020	GB	Rp1.252.216.000	1087927856	BA.1930/HK.05.01/RJT M.2021 5 Januari 2021
7	2R7YBCHA	HIBAH BARANG DARI BUREAU OF INTERNATIONAL SECURITY AND NONPROLIFERATION BERUPA EXPORT CONTROL AND BORDER SECURITY (EXBS) KEPADA SATKER PENINGKATAN FUNGSI KPLP	439180	31/12/2021	PM	Rp1.735.178.837	1095665386	BA.10/SRT/KPA/PFPK PLP-2021 Tanggal 30 Desember 2021
8	2MG6B51A	UPP Kelas III Pelabuhan Ratu Hibah Langsung berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Sukabumi	521292	15/10/2021	Tanah	Rp7.722.000.000	1070860001	024/1357/BPKAD 21-Februari 2020

## Y. Transfer Aset (Transfer Keluar-Transfer Masuk)

Transfer Keluar-Transfer Masuk secara internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah sesuai atau memiliki nilai sama, yaitu sebesar Rp356.411.910.812,-. Namun secara total, terdapat selisih Transfer Keluar-Transfer Masuk pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp19.301.912.523,- yang disebabkan oleh selisih Nilai Transfer Masuk dari maupun Nilai Transfer Keluar ke non BA-022.04 (Eselon I Ditjen Hubla). Terdapat 8 satker yang melakukan transaksi transfer masuk dan transfer keluar dengan Eselon 1 lain atau Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu:

### 1. KSOP Samarinda

Terdapat transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk aset dari luar Ditjen Hubla (022.04), yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda berupa Gedung dan Bangunan. Pada awalnya Ksop Samarinda memiliki Gedung yang berdiri diatas lahan PT. Pelindo, sedangkan Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki kantor yg berdiri diatas lahan KSOP Samarinda. Oleh karena itu, kedua satuan kerja melakukan alih status dengan tujuan masing-masing satker dapat memiliki aset di atas lahan satker tersebut.

Aset yang di Transfer ke KSOP Samarinda senilai Rp1.655.096.000,- beserta penyusutannya sebesar (Rp537.499.090,-) dengan dasar Berita Acara Serah Terima Alih Status BMN Nomor HK.02.02/I/2649/2020. Sedangkan aset yang di transfer ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda senilai Rp1.117.898.000,- Beserta penyusutannya sebesar (Rp93.446.259,-) dengan dasar Berita Acara Serah Terima Alih Status BMN Nomor PL.406/1/4/KSOP.SMD-2020.

### 2. Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhanan Pusat

Terdapat Transaksi Masuk berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp4.316.187.150,-, dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dengan Kode Satker 109.01.496978. Transfer Aset tersebut sesuai dengan BAST Nomor 1050/BA/BPWS-Satker/11/2021 dan UM.60/2/15/DP-21 tanggal 23 November 2021.

### 3. Kantor Pusat Ditjen Hubla

Terdapat Transaksi Keluar ke Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan kode satker 022.11.288752 berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp1.529.291.204,-, dan akumulasi penyusutannya senilai Rp322.128.714,-, serta Peralatan dan Mesin senilai Rp2.254.901.000,- dan akumulasi penyusutannya senilai Rp88.987.484,-. Transfer Aset tersebut sesuai dengan BAST Nomor PL.301/6/18/DJPL/2021 tanggal 22 November 2021.

### 4. KSOP Sunda Kelapa

Terdapat Transaksi Keluar ke Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dengan kode satker 032.03.537611 Perhubungan berupa Aset Tetap Renovasi senilai Rp172.898.923,-. Satker Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman menerima ATR tersebut sebagai nilai yang menambah Gedung dan Bangunan

5. KSOP Khusus Batam

Terdapat transaksi Transfer Masuk aset dari luar Ditjen Hubla (022.04). yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berupa Tanah sebesar Rp3.925.410.299,-. Tanah seluas 3.000m<sup>2</sup> tersebut berasal dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pengalihan Status tersebut berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima dengan Nomor HK.201/1/1/Ksop Batam/2021 tanggal 10 Maret 2021.

6. UPP Rembang

Terdapat Transaksi Masuk berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp308.242.000,- dan akumulasi penyusutannya senilai Rp70.677.985,- dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus. Pengalihan status ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara No. BA-10/MK.1/SJ.7/2021 Tanggal 14 Juni 2021.

7. UPP Jepara

Terdapat Transaksi Masuk berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp379.605.000,- dan akumulasi penyusutannya senilai Rp87.041.079,- dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus. Pengalihan status ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara No. BA-10/MK.1/SJ.7/2021 Tanggal 14 Juni 2021.

8. KSOP Gunung Sitoli

Terdapat Transaksi Masuk berupa Tanah senilai Rp4.636.333.000,-, Gedung dan Bangunan senilai Rp294.146.000,- dan akumulasi penyusutannya senilai Rp88.315.442,- dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sibolga. Pengalihan status ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara No. BA-767-Tahun 2021 Tanggal 04 Agustus 2021.

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA  
NIP. 19670320 199203 1 003

# LAMPIRAN

## I

**NERACA**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
UNIT ORGANISASI : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl. Cetak 02/03/2022 6:12 AM  
lap\_neraca\_es1\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	12,112,827	65,204,207	(53,091,380)	(81.42)
Kas di Bendahara Penerimaan	90,453,800	222,794,110	(132,340,310)	(59.40)
Kas Lainnya dan Setara Kas	20,701,471,289	1,569,164,904	19,132,306,385	1,219.27
Kas pada Badan Layanan Umum	3,672,566,846	0	3,672,566,846	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	2,499,192,324	(2,499,192,324)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	40,464,859,524	51,609,572,638	(11,144,713,114)	(21.59)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(20,163,949,005)	(19,073,357,257)	(1,090,591,748)	5.72
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>20,300,910,519</b>	<b>32,536,215,381</b>	<b>(12,235,304,862)</b>	<b>(37.61)</b>
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	63,035,000	0	63,035,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(744,575)	0	(744,575)	0.00
<b>PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)</b>	<b>62,290,425</b>	<b>0</b>	<b>62,290,425</b>	<b>0.00</b>
Persediaan	225,594,470,297	218,480,101,807	7,114,368,490	3.26
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>270,434,276,003</b>	<b>255,372,672,733</b>	<b>15,061,603,270</b>	<b>5.90</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	12,443,538,534,024	11,965,320,248,636	478,218,285,388	4.00
Peralatan dan Mesin	19,923,727,581,084	17,087,015,203,142	2,836,712,377,942	16.60
Gedung dan Bangunan	7,253,695,864,930	6,992,136,398,200	261,559,466,730	3.74
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,455,009,293,404	23,403,893,990,585	51,115,302,819	0.22
Aset Tetap Lainnya	41,823,756,584	44,686,110,058	(2,862,353,474)	(6.41)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12,127,144,408,156	13,359,168,726,331	(1,232,024,318,175)	(9.22)
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(16,830,681,465,191)</b>	<b>(14,284,365,585,551)</b>	<b>(2,546,315,879,640)</b>	<b>17.83</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>58,414,257,972,991</b>	<b>58,567,855,091,401</b>	<b>(153,597,118,410)</b>	<b>(0.26)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	9,482,009,139	9,478,598,990	3,410,149	0.04
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(544,462,853)	(376,290,802)	(168,172,051)	44.69
<b>TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>	<b>8,937,546,286</b>	<b>9,102,308,188</b>	<b>(164,761,902)</b>	<b>(1.81)</b>
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>8,937,546,286</b>	<b>9,102,308,188</b>	<b>(164,761,902)</b>	<b>(1.81)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	742,138,116,015	401,218,575,000	340,919,541,015	84.97
Aset Tak Berwujud	623,200,185,238	514,228,379,543	108,971,805,695	21.19
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	7,260,888,250	13,413,438,250	(6,152,550,000)	(45.87)
Aset Lain-lain	483,295,024,276	470,084,375,971	13,210,648,305	2.81
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(514,264,409,188)</b>	<b>(333,380,139,429)</b>	<b>(180,884,269,759)</b>	<b>54.26</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1,341,629,804,591</b>	<b>1,065,564,629,335</b>	<b>276,065,175,256</b>	<b>25.91</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>60,035,259,599,871</b>	<b>59,897,894,701,657</b>	<b>137,364,898,214</b>	<b>0.23</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,238,811,295	3,086,240,444	152,570,851	4.94

**NERACA**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
 UNIT ORGANISASI : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl. Cetak 02/03/2022 6:12 AM  
 lap\_neraca\_es1\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Hibah Yang Belum Disahkan	0	646,693,551	(646,693,551)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	448,970,250	0	448,970,250	0.00
Uang Muka dari KPPN	12,112,827	65,204,207	(53,091,380)	(81.42)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>3,699,894,372</b>	<b>3,798,138,202</b>	<b>(98,243,830)</b>	<b>(2.59)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3,699,894,372</b>	<b>3,798,138,202</b>	<b>(98,243,830)</b>	<b>(2.59)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	60,031,559,705,499	59,894,096,563,455	137,463,142,044	0.23
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>60,031,559,705,499</b>	<b>59,894,096,563,455</b>	<b>137,463,142,044</b>	<b>0.23</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>60,031,559,705,499</b>	<b>59,894,096,563,455</b>	<b>137,463,142,044</b>	<b>0.23</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>60,035,259,599,871</b>	<b>59,897,894,701,657</b>	<b>137,364,898,214</b>	<b>0.23</b>

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LO.ES1  
Tanggal : 02/03/22 6:12 AM  
Halaman : 1  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM  
Prog ID : lap\_lo\_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,111,240,006,910	3,695,233,306,103	416,006,700,807	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,111,240,006,910	3,695,233,306,103	416,006,700,807	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	4,111,240,006,910	3,695,233,306,103	416,006,700,807	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	1,703,783,086,434	1,715,775,702,835	(11,992,616,401)	-
Beban Persediaan	229,978,107,715	344,156,053,787	(114,177,946,072)	-
Beban Barang dan Jasa	2,453,897,567,152	2,338,327,025,660	115,570,541,492	-
Beban Pemeliharaan	652,214,777,017	561,539,042,736	90,675,734,281	-
Beban Perjalanan Dinas	283,008,531,679	258,877,554,781	24,130,976,898	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	313,082,926,561	(313,082,926,561)	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LO.ES1  
Tanggal : 02/03/22 6:12 AM  
Halaman : 2  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM  
Prog ID : lap\_lo\_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,807,358,228,442	2,716,552,743,919	90,805,484,523	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6,162,102,454	1,521,429,638	4,640,672,816	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8,136,402,400,893</b>	<b>8,249,832,479,917</b>	<b>(113,430,079,024)</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(4,025,162,393,983)</b>	<b>(4,554,599,173,814)</b>	<b>529,436,779,831</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(317,122,032,412)	(92,366,317,184)	(224,755,715,228)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12,007,636,694	3,943,194,271	8,064,442,423	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	329,129,669,106	96,309,511,455	232,820,157,651	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40,692,166,445	34,204,443,796	6,487,722,649	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,489,581,425	51,825,249,005	(10,335,667,580)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	797,414,980	17,620,805,209	(16,823,390,229)	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(276,429,865,967)</b>	<b>(58,161,873,388)</b>	<b>(218,267,992,579)</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(4,301,592,259,950)</b>	<b>(4,612,761,047,202)</b>	<b>311,168,787,252</b>	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(4,301,592,259,950)</b>	<b>(4,612,761,047,202)</b>	<b>311,168,787,252</b>	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : Lpe.es1  
Tanggal : 02/03/22 6:12 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lpe\_es1

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	59,894,096,563,455	56,952,495,482,080	2,941,601,081,375	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,301,592,259,950)	(4,612,761,047,202)	311,168,787,252	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(588,415,965,730)	1,234,101,075,870	(1,822,517,041,600)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	3,725,177,192	11,864,853,518	(8,139,676,326)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(2,926,538,499)	25,980,142,852	(28,906,681,351)	-
SELISIH REVALUASI ASET	34,645,546,250	1,256,160,377,250	(1,221,514,831,000)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(621,597,959,863)	(63,850,336,357)	(557,747,623,506)	-
LAIN-LAIN	(2,262,190,810)	3,946,038,607	(6,208,229,417)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,027,471,367,724	6,320,261,052,707	(1,292,789,684,983)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	137,463,142,044	2,941,601,081,375	(2,804,137,939,331)	-
EKUITAS AKHIR	60,031,559,705,499	59,894,096,563,455	137,463,142,044	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 ESELON I : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.F.W.1  
 Tanggal : 02/03/22 6:12 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_face\_es1\_komparatif--

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3,843,330,169,001	4,172,720,949,441	329,390,780,440	109	3,452,310,586,000	3,711,055,508,075	258,744,922,075	107
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>3,843,330,169,001</b>	<b>4,172,720,949,441</b>	<b>329,390,780,440</b>	<b>109</b>	<b>3,452,310,586,000</b>	<b>3,711,055,508,075</b>	<b>258,744,922,075</b>	<b>107</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	1,753,170,624,000	1,703,879,027,832	(49,291,596,168)	97	1,760,953,117,000	1,717,590,901,468	(43,362,215,532)	98
	BELANJA BARANG	3,733,583,089,000	3,644,598,122,816	(88,984,966,184)	98	3,565,651,196,000	3,483,287,946,778	(82,363,249,222)	98
	BELANJA MODAL	4,009,735,511,000	3,796,309,989,382	(213,425,521,618)	95	4,585,334,249,000	4,312,543,993,955	(272,790,255,045)	94
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>9,496,489,224,000</b>	<b>9,144,787,140,030</b>	<b>(351,702,083,970)</b>	<b>96</b>	<b>9,911,938,562,000</b>	<b>9,513,422,842,201</b>	<b>(398,515,719,799)</b>	<b>96</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 02/03/22 6:13 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1,294,150,000	1,268,525,000	0	1,268,525,000	98.02
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	1,294,150,000	1,268,525,000	0	1,268,525,000	98.02
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1,617,688,000	4,901,347,700	0	4,901,347,700	302.98
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	1,617,688,000	4,901,347,700	0	4,901,347,700	302.98
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	323,537,000	41,860,765	0	41,860,765	12.94
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	323,537,000	41,860,765	0	41,860,765	12.94
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	55,900,000	0	55,900,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,431,556,044	0	6,431,556,044	0
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	164,000	0	0	0	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	63,498,000	5,520,180,650	0	5,520,180,650	8693.47
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,232,096,000	14,279,752,743	124,575	14,279,628,168	639.74
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	603,980,000	0	603,980,000	0
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,626,307,000	10,525,271,097	0	10,525,271,097	122.01
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	2,097,000,000	0	2,097,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	10,922,065,000	39,513,640,534	124,575	39,513,515,959	361.78
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2,274,276,111,000	2,486,901,710,435	0	2,486,901,710,435	109.35
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	542,361,522,001	605,873,972,772	0	605,873,972,772	111.71
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	219,459,064,000	274,038,369,122	0	274,038,369,122	124.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 02/03/22 6:13 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	520,573,147,000	540,555,379,773	0	540,555,379,773	103.84
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	272,502,885,000	69,220,536,819	0	69,220,536,819	25.4
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255</b>	<b>3,829,172,729,001</b>	<b>3,976,589,968,921</b>	<b>0</b>	<b>3,976,589,968,921</b>	<b>103.85</b>
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	9,109	0	9,109	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	146,929,398	0	146,929,398	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	56,010,000	0	56,010,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	132,948,169	0	132,948,169	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257</b>	<b>0</b>	<b>335,896,676</b>	<b>0</b>	<b>335,896,676</b>	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	112,601,690,435	0	112,601,690,435	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258</b>	<b>0</b>	<b>112,601,690,435</b>	<b>0</b>	<b>112,601,690,435</b>	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	52,455,557	0	52,455,557	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30,599,180,564	0	30,599,180,564	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,298,098,465	0	6,298,098,465	0
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	88,335,000	0	88,335,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	554,200	0	554,200	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	429,520,199	0	429,520,199	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259</b>	<b>0</b>	<b>37,468,143,985</b>	<b>0</b>	<b>37,468,143,985</b>	
	<b>JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42</b>	<b>3,843,330,169,001</b>	<b>4,172,721,074,016</b>	<b>124,575</b>	<b>4,172,720,949,441</b>	<b>108.57</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3,843,330,169,001</b>	<b>4,172,721,074,016</b>	<b>124,575</b>	<b>4,172,720,949,441</b>	<b>108.57</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 02/03/22 6:13 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	628,110,394,000	628,062,284,000	614,124,903,962	14,476,666	614,110,427,296	97.78	13,951,856,704
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	123,431,000	13,504,000	9,711,701	87,855	9,623,846	71.27	3,880,154
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	55,449,341,000	52,250,837,000	50,167,179,535	1,718,610	50,165,460,925	96.01	2,085,376,075
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,152,616,000	16,892,837,000	16,019,332,111	1,175,820	16,018,156,291	94.82	874,680,709
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,130,154,000	9,274,423,000	8,752,985,000	490,000	8,752,495,000	94.37	521,928,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	370,105,000	427,908,000	423,020,000	4,800,000	418,220,000	97.74	9,688,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,653,398,000	1,364,007,000	685,367,310	0	685,367,310	50.25	678,639,690
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	41,875,415,000	44,111,415,000	42,769,133,230	1,208,172	42,767,925,058	96.95	1,343,489,942
511129	Belanja Uang Makan PNS	132,385,044,000	123,756,348,000	117,660,159,579	2,742,900	117,657,416,679	95.07	6,098,931,321
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	21,439,436,000	15,852,728,000	13,426,946,146	18,000	13,426,928,146	84.7	2,425,799,854
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	612,910,000	517,972,000	462,375,000	0	462,375,000	89.27	55,597,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	3,954,883,000	3,989,072,000	3,715,873,148	0	3,715,873,148	93.15	273,198,852
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam	10,000,000	400,000	0	0	0	0	400,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	34,886,734,000	33,849,081,000	32,252,231,550	30,898,778	32,221,332,772	95.19	1,627,748,228
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>948,153,861,000</b>	<b>930,362,816,000</b>	<b>900,469,218,272</b>	<b>57,616,801</b>	<b>900,411,601,471</b>	<b>96.79</b>	<b>29,951,214,529</b>
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	150,000,000	92,000,000	91,897,800	0	91,897,800	99.89	102,200
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115</b>	<b>150,000,000</b>	<b>92,000,000</b>	<b>91,897,800</b>	<b>0</b>	<b>91,897,800</b>	<b>99.89</b>	<b>102,200</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	87,964,892,000	87,313,445,000	84,724,056,778	722,000	84,723,334,778	97.03	2,590,110,222
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>87,964,892,000</b>	<b>87,313,445,000</b>	<b>84,724,056,778</b>	<b>722,000</b>	<b>84,723,334,778</b>	<b>97.03</b>	<b>2,590,110,222</b>
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	884,182,405,000	735,402,363,000	718,744,775,254	92,581,471	718,652,193,783	97.72	16,750,169,217
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124</b>	<b>884,182,405,000</b>	<b>735,402,363,000</b>	<b>718,744,775,254</b>	<b>92,581,471</b>	<b>718,652,193,783</b>	<b>97.73</b>	<b>16,750,169,217</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>1,920,451,158,000</b>	<b>1,753,170,624,000</b>	<b>1,704,029,948,104</b>	<b>150,920,272</b>	<b>1,703,879,027,832</b>	<b>97.2</b>	<b>49291596168</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	359,828,441,000	358,708,518,000	354,872,304,842	114,659,328	354,757,645,514	98.9	3,950,872,486
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	14,488,867,000	12,025,379,000	11,880,823,960	0	11,880,823,960	98.8	144,555,040
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,168,874,000	7,044,563,000	6,749,093,499	0	6,749,093,499	95.81	295,469,501
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,345,717,000	4,437,746,000	4,266,429,178	0	4,266,429,178	96.14	171,316,822
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,907,332,000	50,798,888,000	48,994,185,500	40,851,700	48,953,333,800	96.37	1,845,554,200
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	46,138,974,000	36,045,150,000	34,015,068,437	0	34,015,068,437	94.37	2,030,081,563
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	13,857,318,000	20,348,362,000	19,265,051,967	0	19,265,051,967	94.68	1,083,310,033

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 02/03/22 6:13 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>502,735,523,000</b>	<b>489,408,606,000</b>	<b>480,042,957,383</b>	<b>155,511,028</b>	<b>479,887,446,355</b>	<b>98.09</b>	<b>9,521,159,645</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	48,724,170,000	43,507,822,000	42,003,792,501	9,000	42,003,783,501	96.54	1,504,038,499
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,839,430,000	17,320,400,000	16,775,828,000	2,879,000	16,772,949,000	96.84	547,451,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,847,943,788,00	1,670,125,976,00	1,654,794,883,88	1,047,415,922	1,653,747,467,96	99.02	16,378,508,037
521221	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam	3,062,320,000	2,743,980,000	2,743,980,000	0	2,743,980,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	21,750,000	21,750,000	21,750,000	0	21,750,000	100	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	662,523,000	3,669,187,000	2,994,224,294	200,000	2,994,024,294	81.6	675,162,706
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>1,921,253,981,000</b>	<b>1,737,389,115,000</b>	<b>1,719,334,458,680</b>	<b>1,050,503,922</b>	<b>1,718,283,954,758</b>	<b>98.96</b>	<b>19,105,160,242</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	159,559,934,000	120,605,019,000	117,456,778,309	700,000	117,456,078,309	97.39	3,148,940,691
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan	514,562,000	524,612,000	493,480,034	0	493,480,034	94.07	31,131,966
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	22,594,302,000	29,071,582,000	27,925,657,033	8,157,500	27,917,499,533	96.03	1,154,082,467
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>182,668,798,000</b>	<b>150,201,213,000</b>	<b>145,875,915,376</b>	<b>8,857,500</b>	<b>145,867,057,876</b>	<b>97.12</b>	<b>4,334,155,124</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	60,113,838,000	50,659,159,000	48,292,573,429	1,792,873	48,290,780,556	95.32	2,368,378,444
522112	Belanja Langganan Telepon	10,437,120,000	5,778,996,000	4,952,806,144	56,210	4,952,749,934	85.7	826,246,066
522113	Belanja Langganan Air	8,260,017,000	6,080,895,000	5,154,986,823	179,000	5,154,807,823	84.77	926,087,177
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36,422,582,000	21,342,693,000	19,489,036,941	38,250	19,488,998,691	91.31	1,853,694,309
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	3,429,225,000	2,498,174,000	2,086,737,480	3,100,000	2,083,637,480	83.41	414,536,520
522131	Belanja Jasa Konsultan	122,686,865,000	87,440,730,000	86,253,378,387	0	86,253,378,387	98.64	1,187,351,613
522141	Belanja Sewa	11,747,174,000	14,769,544,000	14,539,450,437	0	14,539,450,437	98.44	230,093,563
522151	Belanja Jasa Profesi	7,031,249,000	4,354,103,000	3,894,639,368	0	3,894,639,368	89.45	459,463,632
522191	Belanja Jasa Lainnya	265,195,016,000	67,851,659,000	66,318,815,918	0	66,318,815,918	97.74	1,532,843,082
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,534,597,000	4,016,327,000	3,112,224,482	0	3,112,224,482	77.49	904,102,518
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>527,857,683,000</b>	<b>264,792,280,000</b>	<b>254,094,649,409</b>	<b>5,166,333</b>	<b>254,089,483,076</b>	<b>95.96</b>	<b>10,702,796,924</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111,600,533,000	109,565,861,000	108,537,489,896	0	108,537,489,896	99.06	1,028,371,104
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	836,805,000	673,162,000	672,330,360	0	672,330,360	99.88	831,640
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	30,800,000	30,800,000	30,800,000	0	30,800,000	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	198,000,000	197,991,334	0	197,991,334	100	8,666
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	678,013,355,000	478,284,166,000	471,326,388,323	51,573,602	471,274,814,721	98.53	7,009,351,279
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	1,068,568,000	144,462,000	94,692,000	0	94,692,000	65.55	49,770,000
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	130,973,653,000	112,194,722,000	110,627,889,672	34,712,744	110,593,176,928	98.57	1,601,545,072
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000,000	450,364,000	449,948,000	0	449,948,000	99.91	416,000
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	25,422,671,000	17,047,138,000	16,433,010,976	0	16,433,010,976	96.4	614,127,024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 02/03/22 6:13 AM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	50,235,000	49,988,000	0	49,988,000	99.51	247,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	661,597,000	967,691,000	958,543,719	0	958,543,719	99.05	9,147,281
523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan	0	22,181,000	22,081,000	0	22,081,000	99.55	100,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	226,400,000	25,176,943,000	254,008,902	0	254,008,902	1.01	24,922,934,098
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>949,834,382,000</b>	<b>744,805,725,000</b>	<b>709,655,162,182</b>	<b>86,286,346</b>	<b>709,568,875,836</b>	<b>95.28</b>	<b>35,236,849,164</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	353,099,473,000	202,943,739,000	196,015,020,722	82,426,797	195,932,593,925	96.55	7,011,145,075
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,775,832,000	53,218,088,000	52,923,295,410	89,248,500	52,834,046,910	99.28	384,041,090
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,510,495,000	15,845,085,000	15,134,538,957	550,000	15,133,988,957	95.51	711,096,043
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,800,219,000	19,414,881,000	18,573,557,859	1,048,285	18,572,509,574	95.66	842,371,426
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>411,186,019,000</b>	<b>291,421,793,000</b>	<b>282,646,412,948</b>	<b>173,273,582</b>	<b>282,473,139,366</b>	<b>96.99</b>	<b>8,948,653,634</b>
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	11,321,984,000	118,236,000	118,236,000	0	118,236,000	100	0
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	343,000,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242</b>	<b>11,664,984,000</b>	<b>118,236,000</b>	<b>118,236,000</b>	<b>0</b>	<b>118,236,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	0	581,223,000	498,681,500	0	498,681,500	85.8	82,541,500
525113	Belanja Jasa	0	358,627,000	312,580,000	0	312,580,000	87.16	46,047,000
525115	Belanja Perjalanan	0	544,946,000	417,156,313	0	417,156,313	76.55	127,789,687
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251</b>	<b>0</b>	<b>1,484,796,000</b>	<b>1,228,417,813</b>	<b>0</b>	<b>1,228,417,813</b>	<b>82.73</b>	<b>256,378,187</b>
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	64,582,299,000	53,884,925,000	53,019,517,336	0	53,019,517,336	98.39	865,407,664
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261</b>	<b>64,582,299,000</b>	<b>53,884,925,000</b>	<b>53,019,517,336</b>	<b>0</b>	<b>53,019,517,336</b>	<b>98.39</b>	<b>865,407,664</b>
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk	0	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk	827,325,000	62,000,000	61,994,400	0	61,994,400	99.99	5,600
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263</b>	<b>827,325,000</b>	<b>76,400,000</b>	<b>61,994,400</b>	<b>0</b>	<b>61,994,400</b>	<b>81.14</b>	<b>14,405,600</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>4,572,610,994,000</b>	<b>3,733,583,089,000</b>	<b>3,646,077,721,527</b>	<b>1,479,598,711</b>	<b>3,644,598,122,816</b>	<b>97.66</b>	<b>88984966184</b>
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	2,838,741,000	3,546,100,000	3,534,754,848	0	3,534,754,848	99.68	11,345,152
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	1,227,045,000	0	0	0	0	1,227,045,000
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	851,786,000	770,955,510	0	770,955,510	90.51	80,830,490
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	6,055,000,000	71,039,000	42,470,840	0	42,470,840	59.79	28,568,160
531121	Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang	0	61,843,946,000	61,843,944,513	0	61,843,944,513	100	1,487

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
ESELON I : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 02/03/22 6:13 AM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	8,893,741,000	67,539,916,000	66,192,125,711	0	66,192,125,711	98	1,347,790,289
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,339,872,191,00	835,474,021,000	833,123,570,106	11,000,000	833,112,570,106	99.72	2,361,450,894
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	14,550,000	29,270,000	14,500,000	0	14,500,000	49.54	14,770,000
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan	1,200,000,000	394,050,000	366,440,000	14,500,000	351,940,000	89.31	42,110,000
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	779,000,000	404,450,000	0	404,450,000	51.92	374,550,000
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	321,600,000	279,650,000	214,705,746	0	214,705,746	76.78	64,944,254
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	1,372,047,000	1,510,860,000	1,406,149,650	0	1,406,149,650	93.07	104,710,350
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	14,164,460,000	27,581,225,000	27,501,914,015	0	27,501,914,015	99.71	79,310,985
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,356,944,848,000	866,048,076,000	863,031,729,517	25,500,000	863,006,229,517	99.65	3,041,846,483
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	756,347,490,000	362,687,575,000	356,071,500,521	29,585,000	356,041,915,521	98.17	6,645,659,479
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	45,150,000	62,950,000	32,000,000	0	32,000,000	50.83	30,950,000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	1,825,210,000	739,520,000	738,517,500	0	738,517,500	99.86	1,002,500
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	81,959,000	416,440,000	408,473,135	0	408,473,135	98.09	7,966,865
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	145,701,900,000	145,320,446,698	0	145,320,446,698	99.74	381,453,302
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,471,650,000	1,470,937,000	1,470,100,300	0	1,470,100,300	99.94	836,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	761,771,459,000	511,079,322,000	504,041,038,154	29,585,000	504,011,453,154	98.62	7,067,868,846
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,686,577,498,00	2,495,393,827,00	2,295,114,330,52	0	2,295,114,330,52	91.97	200,279,496,47
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	165,720,000	94,240,000	28,400,000	0	28,400,000	30.14	65,840,000
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	106,750,000	49,750,000	0	0	0	0	49,750,000
534121	Belanja Modal Irigasi	89,659,000	184,935,000	184,522,000	0	184,522,000	99.78	413,000
534131	Belanja Modal Jaringan	215,000,000	215,000,000	215,000,000	0	215,000,000	100	0
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	750,000,000	297,204,000	297,204,000	0	297,204,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	2,687,904,627,000	2,496,234,956,000	2,295,839,456,524	0	2,295,839,456,524	91.97	200,395,499,476
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	103,613,910,000	67,481,999,000	65,949,975,670	0	65,949,975,670	97.73	1,532,023,330
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	103,613,910,000	67,481,999,000	65,949,975,670	0	65,949,975,670	97.73	1,532,023,330
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	824,542,000	785,978,232	0	785,978,232	95.32	38,563,768
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan	0	526,700,000	524,770,574	0	524,770,574	99.63	1,929,426
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	1,351,242,000	1,310,748,806	0	1,310,748,806	97	40,493,194
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,919,128,585,000	4,009,735,511,000	3,796,365,074,382	55,085,000	3,796,309,989,382	94.68	213425521618
	JUMLAH BELANJA	11,412,190,737,00	9,496,489,224,000	9,146,472,744,013	1,685,603,983	9,144,787,140,030	96.31	351,702,083,970



# LAMPIRAN

II

**BERITA ACARA REKONSILIASI SIMAK DAN E REKON TINGKAT ESELON 1**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021 (UNAUDITED)**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **PARISTAWANGI, SE**  
 NIP. : **19810607 200604 2 002**  
 Jabatan : **Penyusun Laporan Keuangan**

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon 1 (UAPPB-E1) untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

II. Nama : **PRATAMA AGUSTYAN S**  
 NIP. : **19860814 200812 1 002**  
 Jabatan : **Penyusun Laporan Keuangan**

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon 1 (UAPPA-E1) untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

III. Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data SIMAK BMN Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon 1 (UAPPB-E1) dengan Data E-Rekon Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) dengan hasil sebagai berikut :

KODE AKUN	AKUN	E-SIMAK	E-REKON	SELISIH	STATUS
1171	PERSEDIAAN	225.594.470.297	225.594.470.297	-	SAMA
1311	TANAH	12.443.538.534.024	12.443.538.534.024	-	SAMA
1321	PERALATAN DAN MESIN	19.923.727.581.084	19.923.727.581.084	-	SAMA
1331	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.253.695.864.930	7.253.695.864.930	-	SAMA
1341	JALAN, IRIGASI, JARINGAN	23.455.009.293.404	23.455.009.293.404	-	SAMA
1351	ASET TETAP LAINNYA	41.823.756.584	41.823.756.584	-	SAMA
1361	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	12.127.144.408.156	12.127.144.408.156	-	SAMA
137	AKUM PENY ASET TETAP	(16.830.681.465.191)	(16.830.681.465.191)	-	SAMA
1611	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	742.138.116.015	742.138.116.015	-	SAMA
1621	ASET TAK BERWUJUD	623.200.185.238	623.200.185.238	-	SAMA
162311	ATB DALAM Pengerjaan	7.260.888.250	7.260.888.250	-	SAMA
1661	ASET LAIN-LAIN	483.295.024.276	483.295.024.276	-	SAMA
169	AMORTISASI ASET LAINNYA	(514.264.409.188)	(514.264.409.188)	-	SAMA
	<b>TOTAL</b>	<b>59.981.482.247.879</b>	<b>59.981.482.247.879</b>	<b>-</b>	<b>SAMA</b>

/Demikian .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan Penyusunan Laporan BMN dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA. 2021 *Unaudited* dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. UAPPB-E1  
KETUA URUSAN IV KELOMPOK SUBSTANSI  
AKUNTANSI  
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN



PARISTAWANGI  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19810607 200604 2 002

An. UAPPA-E1  
KETUA URUSAN II KELOMPOK SUBSTANSI  
AKUNTANSI  
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN



PRATAMA AGUSTYAN S  
Penata Tk I (III/d)  
NIP. 19860814 200812 1 002

Mengetahui,  
KEPALA BAGIAN KEUANGAN



RETNO WUJAYANTI  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19671206 199403 2 002

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 UAPPB- : 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tanggal : 15/02/22 2:59 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_es

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	64,458,069,166
117112	Amunisi	70,102,262
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,935,022,786
117114	Suku Cadang	24,368,336,288
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	11,680,955,168
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam	67,079,580,439
117131	Bahan Baku	27,243,317,669
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1,030,392,052
117199	Persediaan Lainnya	26,728,694,467
131111	Tanah	12,443,538,534,024
132111	Peralatan dan Mesin	19,923,727,581,084
133111	Gedung dan Bangunan	7,253,695,864,930
134111	Jalan dan Jembatan	20,031,449,948,219
134112	Irigasi	3,338,976,045,626
134113	Jaringan	84,583,299,559
135111	Aset Tetap Renovasi	11,544,921,291
135121	Aset Tetap Lainnya	30,278,835,293
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	12,127,144,408,156
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11,501,450,489,875)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,162,905,264,989)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,271,055,137,683)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,866,385,888,654)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(28,828,970,069)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(55,713,921)
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	742,138,116,015
162151	Software	144,731,117,892
162171	Hasil Kajian/Penelitian	259,194,125,714
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	219,274,941,632
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	7,260,888,250
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	466,280,432,181
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	17,014,592,095
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(44,306,520,343)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(332,887,030,758)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(136,816,318,087)
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(192,610,000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(61,930,000)
<b>J U M L A H</b>		<b>59,981,482,247,879</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022  
UNIT ORGANISASI : 04

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl. Cetak 15/02/2022 2:59 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,114,500	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	10,998,327	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	90,453,800	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	20,701,471,289	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	3,672,566,846	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	38,278,580,404	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,143,260,220	0
0.0	115711	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	63,035,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	20,153,017,609
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	10,716,301
0.0	116611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	744,575
0.0	117111	Barang Konsumsi	64,458,069,166	0
0.0	117112	Amunisi	70,102,262	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,935,022,786	0
0.0	117114	Suku Cadang	24,368,336,288	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	11,680,955,168	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	67,079,580,439	0
0.0	117131	Bahan Baku	27,243,317,669	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1,030,392,052	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	26,728,694,467	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	12,443,538,534,024	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	19,923,727,581,084	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	132411	Peralatan dan Mesin Belum Diregister - BLU	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,253,695,864,930	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	20,031,449,948,219	0
0.0	134112	Irigasi	3,338,976,045,626	0
0.0	134113	Jaringan	84,583,299,559	0
0.0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	0	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : 04

DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Tgl. Cetak 15/02/2022 2:59 AM

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	11,544,921,291	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	30,278,835,293	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	12,127,144,408,156	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,501,450,489,875
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,162,905,264,989
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,271,055,137,683
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,866,385,888,654
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	28,828,970,069
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	55,713,921
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	9,482,009,139	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	544,462,853
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0
0.0	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	742,138,116,015	0
0.0	162151	Software	144,731,117,892	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	259,194,125,714	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	219,274,941,632	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	7,260,888,250	0
0.0	166111	Aset Lain-lain	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	466,280,432,181	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17,014,592,095	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	44,306,520,343
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	332,887,030,758
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	136,816,318,087
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	192,610,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	61,930,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	2,795,232,345
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	443,578,950
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	433,970,250
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	0
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	15,000,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	12,112,827
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,135,253,015,411
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,166,509,215,976	0
0.0	313211	Transfer Keluar	360,982,337,482	0

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
PERIODE S.D. 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

---

Pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Nama : DANANG MARDYANTO**

**NIP : 19840322 201012 1 003**

**Jabatan : Plh. Koordinator Kelompok Substansi Perbendaharaan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Pengelola PNBPN tingkat E1 Ditjen Hubla, untuk selanjutnya disebut Pihak pertama;

**II. Nama : PRATAMA AGUSTYAN**

**NIP : 19860814 200812 1 002**

**Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Akuntansi**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), untuk selanjutnya disebut Pihak kedua;

A. Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan cara membandingkan data PNBPN dari hasil Rekonsiliasi Data PNBPN untuk periode s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2021 dengan Laporan Keuangan pada Laporan UAPPA-E1 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2021, dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN	AKUNTANSI	PERBENDAHARAAN	SELISIH	KETERANGAN
1	Kas Bendahara Penerima	90.453.800	90.453.800	-	
2	Piutang PNBPN	38.321.599.304	38.321.599.304	-	
3	Penyisihan Piutang PNBPN	20.153.232.704	20.153.232.704	-	
4	Piutang Lainnya	2.143.260.220	2.143.260.220	-	
5	Penyisihan Piutang Lainnya	10.716.301	10.716.301	-	
6	Piutang BLU	63.035.000	63.035.000	-	
7	Penyisihan Piutang BLU	744.575	744.575	-	

<b>8</b>	<b>Pendapatan Fungsional</b>				
	- Jasa Perkapalan dan Kepelautan	274.038.369.122	274.038.369.122	-	
	- Jasa Kepelabuhanan	2.486.901.710.435	2.486.901.710.435	-	
	- Jasa Transportasi Lainnya	69.220.536.819	69.220.542.819	-6.000	Terdapat kesalahan akun pada UPP Sikakap yang seharusnya akun JTL menjadi Konsesi senilai Rp 6.000
	- Jasa Kenavigasian	605.873.972.772	605.873.972.772	-	
	- Jasa Konsesi	540.555.379.773	540.555.373.773	6.000	Terdapat kesalahan akun pada UPP Sikakap yang seharusnya akun JTL menjadi Konsesi senilai Rp 6.000
<b>9</b>	<b>Pendapatan Non Fungsional</b>	196.130.980.603	196.130.980.603	-	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan periode s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**a.n. Pengelola PNBP E1 Ditjen Hubla  
Plh. Koordinator Kelompok Substansi  
Perbendaharaan**



**DANANG MARDYANTO**  
NIP 19840322 201012 1 003

**a.n. UAPPA-E1  
Koordinator Kelompok Substansi  
Akuntansi**



**PRATAMA AGUSTYAN**  
NIP 19860814 200812 1 002

**Mengetahui,  
KEPALA BAGIAN KEUANGAN**



**RETNO WIJAYANTI**  
NIP 19671206 199403 2 001

**BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SEMESTER II TA. 2021  
YANG DIMASUKKAN DALAM LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEMESTER II TA. 2021**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** Tahun **2022** telah diselenggarakan rekonsiliasi/konsolidasi Laporan Barang Milik Negara antara **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB E-1) dengan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Kementerian Perhubungan.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB E-1) **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** Kementerian Perhubungan dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan rekonsiliasi/konsolidasi Laporan Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2021 dengan hasil terlampir.

**Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** Kementerian Perhubungan telah menyetujui angka-angka dalam Laporan Barang Milik Negara tersebut, sebagaimana dituangkan dalam lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dimuat dalam Laporan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan Semester II Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Berita Acara ini maka **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** Kementerian Perhubungan menyetujui akan menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2021 beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam lampiran Berita Acara ini kepada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN.

Jakarta,      Februari 2022

a.n. Unit Akuntansi Pengguna Barang  
(UAPB) Kementerian Perhubungan  
Kepala Bagian Pengelolaan  
Barang Milik Negara



M. UJUAN AMIRTA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19830324 200502 1 001

a.n. Unit Akuntansi Pembantu  
Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-EI)  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
Kepala Bagian Keuangan



RETNO WIJAYANTI  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19671206 199403 2 002

### Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Periode Semester II TA. 2021

URAIAN	SALDO AKHIR AUDITED	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR UNAUDITED
	TAHUNAN TA. 2020	01 JANUARI 2021	TAMBAH	KURANG	TAHUNAN TA. 2021
Barang Konsumsi	69.631.125.971	69.631.125.971		5.173.056.805	64.458.069.166
Amunisi	70.101.810	70.101.810	452		70.102.262
Bahan untuk Pemeliharaan	3.556.860.991	3.556.860.991		621.838.205	2.935.022.786
Suku Cadang	30.003.347.712	30.003.347.712		5.635.011.424	24.368.336.288
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	11.680.955.168	11.680.955.168	-	-	11.680.955.168
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-	-	-
Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	17.682.423.103	17.682.423.103	49.397.157.336		67.079.580.439
Bahan Baku	35.209.863.721	35.209.863.721		7.966.546.052	27.243.317.669
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	1.183.123.352	1.183.123.352		152.731.300	1.030.392.052
Persediaan Lainnya	49.462.299.979	49.462.299.979		22.733.605.512	26.728.694.467
Tanah	11.965.320.248.636	11.965.320.248.636	1.235.634.149.521	757.415.864.133	12.443.538.534.024
Peralatan dan Mesin	17.087.015.203.142	17.087.015.203.142	4.233.612.922.054	1.396.900.544.112	19.923.727.581.084
Gedung dan Bangunan	6.992.136.398.200	6.992.136.398.200	944.285.771.367	682.726.304.637	7.253.695.864.930
Jalan dan Jembatan	20.119.697.957.635	20.119.697.957.635	3.345.378.638.491	3.433.626.647.907	20.031.449.948.219
Irigasi	3.197.295.099.869	3.197.295.099.869	346.916.488.077	205.235.542.320	3.338.976.045.626
Jaringan	86.900.933.081	86.900.933.081	3.355.332.116	5.672.965.638	84.583.299.559
Aset Tetap dalam Renovasi	18.727.099.914	18.727.099.914	6.736.629.000	13.918.807.623	11.544.921.291
Aset Tetap Lainnya	25.959.010.144	25.959.010.144	6.324.490.900	2.004.665.751	30.278.835.293
Konstruksi Dalam pengerjaan	13.359.168.726.331	13.359.168.726.331	3.518.825.562.400	4.750.849.880.575	12.127.144.408.156
Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 10.080.161.927.071	- 10.080.161.927.071	- 1.587.389.742.237	- 166.101.179.433	- 11.501.450.489.875
Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 903.271.265.962	- 903.271.265.962	- 258.229.822.404	- 1.404.176.623	- 1.162.905.264.989
Ak. Penyusutan Jalan dan Jembatan	- 1.813.613.498.341	- 1.813.613.498.341	- 505.348.902.769	- 47.907.263.427	- 2.271.055.137.683
Ak. Penyusutan Irigasi	- 1.449.046.405.422	- 1.449.046.405.422	- 377.180.108.274	- 40.159.374.958	- 1.866.385.888.654
Ak. Penyusutan Jaringan	- 26.079.761.465	- 26.079.761.465	- 3.551.807.507	- 802.598.903	- 28.828.970.069

URAIAN	SALDO AKHIR AUDITED	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR UNAUDITED
	TAHUNAN TA. 2020	01 JANUARI 2021	TAMBAH	KURANG	TAHUNAN TA. 2021
Ak. Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Dalam Renovasi)	-	-			-
Ak. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	- 12.192.727.290	- 12.192.727.290	- 19.219.031	- 12.156.232.400	- 55.713.921
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	401.218.575.000	401.218.575.000	343.651.898.015	2.732.357.000	742.138.116.015
Hak Cipta					-
Paten					-
Software	142.374.955.701	142.374.955.701	35.414.044.410	33.057.882.219	144.731.117.892
Lisensi					-
Hasil Kajian/Penelitian	160.131.914.924	160.131.914.924	100.315.818.990	1.253.608.200	259.194.125.714
Aset Tak Berwujud Lainnya	211.721.508.918	211.721.508.918	10.327.938.214	2.774.505.500	219.274.941.632
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	13.413.438.250	13.413.438.250	60.157.406.970	66.309.956.970	7.260.888.250
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430.953.749.503	430.953.749.503	305.366.734.893	270.040.052.215	466.280.432.181
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	39.130.626.468	39.130.626.468	9.460.000	22.125.494.373	17.014.592.095
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	- 21.138.303.678	- 21.138.303.678	- 10.703.310.561	12.464.906.104	- 44.306.520.343
Ak. Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi	- 212.179.113.073	- 212.179.113.073	- 8.188.594.459	112.519.323.226	- 332.887.030.758
Ak. Amortisasi Hak Cipta					-
Ak. Amortisasi Paten					-
Ak. Amortisasi Software	- 99.242.216.952	- 99.242.216.952	- 37.574.101.135	-	- 136.816.318.087
Ak. Amortisasi Lisensi					-
Ak. Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	- 192.610.000	- 192.610.000			- 192.610.000
Ak. Amortisasi ATB Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	- 627.895.726	- 627.895.726		- 565.965.726	- 61.930.000
<b>JUMLAH</b>	<b>59.851.899.822.543</b>	<b>59.851.899.822.543</b>	<b>11.757.524.834.829</b>	<b>11.627.942.409.493</b>	<b>59.981.482.247.879</b>

**BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
YANG DIMASUKKAN DALAM  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021 (UNAUDITED)**

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Bulan **Februari** Tahun **2022** telah diselenggarakan rekonsiliasi/konsolidasi (LRA, Neraca, LO, dan LPE) antara **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E-1) dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Perhubungan.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E-1) **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Biro Keuangan Kementerian Perhubungan, telah melakukan rekonsiliasi/konsolidasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan hasil terlampir.

**Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** telah menyetujui angka-angka Laporan Keuangan, sebagaimana dituangkan dalam lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dimuat dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Berita Acara ini maka **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** menyetujui akan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam lampiran Berita Acara ini kepada Biro Keuangan paling lambat tanggal **18 Februari 2022**.

A.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran  
(UAPA) Kementerian Perhubungan  
Kepala Bagian Akuntansi,



JOKO MURDYONO  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711007 199703 1 004

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna  
Anggaran Eselon I (UAPPA-EI)  
Kepala Bagian Keuangan,



RETNO WIJAYANTI  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19671206 199403 2 002

Mengetahui  
Tim Reviu Laporan Keuangan  
Inspektorat Jenderal,



INDRAHADHI WIBOWO  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690430 200502 1 001

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
A. PENDAPATAN

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 (UNAUDITED)						TAHUN ANGGARAN 2020 (AUDITED)	
	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI NETTO
41. Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.843.330.169.001	4.172.721.074.016	124.575	4.172.720.949.441	(329.390.780.440)	108,57	3.452.310.586.000	3.711.055.508.075
424. Pendapatan BLU	3.235.375.000	6.211.733.465	-	6.211.733.465	(2.976.358.465)	191,99	-	-
425. PNPB Lainnya	3.840.094.794.001	4.166.509.340.551	124.575	4.166.509.215.976	(326.414.421.975)	108,50	3.452.310.586.000	3.711.055.508.075
43. Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>3.843.330.169.001</b>	<b>4.172.721.074.016</b>	<b>124.575</b>	<b>4.172.720.949.441</b>	<b>(329.390.780.440)</b>	<b>108,57</b>	<b>3.452.310.586.000</b>	<b>3.711.055.508.075</b>

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 (UNAUDITED)						TAHUN ANGGARAN 2020 (AUDITED)	
		PAGU SETELAH REVISI	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI NETTO
	<b>RM, PNPB, PHLN, BLU, &amp; SBSN</b>	<b>9.496.489.224.000</b>	<b>9.146.472.744.013</b>	<b>1.685.603.983</b>	<b>9.144.787.140.030</b>	<b>351.702.083.970</b>	<b>96,30</b>	<b>9.911.938.562.000</b>	<b>9.513.422.842.201</b>
51	Belanja Pegawai	1.753.170.624.000	1.704.029.948.104	150.920.272	1.703.879.027.832	49.291.596.168	97,19	1.760.953.117.000	1.717.590.901.468
52	Belanja Barang	3.733.583.089.000	3.646.077.721.527	1.479.598.711	3.644.598.122.816	88.984.966.184	97,62	3.565.651.196.000	3.483.287.946.778
53	Belanja Modal	4.009.735.511.000	3.796.365.074.382	55.085.000	3.796.309.989.382	213.425.521.618	94,68	4.585.334.249.000	4.312.543.993.955
54	Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>9.496.489.224.000</b>	<b>9.146.472.744.013</b>	<b>1.685.603.983</b>	<b>9.144.787.140.030</b>	<b>351.702.083.970</b>	<b>96,30</b>	<b>9.911.938.562.000</b>	<b>9.513.422.842.201</b>

A.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran  
(UAPA) Kementerian Perhubungan  
Kepala Bagian Akuntansi



**JOKO MURDYONO**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui  
Tim Reviu Laporan Keuangan  
Inspektorat Jenderal



**INDRAHADI WIBOWO**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690430 200502 1 001

A.n. Unit Akuntansi Pembantu  
Pengguna Anggaran Eselon I  
Kepala Bagian Keuangan



**RETNO WIJAYANTI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19671206 199403 2 002

**LAMPIRAN BERITA ACARA  
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN  
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
ESELON I**

**: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022)  
: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**2. NERACA**

AKUN	TAHUN 2021 (UNAUDITED)	TAHUN 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	%
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.112.827	65.204.207	(53.091.380)	(81,42)
Kas di Bendahara Penerimaan	90.453.800	222.794.110	(132.340.310)	(59,40)
Kas Lainnya dan Setara kas	20.701.471.289	1.569.164.904	19.132.306.385	1.219,27
Kas pada BLU	3.672.566.846	-	3.672.566.846	-
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	2.499.192.324	(2.499.192.324)	(100,00)
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	-
Piutang Pajak	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak	-	-	-	-
Piutang Pajak (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	40.464.859.524	51.609.572.638	(11.144.713.114)	(21,59)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(20.163.949.005)	(19.073.357.257)	(1.090.591.748)	5,72
Piutang Bukan Pajak (Netto)	20.300.910.519	32.536.215.381	(12.235.304.862)	(37,61)
Bagian Lancar TP/TGR	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	63.035.000	-	63.035.000	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(744.575)	-	(744.575)	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	62.290.425	-	62.290.425	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	225.594.470.297	218.480.101.807	7.114.368.490	3,26
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-	-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>270.434.276.003</b>	<b>255.372.672.733</b>	<b>15.061.603.270</b>	<b>5,90</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	12.443.538.534.024	11.965.320.248.636	478.218.285.388	4,00
Tanah Belum Diregister	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	19.923.727.581.084	17.087.015.203.142	2.836.712.377.942	16,60
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Belum Diregister	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	7.253.695.864.930	6.992.136.398.200	261.559.466.730	3,74
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	23.455.009.293.404	23.403.893.990.585	51.115.302.819	0,22
Jalan Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	41.823.756.584	44.686.110.058	(2.862.353.474)	(6,41)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.127.144.408.156	13.359.168.726.331	(1.232.024.318.175)	(9,22)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(16.830.681.465.191)</b>	<b>(14.284.365.585.551)</b>	<b>(2.546.315.879.640)</b>	<b>17,83</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.501.450.489.875)	(10.080.161.927.071)	(1.421.288.562.804)	14,10
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.162.905.264.989)	(903.271.265.962)	(259.633.999.027)	28,74
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(4.166.269.996.406)	(3.288.739.665.228)	(877.530.331.178)	26,68
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(55.713.921)	(12.192.727.290)	12.137.013.369	(99,54)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>58.414.257.972.991</b>	<b>58.567.855.091.401</b>	<b>(153.597.118.410)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	9.482.009.139	9.478.598.990	3.410.149	0,04
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(544.462.853)	(376.290.802)	(168.172.051)	44,69
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	8.937.546.286	9.102.308.188	(164.761.902)	(1,81)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>8.937.546.286</b>	<b>9.102.308.188</b>	<b>(164.761.902)</b>	<b>(1,81)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	742.138.116.015	401.218.575.000	340.919.541.015	84,97
Aset Tak Berwujud	623.200.185.238	514.228.379.543	108.971.805.695	21,19
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	7.260.888.250	13.413.438.250	(6.152.550.000)	(45,87)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
Dana Pinjaman	-	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	-	-
Aset Lain-lain	483.295.024.276	470.084.375.971	13.210.648.305	2,81

AKUN	TAHUN 2021 (UNAUDITED)	TAHUN 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	%
<b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</b>	<b>(514.264.409.188)</b>	<b>(333.380.139.429)</b>	<b>(180.884.269.759)</b>	<b>54,26</b>
Akum. Penyusutan Aset Lain-Lain	(332.887.030.758)	(212.179.113.073)	(120.707.917.685)	56,89
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(137.008.928.087)	(99.434.826.952)	(37.574.101.135)	37,79
Akum. Penyusutan Kemitraan Dengan Phk Ke-3	(44.306.520.343)	(21.138.303.678)	(23.168.216.665)	109,60
Akum. Amortisasi ATB yang TDK Digunakan	(61.930.000)	(627.895.726)	565.965.726	(90,14)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1.341.629.804.591</b>	<b>1.065.564.629.335</b>	<b>276.065.175.256</b>	<b>25,91</b>
				-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>60.035.259.599.871</b>	<b>59.897.894.701.657</b>	<b>137.364.898.214</b>	<b>0,23</b>
				-
<b>KEWAJIBAN</b>				-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				-
Utang kepada Pihak Ketiga	3.238.811.295	3.086.240.444	152.570.851	4,94
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		-	-	-
Hibah yang Belum Disahkan		646.693.551	(646.693.551)	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	448.970.250	-	448.970.250	-
Uang Muka dari KPPN	12.112.827	65.204.207	(53.091.380)	(81,42)
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>3.699.894.372</b>	<b>3.798.138.202</b>	<b>(98.243.830)</b>	<b>(2,59)</b>
				-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		-	-	-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN		-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.699.894.372</b>	<b>3.798.138.202</b>	<b>(98.243.830)</b>	<b>(2,59)</b>
				-
<b>EKUITAS</b>				-
Ekuitas	60.031.559.705.499	59.894.096.563.455	137.463.142.044	0,23
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>60.031.559.705.499</b>	<b>59.894.096.563.455</b>	<b>137.463.142.044</b>	<b>0,23</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>60.035.259.599.871</b>	<b>59.897.894.701.657</b>	<b>137.364.898.214</b>	<b>0,23</b>

A.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran  
(UAPA) Kementerian Perhubungan  
Kepala Bagian Akuntansi



**JOKO MURDYONO**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui  
Tim Reviu Laporan Keuangan  
Inspektorat Jenderal



**INDRAHADI WIBOWO**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690430 200502 1 001

A.n. Unit Akuntansi Pembantu  
Pengguna Anggaran Eselon I  
Kepala Bagian Keuangan



**RETNO WIJAYANTI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19671206 199403 2 002

3. LAPORAN OPERASIONAL

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	TAHUN 2021 (UNAUDITED)	TAHUN 2020 (AUDITED)	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.111.240.006.910	3.695.233.306.103	416.006.700.807	11,26
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	<b>4.111.240.006.910</b>	<b>3.695.233.306.103</b>	<b>416.006.700.807</b>	<b>11,26</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	1.703.783.086.434	1.715.775.702.835	(11.992.616.401)	(0,70)
Beban Persediaan	229.978.107.715	344.156.053.787	(114.177.946.072)	(33,18)
Beban Barang dan Jasa	2.453.897.567.152	2.338.327.025.660	115.570.541.492	4,94
Beban Pemeliharaan	652.214.777.017	561.539.042.736	90.675.734.281	16,15
Beban Perjalanan Dinas	283.008.531.679	258.877.554.781	24.130.976.898	9,32
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	313.082.926.561	(313.082.926.561)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.807.358.228.442	2.716.552.743.919	90.805.484.523	3,34
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.162.102.454	1.521.429.638	4.640.672.816	305,02
Beban Lain-Lain	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>8.136.402.400.893</b>	<b>8.249.832.479.917</b>	<b>(113.430.079.024)</b>	<b>(1,37)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(4.025.162.393.983)</b>	<b>(4.554.599.173.814)</b>	<b>529.436.779.831</b>	<b>(11,62)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12.007.636.694	3.943.194.271	8.064.442.423	204,52
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	329.129.669.106	96.309.511.455	232.820.157.651	241,74
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(317.122.032.412)</b>	<b>(92.366.317.184)</b>	<b>(224.755.715.228)</b>	<b>243,33</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41.489.581.425	51.825.249.005	(10.335.667.580)	(19,94)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	797.414.980	17.620.805.209	(16.823.390.229)	(95,47)
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>40.692.166.445</b>	<b>34.204.443.796</b>	<b>6.487.722.649</b>	<b>18,97</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(276.429.865.967)</b>	<b>(58.161.873.388)</b>	<b>(218.267.992.579)</b>	<b>375,28</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	<b>(4.301.592.259.950)</b>	<b>(4.612.761.047.202)</b>	<b>311.168.787.252</b>	<b>(6,75)</b>

A.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran  
(UAPA) Kementerian Perhubungan  
Kepala Bagian Akuntansi



**JOKO MURDYONO**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui  
Tim Reviu Laporan Keuangan  
Inspektorat Jenderal



**INDRAHADI WIBOWO**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690430 200502 1 001

A.n. Unit Akuntansi Pembantu  
Pengguna Anggaran Eselon I  
Kepala Bagian Keuangan



**RETNO WIJAYANTI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19671206 199403 2 002

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	TAHUN 2021 (UNAUDITED)	TAHUN 2020 (AUDITED)	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EKUITAS AWAL	59.894.096.563.455	56.952.495.482.080	2.941.601.081.375	5,17
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4.301.592.259.950)	(4.612.761.047.202)	311.168.787.252	(6,75)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(588.415.965.730)	1.234.101.075.870	(1.822.517.041.600)	(147,68)
Koreksi Nilai Persediaan	3.725.177.192	11.864.853.518	(8.139.676.326)	(68,60)
Revaluasi Aset Tetap	34.645.546.250	1.256.160.377.250	(1.221.514.831.000)	(97,24)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(538.124.390.489)	(63.847.382.137)	(474.277.008.352)	742,83
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(83.473.569.374)	(2.954.220)	(83.470.615.154)	2.825.470,52
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(2.926.538.499)	25.980.142.852	(28.906.681.351)	(111,26)
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
Koreksi Lainnya	(2.262.190.810)	3.946.038.607	(6.208.229.417)	(157,33)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5.027.471.367.724	6.320.261.052.707	(1.292.789.684.983)	(20,45)
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.135.253.015.411	9.513.422.842.201	(378.169.826.790)	(3,98)
Diterima dari Entitas Lain	(4.166.509.215.976)	(3.711.055.508.075)	(455.453.707.901)	12,27
Transfer Keluar	(360.982.337.482)	(347.210.225.576)	(13.772.111.906)	3,97
Transfer Masuk	371.143.396.665	834.272.737.775	(463.129.341.110)	(55,51)
Pengesahan Hibah Langsung	40.844.509.106	29.793.839.591	11.050.669.515	37,09
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	7.722.000.000	1.037.366.791	6.684.633.209	644,38
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-	-	-
Setoran Surplus BLU	-	-	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	137.463.142.044	2.941.601.081.375	(2.804.137.939.331)	(95,33)
EKUITAS AKHIR	60.031.559.705.499	59.894.096.563.455	137.463.142.044	0,23

A.n. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran  
(UAPA) Kementerian Perhubungan  
Kepala Bagian Akuntansi



**JOKO MURDYONO**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711007 199703 1 004

Mengetahui  
Tim Reviu Laporan Keuangan  
Inspektorat Jenderal



**INDRAHADI WIBOWO**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690430 200502 1 001

A.n. Unit Akuntansi Pembantu  
Pengguna Anggaran Eselon I  
Kepala Bagian Keuangan



**RETNO WIJAYANTI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19671206 199403 2 002

# LAMPIRAN

## III

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT  
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
1	007	022	04	559182	UPP SIROMBU	9890275591821000	BPG 007 UPP SIROMBU	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
2	106	022	04	413061	DISNAV SIBOLGA	9890274130611000	BPG 106 DISNAV SIBOLGA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
3	123	022	04	413055	DISNAV BELAWAN	9890274130551000	BPG 123 DISNAV BLWN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
4	123	022	04	413417	KSU BELAWAN	9890274134171000	BPG 123 KTR SYAHBANDAR BLWN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
5	123	022	04	413018	OP BELAWAN	9890274130181000	BPG 123 KTR OTEPEL UTAMA BELAWAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
6	076	022	04	413080	KSOP KUALA TANJUNG	9890274130801000	BPG 076 KANTOR KSOP KUALA TANJUNG	20	S-6762/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 Desember 2020	IDR	-	
7	010	022	04	413070	KSOP TELUK BAYUR	9890274130701000	BPG 010 KSOP TELUK BAYUR	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
8	010	022	04	413086	DISNAV TELUK BAYUR	9890274130861000	BPG 010 DISNAV TELUK BAYUR	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
9	092	022	04	413143	KSOP KUALA CINAKU	9890274131431000	BPG 092 KSOP RENGAT	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
10	092	022	04	413152	KSOP TEMBILAHAN	9890274131521000	BPG 092 KSOP TEMBILAHAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
11	092	022	04	521548	KSOP KUALA ENOK	9890275215481000	BPG 092 KSOP KUALA ENOK	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
12	092	022	04	521552	UPP KUALA GAUNG	9890275215521000	BPG 092 UPP KUALA GAUNG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
13	120	022	04	413112	KSOP BENGKALIS	9890274131121000	BPG 120 KSOP BENGKALIS	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
14	120	022	04	413137	KSOP SELAT PANJANG	9890274131371000	BPG 120 KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SELATPANJANG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
15	009	022	04	413168	KSOP TANJUNG PINANG	9890274131681000	BPG 009 KSOP TANJUNGPINANG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
16	009	022	04	413199	UPP TANJUNG UBAN	9890274131991000	BPG 009 UPP TANJUNG UBAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
17	009	022	04	413200	UPP TAREMPA	9890274132001000	BPG 009 UPP TAREMPA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
18	009	022	04	413231	DISNAV TANJUNG PINANG	9890274132311000	BPG 009 DISNAV TANJUNG PINANG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
19	009	022	04	528895	PPLP TANJUNG UBAN	9890275288951000	BPG 009 PANGKALAN PLP TANJUNG UBAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
20	137	022	04	413180	KSOP TANJUNG BALAI KARIMUN	9890274131801000	BPG 137 KSOP KELAS II TBK	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
21	014	022	04	413256	KSOP PALEMBANG	9890274132561000	BPG 014 KANTOR KSOP PALEMBANG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
22	016	022	04	288021	KSOP PULAU BAAI	9890272880211000	BPG 016 KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PULAU BAAI	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
23	017	022	04	413307	KSOP PANJANG	9890274133071000	BPG 017 KANTOR KSOP KELAS 1 PANJANG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
24	017	022	04	652521	KSOP BAKAUHEUNI	9890276525211000	BPG 017 KANTOR KSOP BAKAUHENI	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
25	133	022	04	412781	OP TANJUNG PRIOK	9890274127811000	BPG 133 OTORITAS PEL. TANJUNG PRIOK	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
26	133	022	04	412797	KSOP SUNDA KELAPA	9890274127971000	BPG 133 KSOP SUNDA KELAPA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
27	133	022	04	412801	DISNAV TANJUNG PRIOK	9890274128011000	BPG 133 DISNAV TANJUNG PRIOK	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
28	133	022	04	413721	BTKP	9890274137211000	BPG133 BALAI TEK. KESELAMATAN PELAYARAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
29	133	022	04	439180	SATKER KPLP	9890274391801000	BPG 133 PENINGKATAN FUNGSI KPLP	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
30	133	022	04	439196	SATKER KAPPEL	9890274391961000	BPG 133 PENINGKATAN FUNGSI PKP	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
31	133	022	04	439200	SATKER KEPSELABUHANAN	9890274392001000	BPG 133 PFP3	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
32	133	022	04	439454	SATKER LALA	9890274394541000	BPG 133 PEN.KES.LALIN ANGK.LAUT PUSAT	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
33	133	022	04	439460	SATKER NAVIGASI	9890274394601000	BPG 133 PENG KENAVIGASIAN PUSAT	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
34	133	022	04	520454	PPLP TANJUNG PRIOK	9890275204541000	BPG133 PPLP KELAS 1 TANJUNG PRIUK	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
35	133	022	04	606301	BKKP	9890276063011000	BPG133 BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
36	133	022	04	652495	KSOP MUARA ANGKE	9890276524951000	BPG 133 KSOP MUARA ANGKE	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
37	133	022	04	652517	KSOP MARUNDA	9890276525171000	BPG 133 KSOP MARUNDA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
38	021	022	04	21140	KSOP PATIMBAN	989027211401000	BPG 021 KSOP Patimban	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
39	025	022	04	521285	UPP PANGANDARAN	9890275212851000	BPG 025 KANPEL PANGANDARAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
40	072	022	04	559154	UPP BATANG	9890275591541000	BPG 072 UPP BATANG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
41	130	022	04	412860	KSOP CILACAP	9890274128601000	BPG 130 KSOP CILACAP	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
42	134	022	04	412823	KSOP TANJUNG EMAS	9890274128231000	BPG 134 KSOP TANJUNG EMAS	20	S-6762/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 Desember 2020	IDR	-	
43	097	022	04	412854	UPP JUWANA	9890274128541000	BPG 097 UPP JUWANA	20	S-10/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 4 Januari 2021	IDR	-	
44	135	022	04	412905	KSOP GRESIK	9890274129051000	BPG 135 KSOP GRESIK	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
45	135	022	04	413428	KSU TANJUNG PERAK	9890274134281000	BPG 135 KESYAHBANDARAN UTAMA T PERAK SBY	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
46	042	022	04	521690	UPP TELOK MELANO	9890275216901000	BPG 042 KANTOR UPP KELAS III TELOK MELANO	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
47	094	022	04	521705	UPP KENDAWANGAN	9890275217051000	BPG 094 UPP KENDAWANGAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
48	081	022	04	559292	KANTOR UPP SATUI	9890275592921000	BPG 081 KUPP SEI DANAU SATUI	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
49	046	022	04	287211	KSOP SAMARINDA	9890272872111000	BPG 046 KSOP KELAS II SAMARINDA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
50	046	022	04	287253	UPP TANJUNG SANTAN	9890272872531000	BPG046 KANTOR UPP TANJUNG SANTAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
51	051	022	04	287406	UPP P A R I G I	9890272874061000	BPG 051 KANTOR UPP PARIGI	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
52	082	022	04	413432	KSOP TOLI-TOLI	9890274134321000	BPG082 KSOP TOLITOLI	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
53	054	022	04	413439	KSU MAKASAR	9890274134391000	BPG 054 KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
54	056	022	04	289885	UPP BULU KUMBA	9890272898851000	BPG 056 KANTOR UPP BULUKUMBA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
55	103	022	04	287145	KANTOR UPP WANCI	9890272871451000	BPG 103 UPP KELAS III WANCI	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
56	103	022	04	413494	UPP BAU - BAU	9890274134941000	BPG 103 KANTOR UPP BAUBAU	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
57	157	022	04	413514	UPP R A H A	9890274135141000	BPG 157 UPP RAHA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
58	061	022	04	287537	KSOP AMBON	9890272875371000	BPG061 KTR KESYAHBANDARAN & OTORITAS PELABUHAN AMBON	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
59	061	022	04	413812	UPP N A M L E A	9890274138121000	BPG 061 UPP NAMLEA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
60	061	022	04	287558	DISNAV A M B O N	9890272875581000	BPG 061 DISNAV AMBON	20	S-6762/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 Desember 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
61	173	022	04	521878	UPP T U L E H U	9890275218781000	BPG 173 KANTOR UPP TULEHU	20	S-10/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 4 Januari 2021	IDR	-	
62	112	022	04	413642	UPP T O B E L O	9890274136421000	BPG 112 KANITPEL TOBELO	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
63	112	022	04	559438	UPP DARUBA	9890275594381000	BPG 112 KANITPEL DARUBA	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
64	038	022	04	413792	KSOP LEMBAR	9890274137921000	BPG 038 KANTOR KSOP LEMBAR	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
65	071	022	04	521946	UPP S A P E	9890275219461000	BPG 071 KUP PELABUHAN SAPE	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
66	101	022	04	652559	UPP BENETE	9890276525591000	BPG101 UPP BENETE	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
67	101	022	04	287651	KSOP BADAS	9890272876511000	BPG101 KANTOR KSOP BADAS	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
68	039	022	04	521950	UPP BA'A	9890275219501000	BPG 039 UPP BAA 521950	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
69	039	022	04	522578	KSOP KALABAHI	9890275225781000	BPG 039 KSOP KALABAHI	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
70	039	022	04	522582	KSOP KUPANG	9890275225821000	BPG 039 KSOP KUPANG	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
71	111	022	04	559552	UPP LABUHAN BAJO	9890275595521000	Bpg 111 UPP Labuan Bajo	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
72	040	022	04	287701	KSOP LAURENTIUS SAY	9890272877011000	BPG 040 KSOP LAURENTIUS SAY MAUMERE	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
73	059	022	04	521822	UPP M A J E N E	9890275218221000	BPG 059 521822 UPP MJN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
74	152	022	04	287249	KSOP NUNUKAN	9890272872491000	Bpg 152 KSOP NUNUKAN	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
75	152	022	04	559311	UPP SUNGAI NYAMUK	9890275593111000	BPG 152 UPP SUNGAI NYAMUK	20	S-1747/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
76	007	022	04	413049	KSOP GUNUNG SITOLI	650694130491000	BPG 007 KSOP GUNUNGSITOLI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
77	007	022	04	413369	UPP PULAU TELLO	650484133691000	BPG 007 UPP PULAU TELLO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
78	007	022	04	413695	UPP LAHEWA	650484136951000	BPG 007 UPP LAHEWAIAS	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
79	075	022	04	413350	UPP LEIDONG	650484133501000	BPG 075 UPP LEIDONG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
80	075	022	04	559218	UPP TANJUNG SARANG ELANG	650485592181000	BPG 075 UPP TG SARANG ELANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
81	076	022	04	413030	KSOP TANJUNG BALAI ASAHAN	650484130301000	BPG ADPEL TG. BALAI ASAHAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
82	106	022	04	413024	KSOP SIBOLGA	650484130241000	BPG 106 KSOP SIBOLGA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
83	106	022	04	521459	UPP BARUS	650485214591000	BPG 106 KUPP BARUS	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
84	123	022	04	289470	KSOP PANGKALAN SUSU	650482894701000	BPG 123 KSOP P SUSU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
85	006	022	04	559222	KANTOR UPP BATAHAN	650485592221000	BPG 006 PELABUHAN BATAHAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
86	007	022	04	413375	UPP TELUK DALAM NIAS	650694133751000	BPG 007 UPP TELUK DALAM NIAS	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
87	124	022	04	559196	UPP TANJUNG BERINGIN	650695591961000	BPG 124 KUPP TANJUNG BERINGIN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
88	010	022	04	521510	UPP SIUBAN	650485215101000	BPG 010 UPP SIUBAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
89	010	022	04	559239	UPP MUARA SIBERUT	650485592391000	BPG 010 UPP MUARA SIBERUT	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
90	010	022	04	559243	UPP SIKAKAP	650485592431000	BPG 010 KUPP KELAS III SIKAKAP	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
91	092	022	04	559250	UPP SUNGAI GUNTING	650485592501000	BPG 092 UPP S. GUNTING	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
92	120	022	04	289534	KSOP TANJUNG BUTON	650482895341000	BPG 120 KSOP SUNGAI PAKNING	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
93	120	022	04	521573	UPP PANIPAHAN	650485215731000	BPG120 KANTOR UPP PANIPAHAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
94	120	022	04	413121	KSOP BAGAN SI-API-API	650484131211000	BPG 120 KANTOR KSOP BAGANSI-API-API	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
95	120	022	04	559264	UPP TANJUNG MEDANG	650695592641000	BPG 120 KANTOR UPP KELAS III TANJUNG MEDANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
96	009	022	04	413219	UPP DABO SINGKEP	650484132191000	BPG 009 UPP DABO SINGKEP	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
97	012	022	04	413240	KSOP TALANG DUKUH	650694132401000	BPG 012 KESYAHBANDAAN DAN OTORITAS PELABUHAN TALANG DUKU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
98	143	022	04	521616	UPP NIPAH PANJANG	650485216161000	BPG 143 KANTOR UPP NIPAH PANJANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
99	143	022	04	559271	UPP KUALA MENDAHARA	650695592711000	BPG 143 KANTOR UPP KUALA MENDAHARA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
100	143	022	04	622042	KSOP KUALA TUNGKAL	650486220421000	BPG 143 KSOP KUALA TUNGKAL	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
101	143	022	04	652538	KSOP MUARA SABAK	650486525381000	BPG 143 KKSOP MUARA SABAK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
102	107	022	04	413287	KSOP TANJUNG PANDAN	650484132871000	BPG 107 KSOP TANJUNG PANDAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
103	107	022	04	413381	UPP MANGGAR	650484133811000	BPG 107 KANTOR UPP KELAS I MANGGAR	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
104	015	022	04	413271	KSOP MUNTOK	650484132711000	BPG 015 KSOP MUNTOK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
105	015	022	04	521637	KANTOR UPP SADAI	650485216371000	BPG 015 UPP SADAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
106	016	022	04	559602	UPP MALAKONI-ENGGANO	650695596021000	BPG 016 UPP MALAKONIENGGANO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
107	121	022	04	559616	KANTOR UPP LINAU BINTUHAN	650485596161000	BPG 121 UNIT PENYELENGGARA PEL. LINAU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
108	017	022	04	289712	UPP KOTA AGUNG	650482897121000	BPG 017 KUPP KOTA AGUNG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
109	126	022	04	521658	UPP LABUHAN MARINGGAI	650485216581000	BPG 126 UPP LABUHAN MARINGGAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
110	116	022	04	521662	UPP MESUJI	650695216621000	BPG 116 UPP MESUJI	20	S-12/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 4 Januari 2021	IDR	-	
111	024	022	04	412817	KSOP CIREBON	650484128171000	BPG 024 KSOP KELAS II CIREBON	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
112	024	022	04	521307	UPP INDRAMAYU	650695213071000	BPG 024 KUPP INDRAMAYU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
113	128	022	04	521292	UPP PELABUHAN RATU	650485212921000	BPG 128 UPP PALABUHANRATU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
114	020	022	04	413670	KSOP BANTEN	650484136701000	BPG 020 KSOP BANTEN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
115	129	022	04	412848	UPP JEPARA	650484128481000	BPG 129 KANTOR UPP JEPARA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
116	129	022	04	521332	UPP KARIMUN JAWA	650485213321000	BPG 129 KANTOR UPP KARIMUNJAWA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
117	130	022	04	412885	DISNAV CILACAP	650484128851000	BPG 130 DISNAV CILACAP	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
118	118	022	04	412832	KSOP TEGAL	651474128321000	BPG 118 KSOP TEGAL	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
119	097	022	04	559140	UPP REMBANG	650695591401000	BPG 097 UPP REMBANG	20	S-12/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 4 Januari 2021	IDR	-	
120	035	022	04	412920	KSOP PROBOLINGGO	650484129201000	BPG 035 KSOP PROBOLINGGO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
121	036	022	04	412942	KSOP KALIANGET	650484129421000	BPG 036 KSOP KALIANGET SUMENEP	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
122	036	022	04	521360	UPP MASALEMBU	650485213601000	BPG 036 KANTOR UPP MASALEMBU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
123	073	022	04	521395	UPP BRONDONG	650485213951000	BPG 073 UPP BRONDONG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
124	100	022	04	413730	KSOP TANJUNG WANGI	650484137301000	BPG 100 KSOP TANJUNGWANGI KAB BANYUWANGI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
125	135	022	04	535841	PPLP SURABAYA	650695358411000	BPG 135 PPLP TANJUNG PERAK SBY	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
126	036	022	04	521349	UPP BRANTA	650485213491000	BPG 036 KANTOR UPP BRANTA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
127	036	022	04	521353	UPP SAPEKEN	650695213531000	BPG 036 UPP SAPEKEN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
128	036	022	04	559161	UPP SAPUDI	650485591611000	BPG 036 KANTOR UPP SAPUDI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
129	135	022	04	413689	UPP BAWEAN	650694136891000	BPG 135 KANPEL BAWEAN JATIM	20	S-12/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 4 Januari 2021	IDR	-	
130	042	022	04	287101	DISNAV PONTIANAK	650482871011000	BPG 042 DISNAV KELAS III PONTIANAK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
131	042	022	04	413313	KSOP PONTIANAK	650484133131000	BPG 042 KSOP PONTIANAK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
132	042	022	04	413390	KANTOR UPP PADANG TIKAR	650484133901000	BPG 042 UPP PADANG TIKAR	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
133	094	022	04	413545	KSOP KETAPANG	650484135451000	BPG 094 KSOP KETAPANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
134	093	022	04	413322	KSOP SINTETE	650694133221000	BPG 093 KSOP SINTETE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
135	093	022	04	521683	KANTOR UPP PALOH	650485216831000	BPG 093 KANTOR PELABUHAN PALOH SAKURA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
136	043	022	04	287143	KSOP PULANG PISAU	650482871431000	BPG 043 KSOP PULANG PISAU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
137	043	022	04	559285	KANTOR UPP RANGGA ILUNG	650485592851000	BPG 043 UPP RANGGA ILUNG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
138	044	022	04	289801	KANTOR UPP TELUK SIGINTUNG	651462898011000	BPG 044 KSOP KUALA PEMBUANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
139	102	022	04	289782	KSOP PANGKALAN B U N	650482897821000	BPG 102 KSOP PANGKALAN BUN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
140	102	022	04	289796	KSOP K U M A I	650482897961000	BPG 102 KSOP KUMAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
141	102	022	04	289818	KSOP SUKAMARA	650482898181000	BPG 102 KSOP SUKAMARA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
142	045	022	04	287192	DISNAV BANJARMASIN	650482871921000	BPG 045 DISNAV KLS II BJM	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
143	168	022	04	413410	KANTOR UPP KINTAP	650484134101000	BPG 168 KANTOR UP PELABUHAN KINTAP	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
144	046	022	04	413426	UPP KUALA SEMBOJA	650484134261000	BPG 046 KANTOR PELABUHAN KUALA SAMBOJA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
145	047	022	04	287228	KSOP BALIKPAPAN	650482872281000	BPG 047 KANTOR KSOP BALIKPAPAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
146	047	022	04	289850	KANTOR UPP TANA PASER	650692898501000	BPG 047 KANTOR UPP KELAS II TANAH GROGOT	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
147	153	022	04	289843	UPP TANJUNG REDEP	650692898431000	BPG 153 KANTOR UPP KELAS III TANJUNG REDEB	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
148	046	022	04	289839	UPP SANGATA	650482898391000	BPG 046 UPP SANGATTA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
149	050	022	04	287321	KSOP GORONTALO	650482873211000	BPG 050 KANTOR KSOP GORONTALO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
150	050	022	04	413752	UPP K W A N D A N G	650484137521000	BPG 050 UPP KWANDANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
151	050	022	04	652563	UPP ANGGREK	650486525631000	BPG 050 UPP ANGGREK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
152	180	022	04	521768	UPP TILAMUTA	650485217681000	BPG.180.UPTILAMUTA 521768	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
153	049	022	04	521730	KANTOR UPP AMURANG	650485217301000	BPG 049 KANTOR PELABUHAN BELANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
154	083	022	04	413576	UPP U L U S I A U	650484135761000	BPG 083 UPP ULU SIAU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
155	158	022	04	521747	UPP KOTABUNAN	650485217471000	BPG 158 UPP KOTABUNAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
156	179	022	04	413582	KANTOR UPP MELONGUANE	650484135821000	BPG 179 UPP KLAS 3 LIRUNG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
157	179	022	04	413783	KSOP BITUNG	650484137831000	BPG 179 KSOP BITUNG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
158	179	022	04	559328	UPP LIKUPANG	650485593281000	BPG 179 KANTOR UPP LIKUPANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
159	052	022	04	287384	UPP P O S O	650482873841000	BPG 052 KANTOR UPP KLAS II POSO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
160	052	022	04	413591	UPP KOLONEDALE	650484135911000	BPG 052 KANTOR UPP KELAS III KOLONODALE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
161	053	022	04	413611	UPP B U N T A	650484136111000	BPG 053 KUPP BUNTA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
162	053	022	04	521789	UPP PAGIMANA	650485217891000	BPG 053 KUPP PAGIMANA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
163	053	022	04	559353	UPP BANGGAI	650485593531000	BPG 053 KUPP BANGGAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
164	082	022	04	521793	UPP L E O K	650485217931000	BPG082 UPP LEOK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
165	051	022	04	559332	UPP OGOAMAS	650485593321000	BPG 051 KANTOR UPP OGOAMAS	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
166	055	022	04	289871	UPP BAJOE	650482898711000	BPG 055 UPP BAJOE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
167	055	022	04	521857	UPP PATIRO BAJO	650485218571000	BPG 055 UPP PATIRO BAJO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
168	057	022	04	521836	UPP GARONGKONG	650485218361000	BPG 057 UP PELABUHAN GARONGKONG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
169	058	022	04	413472	UPP P A L O P O	650484134721000	BPG 058 KANTOR UPP PALOPO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
170	155	022	04	413441	UPP S E L A Y A R	650484134411000	BPG155 UPP SELAYAR 413441	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
171	155	022	04	521815	UPP JAMPEA	650485218151000	BPG 155 UPP JAMPEA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
172	177	022	04	521840	UPP S I N J A I	650485218401000	BPG 177 UPP SINJAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
173	054	022	04	287473	DISNAV UJUUNG PANDANG	650482874731000	BPG 054 DISNAV MAKASSAR	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
174	054	022	04	413709	KANTOR UPP MACCINI BAJI	650484137091000	BPG 054 UPP BIRINGKASSI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
175	058	022	04	413488	UPP MALILI	650484134881000	BPG 058 UPP MALILI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
176	058	022	04	559381	UPP SIWA	651475593811000	BPG 058 UPP SIWA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
177	060	022	04	287141	KANTOR UPP MOLAWE	650482871411000	BPG 060 KANTOR UPP MOLAWE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
178	060	022	04	287502	KSOP KENDARI	650482875021000	BPG 060 KSO PELABUHAN KENDARI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
179	060	022	04	287516	DISNAV KENDARI	650482875161000	BPG 060 DISNAV KENDARI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
180	060	022	04	559395	KANTOR UPP LAPUKO	650485593951000	BPG 060 KANTOR UPP LAPUKO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
181	156	022	04	413508	UPP KOLAKA	650484135081000	BPG 156 UPP KOLAKA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
182	084	022	04	413520	UPP T U A L	650484135201000	BPG 084 UPP TUAL	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
183	084	022	04	413633	UPP D O B O	650484136331000	BPG 084 UPP DOBO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
184	104	022	04	289911	UPP SAUMLAKI	650482899111000	BPG 104 UPP SAUMLAKI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
185	104	022	04	559463	UPP WONRELI	650485594631000	BPG 104 UPP WONRELI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
186	173	022	04	413627	KANTOR UPP AMAHAI	650694136271000	BPG 173 KANTOR UPP KELAS III AMAHAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
187	173	022	04	521882	KANTOR UPP KAIRATU	650485218821000	BPG 173 KANTOR UPP WAISARISSA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
188	173	022	04	559417	UPP GESER	650485594171000	BPG 173 KANTOR UPP GESER	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
189	173	022	04	559484	KANTOR UPP BULA/WAHAI	650485594841000	BPG 173 KANTOR PELABUHAN WAHAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	72.000	Telah disetor Ke Kas Negara NTPN E82DA3CIF173JUVJ tanggal 3 Januari 2022
190	062	022	04	287541	KSOP TERNATE	650692875411000	BPG 062 KTR KESYAHBANDARAN DAN OTO PELABUHAN TERNATE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
191	062	022	04	413658	KANTOR UPP BABANG	650484136581000	BPG 062 UPP BABANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
192	062	022	04	413664	UPP SANANA	650484136641000	BPG 062 UPP SANANA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
193	062	022	04	521899	KANTOR UPP WEDA	650485218991000	BPG 062 UPP WEDA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
194	062	022	04	559421	UPP JAILOLO	650485594211000	BPG 062 UPP JAILOLO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
195	062	022	04	559442	UPP LAIWUI	650485594421000	BPG 062 UPP LAIWUI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
196	062	022	04	559400	UPP SOA-SIU	650485594001000	BPG 062 UNIT PENYELENGGARA PEL SOASIO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
197	112	022	04	559470	UPP BULI	650485594701000	BPG 112 KANITPEL BULI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
198	154	022	04	521904	UPP NUSA PENIDA	650485219041000	BPG 154 UPP NUSA PENIDA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
199	132	022	04	287626	KSOP CELUKAN BAWANG	650692876261000	BPG 132 KSOP CELUKAN BAWANG	20	S-12/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 4 Januari 2021	IDR	-	
200	132	022	04	559491	UPP GILIMANUK	650695594911000	BPG 132 KANTOR UPP GILIMANUK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
201	154	022	04	287590	KSOP PADANG BAI	650692875901000	BPG 154 KSOP PADANGBAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
202	071	022	04	559506	UPP CALABAI	650485595061000	BPG 071 KUP PELABUHAN CALABAI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
203	169	022	04	413715	UPP LABUHAN LOMBOK	650484137151000	BPG 169 LABUHAN LOMBOK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
204	071	022	04	287647	KSOP BIMA	650482876471000	BPG 071 KO PELABUHAN BIMA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
205	041	022	04	287715	KSOP WAINGAPU	650482877151000	BPG 041 KANTOR KSOP WAINGAPU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
206	172	022	04	289953	UPP ATAPUPU	650482899531000	BPG 172 UPP ATAPUPU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
207	174	022	04	289949	UPP LARANTUKA	650482899491000	BPG 174 UPP LARANTUKA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
208	039	022	04	559527	UPP BARANUSA	650485595271000	BPG 039 KUPP BARANUSA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
209	039	022	04	559531	UPP SEBA	650485595311000	BPG 039 UPP SEBA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
210	040	022	04	287722	KSOP E N D E	651472877221000	BPG 040 KSOP ENDE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
211	040	022	04	559548	UPP MARAPOKOT	650695595481000	BPG 040 KANTOR UPP MARAPOKOT	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
212	041	022	04	517904	UPP WAIKELO	650485179041000	BPG 041 KANTOR PELABUHAN WAIKELO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
213	111	022	04	289960	UPP REO	650482899601000	BPG 111 UPP REO	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
214	064	022	04	287782	KSOP B I A K	650482877821000	BPG 064 KANTOR KSOP KELAS II BIAK	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
215	068	022	04	287825	KSOP MERAUKE	650482878251000	BPG 068 KSOP MERAUKE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
216	068	022	04	517946	UPP A G A T S	650695179461000	BPG 068 KANTOR UPP KELAS III AGATS	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
217	068	022	04	517950	UPP B A D E	650485179501000	BPG 068 KANTOR UPP KELAS III BADE	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
218	063	022	04	287778	KSOP JAYAPURA	650482877781000	BPG 063 KSOP JAYAPURA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
219	063	022	04	287900	DISNAV JAYAPURA	650482879001000	BPG 063 DISNAV JAYAPURA	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
220	065	022	04	517925	UPP ORANSBARI	650485179251000	BPG 065 KANTOR UPP ORANSBARI 517925	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
221	066	022	04	287804	KSOP SORONG	650482878041000	BPG 066 KANTOR KSOP SORONG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
222	066	022	04	287935	DISNAV S O R O N G	650482879351000	BPG 066 DISNAV SORONG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
223	178	022	04	413463	UPP M A M U J U	650694134631000	BPG 178 UPP MAMUJU	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
224	178	022	04	559374	UPP BELANG-BELANG	650485593741000	BPG 178 UPP BELANGBELANG	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
225	059	022	04	413457	KANTOR UPP TANJUNG SILOPO	650484134571000	BPG 059 413457 UPP POLEWALI	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
226	185	022	04	417693	UPP TANJUNG SELOR	650694176931000	BPG 185 UPP TJ SELOR 04 417693	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
227	048	022	04	561712	DISNAV TARAKAN	650485617121000	BPG 048 DISNAV TARAKAN	20	S-1748/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
228	001	022	04	412967	KSOP SABANG	904390004129671000	BPG 001 KANTOR KSOP SABANG	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
229	001	022	04	413002	DISNAV S A B A N G	904400004130021000	BPG 001 DISNAV SABANG	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
230	001	022	04	413746	KSOP MALAHAYATI	904410004137461000	BPG 001 KANTOR KSOP MALAHAYATI	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
231	002	022	04	412973	KSOP KUALA LANGSA	904420004129731000	BPG 002 KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN KUALA LANGSA	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
232	003	022	04	412998	KSOP MEULABOH	904430004129981000	BPG 003 KSOP MEULABOH	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
233	074	022	04	289452	UPP SINGKIL	904440002894521000	BPG 074 UPP SINGKIL	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
234	074	022	04	413344	UPP TAPAK TUAN	904450004133441000	BPG 074 UPP TAPAKTUAN	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
235	074	022	04	289445	UPP SUSOH	904470002894451000	BPG 074 UPP SUSOH	20	S-304/PB.3/2021 24 Februari 2021	IDR	-	
236	003	022	04	413803	UPP SINABANG	8100394138031000	BPG 003 UPP SINABANG	20	S-558/PB.3/2021 26 Maret 2021	IDR	-	
237	003	022	04	521417	UPP C A L A N G	8100395214171000	BPG 003 UPP CALANG	20	S-558/PB.3/2021 26 Maret 2021	IDR	-	
238	089	022	04	412982	KSOP LHOKSEUMAWA	8100394129821000	BPG 089 KSOP Lhokseumawe	20	S-558/PB.3/2021 26 Maret 2021	IDR	-	
239	161	022	04	417874	UPP LABUHAN	8100394178741000	BPG 161 KANTOR UPP LABUHAN 417874	20	S-558/PB.3/2021 26 Maret 2021	IDR	-	
240	008	022	04	413106	KSOP PEKANBARU	8100124131061000	BPG 008 KSOP PEKANBARU	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
241	120	022	04	413092	KSOP DUMAI	8100124130921000	BPG 120 KSOP DUMAI	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
242	120	022	04	413225	DISNAV D U M A I	8100124132251000	BPG 120 DISNAV KELAS I DUMAI	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
243	009	022	04	521594	KSOP KIJANG	8100125215941000	BPG 009 KSOP KELAS II KIJANG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
244	137	022	04	521527	KANTOR PELABUHAN BATAM	8100125215271000	BPG 137 KANTOR PELABUHAN BATAM	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
245	009	022	04	521602	UPP SENAYANG	8100125216021000	BPG 009 UPP SENAYANG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
246	014	022	04	521620	UPP SUNGAI LUMPUR	8100125216201000	BPG 014 KANTOR UPP SUNGAI LUMPUR	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
247	014	022	04	413293	DISNAV PALEMBANG	8100124132931000	BPG 014 DISNAV KLS I PLG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
248	015	022	04	413262	KSOP PANGKAL BALAM	8100124132621000	BPG 015 KSOP PKBLM	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
249	116	022	04	521641	UPP MENGGALA	8100125216411000	BPG 116 UPP MENGGALA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
250	133	022	04	412772	KANPUS HUBLA	8100124127721000	BPG 133 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
251	133	022	04	652474	KSOP KEPULAUAN SERIBU	8100126524741000	BPG 133 KSOP KEPULAUAN SERIBU	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
252	133	022	04	413422	KSU TANJUNG PRIOK	8100124134221000	BPG 133 KANTOR KESYAHBANDARAN TJ PRIOK	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
253	020	022	04	521264	UPP KARANGHANTU	8100125212641000	BPG 020 UPP KARANGHANTU	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
254	134	022	04	412879	DISNAV SEMARANG	8100124128791000	BPG 134 DISNAV SEMARANG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
255	035	022	04	412911	KSOP PANARUKAN	8100124129111000	BPG 035 KSOP PANARUKAN	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
256	036	022	04	413761	UPP TELAGA BIRU	8100124137611000	BPG 036 KANTOR UPP TELAGA BIRU	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
257	135	022	04	412951	DISNAV SURABAYA	8100124129511000	BPG 135 DISNAV KELAS I SURABAYA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
258	135	022	04	412891	OPU TANJUNG PERAK	8100124128911000	BPG 135 KANTOR OTEL UTAMA TJ PERAK	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
259	044	022	04	287139	KSOP SAMPIT	8100122871391000	BPG 044 KSOP SAMPIT	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
260	045	022	04	287171	KSOP BANJARMASIN	8100122871711000	BPG 045 KSOP BANJARMASIN	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
261	081	022	04	287185	KSOP KOTABARU - BATULICIN	8100122871851000	BPG 081 KSOP KotabaruBatulicin	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
262	046	022	04	517882	KSOP BONTANG	8100125178821000	BPG 046 KANTOR KSOP BONTANG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
263	046	022	04	287260	DISNAV SAMARINDA	8100122872601000	BPG 046 DISNAV KELAS I SAMARINDA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
264	046	022	04	289822	UPP SANGKULIRANG	8100122898221000	BPG 046 UPP SANGKULIRANG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
265	049	022	04	287317	KSOP MANADO	8100122873171000	BPG 049 KSOP MANADO	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
266	083	022	04	287338	UPP TAHUNA	8100122873381000	BPG 083 UPP TAHUNA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
267	179	022	04	287342	DISNAV MANADO/BITUNG	8100122873421000	BPG 179 DISNAV KLS. I BITUNG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
268	179	022	04	535457	PPLP BITUNG	8100125354571000	BPG 179 KTR. P. PLP. BTG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
269	158	022	04	521751	UPP LABUHAN UKI/ INEBONTO	8100125215711000	BPG 158 UPP LABUHAN UKI	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
270	051	022	04	287370	KSOP TELUK PALU	8100122873701000	BPG 051 KANTOR KSOP PANTOLOAN	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
271	053	022	04	287391	UPP L U W U K	8100122873911000	BPG 053 UPP LUWUK	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
272	052	022	04	413602	UPP A M P A N A	8100124136021000	BPG 052 UPP AMPANA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
273	054	022	04	287469	OPU MAKASAR	8100122874691000	BPG 054 OPU MAKASSAR	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
274	056	022	04	559360	UPP JENEPONTO	8100125593601000	BPG 056 UP PELABUHAN JENEPONTO	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
275	057	022	04	289864	KSOP PARE-PARE	8100122898641000	BPG 057n KSOP Parepare	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
276	156	022	04	521861	UPP POMALA'A	8100125218611000	BPG 156 UPP POMALAA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	No. Rekening	Nama Rekening	Kode Jenis Rekening	Surat Ijin Pembukaan Rekening	Mata Uang	Saldo	Keterangan
277	061	022	04	559459	KANTOR UPP NAMROLE	8100125594591000	BPG 061 UPP LEKSULA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
278	084	022	04	652570	DISNAV TUAL	8100126525701000	BPG 084 DISNAV TUAL	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
279	084	022	04	652584	PPLP DANAR / TUAL	8100126525841000	BPG 084 PPLP DANARTUAL	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
280	173	022	04	652542	KSOP BANDANAIRE	8100126525421000	BPG 173 ADPEL BANDA NAIRA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
281	037	022	04	287579	KSOP B E N O A	8100122875791000	BPG 037 KSOP BENO A	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
282	037	022	04	287612	DISNAV B E N O A	8100122876121000	BPG 037 DISNAV KELAS II BENO A	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
283	038	022	04	559510	KANTOR UPP PEMENANG	8100125595101000	BPG 038 UPP PEMENANG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
284	039	022	04	287736	DISNAV K U P A N G	8100122877361000	BPG 039 DISNAV KLAS II KUPANG	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
285	174	022	04	287147	KANTOR UPP LEWOLEBA	8100122871471000	BPG 174 UPP LEWOLEBA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
286	063	022	04	289974	UPP S A R M I	8100122899741000	BPG 063 UPP SARMI	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
287	064	022	04	559573	UPP KORIDO	8100125595731000	BPG 064 UPP KORIDO	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
288	068	022	04	287956	DISNAV MERAUKE	8100122879561000	BPG 068 DISNAV KELAS III MERAUKE	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
289	138	022	04	287892	UPP S E R U I	8100122878921000	BPG 138 UPP SERUI	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
290	138	022	04	559569	UPP WAREN	8100125595691000	BPG 138 KUPP WAREN	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
291	141	022	04	521967	UPP POMAKO I/POMAKO II	8100125219671000	BPG 141 UPP POMAKO III	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
292	085	022	04	288841	UPP N A B I R E	8100122888411000	BPG 085 KANTOR UPP NABIRE	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
293	065	022	04	287799	KSOP MANOKWARI	8100122877991000	BPG 065 OTORITAS PELABUHAN MANOKWARI 287799	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
294	065	022	04	559580	UPP WASIOR	8100125595801000	BPG 065 UPP WASIOR 559580	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
295	066	022	04	559594	KANTOR UPP RAJA AMPAT	8100125595941000	BPG 066 KANTOR UPP RAJA AMPAT	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
296	067	022	04	287811	KSOP FAK-FAK	8100122878111000	BPG 067 KSOP FAKFAK	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
297	067	022	04	289981	UPP K A I M A N A	8100122899811000	BPG 067 UPP KAIMANA	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
298	067	022	04	517971	UPP K O K A S	8100125179711000	BPG 067 UPP KOKAS	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
299	065	022	04	517911	UPP B I N T U N I	8100125179111000	BPG 065 UPP BINTUNI 517911	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
300	066	022	04	413338	KANTOR UPP TEMINABUAN	8100124133381000	BPG 066 KANTOR UPP TEMINABUAN	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
301	185	022	04	417707	UPP PULAU BUNYU	8100124177071000	BPG 185 UPP BUNYU 04 417707	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
302	048	022	04	287232	KSOP TARAKAN	8100122872321000	BPG 048 KSOP TARAKAN	20	S-1749/WPB.12/KP.04/2020 Tanggal 21 April 2020	IDR	-	
<b>JUMLAH</b>											<b>72.000</b>	

**DAFTAR REKENING LAINNYA  
DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT  
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	Nama Satker	NoRek	Nama Rekening	Nama Bank	Jns Rek	Surat Izin Pembukaan Rekening	MATA UANG	Saldo	Keterangan
1	133	022	04	439460	SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	0165113802	RPL 140 PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	BANK BNI CAB HARMONI	30	S-868/WPB.12/KP.0630/2015 TANGGAL 14 Maret 2015	USD	1.450.799,41	
2	133	022	04	439460	SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	1309427822	RPL 133 PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT UNTUK ANF	BANK BNI CAB HARMONI	30	S-00409/WPB.12/KP.04/2021 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	-	-	
<b>JUMLAH</b>												<b>1.450.799,41</b>	

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN BLU  
DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT  
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	NAMA SATKER	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	Jns Rek	Surat Izin Pembukaan Rekening	MATA UANG	SALDO	Keterangan
1.	133	022	04	606301	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	1178763188	RPL 133 BLU BKPP UNTUK OPS PENERIMAAN	PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	30	S-795/WPB.12/KP.04/2021	IDR	1.664.602.836,00	
2	133	022	04	606301	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	018601001697307	RPL 133 BLU BKPP UNTUK OPS PENERIMAAN	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30	S-001535/WPB.12/KP.04/2021	IDR	1.679.308.046,00	
3	133	022	04	606301	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	1210000780779	RPL 133 BLU BKPP UNTUK OPS PENERIMAAN	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	30	S-001536/WPB.12/KP.04/2021	IDR	328.655.964,80	
<b>JUMLAH</b>												<b>3.672.566.846,80</b>	

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BLU  
DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT  
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

No	KPPN	BA	ES	Kode Satker	NAMA SATKER	NoRek	NAMA REKENING	NAMA BANK	Jns Rek	Surat Izin Pembukaan Rekening	MATA UANG	SALDO	Keterangan
2	133	022	04	606301	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	1179012867	RPL 133 BLU BKPP UNTUK OPS PENGELUARAN	PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) TBK.	Bpg	S-796/WPB.12/KP.04/2021 tanggal 01 Maret 2021	IDR	-	Rekening BLU untuk Operaional Pengeluaran
<b>JUMLAH</b>												<b>-</b>	

**LAMPIRAN**

**IV**

**REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH TINGKAT ESELON 1 / WILAYAH  
UNTUK BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2021**

Bagian Anggaran : 022.04  
Eselon : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	GENERAL INFORMATION				DONOR											
	REGISTRATION NUMBER	PROJECT NAME	ENTITY CODE	DISBURSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLBJS)					DISBURSEMENT CURRENT YEAR							
				DATE OF AUTHORIZATION	CASH		GOODS/SERVICES		NO SPHL / MPHLBJS	VALUE DATE	CASH		GOODS/SERVICES			NO BAST
IDR	CURRENCY	FOREIGN CURR	IDR		CURRENCY	AMOUNT	CURRENCY	FOREIGN CURR			IDR					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	KODE SATKER	PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)					PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI							
				TANGGAL PENGESAHAN	UANG		BARANG/JASA		NO SPHL / MPHLBJS	TANGGAL PEMBERIAN HIBAH	UANG		BARANG/JASA			NO BAST
					IDR	MATA UANG	VALAS	IDR			MATA UANG	NILAI	MATA UANG	VALAS	IDR	
1	2TCFMYFA	UPP SATUI Hibah Tanah dari Bulkani (Wiraswata)	559292	20 September 2021		Rupiah		2.400.000,00	1065476929	20 September 2021			IDR		2.400.000,00	PL.301/1/1/UPP.Satui-21 Tanggal 5 Maret 2021
2	2724D73A	UPP LUWUK Hibah Langsung berupa barang dari Pemda Banggai Kepulauan	287391	09 Agustus 2021		Rupiah		2.473.740.000	1057330241	22 Februari 2021			IDR		2.473.740.000	900/85/BPKAD/2021 PL.301/1/9/DJPL/2021 12 Februari 2021
3	2MG6B51A	UPP Kelas III Pelabuhan Ratu Hibah Langsung berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Sukabumi	521292	15 Oktober 2021		Rupiah		7.722.000.000	1070860001	21 Februari 2020			IDR		7.722.000.000	024/1357/BPKAD 21-Februari 2020
4	2AMYBVYA	UPP AMURANG HIBAH LANGSUNG BERUPA TANAH PEMDA MINAHASA SELATAN SELUAS 7.031M2	521730	05 November 2021		Rupiah		458.310.000	1077983933	5 Juni 2020			IDR		458.310.000	445/900/SEKAR-BPKAD/VI-2020 26 Juni 2020 07/NPHD/BMS/VI-2020 05 JUNI 2020
5	2B5NVGJA	HIBAH LANGSUNG DARI PEMERINTAH KOTA BONTANG UNTUK KSOP BONTANG (aset tanah seluas 12.150 m2)	517882	10 Desember 2021		IDR		9.963.000.000	1085885229	14 Oktober 2021			IDR		9.963.000.000	03/ 909-/BPAD.04 14 Oktober 2021
6	70878801	SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN ANF PROJECT 5 : REPLACEMENT AND MAINTENANCE OFF AIDS TO NAVIGATION IN THE SRAITS OFF MALACA AND SINGAPORE	439460		32.038.213	USD			2114000000000043		USD	32.038.213				S-300/PR.8/2019 29 Mei 2019

NO	GENERAL INFORMATION			DISBURSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLBJS)						DONOR						
	REGISTRATION NUMBER	PROJECT NAME	ENTITY CODE	DATE OF AUTHORIZATION	CASH		GOODS/SERVICES		NO SPHL / MPHLBJS	VALUE DATE	CASH		GOODS/SERVICES			NO BAST
					IDR	CURR ENCY	FOREIGN CURR	IDR			CURR ENCY	AMOUNT	CURRE NCY	FOREIGN CURR	IDR	
					10	11	12	13			14	15	16	17	18	
NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	KODE SATKER	TANGGAL PENGESAHAN	UANG	BARANG/JASA		NO SPHL / MPHLBJS	TANGGAL PEMBERIAN HIBAH	UANG	BARANG/JASA			NO BAST		
					IDR	MATA UANG	VALAS	IDR		MATA UANG	NILAI	MATA UANG	VALAS	IDR		
7	24MMYTFA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS YANG TERLETAK DI JALAN PERAK TIMUR NO. 398 SURABAYA DARI PT. PELINDO III (PERSERO) REGIONAL JAWA TIMUR KEPADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK	412891	27 Desember 2020		IDR		1.252.216.000	1087927856	5 Janurai 2021			IDR		1.252.216.000	BA.1930/HK.05.01/RJT M.2021 5 Januari 2021
8	2R7YBCHA	HIBAH BARANG DARI BUREAU OF INTERNATIONAL SECURITY AND NONPROLIFERATION BERUPA EXPORT CONTROL AND BORDER SECURITY (EXBS) KEPADA SATKER PENINGKATAN FUNGSI KPLP	439180	31 Desember 2021		USD		123,106.40/ Rp. 1.735.178.837	1095665386			USD		123,106.40/ Rp. 1.735.178.837	BA.10/SRT/KPA/PFPKP LP-2021 Tanggal 30 Desember 2021	

**LAMPIRAN**

**V**

**DAFTAR SALDO BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**31 DESEMBER 2021**

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

NO	KODE	NMSATKER	E-REKON	KODE AKUN	NILAI	URAIAN	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	022.04.287171	KSOP BANJARMASIN	48.872.113,	522111	28.322.417	Listrik bln Desember		
				522191	19.799.995	Internet		
				522113	604.811	Air		
				522112	144.890	Telepon		
2	022.04.287192	DISNAV BANJARMASIN	103.986.697,	522111	60.649.596	Langganan Listrik	Kwitansi	
				522112	369.070	Langganan Telepon	Kwitansi	
				522113	3.970.031	Langganan Air	Kwitansi	
				522119	38.998.000	Langganan Jasa Lainnya/Internet	Kwitansi	
3	022.04.412817	KSOP CIREBON	15.396.408,	522111	10.003.521	Beban Pegawai (Tunkin)		
				522113	1.084.410	Beban Pegawai (Tunkin)		
				522112	585.500	Langganan Jasa Lainnya/Internet		
				522119	3.722.977	Langganan Jasa Lainnya/Internet		
4	022.04.521307	UPP INDRAMAYU	7.995.688,	522111	4.859.888	Langganan Listrik		Belum Upload Data Dukung
				522112	57.500	Langganan Telepon		
				522113	834.500	Langganan Air		
				522119	2.243.800	Langganan Jasa Lainnya/Internet		
5	022.04.521878	UPP T U L E H U	59.177.000,	521111	59.177.000,	Honorarium Tenaga Honorer bln Desember 2021		
6	022.04.559292	UPP SATUI	280.500,	522113	280.500,	Langganan Air	Tagihan PDAM	
7	022.04.287139	KSOP SAMPIT	4.490.910,	522111	3.449.590	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522112	1.007.250	Tagihan Telepon Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522113	34.070	Tagihan Air Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
8	022.04.287338	UPP TAHUNA	1.976.000,	522113	1.976.000	Belanja Langganan Air	Surat Tagihan	
9	022.04.287541	KSOP TERNATE	4.141.000,	522113	4.141.000	Tagihan Air Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
10	022.04.288021	KSOP PULAU BAAI	23.133.034,	522111	18.628.215	Tagihan Beban Listrik Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522112	2.078.519	Tagihan Telepon Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522119	2.426.300	Tagihan Internet Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	

11	022.04.289796	KSOP K U M A I	11.984.392,	522111	8.573.432	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522112	95.060	Tagihan Telepon Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522113	1.174.400	Tagihan Air Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522119	2.141.500	Tagihan Internet Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
12	022.04.412860	KSOP CILACAP	12.261.591,	522111	11.134.606	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522112	181.985	Tagihan Telepon Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
				522113	945.000	Tagihan Air Bulan Desember 2021	Surat Tagihan	
13	022.04.412911	KSOP PANARUKAN	20.356.047,	521111	13.011.496	Listrik	Kwitansi	
				521112	6.153.551	Telepon	Kwitansi	
				521113	1.191.000	Air	Kwitansi	
14	022.04.412920	KSOP PROBOLINGGO	21.296.216,	522111	11.512.822	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021		
				522112	6.599.405	Jasa Telepon Bulan November dan Desember 2021		
				522113	1.710.399	Jasa Air Bulan November dan Desember 2021		
				522121	1.473.590	Jasa Pengiriman Surat Dinas Bulan November dan Desember 2021		
15	022.04.413472	UPP P A L O P O	2.439.850,	522113	2.439.850	Tagihan PDAM Bulan Desember 2021		
16	022.04.413602	UPP A M P A N A	50.000,	522113	50.000	Kwitansi Pembayaran		
17	022.04.413658	UPP BABANG	26.778.762,	522111	24.833.244	Listrik Desember 2021		
				522112	1.945.518	Telepon Desember 2021		
18	022.04.413664	UPP SANANA	79.500,	522113	79.500	Belanja Langganan Air	Bukti Rekening Air	
19	022.04.521730	UPP AMURANG	63.200.000,	521111	63.200.000	Beban Keperluan Perkantoran	DIPA 2021	Honor PPNPB Bulan Desember 2021
20	022.04.521899	UPP WEDA	9.375.842,	522111	7.053.846	Beban Langganan Listrik	Struk Pembayaran	
				522113	480.000	Beban Langganan Air	Struk Pembayaran	
				521111	1.841.996	Keperluan Perkantoran (Internet)	Struk Pembayaran	
21	022.04.559421	UPP JAILOLO	1.871.800,	522111	500.000	Listrik		
				522112	871.800	Air		
				522113	500.000	Wifi		
22	022.04.559442	UPP LAIWUI	1.333.500,	522111	1.333.500	Beban Listrik Bulan Desember 2021	Kwitansi	
23	022.04.559510	UPP PEMENANG	2.102.100,	522113	2.102.100	Beban Langganan Air		Langganan Air Bulan Desember 2021
24	022.04.559616	UPP LINAU BINTUHAN	1.000.000,	522111	1.000.000	Beban Langganan Listrik		
<b>TOTAL</b>			443.578.950,		443.578.950,			

AKUN : 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

TRN	KODE	NMSATKER	E-REKON	KODE AKUN	NILAI	URAIAN	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	022.04.287338	UPP TAHUNA	27.439.000,	511129	27.439.000,	Belanja Uang Makan PNS Desember 2021		ok
2	022.04.412817	KSOP CIREBON	565.138.179,	512411	255.450.106	Beban Pegawai (Tunjin)		
				512411	255.450.106	Beban Pegawai (Tunjin)		
				522119	47.560.000	Langganan Jasa Lainnya/Internet		
				522119	6.677.967	Langganan Jasa Lainnya/Internet		
3	022.04.521307	UPP INDRAMAYU	188.335.142,	5124111	85.951.970,	Tunjin bln November 2021		
				5124111	102.383.172,	Tunjin bln November 2021		
4	022.04.521878	UPP T U L E H U	20.042.000,	511129	20.042.000,	Belanja Uang Makan PNS bln Des 2021		
5	022.04.287139	KSOP SAMPIT	545.806.900,	521441	272.903.450,	Tunjin Bulan November 2021	SPP	
				521441	272.903.450,	Tunjin Bulan Desember 2021	SPP	
6	022.04.289796	KSOP K U M A I	230.681.289,	512411	115.299.625,	Tunjin Bulan Perhitungan November 2021	Daftar Perhitungan Tunjin	
				512411	115.381.664,	Tunjin Bulan Perhitungan Desember 2021	Daftar Perhitungan Tunjin	
7	022.04.289801	UPP TELUK SIGINTUNG	61.897.290,	512411	61.897.290,	Belanja Tunjangan Khusus/ Kegiatan		Tunjin Bulan November dan Desember 2021
8	022.04.412772	KANPUS HUBLA	415.451.000,	511129	415.451.000,	Estimasi Belanja Pegawai (Uang Makan) Januari 2022 dengan dasar absensi bulan Desember 2021	absensi bulan Desember 2021	
9	022.04.412879	DISNAV SEMARANG	5.569.181,	511111	5.035.200,	Beban Gaji Pokok PNS	SK Kenaikan Pangkat	Kekurangan Gaji Pegawai (Kenaikan Pangkat) Bulan Oktober - Desember 2021 Untuk 12 Pegawai.
				511119	1.157,	Beban Pembulatan Gaji PNS	SK Kenaikan Pangkat	Kekurangan Gaji Pegawai (Kenaikan Pangkat) Bulan Oktober - Desember 2021 Untuk 12 Pegawai.
				511121	368.400,	Beban Tunj. Suami/ Istri PNS	SK Kenaikan Pangkat	Kekurangan Gaji Pegawai (Kenaikan Pangkat) Bulan Oktober - Desember 2021 Untuk 12 Pegawai.
				511122	134.424,	Beban Tunj. Anak PNS	SK Kenaikan Pangkat	Kekurangan Gaji Pegawai (Kenaikan Pangkat) Bulan Oktober - Desember 2021 Untuk 12 Pegawai.
				511151	30.000,	Beban Tunj. Umum PNS	SK Kenaikan Pangkat	Kekurangan Gaji Pegawai (Kenaikan Pangkat) Bulan Oktober - Desember 2021 Untuk 12 Pegawai.
10	022.04.412920	KSOP PROBOLINGGO	52.886.000,	511129	52.886.000,	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021		
11	022.04.413112	KSOP BENGKALIS	790.500,	511134	790.500,	Belanja Kompensasi Kerja Bulan Desember 2021	KU.005/1/82/KSOP. BKS/2021	
12	022.04.413426	UPP KUALA SEMBOJA	15.410.000,	512211	15.410.000,	Belanja Uang Lembur Bulan Desember 2021	Daftar Lembur	
13	022.04.413576	UPP U L U S I A U	16.250.000,	511129	16.250.000,	Belanja Uang Makan PNS	Daftar Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Desember	
14	022.04.413582	UPP MELONGUANE	253.000.000,	512411	195.000.000,	Tunjin Bulan Desember 2021 (24 Pegawai)		

				512411	58.000.000,	Uang Makan Bulan Desember 2021		
15	022.04.413633	UPP D O B O	49.170.500,	511129	34.606.000,	Belanja Uang Makan PNS	Daftar Perhitungan	Tunj. Kesyahbandaran
				511134	1.204.500,	Belanja Tunj. Kompensasi PNS	Daftar Perhitungan	
				512211	13.360.000,	Belanja Uang Lembur	Daftar Perhitungan	
16	022.04.413658	UPP BABANG	2.432.250,	511134	2.432.250,	Tunjangan Kesyahbandaran Desember 2021		
17	022.04.521730	UPP AMURANG	17.764.000,	511129	17.764.000,	Beban Uang Makan PNS	DIPA 2021	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021
18	022.04.559285	UPP RANGGA ILUNG	203.630.374,	512411	96.082.187,	Tunjangan Kinerja Bulan November 2021	DIPA	Dibayarkan Januari 2022
				511129	11.466.000,	Belanja Uang Makan PNS Bulan Desember 2021	DIPA	Dibayarkan Januari 2023
				512411	96.082.187,	Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2021	DIPA	Dibayarkan Januari 2024
19	022.04.559328	UPP LIKUPANG	8.181.900,	512411	7.831.900,	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	SKPP	An. Udin Abubakar Umar dan Santy Zulfridawaty Abas
				511129	350.000,	Belanja Uang Makan PNS	SKPP	An. Santy Zulfridawaty Abas
20	022.04.652517	KSOP MARUNDA	7.143.090,	511111	2.142.300,	Kekurangan Gaji Induk Pegawai dari Bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021	SAIBA	Anggaran Habis
				511121	130.290,	Kekurangan Tunjangan Suami/Istri dari Bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021	SAIBA	Anggaran Habis
				511122	43.194,	Kekurangan Tunjangan Anak dari Bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021	SAIBA	Anggaran Habis
				511119	306,	Kekurangan Pembulatan Gaji PNS Bulan Oktober 2021 s.d Desember 2023	SAIBA	Anggaran Habis
				511134	4.827.000,	Kekurangan Tunjangan Kompensasi Kerja PNS Desember 2021	SAIBA	Anggaran Habis
21	022.04.289782	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PANGKALAN B U N	108.213.750,	512411	108.213.750,	Belanja Tunjangan Kinerja PNS		
<b>TOTAL</b>			2.795.232.345,		2.795.232.345,			